



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KONSTRUKSI REALITAS PROSES TRANSFORMASI KONFLIK DARI  
PERJUANGAN BERSENJATA MENUJU PERJUANGAN POLITIK  
(Studi Kasus Proses Transformasi Mantan Gerakan Aceh Merdeka - GAM  
Pasca MoU Helsinki Perspektif Komunikasi Antar Budaya )**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Magister Sains Dalam Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia**

**NAMA : KAMARUDDIN  
NPM : 0606015612**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI  
PROGRAM PASCASARJANA  
JAKARTA  
2009**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

NAMA : KAMARUDDIN

NPM : 0606015612

JUDUL : KONSTRUKSI REALITAS PROSES TRANSFORMASI  
KONFLIK DARI PERJUANGAN BERSENJATA MENUJU  
PERJUANGAN POLITIK (Studi Kasus Proses Transformasi  
Mantan Gerakan Aceh Merdeka - GAM Pasca MoU Helsinki  
Perspektif Komunikasi Antar Budaya)

Dosen Pembimbing,



**Drs. Eduard Lukman, MA**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Kamaruddin  
NPM : 0606015612  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : Konstruksi Realitas Proses Transformasi Konflik dari Perjuangan Bersenjata Menuju Perjuangan Politik (Studi Kasus Proses Transformasi Mantan Gerakan Aceh Merdeka-GAM Pasca MoU Helsinki Perspektif Komunikasi Antar Budaya)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains Pada Program Studi Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang :  
DR. Arintowati H. Handoyo, MA



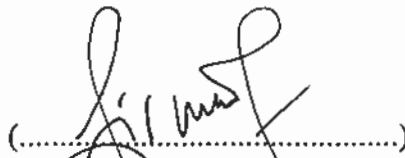
(.....)

Pembimbing :  
Drs. Eduard lukman, MA



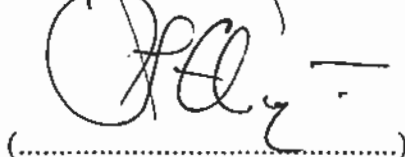
(.....)

Penguji Ahli :  
Ir. Firman Kurniawan Sujono, M.Si



(.....)

Sekretaris Sidang :  
Irwansyah, S.Sos., MA



(.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 01 Juli 2009

## KATA PENGANTAR

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengetahui. (al-Quran: 49:13)*

Ayat di atas, adalah satu petunjuk Allah, menyangkut hal ikhwal alam kodrat manusia dalam urusan bagaimana merajut dan membangun suatu kehidupan bersama baik dalam konteks kehidupan antar individu, komunitas/etnis, berbangsa bahkan antar negara, dalam merajut damai for all in the world.

Untuk itu sudah semestinya segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta manusia dan yang mengajarkan manusia Ilmu Pengetahuan serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selawat teriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW semoga bisa menikmati syafaatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak.

Syukur Alhamdulillah, menjadi kebahagiaan sendiri bagi penulis karena menyelesaikan karya ilmiah ini ditengah berbagai kesibukan aktifitas sehari-hari. Sebahagian yang tertuang dalam karya ini adalah pengalaman penulis sendiri sebagai *peace bulder* di Aceh dan beberapa daerah lain di Indonesia. Sehingga pengalaman ini, coba penulis tuangkan dalam bentuk penelitian karya ilmiah. Namun demikian, tanpa bantuan para pihak yang berkaitan dengan studi ini, niscaya karya ini tidak akan berhasil. Maka penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dedy Nuridayat, sebagai Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Bapak Eduard Lukman yang telah bersedia membimbing dan memotivasi penulis. Kepada para Dosen Pascasarjana Ilmu Komunikasi yang senantiasa terbuka, sabar dan bersemangat dalam membedah Ilmu Komunikasi baik dalam maupun luar kelas. Kepada kawan-kawan mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi angkatan 26, terima kasih atas kebersamaan yang akan terus terpelihara. Terima kasih pula kepada seluruh narasumber/informan terutama kawa-kawan mantan GAM yang tergabung dalam KPA/PA (khususnya *Adoen-kanda* Ibrahim bin Syamsuddin (Alm) yang telah meninggalkan kita semua, semoga semua amal kebajikan diterima di sisi Allah

SWT), korban konflik, kawan-kawan di LIPI, BRA, Inteletual/Akademisi Aceh, NGO, tokoh-tokoh masyarakat Aceh di Aceh maupun Jakarta, kawan-kawan Fisip UNIMAL, TIM Jakarta, para peace buldres, Pers, kawan-kawan IMPAS Aceh-Jakarta dan FOBA yang telah ikut membantu dan membarikan informasi, analisa untuk kepentingan karya ini. Tanpa mereka niscaya penyelesaian konflik dan proses transformasi konflik di Aceh tidak akan berhasil dengan baik.

Secara khusus penulis persembahkan karya ini kepada Ummi Hajjah Sarifah Ainulmardiyah Syeh Sayed Abdurrahman Al-Habsy dan Almarhum Abu Teungku Haji Hasan Husen atas segala pengorbanan, kesabaran dan ketaatannya terhadap perintah Ilahi. Kepada Istri Tercinta Dinda M. Resi Nuridayati dan anak-anak ku (Regita Keumala Sabty, Regina Keumala Sabty, Tamlika Priambanu dan Zakiya Keumala), terima kasih atas jalinan komunikasi efektif selama ini-seterusnya yang melahirkan saling pengertian, kecintaan, kasih sayang, kesabaran dan saling memotivasi semoga semuanya di ridhai oleh Allah SWT.

Akhir kata, terima kasih kepada semua kawan-kawan yang telah membantu penulis, kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebut satu per satu, semoga semua yang kita jalankan dalam keseharian mendapat rahmat, karunia dan ridha dari Allah SWT. Amin

Jakarta, Juni 2009

Penulis,



KAMARUDDIN

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Kamaruddin
NPM	:	0606015612
Program Studi	:	Ilmu Komunikasi
Fakultas	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana
Jenis Karya	:	Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

KONSTRUKSI REALITAS PROSES TRANSFORMASI KONFLIK DARI  
PERJUANGAN BERSENJATA MENUJU PERJUANGAN POLITIK (Studi  
Kasus Proses Transformasi Mantan Gerakan Aceh Merdeka-GAM Pasca MoU  
Helsinki Perspektif Komunikasi Antar Budaya)

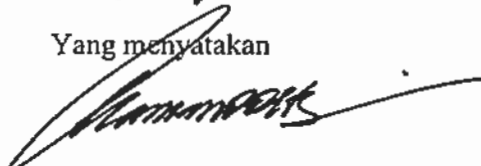
beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta .

Pada tanggal : 10 Juli, 2009

Yang menyatakan



(KAMARUDDIN)

v

## ABSTRAK

Nama : Kamaruddin  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : Konstruksi Realitas Proses Transformasi Konflik Dari Perjuangan Bersenjata Menuju Perjuangan Politik (Studi Kasus Proses Transformasi Mantan Gerakan Aceh Merdeka-GAM Pasca MoU Helsinki Perspektif Komunikasi Antar Budaya)

Penelitian ini berfokus pada kemampuan manusia secara individu maupun kelompok dalam mengkonstruksi realitas proses transformasi konflik Aceh pasca MoU Helsinki. Termasuk penelitian kualitatif dengan disain interpretatif yang menggunakan pendekatan paradigma konstruksionisme. Permasalahan utama adalah bagaimana realitas proses transformasi konflik dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik kasus Gerakan Aceh Merdeka-GAM Pasca MoU di konstruksikan oleh informan, bagaimana komunikasi dibangun oleh para pihak dalam proses transformasi konflik Aceh serta bagaimana dan mengapa kendala-kendala mesti dapat di selesaikan.

Model operasional penelitian menggunakan perspektif komunikasi budaya terutama tentang konsep-konsep konstruksi realitas, interaksionis simbolik, proses dialektika, identitas, etnisitas dan resolusi-transformasi konflik. Informan terdiri dari mantan GAM, korban konflik, BRA, intelektual/akademisi, peace builder dan tokoh masyarakat Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, partisipan observasi dan analisis dokumen sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada standar dan pendapat para peneliti kualitatif dengan paradigma konstruksionisme-interpretive.

Analisis hasil wawancara, partisipan observasi dan analisis dokumen bahwa: Fase awal transformasi yang ditandai dengan pengalaman sejarah, dari kegagalan HDC, Gempa dan tsunami, hadirnya IMC, lahir MoU Helsinki, proses *decommissioning* dan pembubaran sayap militer GAM dengan membentuk KPA serta penarikan TNI/Polisi non organik berhasil dilakukan. Lahirnya BRA sebagai wadah reintegrasi menimbulkan dan menyisakan berbagai permasalahan. UUPA suksesnya Pilkada dengan calon Independen, lahirnya partai lokal sebagai bagian dari *road map to peace proses* dan Pemilu legeslatif secara demokratis dimenangkan partai lokal mantan GAM relatif mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan sosial, budaya dan politik di Aceh.

Kendala proses transformasi; pemahaman sejarah keacehan masih kurang, *mutual trust* terus merosot di Aceh, implementasi MoU dan BRA-FKK setengah hati, kurangnya penerimaan mantan GAM oleh Militer, milisi dan sebaliknya, peran KPA yang berlebihan dalam masyarakat Aceh, keterbatasan pemerintah Irwandi-Nazar mengatasi budaya korupsi, kolusi dan nepotisme, perbedaan penafsiran *self government*, terhambatnya pembentukan KKR, isu ALA-ABAS serta peran *peace builders* relatif kurang, penerapan *trust building*. Dialektika realitas tersebut menjadi persoalan sosial, politik, budaya dan hukum.

Kata kunci: *Konstruksionisme, interaksionis simbolik, komunikasi Budaya, konstruksi realitas, resolusi dan transformasi Konflik.*

## ABSRTACT

Nama : K a m a r u d d i n  
Study Program : Communication Science  
Title : The Construction of the Reality Conflict Transformation Process from Armed-Struggle to Political-Struggle (Case Study of Transformation of Process of former Aceh Freedom Movements-GAM post MoU Helsinki, Perspective of Intercultural Communication)

This study is focused on the human ability, as individual or group, in constructing the reality of conflict transformation process in Aceh post MoU in Helsinki. This is qualitative study with interpretative design using an approach of constructionism paradigm. The main problem is how the reality of conflict transformation from armed-struggle to political struggle in case of the Aceh Freedom Movements (GAM) post MoU constructed by informant, how the communication is established by the person in charge in the process of conflict transformation in Aceh also how and why the obstacles should be solved.

The operational model of this study was using the perspective of cultural communication, especially regarding the concepts of reality construction, symbolic interactionism, dialectic process, identity, ethnicity, and resolution-transformation of the conflict. Informants consist of former GAM members, the victims of the conflict, BRA, academician, peace builder, and prominent figures in Aceh's community. The data collection was done by interview, observation of the participants, and document analysis; while the data analysis was done by referring to the standard and the opinion of the qualitative researchers'. The analysis of interview result, stated that the initial phase marked by the history experiences, the failure of HDC, earthquake and tsunami, the present of IMC, MoU Helsinki, *decommissioning* process, the dissolution of GAM military wings by forming KPA, and the success of the pulling of non-organic TNI/Police. The establishment of BRA as an umbrella for the reintegration produces and leaves several problems. UUPA the success of Pilkada with independent candidates, emerging of local parties as a part of *road map to peace process*, and legislative general election which held democratically and won by local party that consist of former GAM member is relatively be able to create a new space for the hegemony circulation in social, cultural, and political aspects in Aceh.

Obstacles of transformation process; the lack of understanding regarding to history of Aceh, the decline of *mutual trust* in Aceh, the implementation of MoU and BRA that is still half-hearted, lack of acceptance of former GAM members by the Indonesian military, military and vice versa, the over role of KPA in Aceh's community, the limitedness of Irwandi Nazar's government in overcoming KKN, the different opinion in translating the meaning of *self government*, the impeded of the KKR formation, issue about ALA-ABAS, and the lack of *peace builders* roles and the implementation of *trust building* as well. The dialectic of those realities has become a social, politics, cultural, and law problems.

Keywords: Constructionism, symbolic interactionism, intercultural communication, construction reality, conflict resolution and konflik transformation process.



**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah Hasil Karya saya sendiri  
dan semua sumber baik yang saya kutip maupun di rujuk  
telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Kamaruddin**  
**NPM : 0606015612**

**Tanda Tangan : .....**  
**Tanggal : 10 Juli 2009**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTARCT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	15
3. Pertanyaan Penelitian.....	16
4. Identifikasi Masalah.....	16
5. Tujuan Penelitian .....	24
6. Signifikansi Penelitian.....	24
6.1 Aspek Teoritis.....	24
6.2 Aspek Praktis .....	25
<b>BAB II KERANGKA KONSEP</b>	
1. Komunikasi Sebagai Proses Transformasi Konflik .....	26
2. Komunikasi Sebagai Interaksi Simbolik.....	28
3. Transformasi Konflik Mantan GAM .....	32
4. Reintegrasi Sebagai Proses Transformasi Konflik .....	37
5. Pilkada Sebagai Proses Transformasi Konflik.....	44
6. Partai Lokal, Pemilu sebagai Proses Transformasi Konflik .....	50
7. Transformasi Sebagai Proses Komunikasi Antar Budaya .....	53

### **BAB III METODOLOGI**

I. METODE PENELITIAN	
1.1 Metode Penelitian Kualitatif .....	62
1.2. Paradigma Penelitian .....	64
II. SUBJEK PENELITIAN .....	67
III TEHNIK PENGUMPULAN DATA.....	68
a. Wawancara .....	68
b. Partisipan Observasi .....	69
c. Analisis Dokumen .....	69
IV. STRATEGI ANALISIS DATA .....	70
V. UNSUR-UNSUR VALIDITAS PENELITIAN.....	75
VI. KETERBATASAN PENELITIAN.....	77

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

1. Sejarah Konflik Aceh dan Penyelesaiannya .....	78
2. Transformasi Konflik Mantan Kombatan GAM .....	87
3. Reintegrasi Setengah Hati .....	119
4. Pilkada Sebagai Proses Transformasi Konflik .....	150
5. Partai Lokal Sebagai Transformasi Konflik .....	159
6. Pemilu Legeslatif Sebagai Transformasi Konflik .....	169
7. Komunikasi Sebagai Proses Transformasi Konflik.....	178
8. Komunikasi Antar Budaya Sebagai Proses Transformasi.....	198
9. Faktor-Faktor Proses Transformasi Konflik Aceh .....	200
10. Prospek dan Kendala Transformasi Konflik .....	209

### **BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan.....	225
5.2. Rekomendasi .....	239

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	3.1	Komponen Analisis Data Proses Transformasi Konflik	74
Gambar	4.1	Jenis GAM	96
Gambar	4.2	Perincian Umur GAM Aktif, Tahanan dan Populasi Umum	97
Gambar	4.3	Tingkat Pendidikan GAM Aktif dan Masyarakat Umum Aceh	98
Gambar	4.4	Pekerjaan GAM Aktif Sebelum Bergabung Dalam GAM	99
Gambar	4.5	Status Pekerjaan GAM Aktif yang Kembali Saat Ini	99
Gambar	4.6	Pekerjaan GAM yang kembali Saat Ini	100
Gambar	4.7	Proses Transformasi Konflik di Aceh	105
Gambar	4.8	Prioritas Kebutuhan GAM Aktif	120
Gambar	4.9	Sumber Pemahaman mengenai MoU di Antara GAM Aktif	125
Gambar	4.10	Pengetahuan GAM Aktif Mengenai MoU	125
Gambar	4.11	Pemilik Lahan yang Digunakan GAM Aktif	129
Gambar	4.12	Pemilik Lahan yang Digunakan GAM Aktif	129
Gambar	4.13	Analisis model konstruksionis-interpretive terhadap Realitas Proses Transformasi Konflik Aceh.	204
Gambar	4.14	Model Komunikasi Mantan Kombatan Pasca MoU Helsinki dalam mengelola kesan	205
Gambar	4.15	Model Interaksional Komunikasi Manusia	192
Gambar	4.16	Model panggung politik GAM Pasca MoU Helsinki	195
Gambar	4.17	Faktor individual GAM dan peran mereka Pasca MoU Dalam Masyarakat Aceh	195
Gambar	5.1	Kesimpulan Konstruksi Realitas Proses Transformasi Konflik di Aceh	238

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Beberapa ketentuan pokok dalam Kesepakatan Helsinki	106
Tabel 4.2	Posisi Para Pihak dalam Proses Transformasi Konflik di Aceh	115
Tabel 4.3	Program Integrasi Politik dan Implementasi	133
Tabel 4.4	Analisis atas program bidang ekonomi BRA (BRDA)	136
Tabel 4.5	Penyaluran Dana Reintegrasi (hingga Mei 2007)	138
Tabel 4.6	Masukan untuk Meningkatkan Mata Pencaharian bagi GAM yang Kembali	140
Tabel 4.7	Strategi Mata Pencaharian GAM Aktif	141
Tabel 4.8	Jenis Pekerjaan Baru yang Diminati GAM Aktif	142
Tabel 4.9	Beberapa ketentuan pokok dalam kesepakatan Helsinki	202

## BAB I PENDAHULUAN

### I. LATAR BELAKANG

“.....Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi....”

[Pembukaan dalam Nota Kesepahaman antara RI-GAM].<sup>1</sup>

Kutipan di atas menggambarkan tekad kedua belah pihak, baik pihak Republik Indonesia (RI) maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat, setelah hampir 30 tahun lamanya masalah konflik Aceh tidak kunjung dapat dituntaskan. RI-GAM menyadari arti penting konstitusi UNESCO “karena peperangan bermula dari pikiran manusia, maka dalam pikiran manusia pertahanan untuk perdamaian harus ditegakkan”. MoU Helsinki adalah suatu terobosan yang dilakukan sebagai salah satu proses transformasi konflik yang amat mendasar, dari konflik kekerasan menjadi perjuangan politik melalui kerangka demokrasi. Kesepakatan tersebut adalah titik awal bagi perubahan mendasar di Aceh, kalau tidak dapat dikatakan sebagai jalan menuju Aceh baru yang lebih baik. Untuk mencapai itu, proses transformasi akan dilakukan, sebagaimana tercermin dalam isi nota kesepahaman melalui: penyelenggaraan pemerintahan di Aceh; partisipasi politik (adanya partai lokal); ekonomi; peraturan perundang-undangan; hak asasi manusia (HAM), hingga masalah amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber: diambil dari terjemahan resmi yang telah disetujui oleh delegasi RI dan GAM. Hanya terjemahan resmi ini yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Teks Asli tertulis dalam bahasa Inggris yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

<sup>2</sup> MoU Helsinki terdiri dari tiga bagian, yaitu: (1) penyelenggaraan pemerintahan Aceh, yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan di Aceh,

Walaupun perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra pada kalangan elit politik di Jakarta, namun dari segi keberanian, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kalla (SBY-JK) telah melampaui batas-batas kekhawatiran beberapa presiden sebelumnya. SBY-JK tetap konsisten memilih cara damai sebagai resep untuk mengakhiri konflik Aceh melalui kebijakan politik pengintegrasian yang tercermin pada butir-butir dalam MoU. Sejak Januari Juli 2005, pemerintah SBY-JK melakukan lima babak komunikasi informal dengan GAM untuk melakukan perundingan sebagai cara damai menyelesaikan konflik Aceh. Pembicaraan informal ini difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) sebuah lembaga yang dipimpin bekas Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dengan mengambil tempat di Koeningstedt Estate yang terletak diluar Ibukota Finlandia Helsinki.<sup>3</sup> Pemerintahan SBY-JK melakukan terobosan melalui pendekatan baru<sup>4</sup> dalam penyelesaian pemberontakan GAM, yang mementahkan pendekatan-pendekatan sebelumnya, walaupun banyak pihak yang tidak setuju. Akhir dari komunikasi tersebut dilanjutkan dengan pertemuan formal yang melahirkan penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Hampir empat tahun sudah Nota Kesepahaman Damai antara RI-GAM di tandatangani di Helsinki. Perjanjian ini tidak hanya membawa nuansa perubahan dari konflik bersenjata 30 tahun lebih di Aceh ke pada nuansa damai di bumi Aceh, tetapi juga bagi transformasi GAM. Perjanjian tersebut tidak hanya sekedar mengharuskan GAM untuk menghancurkan senjata. GAM kemudian mesti memikirkan bentuk strategis baru dalam mentransformasikan diri dari gerakan

---

pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, dan pembentukan peraturan perundang-undangan; (2) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM); dan (3) amnesti dan reintegrasi mantan anggota GAM dan tahanan politik ke dalam masyarakat serta pengaturan keamanan, pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.

<sup>3</sup> Moch.Nuhasim, *Perundingan Helsinki; Jalan Menuju Dalam Aceh*. (Dalam: Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, Pustaka Pelajar, 2008), h. 108

<sup>4</sup> Dianggap sebagai pendekatan baru, karena SBY-JK konsisten untuk menempuh jalur dialog yang tidak disertai oleh pengerahan pasukan keamanan. Di bawah supervisi Jusuf Kalla yang secara konsisten dan terus menerus untuk memilih cara damai dalam menyelesaikan konflik Aceh. Meskipun cara ini tidak sepenuhnya dapat disebut baru, karena di masa Orde lama telah dilakukan oleh Soekarno dalam menyelesaikan pemberontakan DI/TII di Aceh dan pemberontakan-pemberontakan di daerah lain seperti PRRI/Permesta di Sumatera Barat. Dalam konteks penyelesaian DI/TII di Aceh, lihat M.Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh dalam Pergolakan Aceh*, edisi revisi, (Jakarta: Media Da,wah, 2001). Sementara untuk penyelesaian PRRI/Permesta dapat dilihat dalam tulisan, Barbara Harvey Sillar, *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989), h. 78-83.

bersenjata kepada gerakan politik demi meneruskan perjuangan. MoU Helsinki mentransformasi Aceh dari medan perang menjadi arena pertarungan politik paling dinamis sekaligus laboratorium demokratisasi yang melahirkan terobosan-terobosan inovatif dalam politik dan budaya Indonesia. Namun proses transformasi tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada masalah dalam proses menjaga komunikasi yang efektif, transformasi ekonomi, politik, sosial, budaya dan psikologis dari para pihak. Kompleksitas masalah transformasi, dibutuhkan kerjasama komprehensif, berkesinambungan dan sinergis. Selain itu, mengingat tensi politik di wilayah bekas konflik biasanya memanas seiring dengan munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang bertarung. Dalam konteks inilah, politik kerap kali didefinisikan sebagai *"who gets what and when"*. Sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menarik minat banyak orang. Menurut Deliar Noer 1983, Politik merupakan aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat.<sup>5</sup>

Namun demikian, transformasi konflik pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mudah, karena di dalamnya mencakup proses yang amat panjang. Selain itu pihak yang hendak ditransformasikan adalah kelompok-kelompok yang pernah memegang senjata dan masyarakat Aceh yang cukup lama hidup dalam konflik. Transformasi konflik adalah sebuah upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial dan politik yang positif.<sup>6</sup> Oleh karena itu, transformasi konflik erat kaitannya dengan upaya untuk mengatasi sumber-sumber konflik, baik dalam upaya membangun komunikasi yang efektif, secara sosial maupun politik.

Transformasi GAM ini sebenarnya bukan hal baru yang muncul tiba-tiba. Namun, jauh sebelumnya hal ini telah mulai dilakukan secara bertahap.

<sup>5</sup>Noer, Deliar. Pengantar ke Pemikiran Politik. (Jakarta: Rajawali. 1983)  
Nimmo, Dan, Komunikasi Politik, Tjun Surjaman (terj.). (Bandung : Rosdakarya, 1993)  
Powel Jr., Bingham. Contemporary Democracies, Participan, Stability and Violence. (New York : Harvard University Press. 1982)

<sup>6</sup>S.N. Kartikasari (penyunting), Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak, cetakan pertama, (Jakarta: SMK Grafika Desa Putara, 2001), h. 7.



Perundingan demi perundingan yang dilakukan, adalah bagian dari tahapan transformasi ini. Laga senjata berubah menjadi adu argumen. Hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, politik, negosiasi, komunikasi dengan diplomasi secara santun menjadi taruhan taruhan yang tidak mungkin dinafikan. Keikhlasan GAM membuka diri terhadap transformasi format gerakan ini, juga telah dibuktikan ketika penyerahan senjata secara sukarela. Meskipun sangat berat hati untuk menyerahkannya. Karena untuk mendapatkan jenis senjata-senjata itu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan, rela pula senjata itu dipotong-potong oleh anggota AMM di depannya sendiri mencapai 840 pucuk (MoU-Helsinki: poin 4.3 & 4.4) yang disaksikan khalayak ramai dan tim pemantau yang tergabung dalam AMM. Seperti diungkapkan mantan kombatan GAM wilayah Pase Langkahan Aceh Utara.

“...kitakan sudah sepakat berdamai dengan lahirnya MoU Helsinki, ya kita konsisten aja, memang berat juga sih ketika senjata yang dengan susah payah kita dapat di potong-potong di depan mata, intinya kita pahuhi MoU kan demi rakyat Aceh juga, Keikhlasan GAM ini, juga bagian dari gerakan transformasi yang dilakukan dan bagi RI pula harus mensikapinya secara ikhlas pula, terutama dalam menepati janji-janjinya yang telah dituangkan dalam butir-butir MoU-Helsinki, termasuk janji pemberian amnesti bagi tahanan politik GAM yang ditahan di seluruh lembaga pemasyarakatan, soal penyediaan lapangan kerja, lahan pertanian dan modal usaha bagi mantan kombatan GAM. Hal ini sangat krusial, jika dikaitkan dengan keinginan merawat dan mempertahankan perdamaian yang *sustainable* di bumi Aceh..”<sup>7</sup>

Tahapan-tahapan pemusnahan (*decommissioning*) senjata GAM ini telah berakhir bulan Desember 2005 yang lalu, dengan diimbangi penarikan pasukan (tentara/polisi) non organic di Aceh. Setelah itu, GAM benar-benar mentransformasi diri menuju rimba politik dan sosial budaya yang penuh liku-liku, kerikil-kerikil tajam, dan “gajah-gajah liar” yang siap memangsanya kiri-kanan, muka-belakang dan atas bawah. Dan boleh jadi terkaman juga datang dari “gelanggangnya sendiri”<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Wawancara dengan mantan kombatan GAM wilayah pase Langkahan Aceh Utara, awal Juli 2007 di Kota Pantan Labu Aceh Utara

<sup>8</sup> Baharuddin, AR, GAM: Antara Transformasi Gerakan dan Dilema Re-integrasi (Analisis Parsial Partisipasi GAM Membangun Aceh Bidang politik dan social). Dapat di akses [http://pkukmweb.ukm.my/~pkaukm/BUKU%201%20&%202/PDF\\_buku%201/B11\\_Baharuddin\\_GAM%20antara%20transformasi%20gerakan.pdf](http://pkukmweb.ukm.my/~pkaukm/BUKU%201%20&%202/PDF_buku%201/B11_Baharuddin_GAM%20antara%20transformasi%20gerakan.pdf). Diakses 12 Maret 2008

Fase permulaan transformasi gerakan GAM sudah mulai ditabuhkan dengan memasuki rimba politik, yakni sejak GAM berubah nama menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA) yang diketuai oleh mantan panglima GAM yaitu Muzakir Manaf yang kemudian ditandai dengan pesta demokrasi pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh (Pilkada) untuk lima tahun ke depan. GAM sudah sepakat (*Konsensus Duek Pakat Bansigom Donya*) untuk maju dalam pesta demokrasi pertama pasca MoU-Helsinki di Aceh, sebagai fase “*trial and error*” dalam konteks transformasi format gerakan ini. Konsensus ini, bukan dalam bentuk institusi, tetapi perorangan dengan menafikan bergabung kedalam partai-partai (nasional berbasis daerah) yang sudah ada sekarang. Penegasan ini, diulang kembali Sofyan Dawod (Jurubicara Komite Peralihan Aceh Pusat sebelum digantikan oleh Ibrahim Syamsuddin KBS), ketika dilakukan konferensi pers pada tanggal 27 November 2006 di kantor KPA Pusat, Lamingin Banda Aceh.<sup>9</sup>

Partisipasi mantan GAM dalam Pilkada 11 Desember 2006, menjadi bukti, bahwa GAM ingin mengimplimentasikan isi MoU-Helsinki (lihat poin 1.2.2 & 1.2.3). Meskipun, ada juga suara-suara miring dari secuil public yang menyangkan sikap GAM seperti ini. Kenapa tidak, mereka mempersiapkan diri secara matang untuk berpartisipasi secara maksimal pada pemilu 2009 melalui partai lokal sebagai kenderaan legal mereka sendiri. Namun, pihak GAM sendiri mempunyai pendapat tersendiri, bahwa “kran” demokrasi yang sudah terbuka ini, menjadi kesempatan emas buat mantan GAM untuk berpartisipasi, sekaligus untuk menguji tingkat kepiawaannya bergelut dalam politik sebagai bentuk perjuangan baru dan menguji sejauhmana kredibilitas mereka di depan publik. Disamping suara-suara miring, banyak pula yang sepakat dengan keikutsertaan mereka dalam pesta demokrasi, yang dianggap sangat prestis dan terakbar sepanjang sejarah republik ini. Partisipasi orang-orang GAM dalam pilkada saat itu membuktikan bahwa gerakan perlawanan GAM memasuki gerbang transformasi menuju Aceh baru yang lebih bermartabat melalui gerakan politik tanpa kekerasan dalam bingkai perdamaian yang lebih santun dan beradab.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Serambi Indonesia, 28 November 2006

<sup>10</sup> Catatan perjalanan penulis, selama bulan Oktober-Desember 2006, dalam wawancara dan diskusi dengan para pihak di Banda Aceh, Aceh Utara, Lhokseumawe dan Aceh Timur.

Proses transformasi GAM dari gerakan bersenjata menjadi perjuangan politik membutuhkan partisipasi politik para pihak. Dalam partisipasi tersebut muncul banyak kendala dan hambatan. Bagaimana mantan kombatan yang tergabung dalam KPA-PA mendapat perlakuan teror, pembakaran kantor, intimidasi sampai pada tahap pembunuhan. Awal proses transformasi, ditandai dengan proses dialog, perubahan nama GAM menjadi KPA, berubah menjadi partai lokal, pertarungan Pilkada 2006, proses reintegrasi sampai Pemilu 2009, bahkan strategi dalam menentukan Capres-Cawapres dalam Pilpres Juli 2009 mengalami berbagai hambatan. Insiden penembakan, pembakaran kantor, penggranatan, penculikan, pembunuhan terhadap KPA-PA, di berbagai lokasi terpisah, membuat para petinggi organisasi mantan kombatan itu prihatin. Kekhawatiran perdamaian Aceh yang telah berusia tiga tahun lebih akan rusak. Juru bicara KPA dalam sebuah diskusi mengatakan kalau pihak kepolisian sudah tidak mampu menangani situasi di Aceh. Maka semua pihak yang pro perdamaian harus meminta dan mendesak pihak Internasional agar segera melakukan langkah-langkah konkrit di Aceh, guna menyelamatkan perdamaian.

“kelompok peneror dan pembunuh perlu segera ditangkap dan dipatahkan, agar mereka tidak semakin merajalela. Mari sama-sama kita selamatkan perdamaian sebelum semuanya runyam. KPA berkomitmen untuk tidak akan lagi mau terseret ke konflik baru, karena masih sangat percaya pada mekanisme perdamaian dan demokrasi. Kepada semua pihak untuk tidak mengorganisir kelompok masyarakat untuk kepentingan sesaat, dengan cara-cara membangkitkan dendam masa lalu dan isu-isu keganasan separatisme di Aceh”.

“Semua pihak harus menguburkan dendam masa lalu demi masa depan Aceh yang lebih baik. Jangan karena tidak puas dengan Aceh aman dan damai, maka sengaja memanfaatkan pertemuan dan kenduri-kenduri untuk sarana memprovokasi dan membangkitkan dendam. Ini harus segera dicegah dan dihentikan. Tindakan itu sudah tidak zamannya lagi, di tengah kita sibuk dengan suasana mencari solusi-solusi untuk lebih memperkuat dan memperkokoh perdamaian di Aceh”.<sup>11</sup>

Menjelang pelaksanaan pemilu di Aceh, Partai Aceh-PA mencatat telah mengalami 55 kasus teror dan intimidasi. Tujuh kasus di antaranya menewaskan

<sup>11</sup> Serambi Indonesia, 2, 3,4, 5 Februari 2009, KPA harapkan pemantau Asing: sasaran teror berubah. Menjelang Pemilu 2009 di Aceh terjadi berbagai insiden teror, intimidasi, pembakaran kantor, pembakaran kendaraan, penculikan sampai pembunuhan kader-kader atau anggota KPA dan Partai Aceh (PA).

anggota dan pengurus partai.<sup>12</sup> Transformasi gerakan GAM juga mengandung konsekuensi bagi pemerintah Indonesia sendiri, terutama dalam hal reintegrasi mantan GAM ini ke dalam masyarakat (lihat MoU Helsinki, poin 3.2.1-3.2.5). Semula, GAM sendiri agak berkeberatan menggunakan istilah reintegrasi, karena dianggap agak provokatif, seolah-olah mereka bukan lagi bagian dari publik yang punya hak dan kewajiban yang sama, atau selama ini mereka terlalu banyak menyakiti hati masyarakat, sehingga perlu bagi pemerintah membuat semacam kenduri “peusijuek” (semacam acara tepungtawar) untuk melerai persengketaan dua pihak, atau lebih agar bisa “rujuek” (akur) kembali. Namun, agak disayangkan, acara “peusijuek” ini kurang dilengkapi dengan beberapa syarat lain, termasuk “Bulukat Kuneng” (nasi ketan kuning) dan “Naleueng Sambo” (ilalang). Akhirnya, terkesan program re-integrasi ini dalam implimentasinya, bukan saja tidak sesuai dengan amanat MoU-Helsinki, juga kurang sesuai dengan spirit ke-Acehan, yang sangat memegang teguh sebuah perjanjian, karena janji itu sebuah amanah dan semacam hutang-piutang, yang harus ditunaikan dan disampaikan kepada pemiliknya. Meskipun GAM sendiri tidak berharap banyak terhadap kompensasi dari pemerintah RI. Banyak di antara mereka yang kembali kepada profesi semula, seperti petani, nelayan, tukang bangunan, pedagang, mengajar di dayah dan balai-balai pengajian.

MoU-Helsinki mengamanatkan, bahwa mantan GAM dan korban konflik ini harus diberi pelayanan yang memadai. Sebagai kompensasi, mereka dicadangkan untuk mendapatkan lahan pertanian, modal usaha, dan pekerjaan. Semua ini dibebankan kepada pemerintah RI. Implimentasinya adalah, pemerintah membentuk Badan Re-integrasi Aceh (BRA), walau hanya dengan SK.Gubernur, No.330/106/2006. Anehnya, di SK itu, Gubernur, Mustafa Abu Bakar, meng-SK-kan seseorang, yang juga Mustafa Abu Bakar, di posisi ketua pelaksana, dan sekaligus ketua Forum Bersama (Forbes) di BRA. Badan ini pula dalam kerjanya menuai berbagai masalah. Usman Hasan (mantan ketua BRA) telah mengundurkan diri karena ada masalah, dan diganti Prof. Yusni Sabi. Namun, Yusni Sabi sendiri, dalam suatu diskusi di Banda Aceh, mengatakan, kenapa

---

<sup>12</sup> VIVAnews, Partai Aceh alami 55 kasus Teror, Minggu 5 April 2009

beliau mau memangku jabatan ini, karena ingin sekali membantu rakyat Aceh, khususnya para korban konflik.

“...ternyata korban konflik itu sangat banyak, hampir sama dengan jumlah penduduk Aceh sendiri, baik korban langsung maupun tidak...”<sup>13</sup>

Mundurinya Usman Hasan dari BRA<sup>14</sup>, disusul anggota GAM<sup>15</sup>. Kemudian diikuti pegiat-pegiat LSM<sup>16</sup>. Semuanya menjadi tanda tanya. Apa sebenarnya yang terjadi di tubuh BRA ini?. Berikutnya, anggota GAM juga menarik diri dari BRA. Kondisi ini boleh diasumsi beberapa sebab, di antaranya, seperti yang dinyatakan sendiri oleh Tgk. Irwandi.

“kami menarik semua personil GAM dari BRA untuk memudahkan Gubernur melakukan perampingan dan restrukturisasi badan tersebut. Kecuali itu, keputusan ini diambil GAM untuk menyikapi kekisruhan dan in-efisiensi dalam tubuh organisasi, yang kini dipimpin Yusny Saby itu. Sikap ini diambil, agar menjadi contoh yang baik untuk menyelesaikan kekisruhan dalam tubuh BRA selama ini”<sup>17</sup>.

Berbeda dengan GAM, LSM tidak semua personil ditarik dari BRA, hanya pada badan pelaksana saja (Bapel), sedang pada Forum Bersama (Forbes) BRA tetap dipertahankan. Menurut TAF Haikal (wakil LSM bidang Kesra BRA), alasan mereka mundur dari BRA, antara lain, pola kerja di Badan Pelaksana (Bapel) BRA selama ini dinilai tidak punya konsep jelas dan sangat birokratis. Selebihnya, hanya terfokus pada masalah ekonomi saja, dan ditambah pula dengan pernyataan dari AMM sendiri, bahwa program re-integrasi menjadi tugas pemerintah. Maka, otomatis pula kerja di Bapel BRA menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>18</sup> Masuknya komponen Milisi dalam struktur BRA, seperti Pembela Tanah Air (PETA), menjadi salah satu indikasi dan asumsi kuat faktor menarik diri GAM dan LSM. Hal ini dianggap bertentangan dengan MoU-Helsinki. Menurut Tgk. Jamaika (representasi GAM di BRA kemudian menarik diri).

“jika pemerintah RI mengakui adanya milisi di Aceh, kenapa jauh-jauh hari ketika proses dialog Helsinki berjalan, malah tidak diakui dan diperjuangkan nasib milisi ini. Tetapi kenapa tiba-tiba dimasukkan mereka dalam BRA.

<sup>13</sup> Diskusi dengan Prof. Yusni Sabi, 12 Juni 2006 di kampus IAN Ar Raniry Banda Aceh

<sup>14</sup> Tabloid Kontras, 11-17 Mei 2006

<sup>15</sup> Harian Serambi Indonesia, 11 Juni 2006

<sup>16</sup> Harian Serambi Indonesia, 12 Juni 2006

<sup>17</sup> Harian Serambi Indonesia, 11 Juni 2006

<sup>18</sup> Harian Serambi Indonesia, 13 Juni 2006

Jika ingin membantunya, silakan, sebagai bagian dari korban konflik. Tetapi jangan duduk di BRA”.<sup>19</sup>

Karena reintegrasi sangat terkait dengan membumi, atau tidak suasana damai permanen di Aceh. Sehingga ruang-ruang publik selamanya tersedia untuk melakukan berbagai aktivitas. Problema transformasi bidang sosial dan ekonomi bagi mantan GAM dan korban konflik, sebanding dengan transformasi bidang politik, yang kompensasinya selalu tidak jelas dan sangat berbelit-belit.

Salah satu pendekatan yang muncul kemudian dalam menjalankan proses transformasi adalah pendekatan transformasi dan resolusi konflik. Resolusi konflik menekankan bahwa konflik yang sudah kompleks atau akut, khususnya konflik yang sudah pada tahap perang, perlu ditransformasikan sehingga dapat diselesaikan. Dalam pandangan Burton 1990, resolusi konflik adalah upaya transformasi hubungan yang berkaitan dengan mencari jalan keluar dari suatu perilaku konfliktual sebagai suatu hal yang utama. Ada perbedaan antara resolusi konflik sebagai perlakuan (*treatment*) terhadap persoalan akar konflik dengan resolusi konflik sebagai penanganan (*settlement*) konflik dengan cara-cara paksa (*coersion*) atau dengan cara tawar-menawar (*bargaining*) atau perundingan (*negotiation*). Cara lain adalah dengan memperbaiki pola-pola komunikasi (*improving communication patterns*). Konflik seringkali menyebabkan penguatan masing-masing pihak. Agar konflik tidak selalu antagonistik, cara mengalihkan pola komunikasi yang bersifat antagonistik dapat dilakukan. Selain itu, juga ada cara melalui mendefinikan kembali konflik (*redefining the conflict*).<sup>20</sup>

Proses transformasi konflik terutama dalam membangun kepercayaan dengan para pihak, bahwa proses *trust building* adalah suatu proses yang amat penting sebagai sebuah bagian dari komunikasi sosial, budaya dan politik dengan kelompok pemberontak. Melalui pendekatan ini, minimal dapat dipetakan tiga hal yang amat berguna dalam mengupayakan konsensus normatif dengan kelompok pemberontak, yaitu: *pertama*, melalui komunikasi budaya dan politik, dapat dipetakan tuntutan politik pihak yang bertikai, respon dan pemikiran mantan

<sup>19</sup> *ibid*

<sup>20</sup> Jonh Burton, *Conflict: Resolution and Prevention*, (New York, The Macmillan Press Ltd, 1990), hlm. 3, dalam Moch. Nurhasim, *Perundingan Helsinky; Jalan Menuju Damai Aceh*, (Beranda Perdamaian Aceh tiga tahun pasca MoU, pustaka pelajar, 2008), h. 106

GAM terhadap sejumlah langkah yang pernah ditempuh oleh pemerintah RI, sikap politiknya, dan harapan-harapannya; *kedua*, adanya komunikasi personal antara para pihak sehingga masing-masing pihak saling memahami pemikiran dan solusi yang mungkin berguna dikemudian hari apabila akan terjadi perundingan; dan *ketiga*, adanya kepercayaan antara para pihak yang saling berseteru.<sup>21</sup>

Dalam proses komunikasi ini, perbedaan budaya kerap kali dapat menjadikan komunikasi tidak efektif. Konflik etnisitas juga berawal dari perbedaan budaya. Ini terjadi karena perbedaan dalam perilaku komunikasi yang pada akhirnya sering menimbulkan perbedaan persepsi. Gudykunst, menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi cara atau perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi dari setiap individu bila masuk dalam sebuah budaya baru. Adaptasi terjadi dalam dan melalui komunikasi. Ruben (1975) menyebutkan karena komunikasi melibatkan interaksi dari seseorang dan lingkungan, maka kita dapat meneliti pola komunikasi dalam proses adaptasinya pada dua proses yang berhubungan. Atau dengan kata lain, kapan seseorang dapat menyatu dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya tergantung pada aktivitas komunikasi yang menghubungkan pendatang tersebut dengan lingkungan barunya. Dalam berkomunikasi dengan orang yang berbeda budaya. Seseorang kerap menemui masalah atau hambatan yang tidak diharapkan sebelumnya. Hambatan bisa berbentuk penggunaan bahasa yang berbeda, nilai-nilai, adat istiadat, norma masyarakat, atau perilaku komunikasi yang berbeda. Setiap daerah atau budaya memiliki keunikan tersendiri dan harus dipatuhi oleh pendatang ketika akan berhubungan dengan warga dari budaya baru tersebut agar komunikasi dapat berlangsung dengan lancar. Syarat terjalinnya hubungan yang baik adalah melalui komunikasi yang terbangun atas dasar saling pengertian sehingga pertukaran informasi atau makna antara satu dengan lainnya dalam budaya yang berbeda dapat berlangsung tanpa kendala.<sup>22</sup>

Apalagi Aceh terkenal sebagai wilayah yang memiliki resistensi terhadap segala upaya yang ingin mendominasi (apalagi "menjajah"). Kahin 1990,

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Dapat dilihat dalam Gudykunst, B William dan Young Yun Kim, *Communicating With Strangers. An Approach to Intercultural Communications*, third edition, McGraw-Hill Companies, 1997.

mengenai revolusi Aceh mengilustrasikan bahwa sejak dulu revolusi sosial politik di Aceh senantiasa dipadukan dalam pandangan Islam.<sup>23</sup> Bahwa bagi Aceh ancaman dari luar yang khususnya dimaknai orang Aceh sebagai bentuk "penjajahan", akan menimbulkan perlawanan bagi mereka. Aceh termasuk sensitif terhadap orang-orang luar yang berkeinginan untuk menguasai Aceh. Orientasi ke-Acehan ini terkait dengan identitas Aceh, komitmen kepada Islam yang kuat, bahasa dan adat istiadat serta harga diri orang Aceh yang merupakan unsur-unsur yang melandasi identitas ke-Acehan.<sup>24</sup>

Negara multikultural, seperti Indonesia sebuah komunitas bangsa yang terdiri dari berbagai etnis, adat istiadat, bahasa, nilai dan norma, serta agama yang berbeda-beda. Ada sekitar 250 suku di Indonesia yang tersebar di berbagai wilayah dari Sabang sampai Merauke. Meski terdiri dari beragam suku bangsa, namun interaksi antar-suku bangsa itu berlangsung dinamis. Ini terjadi karena adanya sebuah konsep multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.<sup>25</sup> Suparlan,<sup>26</sup> menjelaskan proses menjaga kepercayaan kedua belah pihak yang telah dicapai melalui MoU Helsinki, tidak serta merta bertahan dengan sendirinya, diperlukan pemahaman kembali tentang Aceh secara menyeluruh, mesti melihat suatu identitas politik, etnisitas, sosial budaya, hukum dan ekonomi yang sudah lama terbentuk sebagai sebuah dialektika sejarah yang berkesinambungan. Momentum penting dalam perjalanan sejarah Aceh di awal abad 21 patut mendapat ruang yang layak, baik pada tingkat masyarakat lokal, nasional maupun internasional.<sup>27</sup>

Untuk itu realitas proses transformasi konflik Aceh dapat di analisis dari momentum-momentum yang dimiliki Aceh, boleh disebut sebagai tahapan baru membangun Aceh. *Pertama* pengalaman yang mengakar terhadap konflik Aceh

<sup>23</sup> Audry R. Kahin, *Pergolakan tiga daerah*, (Jakarta: graffiti, 1990, hlm. 142-176), seperti yang dikutip Moch. Nurhasyim, *Peundingan Helsinki: Jalan menuju Damai Aceh. Dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 87

<sup>24</sup> Anthony Reid, Ed., *Verendah of Violence The Background to the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006), hlm. 12.

<sup>25</sup> Fay 1996, Jary dan Jary 1991, Watson 2000, dalam Suparlan, 2002

<sup>26</sup> Diambil dari berbagai sumber, salah satunya dari Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural", 2002, <http://www.duniaesai.com/antro/antro3.html>, diakses 5 Maret 2008.

<sup>27</sup> Kamaruddin Hasan, *Pilkada, Partai Lokal Dan Masa Depan Aceh: Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar-P2P LIPI, 2008



sepanjang sejarah. *Kedua* adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Pasca musibah di luar dugaan tersebut semua orang berharap bahwa ini babak baru membangun Aceh. Setiap orang atau kelompok yang selama ini terlibat dalam konflik dan pengelolaan pembangunan Aceh sadar dan kembali berfikir untuk sepenuhnya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh. MoU Helsinki 15 Agustus 2005 menjadi tahapan *ketiga* tempat menggantungkan masa depan rakyat Aceh. Bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. Nafas persengketaan dan permusuhan yang telah berakar lebih dari 30 tahun di Aceh mulai berhenti. Ia tergantikan dengan angin perubahan yang jauh lebih signifikan dan makin melegakan. Simpul penting transformasi konflik menuju proses damai yang lebih stabil dan berkelanjutan telah dimulai. Aceh pasca tsunami yang secara fisik sudah hancur berantakan dan Aceh pasca konflik yang menyisakan puluhan ribu korban sudah mulai bangkit. Kini, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana mengikat komitmen damai bagi semua *peace process for all*, bukan hanya pihak yang bertikai.

Cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 paling demokratis telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh. Pilkada desember 2006 pun melahirkan pemimpin yang beragam, mulai dari kelompok yang selama ini terbuang dari siklus kekuasaan (*outsider*) hingga masyarakat sipil yang dianggap berprestasi untuk menjaga momentum membangun Aceh. Kemenangan calon independen dalam pilkada lalu menunjukkan besarnya keinginan dari masyarakat sipil Aceh untuk menyongsong perubahan politik pemerintahan dan mengharapkan adanya visi pembangunan yang lebih mengakar pada kepentingan masyarakat luas dan korban dari kebijakan pro-Jakarta di masa lalu. Irwandi Yusuf, di dampingi Muhammad Nazar sebagai wakilnya, terpilih melalui jalur independen, diharapkan benar-benar independen dalam memimpin Aceh. Para pemimpin yang terpilih dapat dikatakan sebagai representasi terbaik keinginan rakyat. Proses pemilihan yang nyaman dan belum pernah dialami bumi Iskandar Muda ini bahkan Indonesia sejak pemilu 1955, menggembirakan semua pihak: Jakarta, para stakeholders

rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok sipil demokratis, dan akar rumput. Anggapan bahwa Pilkada Aceh 2006 lalu akan 'berdarah-darah', terbantahkan dengan realitas yang menyejukkan. Pilkada ini menjadi tahapan *keempat* tempat rakyat Aceh menggantungkan harapan dan cita-cita.

Momentum *kelima* adalah tingginya dinamika perpolitikan Aceh dalam pemilu legislatif 2009. Momentum ini harapan akhir transisi Aceh. Enam partai lokal yang lolos verifikasi faktual KPU pusat dan Partai Nasional akan bertarung di Aceh. Parlok sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat Aceh diharapkan dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik, mandiri dan modern. Bagaimana partai-partai tersebut "mencitrakan diri" dalam konteks ke Acehan. Hal tersebut sangat tergantung pada landasan ideologis, strategi-taktik, dan program-program yang diusung. Di samping itu, juga memiliki kemampuan menerjemahkan kondisi objektif keacehan. Dalam konteks keacehan dan sistem politik nasional, bagaimana membangun kanal politik secara nasional, karena arah proses perdamaian abadi masih sangat bergantung oleh konstelasi politik di nasional. Partai politik lokal hanya menjangkau saluran aspirasi masyarakat di tingkatan DPRA dan DPRK. Momentum *keenam* adalah strategi rakyat Aceh dalam menentukan pilihannya dalam Pilpres 2009, mengingat bertahan tidaknya damai Aceh juga sangat tergantung pada Pemerintah baru yang akan terpilih dalam Pilpres.<sup>28</sup>

Pasca MoU Helsinki rakyat Aceh memang telah memperoleh kembali rasa aman dalam pengertian terlepas dari rasa takut terhadap ancaman pembunuhan, pembakaran, perang, dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Roda kehidupan ekonomi mulai bergulir meskipun belum seratus persen pulih. Birokrasi pemerintahan jalan, sementara kegiatan pendidikan tampak berlangsung normal. Namun demikian, kerisauan akan kembalinya situasi konflik tidak hilang sama sekali. Sebab-sebab lama bercampur dengan kompleksitas masalah baru dapat saja menjadi hamparan rumput kering yang mudah terbakar hanya karena percikan api. Pada saat yang sama, banyak harapan mengemuka: peningkatan kualitas

---

<sup>28</sup> Kamaruddin Hasan, "Perdamaian Abadi sebagai basis kebudayaan Rakyat Aceh" (Makalah dalam Workshop Education for Peace, yang di selenggarakan oleh FOBA, Cisarua 22-23 Juni 2008 dan juga pernah dipresentasikan di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI), Maret 2008.

kehidupan sosial-ekonomi, peningkatan kualitas proses-proses politik, perbaikan tata pemerintahan, peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemenuhan hak-hak dasar khususnya bagi perempuan dan anak. Masalah utama dianggap berpotensi menjadi faktor penyebab konflik muncul kembali. Tapi bila mampu dikelola dengan baik akan menjadi faktor pencipta perdamaian yang signifikan. Pertama, isu politik lokal yang mencakup politik bagi kekuasaan dan politik identitas. Kedua, isu-isu ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat tak mampu, khususnya mantan kombatan dan korban konflik. Kedua masalah tersebut sejatinya sulit dilepaskan satu dengan yang lain.<sup>29</sup>

Memang proses transformasi sedang dan terus berlansung di Aceh, seperti di ungkapkan oleh Otto Syamsuddin, untuk pertama kalinya anggota GAM diintegrasikan dengan cara mendapat posisi penting di dalam struktur BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi), bahkan ada ratusan lainnya yang mendapatkan jabatan dan fasilitas yang minus "bekerja penuh" untuk badan itu. Semua aktor perang ditransformasikan. GAM dialihkan ke Komite Peralihan Aceh (KPA). Polri diberikan pengenalan HAM dan mempercepat pelaksanaan kebijakan polisi komunitas. TNI mengorganikkan, memekarkan, dan merelokasikan serdadunya. GAM masuk dan menjadi aktor di ranah pemerintahan, politik, dan bisnis. Polri semakin kukuh sebagai aktor utama di bidang keamanan. TNI masuk ke ranah intelijen yang operasinya bisa dirasakan oleh masyarakat, tapi bentuknya tanwujud. Kalaulah semua aktor telah tertransformasikan, lalu bagaimana dengan nasib rakyat di Aceh? Tampaknya, mereka tidak turut serta atau diturutsertakan dalam proses transformasi itu, baik dengan sukarela sebagaimana mereka mendukung GAM maupun dipaksakan ketika serdadu mempropagandakan dirinya sedang merebut hati rakyat pada masa Perang Aceh yang baru berlalu itu, terkesan bahwa rakyat tidak berada di dalam atau terasingkan dari arus transformasi itu.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> T.Kemal Fasya, dalam sebuah diskusi di Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta, yang difasilitasi oleh Asrama Mahasiswa Aceh FOBA Jakarta, Januari 2008.

<sup>30</sup> Oito Syamsuddin, *dilihat dari dalam ditulis dari luar*, Kompas, 8 september 2008, Tulisan ini sebagai komentar Otto syamsuddin dalam meresensi buku Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki yang diterbitkan oleh L2P-LIPI-Pustaka Pelajar, Agustus 2008.

Untuk itu penelitian ini ingin memotret, menginterpretasikan dan mengkonstruksi realitas secara kualitatif terutama realitas proses transformasi konflik Aceh dalam perspektif komunikasi budaya. Realitas proses transformasi tersebut dapat di analisis mulai dari proses komunikasi atau dialog antar RI-GAM, proses reintegrasi dan rekonsiliasi, dinamika dalam tubuh GAM bermetamorfosis menjadi Komite Peralihan Aceh-KPA yang selanjutnya melahirkan partai lokal dengan nama Partai Aceh-PA. Sampai kemudian berjuang dalam Pilkada 2006 dan mampu memenangkan posisi strategis di beberapa daerah di Aceh termasuk posisi orang nomor satu di Propinsi Aceh. Tahap selanjutnya adalah berjuang merebut kursi parlemant Aceh dalam pemilu 2009 dan juga strategi dalam menentukan pilihan dalam Pilpres 2009. Semua proses transformasi dan demokrasi tersebut menjadikan dinamika komunikasi baik dalam konteks budaya menarik untuk diteliti. Dengan harapan proses transformasi tersebut berjalan dengan baik dan benar sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.<sup>31</sup>

## 2. RUMUSAN MASALAH

Upaya penyelesaian konflik di Aceh yang ditempuh pasca MoU menunjukkan adanya transformasi pilihan resolusi konflik dari kekerasan menjadi jalan damai. Tantangan besar kemudian adalah menuntaskan proses transformasi mantan kombatan yang tergabung dalam KPA-PA serta para tahanan politik ke dalam masyarakat bahkan transformasi masyarakat Aceh sendiri menuju kearah yang lebih baik dari berbagai sektor kehidupan. Proses transformasi ini tentu saja bukan sebuah proses yang mudah. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh struktur dan mekanisme dari proses yang telah disepakati seperti proses reintegrasi, tetapi juga oleh proses komunikasi para pihak, terutama KPA/PA sendiri, pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak ketiga dan tokoh-tokoh masyarakat baik secara individu maupun organisasi.

---

<sup>31</sup> Analisis penulis terhadap kekuatan GAM pasca MoU Helsinki yang cukup kuat di Aceh, hal ini terbukti dengan tersebarnya mantan GAM ke berbagai lembaga/instansi di Aceh, kemenangan calon Independen dalam Pilkada 2006 dan memenangkan Pemilu Legeslatif lebih dari 40% diseluruh Aceh.

Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pengetahuan faktual, mengungkapkan, menginterpretasikan dan mengkonstruksi realitas proses transformasi konflik Aceh; mulai dari proses membuka jalur komunikasi atau dialog RI-GAM, proses reintegrasi, GAM bermetamorfosis menjadi KPA, kemudian melahirkan partai lokal, dinamika pilkada 2006, berjuang merebut parlemen di Aceh dalam Pemilu 2009 juga bagaimana "mesin" politik KPA-PA mengarahkan rakyat dalam menentukan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres Juli 2009. Mengetahui kendala dan hambatan serta bagaimana meminimalisir kendala dan hambatan tersebut dengan pendekatan komunikasi budaya dalam setiap tingkatannya.

Sehingga dengan penelitian diharapkan dari fakta empiris dapat mengembangkan konsep, model teoritis, pendekatan transformasi dan resolusi konflik dan budaya dengan paradigma konstruksionisme. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang jelas dan objektif tentang apa, mengapa dan bagaimana mereka (KPA/PA, intelektual/akademisi, BRA, tokoh masyarakat dan aktifis) melakukan konstruksi terhadap realitas transformasi konflik Aceh.

### **3. PERTANYAAN PENELITIAN**

Masalah penelitian ini dirumuskan dan dinyatakan ke dalam tiga pertanyaan pokok:

1. Bagaimana realitas proses transformasi konflik dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU di-konstruksikan oleh para pihak (KPA-PA, BRA, Intelektual/akademisi, tokoh masyarakat dan aktifis)
2. Bagaimana komunikasi antar budaya yang dibangun oleh para pihak dalam proses transformasi konflik Aceh.
3. Bagaimana dan mengapa kendala-kendala proses transformasi GAM mesti dapat di selesaikan.

### **4. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dalam catatan sejarah perlawanan rakyat Aceh dalam mempertahankan identitasnya sebagai sebuah "bangsa" begitu kuat. Aceh dapat dikatakan sebagai

daerah yang tidak pernah lepas dari konflik sepanjang sejarahnya. Pasca kemerdekaan Indonesia konflik antara Aceh dan Pemerintah pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureuh di proklamirkan pada tahun 1953. Konflik ini akhirnya dapat diredakan dengan memberikannya status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan pada tahun 1959.<sup>32</sup>

Setelah sempat mengalami masa damai, konflik Aceh dan pemerintah pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamirkan kemerdekaan Aceh pada tanggal 4 Desember 1976. Persoalan ini semakin rumit ketika keistimewaan daerah Aceh berakhir dengan diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1974, yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1965, yang didalamnya diatur mengenai keistimewaan Aceh. Akumulasi dari berbagai persoalan tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan pemisahan diri di bawah bendera Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang kemudian di kenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pemerintah pusat kemudian meresponnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan tersebut, termasuk operasi militer. Tahun 1989-1998 merupakan periode yang paling berdarah dalam sejarah konflik di Aceh. GAM kembali menjadi perhatian publik dan pemerintah pusat setelah mereka menegaskan kembali keberadaannya ditengah krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Kebangkitan gerakan ini tentu saja merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit untuk di padamkan.<sup>33</sup>

Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintahan transisi sejak masa B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu, sehingga penyelesaian masalah Aceh pun berlarut-larut. Namun satu hal yang penting untuk dicatat dari upaya penyelesaian konflik pada

---

<sup>32</sup> Diambil dari berbagai sumber, salah satu sumber dapat di lihat, dalam laporan riset kompetitif LIPI tahun 2004 "konflik Aceh: dari DI/TII ke GAM (Gerakan Aceh Merdeka)" oleh Abdurrahman Patji dkk.

<sup>33</sup> Diolah dari berbagai sumber, antara lain Moch. Nurhasyim Pelibatan Masyarakat Aceh dalam Rekonstruksi dan Recovery Pasca Tsunami dalam *Reconstruction and Peace Building in Aceh* (LIPI 2005). A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, ( Jakarta: Yayasan Oboor Indonesia, 2003). Indra J.Piliang Mengakhiri Konflik Aceh, dalam *Reconstruction and Peace Building in Aceh* (LIPI, 2005)

masa transisi ini adalah disertakannya aspek diplomasi dan komunikasi, meskipun dalam tataran operasional masih kental dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Pada masa Abdurrahman Wahid upaya komunikasi melalui dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan I dan II telah dilakukan. Namun, kebijakan yang memadukan operasi keamanan, operasi kemanusiaan, dan penegakan hukum ini pun tidak berhasil memadamkan perjuangan GAM, sehingga kemudian dengan Keputusan Presiden Nomo 18 Tahun 2003 pada tanggal 19 Mei 2003 Megawati mengumumkan diberlakukannya status Darurat Militer di Aceh.<sup>34</sup>

Pendekatan diplomasi dan komunikasi efektif dalam penyelesaian konflik<sup>35</sup> Aceh kembali digunakan oleh pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-M.Yusuf Kalla, yang dipilih melalui pemilihan secara langsung pada tahun 2004, dengan melakukan komunikasi persuasif informal dengan pihak GAM. Komunikasi informal yang berlangsung sejak akhir Januari hingga Mei 2005 dilakukan dengan bantuan fasilitasi dari Crisis Management Iniatif (CMI), sebuah lembaga internasional yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. Rangkaian proses komunikasi yang berlangsung empat tahap antara delegasi Pemerintah RI dan GAM di luar kota Helsinki ini akhirnya menghasilkan sebuah Nota Kesepahaman MoU yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. MoU ini memuat antara lain penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian pelanggaran HAM, pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.

<sup>34</sup> Sejak Pemerintahan Abdurrahman Wahid melakukan perjanjian dengan pihak GAM melalui Jeda Kemanusiaan I dan II yang kemudian diteruskan dengan CoHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) yang diteruskan oleh Presiden Megawati. CoHA yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center (HDC) ini dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah RI yang kemudian disusul dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 28/2003 tertanggal 19 Mei 2003 tentang Peningkatan Status Keadaan Bahaya di Nanggroe Aceh Darussalam dengan tingkatan Keadaan Bahaya. Praksis pintu perjanjian (dialog damai) sudah tertutup dengan pihak GAM.

<sup>35</sup> Pemerintah RI dan GAM dalam menjalankan proses komunikasi baik yang bersifat informal maupun formal demi tercapainya perdamaian secara menyeluruh di Bumi Iskandar Muda. Menurut pengamatan dan analisa penulis, proses komunikasi berlangsung dalam konteks politik dan budaya.

Realitas proses transformasi pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks, yang membutuhkan kontribusi timbal-balik dari pihak yang ditransformasi dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan kombatan sebagai subjek yang ditransformasikan perlu didorong untuk mampu mengambil kesempatan-kesempatan di bidang sosial politik, pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya, sedangkan masyarakat luas didorong untuk membangun sikap-sikap tertentu, sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan kombatan dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka.

Selain itu, komunikasi yang dibangun oleh para pihak termasuk pemerintah pusat bersama pemerintah daerah bersama dengan mantan kombatan GAM, juga menentukan keberhasilan proses transformasi GAM dari perjuangan dengan senjata menuju perjuangan politik. Komunikasi menjadi sangat penting dalam proses resolusi dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik Aceh secara tuntas. Bagi KPA melalui Juru bicaranya Ibrahim Bin Syamsuddin, sering disapa dengan KBS (“kap bouso”), bahwa mereka senantiasa menjalin komunikasi secara kontiu dengan pemerintah pusat maupun daerah. Komunikasi yang dijalankan bersifat formal maupun informal, di Aceh, Jakarta maupun pihak ketiga (CMI).<sup>36</sup>

Akan tetapi, berkaca dari transformasi konflik dari kekerasan ke jalan damai di berbagai negara lain, keberhasilan proses transformasi sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh sebuah lembaga koordinasi semacam BRA. Salah satu faktor lain yang turut menentukan keberhasilan proses transformasi termasuk reintegrasi adalah adanya keterlibatan dan dukungan dari para pihak di semua level, tidak terkecuali di tingkat pusat maupun internasional terhadap proses tersebut. Memang Inpres Nomor 15 Tahun 2005 secara eksplisit memberikan tanggung jawab yang besar kepada pemerintah propinsi dalam mengimplementasikan isi MoU. Namun demikian dalam operasional lapangan keberhasilan proses transformasi juga dipengaruhi oleh para pihak seperti mantan kombatan GAM sendiri, tokoh-tokoh Aceh pusat maupun daerah, pemerintah pusat, pihak internasional maupun intelektual/akademisi, elit lokal, aktifis, pihak yang memfasilitasi, bahkan media local maupun nasional. Artinya untuk mencapai

---

<sup>36</sup> Wawancara dan diskusi penulis dengan Jurubicara KPA secara informal di Hotel Kartika Candra Jakarta Selatan, 10-11 September 2008.



keberhasilan transformasi di Aceh tidak terlepas dari peran komunikasi semua pihak. Dalam sebuah penelitian LIPI yang dilakukan pada tahun 2007,<sup>37</sup> tentang peran pemangku kepentingan (elit lokal) dalam mengimplementasikan program reintegrasi. Juga mengungkapkan bahwa pemangku jabatan atau elit lokal di Aceh memiliki peran penting dalam mensukseskan proses transformasi GAM. Tanpa peran aktif elit lokal niscaya program tersebut kurang maksimal implementasi dilapangan.

Diketahui bahwa situasi damai di Aceh masih terus bertahan. Tetapi meskipun pemerintah SBY-JK dan banyak kalangan di Jakarta melihat hal ini sebagai sebuah cerita yang berakhir dengan *happy ending*, banyak warga Aceh yang menganggap hal ini hanya sebagai istirahat sementara dari sebuah konflik yang tidak dapat dielakkan akan terjadi lagi. Tingkah perilaku sejumlah pejabat GAM yang terpilih melalui pilkada, pihak TNI yang kurang sepakai dengan MoU, pihak yang tidak senang melihat Aceh damai, oknum mantan kombatan menjadi salah satu alasan membayangnya pesimisme.<sup>38</sup>

Terpilihnya anggota GAM sebagai pejabat propinsi dan kabupaten pada 11 Desember 2006 telah membantu menciptakan sebuah jaringan patronase yang menguntungkan; pekerjaan dan kontrak jatuh ke tangan sang pemenang. Namun demikian, tingkat pengangguran diantara para mantan kombatan masih tetap tinggi dan mungkin menjadi salah satu faktor sejumlah insiden yang melibatkan cara-cara ilegal untuk mendapat uang dengan cepat. Badan Reintegrasi Aceh-BRA sudah disfungsi sejak pertama kali dibentuk. Kepemimpinan yang baru sejak bulan April 2007 dan orientasi yang baru sejak bulan Agustus mungkin dapat menghadapi beberapa dari persoalan manajemen; namun apakah arah yang baru ini akan dapat memfasilitasi transformasi menuju rekonsiliasi atau malah semakin mempolarisasikan masyarakat masih belum jelas. Tidak seorangpun, termasuk para donor, tampaknya memiliki gagasan yang jelas mengenai apakah dana reintegrasi dan transformasi merupakan hak dibawah perjanjian damai

---

<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjadi salah satu Tim lapangan dalam memfasilitasi FGD dan diskusi informal maupun formal dengan para elit lokal. (BRA, Bupati, camat, geuchik, mantan kombatan, NGO dan lain-lain), dapat dilihat juga hasil penelitian dalam laporannya "Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, LIPI 2007.

<sup>38</sup> Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara dan diskusi dengan akademisi di Kampus Universitas Malikussalch, 10 Maret 2008

Helsinki tahun 2005, sebuah instrumen bagi upaya rekonsiliasi masyarakat, kompensasi bagi kerugian di masa lalu, atau alat pemberdayaan ekonomi bagi individu-individu. Dugaan-dugaan adanya penyebaran uang yang tidak merata telah semakin memecah belah KPA yang sebelumnya memang sudah terlihat kurang harmonis dan terdesentralisasi.<sup>39</sup>

Keretakan politik yang timbul sebelum pilkada antara para pemimpin yang berada di pengasingan di Swedia yang dipimpin oleh Malik Mahmud dan generasi yang lebih muda yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf (sekarang menjadi gubernur Aceh) dan sejumlah komandan lapangan, telah menjadi semakin dalam dan kemungkinan akan terus terpolarisasi sampai saat ini. Dalam persiapan menjelang pemilu tahun 2009, para pendukung GAM telah mendaftarkan paling sedikit tiga partai yang berbeda. Sementara itu, para pemimpin GAM harus memusatkan perhatian kepada tugas-tugas menjalankan pemerintahan, memberi hasil dan manfaat yang nyata kepada warga Aceh dan mengendalikan para pendukung mereka, daripada melemparkan seluruh kesalahan atas kurangnya kemajuan kepada Jakarta.<sup>40</sup> Keberhasilan Partai lokal yaitu Partai Aceh (PA) bentukan mantan kombatan GAM meraih lebih dari 45% suara pemilih di seluruh Aceh dalam pemilu legislatif 2009, dapat dikatakan keberhasilannya menguasai parlemen di Aceh juga keberhasilan transformasi politik. Keberhasilan mantan GAM dalam Pilkada 2006 dan Pemilu legislatif 2009 mencerminkan kuatnya mesin politik yang diperankan oleh mantan GAM. Hal ini juga akan berpengaruh pada penentuan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Juli 2009 terutama bagi rakyat Aceh. Sepertinya kemana arah penentuan pilihan KPA-PA kesitu pula arah pilihan rakyat Aceh dalam Pilpres 2009.<sup>41</sup>

Kekisruhan situasi ini bersumber pada empat masalah. *Pertama*, tingkat rasa saling percaya (*mutual trust*) antara stakeholders perdamaian di Aceh terus melorot, sementara rasa permusuhan (*hostilities*) dan kecurigaan bergerak naik. *Kedua*, forum komunikasi politik, budaya dan keamanan tampaknya terlalu lemah

<sup>39</sup> Kamaruddin Hasan, *Pilkada, Partai Lokal Dan Masa Depan Aceh: Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki*, Pustaka Pelajar-P2P LIPI, 2008, hlm. 193

<sup>40</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Indra J. Piliang, pengamat CSIS, yang diamini oleh Barata Krisna wartawan Suara Pembaharuan Jakarta, dalam sebuah obrolan Kedai Kopi di Kampus UI salemba, 14 April 2008.

<sup>41</sup> Analisis penulis sejak pasca MoU sampai dengan saat ini.

dan tidak mampu menjadi tempat dialog antara militer dan kelompok mantan GAM, antara elite politik Aceh dan berbagai spektrum elite politik Jakarta, serta antarberbagai komponen masyarakat Aceh sendiri. *Ketiga*, setiap saat kekerasan dapat meledak; terutama saat TNI dan mantan anggota GAM (atau oknum-oknum di dalamnya) tidak tunduk pada supremasi hukum atau terpancing untuk berkonfrontasi. Potensi kekerasan lain bisa muncul dari berbagai kelompok milisi dan faksi-faksi internal GAM yang kecewa terhadap perkembangan organisasi dan perjuangan mereka. *Keempat*, masih ada perbedaan pandangan antara Aceh dan Jakarta (dan antarberbagai elemen kedua pihak) tentang platform penyelesaian komprehensif masalah Aceh. Titik tenger utama adalah penafsiran "pemerintahan sendiri" (*self government*) yang telah disepakati dalam MOU Helsinki, tetapi tidak secara memadai diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Kubu mantan GAM berjuang untuk memenangi pemilu (menguasai parlemen lokal) sebagai jalan untuk implementasi pemerintahan sendiri sesuai dengan tafsiran mereka. Sebaliknya, elite politik Jakarta mencurigai Partai Aceh akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan lewat jalur politik melalui parlemen lokal dengan dalih penentuan nasib sendiri.<sup>42</sup>

Konstelasi persoalan itu mirip dengan latar belakang kegagalan perjanjian perdamaian tahun 2003. Tidak mengherankan jika Sidney Jones, 2009<sup>43</sup> dari ICG mengingatkan, "terlalu bahaya jika kita cepat-cepat menyimpulkan bahwa perdamaian Aceh telah sukses"; sebab sebenarnya Aceh saat ini "bagai telur di ujung tanduk" *Aceh on the Knife's Edge*. Evaluasi kritis dan realistis seperti itu menyadarkan kita, konflik Aceh membutuhkan penanganan ekstra serius dan bahwa kualitas relasi dan komunikasi para pihak perdamaian harus diperbaiki. Tema kualitas relasi-komunikasi para pihak ini menjadi diskursus penting dalam wacana *peacebuilding*, terutama sejak John Paul Lederach mengembangkan kerangka kerja transformasi konflik sebagai penyempurnaan atas teori resolusi konflik yang dinilai tidak memadai untuk menjelaskan konflik sosial politik yang kompleks seperti di Aceh. Kekurangan resolusi konflik hanya berpusat pada

<sup>42</sup> Analisa penulis, dalam melihat dan mengamati perkembangan proses transformasi GAM dari perjuangan bersenja menuju perjuangan politik, baik dalam konteks Pilkada sampai Pemilu 2009, serta riak-riak masalah sehari-hari di Aceh dan Jakarta.

<sup>43</sup> Laporan ICG, Inside Indonesia, Maret 2009

ikhtiar untuk menyepakati solusi atas masalah yang ada. Sementara transformasi konflik, selain memberi perhatian pada penyelesaian sengketa, juga berfokus pada relasi dan komunikasi yang mewujudkan jejaring hubungan yang membentuk konteks konflik yang lebih luas.

Lederach, 2003<sup>44</sup> menegaskan, sebenarnya perdamaian itu berpusat dan berakar pada kualitas relasi dan komunikasi yang mencakup baik interaksi langsung maupun cara-cara kita menata struktur hubungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada. Perspektif transformasi ini mengajak kita untuk melihat perdamaian bukan sebagai keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sebuah kualitas relasi yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, kerja perdamaian adalah ikhtiar untuk menangani munculnya konflik dengan menjalin dialog tanpa kekerasan demi menyelesaikan masalah yang ada dan meningkatkan saling pengertian, kesetaraan, dan respek dalam relasi damai. Jika ditangani dengan dialog tanpa kekerasan, konflik dapat mengantar kita masuk proses perubahan mendasar yang konstruktif (*substantive constructive changes*), baik pada level relasional maupun struktural. Dengan kata lain, melalui dialog, struktur-struktur yang menata kehidupan dapat dimodifikasi menjadi lebih responsif dan adil.<sup>45</sup>

Penerima Nobel Perdamaian dan fasilitator perdamaian Aceh, Marti Ahtisaari, menegaskan, lebih baik rakyat Aceh berjuang dalam pemilu dengan partai lokal daripada lewat pemberontakan bersenjata. Hal yang sama dapat dikatakan bagi Jakarta; lebih baik menata Aceh lewat undang-undang dan konsensus politik daripada pendekatan represif atau operasi militeristik baru. Seperti dikatakan oleh Cypri Jehan Paju Dale Pegiat Perdamaian; Koordinator Nasional LSM Sunspirit for Justice and Peace, perdamaian hanya dapat dicapai lewat permusyawaratan keadilan, sebuah dialog transformatif; sedangkan pendekatan militeristik hanya akan memerangkap kita dalam lingkaran setan kekerasan. Maka penelitian ini berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan realitas proses transformasi konflik Aceh seperti tersebut diatas yang dikonstruksikan oleh narasumber.

---

<sup>44</sup> John Paul Lederach *The Little Book of Conflict Transformation*, 2003

<sup>45</sup> Pendapat serupa, juga pernah di lontarkan oleh Sidney Jones, dalam sebuah diskusi informal di kantor ICG di Jln. Thamrin Jakarta, 12 Juni 2007.

## 5. TUJUAN PENELITIAN

Ada dua (2) tujuan pokok yang hendak dicapai oleh penelitian ini, yaitu:

- a. Mendapat gambaran dan menginterpretasikan realitas proses transformasi konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU Helsinki yang konstruksikan oleh narasumber penelitian. Juga ingin mendapat gambaran bagaimana kendala dan hambatan dapat diselesaikan.
- b. Mendapat gambaran dan menginterpretasikan bagaimana komunikasi budaya berperan dalam realitas proses transformasi konflik Aceh yang dikonstruksikan oleh narasumber.

## 6. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

### 6.1. Aspek Teoritis

Studi-studi tentang realitas proses transformasi konflik Aceh secara kualitatif, apalagi dengan menggunakan paradigma konstruksionisme dengan pendekatan komunikasi budaya, masih jarang ditemui. Prof Olle Törnquist Ph.D Peneliti ilmu politik dari University of Oslo, dalam sebuah diskusi di Banda Aceh Akhir November 2008, juga menggaris bawahi bahwa Aceh sejak zaman imprealis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional untuk mengkaji.<sup>46</sup> Menurutnya selain Snouck yang gemilang menghasilkan karyanya, ada periset internasional-tentu juga ada peneliti lokal dan nasional yang mengupas Aceh. Misalnya, R William Liddle pengamat politik asal Amerika, Mark Durie meneliti tata bahasa Aceh, Tim Kell "The Root of Acehnese Rebellion, James T Siege "The Rope of God", Denys Lombard, Fadhullah Wilmot, Anthony Reid, Sidney Jones, Edward Aspinall, Jacqueline Aquino Siapno. Hasil penelusuran peneliti, terdapat begitu banyak studi tentang konflik Aceh pra maupun pasca MoU Helsinki dilakukan oleh berbagai lembaga/instansi bahkan individu. Antara lain LIPI, World Bank, ICG, IOM, UNDP, USAID, AMM, BRA, kontras, Komnas HAM, UNOUC, Aceh Institut, IRE dan lain-lain. Secara individu bisa disebutkan antara lain Anthony Reid, Indra J.Piliang, M. Nurhasim, Neta S. Pane, Sidney Jones, Otto Syamsuddin Ishak, T. kemal Fasya, Aris Ananda, Al Chaidar M. Nur El Ibrahim, Ibrahim

<sup>46</sup> Diskusi dengan Prof. Olle di Banda Aceh pada akhir November 2008 yang juga dihadiri oleh kalangan wartawan di Nanggroe Aceh Darussalam

Alfian, M. Isa Sulaiman, Rizal Sukma, Kristen E Schulze, Nazaruddin Syamsuddin dan lain sebagainya.

Namun tidak ditemukan penelitian terhadap realitas proses transformasi konflik Aceh dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik dengan menggunakan paradigma konstruksionisme dalam perspektif komunikasi budaya. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan gagasan baru yang dapat melengkapi studi-studi komunikasi, transformasi konflik dan budaya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa masukan kebijakan bagi peningkatan pemahaman dan persepsi, relasi serta komunikasi para pihak yang terlibat dalam proses transformasi konflik di Aceh pasca MoU Helsinki. Sehingga tercipta gambaran akademis tentang bagaimana realitas proses transformasi konflik Aceh di konstruksikan melalui proses komunikasi. Dari sini diharapkan muncul sumbangan pada teori komunikasi khususnya komunikasi konflik, antarbudaya, dan transformasi konflik.

#### **6.2. Aspek Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa masukan kebijakan bagi peningkatan pemahaman dan persepsi serta komunikasi para pihak yang terlibat dalam realitas proses transformasi konflik GAM Pasca MoU. Juga diharapkan mampu menjadi acuan kebijakan bagi berbagai lembaga/instansi dan individu yang akan melakukan tugas-tugas transformasi konflik, resolusi konflik dalam kondisi relasi-komunikasi, sosio-kultural dan politik masyarakat pasca konflik.

## BAB II KERANGKA KONSEP

### 1. Komunikasi Sebagai Proses Transformasi Konflik

Dalam demokrasi, legitimitas politik mencari pembenarannya melalui persetujuan warga negara. Persetujuan ini dilandaskan pada komunikasi (J Habermas, 1981). Dalam hubungannya dengan proses sosial, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi, seperti halnya hubungan antara manusia dengan masyarakat. Little John 1999, menjelaskan hal ini dalam *genre interactionist theories*. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. Komunikasi (interaksi) merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial-struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial.

Komunikasi adalah alat yang luar biasa guna mengawasi salah satu kekuatan penting masyarakat; konsepsi mental yang membentuk wawasan orang mengenai kehidupan. Dengan kata lain, mereka yang berada dalam posisi mengawasi media, dapat menggerakkan pengaruh yang menentukan menuju arah perubahan sosial. Komunikasi sebagai proses sosial adalah bagian integral dari masyarakat. Secara garis besar komunikasi sebagai proses sosial di masyarakat memiliki fungsi-fungsi antara lain: (1) Komunikasi menghubungkan antar berbagai komponen masyarakat. Komponen di sini tidak hanya individu dan masyarakat saja, melainkan juga berbagai bentuk lembaga sosial; (2) Komunikasi membuka peradaban (*civilization*) baru manusia; (3) Komunikasi adalah manifestasi kontrol sosial dalam masyarakat; (4) Tanpa bisa diingkari komunikasi berperan dalam sosialisasi dan transformasi nilai ke masyarakat; dan (5)

Seseorang akan diketahui jati dirinya sebagai manusia karena menggunakan komunikasi. Itu juga berarti komunikasi menunjukkan identitas sosial seseorang.

David K. Berlo dari Michigan State University, dalam Cangara, 1965 menyebutkan bahwa komunikasi sebagai instrument interaksi social berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian damai di Aceh ditentukan oleh kemampuan komunikasi para pihak yang terlibat.

Proses komunikasi ini yang terus menerus berlangsung baik secara individu, kelompok/komunitas bahkan dalam Negara dalam upaya mengkonstruksikan realitas kehidupan. Dalam proses konstruksi pemikiran inilah rakyat Aceh terus berdinamika untuk membangun dunianya yang lebih baik. Erving Goffman<sup>47</sup> dengan teori dramaturgis menyebutkan bahwa kita dengan sengaja menampilkan diri kita (*self presentation*) seperti yang kita kehendaki. Yang ditampilkan atau dipresentasikan sebagai *front*. *Front* terdiri dari *setting* atau panggung (*stage*), *appearance* (penampilan) dan *manner* (tingkah laku). Goffman berasumsi bahwa seseorang bagaimanapun harus membuat atau mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang muncul sebagai suatu kejadian yang terorganisasi bagi seseorang akan menjadi realitas pada orang tersebut pada saat itu. Goffman menyebutkan apa yang nyata bagi individu adalah definisi terhadap situasi (*the definition of the situation*).

Menarik apa yang dikemukakan Peter L. Berger<sup>48</sup>, bahwa suatu masyarakat manusia adalah usaha pembangunan dunia. Ia merupakan hasil dari proyek manusia membangun dunianya, suatu *enterprise of world building*. Perspektif ini memberikan pengertian bahwa dunia (lingkungan sosial-kultural, termasuk politik) merupakan hasil konstruksi pemikiran dan aktivitas masyarakat

<sup>47</sup> Pemikiran Ervin Goffman dalam Littlejohn 1996, tentang Dramaturgis di ulas secara lugas oleh Deddy Mulyana dalam metode penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya, Bandung; Remaja Rosdakarya 2001.

<sup>48</sup> Pemikiran Peter L. Berger tentang dialektika masyarakat yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. bahwa manusia membangun dunia hasil konstruksi pemikirannya. Dapat di baca dalam buku Humanisme Sosiologi, terj. Dhaniel Dhakidae, Jakarta; Inti Sarana Aksara, 1985.



manusia, melalui apa yang disebut Berger sebagai proses dialektika masyarakat, yaitu *eksternalisasi*, *objektivasi* dan *internalisasi*. Menurutnya, semua dunia yang dibangun (dikonstruksi) oleh masyarakat manusia (sosial), secara inhern adalah rawan, karena terancam oleh fakta kepentingan diri dan kebodohan manusiawi.

## 2. Komunikasi sebagai Interaksi Simbolik

Seorang sosiolog yang bernama George Herbert Mead 1934, yang mengajar psikologi sosial pada Departemen filsafat Universitas Chicago, mengembangkan teori ini. Mead percaya bahwa keanggotaan kita dalam suatu kelompok sosial menghasilkan perilaku bersama yang kita kenal dengan nama budaya. Dalam waktu yang bersamaan, dia juga mengakui bahwa individu-individu yang memegang posisi berbeda dalam suatu kelompok, mempunyai peran yang berbeda pula, sehingga memunculkan perilaku yang juga berbeda. Misalnya, perilaku pemimpin berbeda dengan pengikutnya. Dalam kasus ini, Mead tampak juga seorang strukturis. Namun dia juga menentang pandangan bahwa perilaku kita melulu dipengaruhi oleh lingkungan sosial atau struktur sosial. Sebaliknya Mead percaya bahwa kita sebagai bagian dari lingkungan sosial tersebut juga telah membantu menciptakan lingkungan tersebut. Lebih jauh lagi, dia memberi catatan bahwa walau kita sadar akan adanya sikap bersama dalam suatu kelompok/masyarakat, namun hal tersebut tidaklah berarti bahwa kita senantiasa berkompromi dengannya.

Mead juga tidak setuju pada pandangan yang mengatakan bahwa untuk bisa memahami perilaku sosial, maka yang harus dikaji adalah hanya aspek eksternal (perilaku yang teramati) saja. Dia menyarankan agar aspek internal (mental) sama pentingnya dengan aspek eksternal untuk dipelajari. Karena dia tertarik pada aspek internal dan eksternal atas dua atau lebih individu yang berinteraksi, maka dia menyebut aliran perilakunya dengan nama "*social behaviorism*". Dalam perspektif interaksionis ada beberapa teori yang layak untuk dibahas yaitu teori interaksi simbolis (*Symbolic Interaction Theory*), dan teori identitas (*Identity Theory*).

Walau Mead menyarankan agar aspek internal juga dikaji untuk bisa memahami perilaku sosial, namun hal tersebut bukanlah merupakan minat

khususnya. Justru dia lebih tertarik pada interaksi, di mana hubungan di antara gerak-isyarat (*gesture*) tertentu dan maknanya, mempengaruhi pikiran pihak-pihak yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi Mead, gerak-isyarat yang maknanya diberi bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam interaksi adalah merupakan "satu bentuk simbol yang mempunyai arti penting" (*a significant symbol*). Kata-kata dan suara-lainnya, gerakan-gerakan fisik, bahasa tubuh (*body language*), baju, status, kesemuanya merupakan simbol yang bermakna. Mead tertarik mengkaji interaksi sosial, di mana dua atau lebih individu berpotensi mengeluarkan simbol yang bermakna. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh simbol yang dikeluarkan orang lain, demikian pula perilaku orang lain tersebut. Melalui pemberian isyarat berupa simbol, kita mengutarakan perasaan, pikiran, maksud, dan sebaliknya dengan cara membaca simbol yang ditampilkan orang lain, kita menangkap pikiran, perasaan orang lain tersebut. Teori ini mirip dengan teori pertukaran sosial.

Interaksi di antara beberapa pihak tersebut akan tetap berjalan lancar tanpa gangguan apa pun manakala simbol yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dimaknakan bersama sehingga semua pihak mampu mengartikannya dengan baik. Hal ini mungkin terjadi karena individu-individu yang terlibat dalam interaksi tersebut berasal dari budaya yang sama, atau sebelumnya telah berhasil memecahkan perbedaan makna di antara mereka. Namun tidak selamanya interaksi berjalan mulus. Ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan simbol yang tidak signifikan simbol yang tidak bermakna bagi pihak lain. Akibatnya orang-orang tersebut harus secara terus menerus mencocokkan makna dan merencanakan cara tindakan mereka. Banyak kualitas perilaku manusia yang belum pasti dan senantiasa berkembang: orang-orang membuat peta, menguji, merencanakan, menunda, dan memperbaiki tindakan-tindakan mereka, dalam upaya menanggapi tindakan-tindakan pihak lain. Sesuai dengan pandangan ini, individu-individu menegosiasikan perilakunya agar cocok dengan perilaku orang lain.

Seperti yang disampaikan oleh Blumer, sebagaimana dikutip Poloma (2000:258): Interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis utama ; (1) Manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang ada di benak mereka terhadap

sesuatu: (2) Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain: (3) Makna-makna tersebut disempurnakan disaat proses interaksi sosial berlangsung. Hal ini seperti pernah diungkapkan oleh Peter Berger memandang realitas sosial berada dalam tiga titik utama: eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Sejalan dengan pandangannya ini, maka realitas sosial yang pada dasarnya merupakan hasil konstruksi manusia (melalui mekanisme eksternalisasi dan objektivasi) berbalik membentuk manusia (melalui mekanisme internalisasi). Dan dalam prosaes saling bentuk tesis, anti tesis, sintesis inilah realitas sosial berada (muncul, bertahan dan berubah). Bahwa hubungan diantara manusia dan masyarakat merupakan hubungan yang bersifat dialektis.

Seperti halnya hubungan budaya dengan komunikasi demikian erat, sehingga seperti dua sisi dari satu mata uang. Edward.T.Hall mengatakan bahwa, *'communication is culture and culture is communication'* (Yoshikawa, 1988:150). Menurut Yoshikawa, Hall mengingatkan bahwa budaya dan komunikasi mempunyai hubungan timbal balik. Manusia mengorganisasikan hidup yang disebut sebagai budaya sebagai bagian dari perwujudan perilaku komunikasi manusia dalam suatu jaringan tertentu dan dikembangkan menurut karakteristik budayanya. Oleh karenanya sekumpulan orang yang berinteraksi mesti dipandang dalam dua sisi, yaitu sebagai mikrokosmos budaya dan aktivitas manusia berkomunikasi. Dalam kaitanya dengan mantan kombatan GAM berinteraksi dengan sesamanya dan dengan pihak lain dapat menunjukkan karakteristik yang unik. Mereka dapat menciptakan dunia sendiri, struktur sosial sendiri, termasuk dunia simbol dan proses komunikasinya.

*Teori interaksionisme simbolik merujuk pada karakter interaksi khusus yang berlangsung antar manusia. Aktor tidak semata-mata beraksi terhadap tindakan orang lain, tetapi dia menafsirkan dan mendefinisikan setiap tindakan orang lain. Respon aktor secara langsung maupun tidak, selalu didasarkan atas penilaian makna tersebut. Oleh karena itu, interaksi manusia dijembatani oleh penggunaan simbol penafsiran atau dengan menemukan makna tindakan orang lain (Soeprapto, 2000:121).*

Interaksi simbolik menurut Mulyana (2001:68) ialah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyerankan bahwa perilaku manusia

harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain menjadi mitra interaksinya. Dalam pandangan interaksi simbolik, manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi objektif, tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor bebas. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang akan menentukan perilaku mereka (Mulyana, 2001:70).

Secara ringkas Mulyana (2001:71) mengungkapkan interaksi simbolik didasarkan pada premis-premis berikut. *Pertama*, individu merespon suatu situasi simbolik, mereka merespon lingkungan, termasuk objek fisik dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika mereka menghadapi suatu situasi, respon mereka bergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. *Kedua*, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Hal ini dimungkinkan karena manusia mampu menamai segala sesuatu, bukan hanya objek fisik, tindakan, atau peristiwa, namun juga hal-hal yang abstrak. Nama atau simbol itu bersifat sembarang (*arbiter*), maksudnya apa saja dapat dijadikan simbol dan karena itu tidak ada hubungan logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya. Melalui simbol itulah manusia dapat berbagai pengalaman.

Antara pemikiran dan aktivitas kehidupan manusia dengan simbol-simbol cukup erat, sebab kehidupan manusia salah satunya berada dalam lingkungan simbolik, hal itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (1987 : 66) bahwa manusia hidup ditengah-tengah tiga lingkungan yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Lingkungan material bukanlah ekosistem atau tempat ketiga lingkungan itu terkait, tetapi lingkungan buatan manusia, seperti rumah, jembatan, dan peralatan-peralatan. Lingkungan sosial adalah organisasi sosial, stratifikasi, sosialisasi, dan sebagainya. Lingkungan simbolik adalah gejala sesuatu yang meliputi makna dan komunikasi, seperti bahasa, nyanyian, seni, upacara, tingkah laku, benda-benda, konsep-konsep, dan sebagainya.

Manusia pada dasarnya membutuhkan kehidupan bersama dengan manusia lainnya (*zon politicon*). Selama mereka itu menjalani kehidupan bersama, mereka akan selalu terlibat dalam suatu hubungan timbal balik yang disebut interaksi sosial atau berkomunikasi dengan sesamanya. Dari interaksi sosial ini akan mengarah ke interaksi sosial. Oleh Gillin, dalam Soekanto (1993 : 67) interaksi sosial dianggap faktor paling utama, bahkan menjadi kunci dari seluruh kehidupan sosial, sebab tanpa adanya interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Dalam interaksi sosial berarti adanya perubahan kearah penyesuaian diri, kelompok terhadap lingkungan yang merupakan sistem sosial. Untuk memenuhi keinginan-keinginan itu, para anggota suatu kelompok masyarakat, dengan tujuan untuk bekerjasama, dapat bervariasi, sesuai dengan kelompok yang ada. Dalam hal ini Kreach (2001:394) menjelaskan bahwa keinginan yang harus dikemukakan itu terdiri dari: *Mind* dan *self* pada dasarnya berasal dari *society* atau dari proses-proses interaksi. Cara manusia mengartikan dunia (*mind*) dan diri-sendiri (*self*) berhubungan erat dengan masyarakatnya (*society*). Ada kesatuan antara berpikir dengan beraksi, pikiran dan kedirian menjadi bagian dari perilaku manusia, yaitu bagian interaksinya dengan orang-orang lain. Interaksi itu membuat dia mengenal dunia dan dia sendiri. Berpikir adalah interaksi oleh "diri" orang yang bersangkutan dengan orang lain. Tidak ada pikiran yang timbul lepas-bebas dari suatu situasi sosial. Herbert Blumer menyambung gagasan-gagasan Mead tersebut yang terangkum dalam bukunya *Symbolic Interactionsm: Perspective and Method* (1969). Gagasan-gagasan Blumer (dalam Veeger, 1985:224 – 228) tersebut terdiri dari konsep dari (*self*), konsep perbuatan (*action*), konsep obyek, konsep interaksi sosial, dan konsep aksi kolektif (*join action*).

### 3. Transformasi Konflik GAM

Secara sederhana transformasi konflik dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan social budaya dan politik yang positif.<sup>49</sup> Sean Byrner menjelaskan ada beberapa preposisi dalam transformasi resolusi konflik, antara lain: (1)

<sup>49</sup> Sean Byrne, "Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001)

rekonsiliasi adalah sebuah gagasan *multi-faceted* yang dibangun diatas kepercayaan, kasih sayang, keadilan dan perdamaian; (2) diperlukan upaya untuk membangun sebuah budaya perdamaian pada masyarakat local. Hal ini dibangun antara lain melalui pendidikan yang dialogis atau liberatif, pembangunan yang berlandaskan sumber daya cultural yang ada, dan usaha untuk mendorong tema-tema generative dalam kegiatan-kegiatan local yang membangun kesadaran kritis; (3) dibutuhkan kemitraan yang inklusif dan kesalingtergantungan yang fleksibel dan beraneka ragam yang melibatkan sebuah jaringan hubungan pada semua level yang berkelanjutan dan mendorong demokrasi partisipatif; (4) keterkaitan partisipasi individu terhadap pilitik membangun pemberdayaan dan pengakuan politik dan psikologis; (5) *transformation conflict resolution* adalah sebuah alternative sistematis tanpa kekerasan dalam penyelesaian konflik; (6) transformasi mewakili masa depan bersama yang dibayangkan atau diharapkan; (7) untuk mendukung dan memelihara infranstruktur perdamaian jangka panjang dibutuhkan sumber daya social- ekonomi; (8) transformasi spiritual menyediakan individu-individu dengan inspirasi, keterhubungan, dan pikiran yang mendorong masyarakat mencari kebenaran dan keadilan; (9) proses transformasi mensyaratkan bahwa semua pihak yang terlibat menganggap bahwa konflik sejatinya bergerak dari konflik yang destruktif kearah akomodatif dan *trust-building*.<sup>50</sup>

Menurut Soderberg (2004:1) transformasi mantan gerakan bersenjata menjadi gerakan politik merupakan salah satu faktor penting dalam menilai keberhasilan implementasi nota perdamaian. Menurut Manning (2004) ada dua tantangan yang dihadapi oleh kelompok pemberontak dalam usaha mereka merubah diri menjadi partai politik. Pertama, menyangkut dengan konsolidasi di tingkat elit kelompok tersebut dalam menghadapi perubahan situasi politik, termasuk menanggalkan ideologi lama dan membangun ideologi baru. Pergesekan dan persaingan intra elit biasanya tidak bisa dihindari karena perbedaan persepsi atau kepentingan. Relasi elit sipil-militer dalam tubuh gerakan itu juga berpotensi menjadi tantangan yang sensitif. Kedua, menurutnya Manning, berkaitan dengan

<sup>50</sup> Sean Byrner, "Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001), h. 4.

strategi untuk mendapat dukungan dan basis massa. Diketahui bahwa kelompok bersenjata adalah gerilyawan yang mendapat dukungan logistik dari rakyat ketika peperangan berlangsung. Tanpa dukungan rakyat, kelompok tersebut biasanya akan tamat, atau berubah menjadi kelompok kriminal yang melakukan pemerasan. Ketika mereka merubah dirinya menjadi partai politik, kondisinya sangat berbeda. Arena politik berbeda dengan arena tempur bersenjata. Politik memerlukan keahlian untuk bernegosiasi dan keahlian untuk membujuk masyarakat supaya setuju dengan program politik partai.

Pada tahap ini, kemungkinan terjadinya perbedaan strategi dalam tubuh gerakan tersebut sangat terbuka. Para elit militer yang tidak punya pengalaman politik cenderung memilih untuk menggunakan pendekatan lama, menekan masyarakat untuk memperoleh dukungan politik. Cara ini, bagaimanapun, mungkin akan cukup efektif dilakukan di kawasan pedesaan. Sementara, di sisi lain, elit sipil lebih memilih untuk menghindari pola-pola represif yang bisa membuat rakyat kembali menderita. Turunan dari dua tantangan ini adalah gerakan tersebut memerlukan tiga hal untuk bisa sukses mentransformasikan dirinya menjadi gerakan politik. *Pertama*, kekompakan secara organisatoris untuk melakukan perubahan-perubahan signifikan dalam tubuh gerakan. Semakin solid organisasi tersebut, semakin besar peluang mereka untuk memasuki dunia politik yang sangat kompetitif. Oleh itu diperlukan kemampuan *leadership* yang tangguh dari elit gerakan tersebut supaya bisa mengendalikan situasi politik di era transisi. *Kedua*, dukungan massa yang luas. Partai politik sangat tergantung pada basis massa. Tanpa dukungan massa, partai politik tidak lebih dari sebuah kelompok penekan yang tidak bertenaga. Rakyat merupakan sumber munculnya kekuasaan politik. Rakyat memandatkan kekuasaan politik kepada elit melalui partai politik. Tanpa massa, sebuah gerakan tidak mungkin bisa mempertahankan diri menjadi partai politik. Bagaimana sebuah gerakan bersenjata bisa mempertahankan dukungan dari rakyat ketika mereka tidak lagi memiliki senjata, adalah pertanyaan yang kerap muncul dan sulit untuk dijawab. Dukungan para mantan anggota pun bisa hilang kalau, misalnya, gerakan tersebut hanya bisa membangun integrasi di tingkat elit, sementara di tingkat akar rumput, para mantan kombatan tidak memperoleh perhatian yang cukup dari para elit. Para mantan kombatan yang

frustrasi karena tidak punya pekerjaan dan penghasilan, bisa memindahkan dukungan politik mereka ke kubu lain, atau malah lebih buruk lagi, mereka memilih untuk menjadi “petualang” yang melakukan teror untuk mendapatkan uang.

*Ketiga*, dukungan internasional terhadap mereka untuk melakukan transformasi, berupa pengakuan secara politik, bantuan teknis (*technical assistance*), pelatihan dan bantuan finansial. Dukungan internasional menjadi penting supaya terjadi transformasi yang sempurna. Seringkali komunitas internasional memainkan peranan kunci dalam proses perdamaian di dunia. Dukungan internasional bisa menjadi satu trajektori yang bisa mempercepat perubahan gerakan bersenjata ke gerakan politik. Pihak internasional juga bisa menjadi penjamin bahwa pemerintah atau pihak lain akan mengakui keberadaan bekas kelompok bersenjata tersebut sebagai sebuah partai politik.

Namun disisi lain, konflik yang telah terjadi di Aceh selama hampir 30 tahun tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar melainkan juga, disadari atau tidak, berpotensi telah mengubah karakter masyarakat Aceh dari masyarakat yang cinta damai menjadi masyarakat yang akrab dengan kekerasan. Di beberapa tempat di Aceh, saat ini bisa dijumpai orang-orang yang memiliki karakter (*state of nature*) seperti yang dikatakan oleh Thomas Hobbes (1588-1679), sebagai “evil”, yakni mereka yang tidak patuh terhadap aturan yang berlaku dan menghalalkan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Hobbes, empat abad lalu, menyatakan bahwa untuk mengatur manusia yang “evil” itu perlu ada “*leviathan*” (semacam monster) yang diberikan otoritas oleh negara untuk memberikan *punishment*. *Leviathan* itu kemudian bisa diterjemahkan sebagai militer.

Pendekatan resolusi konflik merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian konflik dalam beberapa tahap sesuai dengan dinamika siklus konflik. Penjabaran tahapan proses resolusi konflik dibuat untuk empat tujuan. *Pertama*, konflik tidak boleh hanya dipandang sebagai suatu fenomena politik-militer, namun harus dilihat sebagai suatu fenomena sosial. *Kedua*, konflik memiliki suatu siklus hidup yang tidak berjalan linear. Siklus



hidup suatu konflik yang spesifik sangat tergantung dari dinamika lingkungan konflik yang spesifik pula. *Ketiga*, sebab-sebab suatu konflik tidak dapat direduksi ke dalam suatu variabel tunggal dalam bentuk suatu proposisi kausalitas bivariat. Suatu konflik sosial harus dilihat sebagai suatu fenomena yang terjadi karena interaksi bertingkat berbagai faktor. *Terakhir*, resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara optimal jika dikombinasikan dengan beragam mekanisme penyelesaian konflik lain yang relevan. Suatu mekanisme resolusi konflik hanya dapat diterapkan secara efektif jika dikaitkan dengan upaya komprehensif untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng.

Konsep membangun perdamaian atau *peace building* dalam literatur didefinisikan sebagai aktivitas yang memiliki ruang gerak luas terutama mencakup rekonsiliasi, transformasi sosial dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan. Aktivitas tersebut berjalan setelah proses *peace making* dan *peace keeping* di wilayah pasca konflik. Di Aceh, *peace making* terjadi ketika negosiasi perdamaian dimulai. Dalam fase ini konflik kekerasan secara berlahan berkurang dan berubah menjadi dialog tanpa kekerasan. Indikator keberhasilan *peace making* ialah penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Fase selanjutnya ialah *peace keeping*, dimana proses transisi ini dikawal oleh Aceh Monitoring Mission. AMM bertugas untuk melucuti (*disarmament*) dan pemulangan (*demobilisasi*) pasukan TNI dan GAM.

Tidak seperti *peace making* dan *peace keeping* yang relatif membutuhkan waktu singkat, *peace building* merupakan proses yang dapat memakan waktu puluhan tahun. Hal ini tidak terlepas dari tiga dimensi yang melingkupi *peace building*, yakni struktural, relasional dan personal. Struktural berkaitan dengan bagaimana membangun perdamaian melalui transformasi nilai sekaligus peningkatan kapasitas institusi eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga mencakup pula militer dan kepolisian. Dua institusi terakhir ini memegang peranan penting dalam mengendalikan masyarakat pasca konflik yang notabene rentan terhadap provokasi dan sangat mendambakan penegakan hukum.

Selama konflik berlangsung kerja-kerja perdamaian biasanya difokuskan kepada intervensi konflik melalui mediasi atau fasilitasi dan rekonsiliasi. Hal ini

bertujuan agar konflik dapat dikelola, dilokalisir sehingga tidak meluas kemana-mana, dan sedapat mungkin diredakan. Dalam istilah teknis fase-fase ini disebut managemant konflik dan resolusi konflik. Selama fase-fase ini fokus kerja peacebuiding biasanya bersifat jangka pendek, yaitu mendekonstruksi struktur kekerasan. Setelah konflik kekerasan mereda, kerja-kerja perdamaian lebih diarahkan kepada tujuan perubahan sosial berjangka panjang yang lebih menekankan rekonstruksi struktur damai dalam masyarakat. Damai bukanlah semata-mata ketiadaan perang, tapi sesuatu keadaan dinamis, partisipatif, dan berjangka -panjang, yang berdasar pada nilai-nilai universal di segala level praktis keseharian, yaitu keluarga, sekolah, komunitas dan negara.

#### 4. Reintegrasi Sebagai Proses Transformasi Konflik

Transformasi GAM sebagai sebuah gerakan bersenjata ke gerakan politik ditandai oleh beberapa hal. *Pertama*, mereka telah melakukan proses *decommissioning* sebanyak lebih dari 840 pucuk senjata. *Kedua*, mereka membubarkan sayap militer dan membentuk sebuah organisasi sipil untuk menampung mantan petempur yang diberi nama Komite Peralihan Aceh (KPA). *Ketiga*, GAM secara terbuka terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik (pilkada) di Aceh pada tahun 2006 lalu. *Keempat*, GAM telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi partai politik lokal di Aceh dengan nama Partai Aceh (PA). *Kelima*, GAM secara terbuka terlibat dan berpartisipasi dalam proses Pemilu 2009 di Aceh.<sup>51</sup>

Proses transformasi tersebut juga di tandai dengan lahirnya badan yang mengurus reintegrasi mantan kombatan GAM. Untuk mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan proses tersebut pada tanggal 11 Maret 2006 dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA), yang kemudian berubah nama menjadi Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA). BRA mengemban misi antara lain: mengakomodir perencanaan dan pelaksanaan antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik domestik maupun asing untuk melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dalam rangka reintegrasi Aceh, sesuai dengan MoU

<sup>51</sup> Hasil pengamatan dan analisis penulis, dalam mengobservasi perkembangan proses transformasi GAM pasca MoU, baik dilakukan di lapangan maupun melalui media massa, sejak tahun 2005 sampai dengan pasca Pemilu 2009.

Helsinki; melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan reintegrasi Aceh menuju perdamaian yang berkelanjutan di Aceh; mengakomodir dan memantau pelaksanaan pemberdayaan di kabupaten/kota agar realisasi program sejalan dengan upaya pemenuhan kesepakatan MoU; memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati; dan mengkompilasi dan mendistribusikan laporan atas realisasi program yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pelaksana kepada institusi terkait.<sup>52</sup> Jelas, misi yang di emban oleh BRA sangat kompleks,<sup>53</sup> apalagi dalam beberapa bulan pertama saja sejak pembentukannya BRA sudah dihadapkan pada persoalan-persoalan serius seperti keterlambatan pencarian dana, ketidakakuratan data, hingga keluarnya perwakilan GAM dan NGO dari BRA pada juni 2006.

Integrasi, akar katanya berasal dari bahasa latin, *integer* yang berarti keseluruhan. istilah ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian, unsur-unsur, factor-faktor, atau perincian-perincian yang telah membaur dan bergabung secara menyeluruh sehingga masing-masing telah kehilangan jati diri yang khas.<sup>54</sup> Myron Weiner menyebut lima definisi dalam menjelaskan integrasi. *Pertama*, integrasi mungkin merujuk pada proses penyatuan berbagai budaya dan social ke dalam satu kesatuan wilayah dan pada pembentukan suatu identitas nasional. *Kedua*, integrasi sering digunakan dalam arti yang serupa untuk merujuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat diatas unit-unit atau wilayah-wilayah politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan suatu kelompok budaya atau social tertentu. *Ketiga*, integrasi sering digunakan untuk menunjuk pada masalah seputar hubungan pemerintah dengan yang diperintah. *Keempat*, integrasi kadang-kadang juga digunakan untuk menunjukkan adanya consensus nilai minimum yang diperlukan untuk memelihara tertib social. *Kelima*,

<sup>52</sup> Surat Keputusan Gubernur No. 330/032/2006 tanggal 11 Februari 2006 dan diubah dengan keputusan No. 330/106/2006 tanggal 13 April 2006 dan keputusan No. 330/213/2006.

<sup>53</sup> Kompleksitas itu berkaitan dengan struktur lembaga yang harus menampung berbagai kepentingan dan misi yang diembannya sangat luas dan kurang terarah.

<sup>54</sup> A.Rahman Zainuddin, "Islam dan masalah Integrasi", dalam Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing, (penyunting), *Integrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 97

berkaitan dengan “tingkah-laku integrative” yaitu kapasitas orang-orang didalam satu masyarakat untuk berorganisasi demi mencapai beberapa tujuan bersama.<sup>55</sup>

Berdasarkan definisi di atas, Weiner merumuskan bahwa integrasi adalah suatu rangkuman sikap-sikap manusia yang sangat luas, yaitu integrasi antara berbagai kesetiaan cultural dan pembangunan rasa kebangsaan; integrasi unit-unit politik kedalam kerangka wilayah bersama dengan suatu pemerintah dan yang diperintah; dan integrasi warga Negara kedalam proses politik yang dijalankan bersama; dan integrasi individu-individu kedalam organisasi dengan kegiatan yang bermanfaat.<sup>56</sup>

Nazaruddin Sjamsudin membedakan dua dimensi proses penyatuan berbagai elemen dalam masyarakat dalam suatu Negara, yaitu vertical (elit dan massa) dan horizontal (antar wilayah/territorial). Integrasi vertical mencakup proses yang menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat antara elit dan massa. Sedangkan integrasi horizontal bertujuan mengurangi ketegangan kultur kedaerahan dalam rangka proses penciptaan masyarakat politik homogen. Dengan kata lain, tujuan integrasi vertical atau yang lebih sering disebut integrasi politik adalah mencoba mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada pada kelompok yang berpengaruh dan yang dipengaruhi atau orang yang memerintah dan yang diperintah, sedangkan integrasi horizontal lebih menunjuk pada wilayah yang dipersatukan.<sup>57</sup>

Integrasi biasanya melibatkan persoalan kedaulatan, terutama menyangkut masalah bagaimana kekuasaan beralih dalam kelompok yang ada di masyarakat dan bagaimana mereka membagi dan menggunakan kekuasaan tersebut.<sup>58</sup> Apabila dihubungkan dengan persoalan kekuasaan, maka integrasi politik menyangkut persoalan bagaimana meningkatkan konsensus normative yang mengatur tingkah laku politik masyarakat atau individu-individu yang ada di dalamnya serta

<sup>55</sup> Lihat Myron Weiner, “Political Integration and Political Development,” dalam Cloude E. Welch, Jr (ed), *Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change*, (Belmont, Wadsworth Publishing Company, 1969), h. 551-553

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Nazaruddin Syamsuddin, “Dimensi Politik dari Integrasi Nasional: Tinjauan Teoritis”, dalam Saafroedin Bahar dan A.B. Tangdililing; (penyunting), *Integrasi Nasional, Teori, Masalah dan Strategi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), h. 4-6

<sup>58</sup> Ibid., hlm. 5.

bagaimana membuat rakyat patuh dan tunduk pada tuntutan Negara.<sup>59</sup> Masalah kedua berhubungan dengan bagaimana pengaturan hubungan dengan antara Negara dan rakyat, sedangkan masalah pertama lebih kepada pembinaan kesepakatan diantara sesama warga Negara tentang tingkah laku politik yang diperlukan agar sistem politik dapat berjalan dengan baik. Kesepakatan ini menyangkut sasaran yang akan dicapai oleh sistem politik menyangkut siapa yang akan mengatur dan mengendalikan pencapaian sasaran tersebut.<sup>60</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi politik berhubungan dengan sebuah consensus tentang sasaran yang akan dicapai oleh sebuah sistem politik menyangkut siapa yang mengatur dan mengendalikan pencapaian sasaran tersebut. Di sini dibutuhkan sebuah lembaga politik yang kuat dan mampu lahir sebagai alat integratif dari sebuah keragaman yang ada. Akan tetapi, jika lembaga politik yang ada tidak mampu mengintegrasikan berbagai elemen tersebut, maka terbuka peluang adanya konflik berupa dominasi kebudayaan kelompok dominan dan terpinggirkannya kelompok minoritas. Kondisi ini mendorong semakin kuatnya keinginan untuk memisahkan diri dan membuka peluang bagi terjadinya disintegrasi. Selain itu, salah satu kendala integrasi adalah adanya *gap* antara elit dan massa di bawahnya.

Mengutip pendapat Shils, Ake menjelaskan bahwa satu faktor yang menyebabkan adanya *gap* elit dan massa adalah *parochialism*.<sup>61</sup> Sikap sempit atau picik itu dapat menimbulkan aliensi di kedua belah pihak. Sering kali strata elit yang biasanya "tinggi" secara sosio ekonomi dan budaya akan sulit mendekati masyarakat yang masih "rendah". Untuk itu dibutuhkan adanya suatu "jembatan" yang menghubungkan elit dan masyarakat. Shils menambahkan, jembatan yang baik untuk menghubungkan keduanya adalah pemimpin karismatik. Akan tetapi pemimpin tipe itu tidak mudah ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengembangan inisiatif. Cara ini:

*"demands a profound social and psychological transformation of the masses. The masses are to be transformed from passive, overdependent, and fatalistic*

<sup>59</sup> Ibid., hlm. 7.

<sup>60</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>61</sup> Lihat Claude Ake, *A Theory of Political Integration* (Illionis: The Dorsey Press, 1967), h. 71.

*subjects of authority to articulate, independent-minded, and dynamic citizens.*<sup>62</sup>

Kemenangan beberapa tokoh GAM dalam pilkada 2006 lalu di Aceh dapat disebutkan sebagai salah satu bentuk transformasi massa yang lebih independen. Ada dua pilihan besar dalam menyelesaikan konflik, yaitu dengan kekerasan atau dengan cara damai. Penyelesaian konflik dengan kekerasan, termasuk yang melibatkan penggunaan senjata pada dasarnya dapat ditransformasikan kedalam resolusi konflik dengan cara damai. Ada tiga proses yang dibutuhkan dalam transformasi ini, yaitu *demobilisasi*, *disarmament*, dan *reintegrasi*.<sup>63</sup> ISS mendefinisikan *demobilisasi* sebagai sebuah proses yang terencana dimana jumlah personel angkatan bersenjata dan dalam struktur komando militer dikurangi secara signifikan. Ini meliputi pengurangan jumlah militer reguler dan pasukan-pasukan paramiliter serta pembubaran pasukan-pasukan pemberontak. Sedangkan *disarmament* adalah salah satu inti dari proses mobilisasi. Proses ini meliputi pengumpulan, pengawasan dan pemusnahan senapan-senapan ringan, amunisi, bahan peledak dan senjata ringan serta berat dari para kombatan, sebagaimana dari penduduk sipil. *Disarmament* ini sangat penting sebagai usaha membangun saling kepercayaan untuk meningkatkan stabilitas, terutama di tengah masyarakat yang penuh tekanan dan kekhawatiran bahwa mereka sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran serangan dari pihak lawan. Proses berikutnya adalah proses reintegrasi.

Terminologi reintegrasi dalam konteks tertentu dapat saja menjadi sesuatu yang kontroversial, terutama menyangkut posisi pihak-pihak yang terlibat. Subyek reintegrasi, dalam konteks konflik di Aceh adalah mantan anggota GAM, adalah mereka yang ada diluar masyarakat yang "normal" dan harus dibawa kembali kedalam masyarakat. Untuk masuk kedalam masyarakat, mantan anggota GAM harus menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pihak yang benar. Posisi ini yang sering kali ditolak oleh mantan kombatan, karena mereka merasa bahwa mereka sudah terintegrasi

<sup>62</sup> Ibid., h. 74.

<sup>63</sup> [http://www.iss.co.za/static/templates/tmpl\\_html.php?node\\_id=42&link\\_id=25](http://www.iss.co.za/static/templates/tmpl_html.php?node_id=42&link_id=25), diakses pada 25 Maret 2007. Dalam MoU Helsinki tidak menggunakan istilah *disarmament*, tetapi *decommissioning*

dengan masyarakat dan tidak membutuhkan sebuah proses reintegrasi atau tidak sepakat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.

Menghindari kontroversi tersebut, Brian Gormally merumuskan sebuah definisi yang longgar mengenai reintegrasi sebagai rangkaian proses, didasarkan pada konsep sebuah perdamaian yang inklusif, yang dirancang untuk meningkatkan kesempatan bagi mantan kombatan untuk memainkan bagian yang utuh dalam sebuah masyarakat baru yang hendak dibangun pasca konflik.<sup>64</sup> Dalam konteks Aceh isi MoU Helsinki menunjukkan bahwa tidak ada persoalan antara pemerintah RI dan GAM mengenai definisi reintegrasi. Kedua belah pihak sepakat bahwa, sebagai bagian dari proses perdamaian, mantan anggota GAM dan tahanan politik perlu diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sepenuhnya.

Reintegrasi adalah sebuah proses yang kompleks yang meliputi transisi ekonomi, politik, sosial dan psikologi dari kehidupan militer ke dalam kehidupan sipil. Kompleksnya cakupan transisi tersebut menyebabkan reintegrasi, berupa proses untuk menjadi sipil sepenuhnya, menjadi proses yang membutuhkan waktu lama. *Reintegrasi ekonomi* adalah proses yang memberikan para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi kemandirian keuangan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup diri mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungannya melalui kegiatan produksi atau pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Reintegrasi ekonomi seringkali sulit untuk dicapai di masyarakat yang kondisi ekonominya kurang baik. *Reintegrasi politik* adalah proses yang memberikan jalan bagi para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi untuk memperoleh kesempatan ikut serta dalam kehidupan politik komunitasnya, seperti menjadi anggota atau pengurus organisasi sipil dan sebagainya.<sup>65</sup>

*Reintegrasi social* adalah proses yang mendorong para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi dan keluarga mereka menyadari bahwa diri mereka adalah bagian dan diterima oleh komunitas dimana mereka tinggal dan masyarakat secara lebih luas. Sikap komunitas terhadap mantan kombatan ini

---

<sup>64</sup> Brian Gormally, *Conversion from War to Peace: Reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland* (Bonn: BICC, 2001), h. 11.

<sup>65</sup> [http://www.iss.co.za/static/templates/tmpl\\_html.php?node\\_id=42&link\\_id=25](http://www.iss.co.za/static/templates/tmpl_html.php?node_id=42&link_id=25), diakses pada 25 Maret 2007.

biasanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap peran historis yang dijalankan oleh mantan kombatan sebelumnya. *Reintegrasi psikologis* adalah proses dimana para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi melakukan penyesuaian diri dari gaya hidup militer, yang secara umum teratur secara hirarkis mengikuti garis komando dan pengawasan, ke dalam kehidupan yang lebih fleksibel ala warga sipil.<sup>66</sup>

Perbedaan antara aspek politik dan aspek sosial-ekonomi diatas tidak sepenuhnya bersifat *exhaustive*, karena jelas bahwa keberhasilan dalam reintegrasi social-ekonomi akan berpengaruh pada proses politik. Demikian pula sebaliknya, karena semua proses pada dasarnya adalah politik, dimana tidak ada satupun keputusan menyangkut pendanaan, pengawasan, dan sebagainya dari proses reintegrasi yang terlepas dari konteks dan konsekuensi politik. Perbedaan antara aspek politik dan aspek lain dari reintegrasi semata-mata disebabkan dual hal. *Pertama*, pembedaan tersebut ditujukan guna memberikan penekanan pada reintegrasi politik sebagai bagian mendasar (*essential part*) dari proses perdamaian yang menyeluruh. *Kedua*, pembedaan juga dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa reintegrasi social-ekonomi tidak dapat dipahami semata-mata dalam terminologi teknis, melainkan terkait dengan aspek politik.<sup>67</sup>

Perbedaan antara aspek politik dan social-ekonomi juga tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan aspek lainnya. Semua aspek tersebut merupakan prasyarat utama yang dibutuhkan bagi keberhasilan reintegrasi. Tentu saja, demikian luasnya cakupan proses reintegrasi membuat proses tersebut sangat mungkin tidak sepenuhnya berhasil atau bahkan gagal sama sekali. Ada kalanya dimana proses reintegrasi berhasil pada aspek tertentu, tapi gagal dalam aspek lain. Kesepakatan untuk melibatkan bekas kombatan dalam proses politik akan menjadi sia-sia jika mereka secara social-ekonomi masih menjadi entitas yang terpisah. Secara ekonomi, keberhasilan reintegrasi ditentukan ada tidaknya hambatan bagi mantan kombatan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi, seperti diterapkannya perbedaan status atau kesempatan dengan kelompok masyarakat lain. Juga akan timbul persoalan jika mereka diberikan kesempatan bersaing sementara mereka tidak dibekali persiapan, baik keahlian maupun modal.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Gormaly, *op cit.*, h. 16-17



Bagaimanapun, mereka mempunyai pengalaman terpisah dari kehidupan normal masyarakat dalam jangka waktu tertentu, sehingga mungkin mereka tidak memiliki disiplin dan keahlian kerja yang dibutuhkan untuk dapat bersaing. Bantuan sementara pemerintah yang tidak disertai proses pemberdayaan di sisi lain juga menimbulkan persoalan berupa munculnya ketergantungan mantan kombatan tersebut. Kebutuhan reintegrasi juga menyangkut persoalan akomodasi seperti tempat tinggal, keluarga serta psikologis.<sup>68</sup>

Menurut Erin McCandless, seperti dikutip Sean Byrner, resolusi konflik yang mengedepankan cara damai memberikan fokus pada bagaimana, apa dan siapa yang mentransformasikan lembaga, isu-isu penting, struktur, dan hubungan untuk membangun budaya perdamaian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terkait dengan siapa saja yang harus terdapat dalam proses tersebut, Byrner menyebutkan bahwa transformasi meliputi upaya menyatukan potensi pemimpin-pemimpin pada level menengah dan para pengikutnya dengan membangun pendekatan-pendekatan yang ditujukan pada pembentukan hubungan. Dengan demikian, semua pemangku kepentingan kunci harus terlibat dalam proses negosiasi dan penciptaan perdamaian. Hal ini diperlukan agar terbangun kesalingpercayaan yang dibutuhkan untuk mentransformasikan struktur yang ada dan menerpa sebuah *civil culture* yang baru.<sup>69</sup>

##### 5. Pilkada 2006 Sebagai Proses Transformasi Konflik

Pelaksanaan pemilihan langsung kepala daerah untuk Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Aceh dan 19 bupati/wakil bupati/wali kota/wakil wali kota secara serentak dilaksanakan pada 11 Desember 2006. Pilkada Aceh 2006, menjadi model baru bagi demokrasi politik di Indonesia.<sup>70</sup> Sejumlah lembaga internasional ikut memantau jalannya pelaksanaan pilkada itu, antara lain European Union Election Observation Mission (EUEOM), Asian Network for Free Election (ANFREL), International Republican Institute (IRI), National

<sup>68</sup> Ibid., hlm. 19-24

<sup>69</sup> Sean Byrner, "Transformational Conflict Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001), h. 4.

<sup>70</sup> Pendapat Prof. Baktiar Aly, P.hd dalam Acara Semiloka Forum Masyarakat Aceh Se-Jawa (Fomaja), "Politik Ekonomi Aceh, Pasca Pilkada 2006". Di Horizon Hotel Bandung, Sabtu 27 Januari 2008. Pendapat serupa juga dapat akses dalam Warta KAMABA Edisi 04-Tahun XXIX Februari-April 2007.

Democratic Institute (NDI), Pemerintah Amerika Serikat (AS), Local Government Support Program (LGSP), Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilihan (KIPP), Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh, Aceh International Recovery Program, I-Card dan lain-lain.

Rakyat Aceh telah melakukan salah satu kewajibannya sebagai warga negara dengan menggunakan hak politiknya dalam pilkada pada 11 Desember 2006 lalu, ini dilakukan untuk memilih sepasang tokoh untuk mendapat kepercayaan dan bertanggungjawab secara penuh dari rakyat dalam menjalankan roda pemerintahan Aceh yang baru. Berbagai analisis dan prediksi banyak pihak, proses pelaksanaan pilkada Aceh tergolong rawan dengan berbagai potensi konflik. Namun, di luar dugaan kita semua, pelaksanaan pilkada di Aceh berlangsung dengan sukses yaitu damai, demokratis dan aman. Proses ini telah menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta politik lokal. Kemenangan rakyat ini dapat dijadikan barometer yang jelas sejauh mana komitmen pemimpin Aceh dalam mengimplementasikan semua program, visi, misi tentang arah kebijakan Aceh yang telah dijanjikan pada saat kampanye guna membangun kerja-kerja positif dalam percepatan pembangunan Aceh pasca Tsunami dan konflik bersenjata.

Irwandi Yusuf - M.Nazar memenangi Pilkada langsung Aceh pada 11 Desember 2006. Mereka dilantik sebagai gubernur dan wagub Aceh oleh Mendagri pada 8 Februari 2007. Data Sekretariat Desk Pilkada Propinsi NAD menunjukkan perolehan suara sejumlah pasangan kandidat gubernur/wagub dalam pilkada Aceh yaitu: 1) Ir. H. Ir. H.Iskandar Hoesin - MH, Drs. H. Saleh Manaf 5,54 %; 2) H. Tamlicha Ali - Tgk. Harmen Nuriqmar 3, 99 %; 3) Drs. H. A. Malik Raden, MM, H - Sayed Fuad Zakaria, SE; 4) Drs. Ahmad Humam Hamid, MA - Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si<sup>71</sup> 16,62 %; 5) M. Djali Yusuf - Drs. H.R.A. Syaukas Rahmatillah, MA 3,26 %; 6) Drh. Irwandi Yusuf, M.Sc - Muhammad Nazar, S. Ag 38,2 %; 7) Ir. Azwar Abubakar, MM - M. Nasir Jamil,

<sup>71</sup> Pasangan ini yang mendapat dukungan/restu dari 'GAM internasional'. Menurut penulis, GAM sekarang ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: 1) GAM lokal yang saat ini berkuasa di Aceh; 2) GAM internasional; 3) GAM yang baru saja kembali dari Malaysia; 4) GAM *grass-roots* yang tidak termasuk dalam skema reintegrasi sehingga tidak mendapat jatah dana reintegrasi.

S.Ag 10,61 % dan 8) Drs. H. Ghazali Abas Adan - Drs. Shalahuddin Al-Fata 7,8 %.<sup>72</sup>

Tiga orang tercatat sebagai anggota atau simpatisan GAM, yakni Hasbi Abdullah, Irwandi Yusuf, dan Shalahuddin Al-Fata. Namun, kalau dilihat, nama-nama lain juga tidak kalah terkenalnya, seperti Muhammad Nazar dan Ghazali Abbas Adan. Satu mantan petinggi militer yang ikut terjun adalah Djali Yusuf. Basis dukungan terhadap kedelapan pasangan calon itu juga beragam. Mengapa Irwandi Yusuf dan M. Nazar yang notabene merupakan perwakilan GAM menjadi pemenang dan bukan pasangan kolaborasi Humam Hamid dan Hasbi Abdullah dari perwakilan RI dan GAM yang menjadi pemenang? Dapat diamati bahwa baik massa GAM maupun sebagian besar masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam sudah lelah terhadap pemimpin-pemimpin Aceh yang hanya berani berjanji di saat kampanye, namun minim realisasi di lapangan. Sejak Aceh diselubungi kemelut konflik bersenjata, tidak ada satupun kebijakan dari pemimpin daerah yang mampu menyelesaikan persoalan Aceh sampai ke akar-akarnya. Mulai dari persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi, pelanggaran HAM, pengelolaan sumber daya alam, reintegrasi GAM, sampai dengan persoalan-persoalan pasca Tsunami.

Menyadari adanya penolakan di kalangan komandan lapangan, Malik Mahmud (perdana menteri, nama lengkapnya Khila Malik Haythar bin Mahmud) pernah mengundang seluruh pimpinan wilayah untuk bertemu pada Agustus 2006 lalu. Dalam pertemuan itu, Muzakkir secara mengejutkan membuat pengumuman yang mengarahkan dukungan GAM kepada Humam-Hasbi. Tindakan Muzakkir ini disebut-sebut atas suruhan seniornya, Zakaria Saman yang juga dikenal dengan nama panggilan Karim Bangkok. Tak pelak, soal ini yang belakangan lebih ramai dipersoalkan ketimbang latar belakang Hasbi dan Humam sendiri. Kalangan muda menilai kalangan senior GAM cenderung tak demokratis.

Menarik untuk dicermati bahwa, setelah sempat menyatakan dukungan terhadap bakal calon gubernur Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, Komite Peralihan Aceh Gerakan Aceh Merdeka, melalui Ketua Komite Peralihan Pusat Muzakkir Manaf, mencabut dukungannya terhadap calon tersebut. Dengan

<sup>72</sup> Data sekretariat Desk Pilkada Prov. NAD, Banda Aceh, 2006.

demikian, komite peralihan mengambil posisi netral dalam pemilihan kepala daerah yang dilangsungkan pada 11 Desember 2006.<sup>73</sup> Sebelum pencabutan tersebut, terdapat dua representasi orang Gerakan Aceh Merdeka dalam pencalonan, yaitu Humam-Hasbi dan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar. Pasangan terakhir berlaga lewat jalur independen. Meskipun pasangan terakhir ini tidak secara resmi dicalonkan Komite Peralihan Aceh GAM, keikutsertaan pasangan tersebut sempat membuat pendukung GAM terlihat berbeda pendapat. Dengan pencabutan dukungan itu, "perpecahan" dalam tubuh GAM tersebut dapat diselesaikan. Dengan langkah tersebut, GAM secara institusional tidak turut serta dalam pilkada. Alasan yang dikemukakan Komite Peralihan GAM adalah Komite ingin masyarakat tak bimbang dalam menentukan pilihan.

Dengan langkah tersebut, GAM menampilkan "tarian politik" yang amat menarik. Secara institusional, mereka menyatakan diri tidak ikut dalam pilkada. Namun, secara perorangan mereka menancapkan dukungan di dua kaki. Fenomena ini amat menarik mengingat dulu GAM begitu bersemangat dengan ide partai lokal. Ide yang dapat ditafsirkan sebagai wujud ambisi GAM secara institusional untuk memenangi kursi kekuasaan secara demokratis di Aceh. Mereka tampak sekali amat berharap setelah berakhirnya konflik kekerasan, akan dapat meraih kekuasaan secara damai. Penyebabnya, bagi bekas organisasi perlawanan ini, pilkada merupakan taruhan. Taruhan yang sekaligus ajang pembuktian. Apakah eksistensi mereka benar-benar mengakar di tengah-tengah masyarakat Aceh. Apakah "perjuangan" mereka beberapa waktu lalu benar-benar atas dukungan masyarakat Aceh. Konsekuensi ini yang kiranya menjadi pertimbangan para petinggi GAM dalam memutuskan ketakikutsertaannya secara institusional dalam pilkada. Apabila mereka mengusung partai sendiri, katakanlah "Partai" GAM, taruhannya terlalu besar. Tidak hanya taruhan bagi partai beserta pasangan calon yang diusungnya, tapi bagi seluruh perjuangan GAM yang sudah dilakukan selama 30 tahun. Jika Partai GAM meraih kemenangan, memang mereka akan menjadi penguasa di Aceh. Dengan kemenangan itu, mereka bisa mengarahkan masa depan Aceh seperti yang diinginkannya. Selain itu, mereka akan dapat membuktikan bahwa "perjuangan" selama ini memang berdasarkan

---

<sup>73</sup> Serambi Indonesia, 31 Mei 2006, GAM bidik Pemilu 2009

aspirasi dan keinginan masyarakat Aceh. Namun, jika kalah, tidak hanya partai baru dan pasangan calon yang diusungnya tersebut yang menderita kekalahan, tapi seluruh "perjuangan" GAM akan menjadi tidak ada artinya. Dunia akan melihat bahwa GAM ternyata tidak didukung rakyat Aceh. Padahal GAM selama ini selalu mengklaim bahwa perjuangannya demi rakyat Aceh. Tampaknya, setelah mencermati kemungkinan terakhir ini, para petinggi GAM bersepakat tidak mengikutsertakan institusi GAM dalam pilkada, bahkan akhirnya mengambil posisi netral. Mereka kelihatannya menilai bahwa probabilitas munculnya "kekalahan" cukup besar. Ini akan berakibat pada delegitimasi organisasi itu di mata masyarakat Aceh, Indonesia, dan dunia.

GAM menyasiasi ketidakikutsertaannya dalam persaingan dengan cara membebaskan kader-kadernya berlaga secara perorangan. Maka muncullah Irwandi Yusuf di satu "kaki" dan Hasbi Abdullah di "kaki" yang lain. Dengan langkah ini, jika salah satu kadernya memenangi persaingan, dengan sendirinya GAM akan masuk ke kekuasaan. Sementara itu, jika keduanya kalah, GAM tidak terkena akibat buruk. Strategi ini sungguh cantik, tidak menghilangkan peluang, tapi tidak memberikan risiko. Apalagi dengan diambilnya posisi netral, perbedaan pendapat dalam tubuh GAM dapat terselesaikan. Mereka tidak bersaing langsung di pilkada tersebut sehingga tidak ada risiko kehilangan alasan landasan "perjuangan". Secara institusi, mereka tidak akan mengalami kekalahan.

Keputusan inilah yang merupakan pilihan paling aman bagi eksistensi dan kehormatan GAM. Pilihan ini juga perlu diambil mengingat berakhirnya konflik di Bumi Serambi Mekkah ini masih relatif baru sehingga memori masyarakat akan kejamnya konflik yang baru saja selesai masih segar. Strategi yang dilancarkan GAM ini amat baik bagi kelangsungan perdamaian dan demokrasi di Aceh. Langkah resmi GAM ini juga dapat meredam para anggotanya dari perbuatan melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Langkah GAM ini akan membuat situasi politik menjadi amat kondusif. Dapat dibayangkan jika GAM mengambil langkah-langkah ceroboh, langsung ikut serta dalam pilkada sehingga menderita kekalahan, konflik bisa meletus kembali. Kekalahan dalam pilkada kali ini bagi para anggota GAM akan berarti hilangnya martabat dan kehormatan. Kondisi ini akan berujung pada meledaknya amarah. Hal inilah yang harus dicegah.

Menurut Malek Mahmud Al Haytar, salah satu petinggi GAM, mencalonkan diri dalam pemilihan kepala pemerintahan di Aceh itu bukanlah tujuan GAM. Tujuannya adalah, apabila GAM sudah siap menjadi partai politik lokal, maka kami akan mencalonkan diri pada pemilu mendatang yang akan berlangsung pada 2009.<sup>74</sup> Keputusan yang diambil GAM sudah sangat demokratis, dimana masyarakat bebas memilih siapa saja.

Menurut Bakhtiar, alasan GAM untuk tidak ambil bagian dalam Pilkada, lebih karena ingin memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Aceh untuk menentukan sendiri calon yang dianggap layak untuk menjadi kepala pemerintahan di Aceh. "Sesuai dengan spirit MoU, semua rakyat Aceh yang merasa berkemampuan untuk berpartisipasi bisa mencalonkan diri secara bebas. Sesuai dengan MoU juga, semua rakyat Aceh mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepala pemerintahan Aceh nanti. Walaupun tak maju dalam Pilkada, sebagai stakeholder, GAM tetap akan eksis dalam proses transformasi. Munawarliza juga menyatakan, keputusan untuk tidak maju dalam Pilkada kali ini adalah keputusan final dari GAM sebagai suatu organisasi. Kendatipun GAM tak melibatkan diri dalam masalah Pilkada, namun GAM akan tetap akan merestui semua calon independen dari anggotanya asalkan maju atas nama pribadi, bukan organisasi. Pilkada 2006 juga dapat diukur dari dua hal. *Pertama*, kedamaian prosesnya. *Kedua*, penerimaan atas siapapun yang kalah atau yang menang. Ketika tokoh dari GAM/KPA menang, kunci suksesnya bukanlah terletak pada kemenangan *an sich*, melainkan bagaimana menjalankan pemerintahan. Daya dukung publik akan dengan cepat menurun, apabila pemerintahan yang dijalankan tidak memenuhi harapan publik, terutama dalam kepiawaian sebagai seorang administratur dan birokrat, pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Pemilu 2006 di Aceh dianggap paling demokratis yang berlangsung damai.

---

<sup>74</sup> Dalam sebuah acara konferensi pers di kantor Komite Peralihan Aceh (KPA) Lamdingin Banda Aceh, bersama beberapa wartawan dan penulis sendiri, senin 29 Mei 2005. Juga dapat di akses berita pada tanggal 30 Mei 2005 di harian serambi Indonesia.

## 6. Partai lokal, Pemilu 2009 Sebagai Proses Transformasi Konflik

Keberadaan parlok telah mewarnai konstelasi politik Aceh dan bagaimana pemerintahan nasional menghadapi pemerintahan Aceh pasca-pemilu. Sebab, tidak semua masalah Aceh diselesaikan di tanah Aceh sendiri, melainkan masuk ke dalam sistem politik nasional. Bagaimanapun, Nota Kesepahaman (MoU) ataupun UU No. 11/2006 adalah bagian dari kebijakan politik nasional, sekalipun dorongan dan masukan dari unsur-unsur masyarakat Aceh juga tidak bisa diabaikan dan signifikan. Masa depan Aceh akan tercermin dari sukses atau tidaknya serta hasil pemilu legislatif Aceh 2009.

Secara teoritis, partai politik berperan sebagai sarana untuk mengoperasionalkan fungsi-fungsi politik, seperti sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi dan agregasi kepentingan politik masyarakat. Fungsi-fungsi ini terkait dengan kedudukan partai politik sebagai salah satu penghuni sistem politik. Sistem politik sendiri menurut pendekatan Fungsional Estonian terdiri dari dua sub-sistem yaitu, infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Dalam pengertian sederhana, infrastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di tingkat masyarakat yang mencerminkan dinamika organisasi sosial politik di luar pemerintahan. Sementara suprastruktur politik merupakan suasana kehidupan politik di dalam pemerintahan dan berkaitan dengan peran dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan.<sup>75</sup> Kehidupan yang demokratis sendiri menurut Urofsky (2002;31)<sup>76</sup> ditandai dengan adanya pemilihan pemimpin secara bebas oleh warga negara dengan cara terbuka dan jujur. Oleh karena itu, pilkada langsung Aceh selain membawa angin demokrasi bagi masyarakat Aceh, juga menambah pengalaman politik luar biasa yang bisa dicapai setelah sekian lama hidup dalam konflik.

Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang

<sup>75</sup> [http://www.acehinstitut.org/m\\_rizwan\\_partai\\_lokal\\_dan\\_masa\\_depan\\_Partai\\_Nasional\\_27/6/2007](http://www.acehinstitut.org/m_rizwan_partai_lokal_dan_masa_depan_Partai_Nasional_27/6/2007), diakses 10/5/2008

<sup>76</sup> Urofsky, Melvin. *Prinsip-prinsip dasar Demokrasi dalam politik, demokrasi dan manajemen komunikasi*. (Yogyakarta; Galang Press, tahun 2002)

dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005.<sup>77</sup> Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK-DPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kepesertaan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. Hadirnya 12 dan hanya 6 yang lolos verifikasi parpol lokal di wilayah yang hanya dihuni empat juta jiwa penduduk menunjukkan adanya dinamika politik yang cukup tinggi dalam mengartikulasikan kepentingan melalui jalur formal. Kehadiran partai untuk memperebutkan 2,2 juta suara yang berhak memilih<sup>78</sup> juga menjadi bukti adanya upaya membuka diri untuk memperebutkan kekuasaan politik secara sah.

Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan. Kesempatan yang dapat mengakhiri transisi politik dan menguncinya dalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Definisi partai politik lokal dalam PP menyebutkan bahwa sifatnya memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh, tetapi tidak lepas dari koridor NKRI. Parpol lokal dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan parpol nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Parpol lokal hanya memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh. Meskipun demikian, tentu tidak mungkin mengabaikan moral historis parpol lokal sebagai perpanjangan jiwa kepentingan rakyat Aceh

---

<sup>77</sup> <http://opini.bebas.epajak.org/politi/partai-politik-lokal-710/> Teuku Kemal Fasya 'Partai Lokal', diakses 7 Juni 2008

<sup>78</sup> Sesuai dengan data Pemilihan Pilkada 2006



yang lama berada dalam era ketertindasan.<sup>79</sup> Ada aspek psikologis dan sosiobiologis masyarakat Aceh yang berbeda dengan masyarakat lain, terutama karena Aceh pernah dicap bertahun-tahun sebagai tanah pemberontakan. Berhadapan dengan situasi ini, parpol lokal yang hadir juga harus mampu menjadi representasi organik dari keinginan masyarakat Aceh.<sup>80</sup>

Pesan politik memang selalu membaruh, tetapi ia terikat dengan basis ideologis yang tidak mudah lekang. Untuk daerah Aceh, identitas keislaman, kemelayuan, ketertindasan, dan keacehan harus mampu diakomodasi secara baik dalam platform dan ideologi kepartaian dan bukan hanya dalam slogan. Parpol yang paling mampu mengakomodasi kepentingan rakyat Aceh secara benarlah yang akan merebut hati dan keinginan rakyat. Basis ideologis tentang ketertindasan dan trauma nasionalisme harus mampu dioperasionalisasi melalui gerakan politik yang masif seperti gerakan GAM di masa lalu sehingga membesar dan sulit dikalahkan. Namun saat ini "ideologi ketertindasan" merupakan tangkupan yang bebas, yang bisa dimaknai oleh parpol mana pun, tidak hanya Partai GAM (yang sudah tiga kali berganti nama dan terakhir dengan nama Partai Aceh). Ketertindasan saat ini tidak lagi oleh kekerasan militer, tetapi oleh politisasi bantuan kemanusiaan yang menguntungkan elite dan organisasi global, kemiskinan, kesempatan yang tidak merata antara masyarakat perkampungan dan perkotaan, kesenjangan masyarakat pedalaman dan pesisir, dan sebagainya.

Dengan berbagai peluang yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwa parpol lokal akan kembali mengungguli parpol nasional seperti kemenangan telak yang diperoleh calon independen saat pilkada lalu. Jika itu terjadi, kemenangan yang diperoleh bukan hanya kemenangan politis yang memberi kongsi kekuasaan, tetapi juga kemenangan ideologis yang membebaskan Aceh dari segala bentuk *inferioritas* dan keterasingan dari bingkai NKRI.<sup>81</sup> Untuk partai GAM, dapat digambarkan bahwa rumusan yang berlawanan dengan optimisme kerasionalan manusia itu dipadatkan dalam kalimat berikut, "Aku memilih maka aku ada".

<sup>79</sup> Baca analisis (Kompas) jum'at 6/6/2008 rubrik Politik dan Hukum hlm,5 "Menimbang Keikutsertaan Parpol Lokal".

<sup>80</sup> <http://opinibebas.epajak.org/politi/partai-politik-lokal-710/...>, partai lokal

<sup>81</sup> Pendapat Kamaruddin Hasan yang dikemukakan dalam Workshop tentang "Perdamaian Abadi untuk Aceh" (mahasiswa dan pemuda Aceh se Jadebotabek – Peusaka Maja I) oleh Wisma Foba Jakarta di Rudian Hotel Cisarua Bogor, 19-20 April 2008.

Tugas membuat pilihan ini ada pada setiap manusia, dan berlangsung dalam proses pergulatan batin untuk menentukan sebuah keputusan atau pilihan hidup. Otentisitas manusia hanya dapat diraih dalam keberaniannya untuk membuat keputusan dan pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Nietzsche, seorang filsuf Jerman abad ke-19, pernah menulis bahwa jika saya mengetahui mengapa saya hidup, maka saya akan bertahan dalam semua keadaan. Mengapa itu adalah tujuan hidup yang membuat saya mampu bertahan dalam semua gejolak kehidupan.<sup>82</sup>

### 7. Transformasi GAM Sebagai Proses Komunikasi Antarbudaya

Dalam komunikasi antar budaya ada dua konsep penting bersumber dari istilah komunikasi dan budaya. Banyak definisi komunikasi yang telah ditulis oleh pakar komunikasi. Di antaranya adalah Ruben dan Stewart, komunikasi manusia adalah suatu proses dimana individu di dalam berhubungan, group, organisasi, dan masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi di suatu lingkungan satu sama lain (Ruben & Stewart, 2006: 17). Atau menurut Samovar & Porter (2001: p.22) komunikasi adalah kemampuan kita untuk membagi gagasan dan perasaan yang merupakan dasar dari kontak manusia. Wilbur Schramm menyatakan bahwa komunikasi sebagai suatu proses berbagi (*sharing process*) dengan penjelasan bahwa istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communis* yang berarti umum (*common*) atau bersama. Dengan demikian apabila kita berkomunikasi sebenarnya kita tengah berusaha menumbuhkan suatu kebersamaan (*commonness*) dengan seseorang. Kita berusaha berbagi informasi, ide atau sikap (Suprpto, 2006:5). Seperti halnya komunikasi, budaya juga memiliki konsep lentur, elastis, dinamis yang menyediakan ruang bagi bermacam-macam makna, tergantung perspektif orang yang melihatnya. Kroeber dan Kluckhohn (1952) mengidentifikasi lebih dari 160 definisi budaya. Istilah budaya berasal dari kata latin *cultura* atau *cultus*, sebagaimana yang ditemukan dalam agri *cultura* yang berarti kultivasi tanah. Dari akar kata yang berarti suatu aktivitas atau terkultivasi (Ting-Toomey, 1999:9). Dalam buku "Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak" disebutkan bahwa definisi budaya sebagai "kebiasaan dan nilai-nilai tertentu yang diakui secara umum oleh suatu

<sup>82</sup> Samuel, Hanneman Dr, 1993. Perspektif Sosiologi Peter Berger (Diktat: UI)

masyarakat yang tinggal di suatu tempat tertentu. Budaya merupakan produk kolektif atau produk bersama yang menghasilkan suatu ukuran dan rangkaian tindakan yang dipakai sebagai acuan untuk menilai tindakan orang lain.” Dengan demikian jelaslah bahwa budaya tidak statis melainkan senantiasa berubah karena pengaruh berbagai kekuatan internal dan eksternal (Fisher, Simon, *et.al*, 2001: 41).

Studi tentang budaya bervariasi antara studi tentang arsitektur dan lanskap eksternal sampai studi tentang prinsip dan nilai-nilai implisit dari suatu komunikasi atau kelompok budaya. Namun, untuk tujuan studi komunikasi, kita batasi dengan definisi yang mengandung tema yang terjadi kembali dari bagaimana budaya dan komunikasi dihubungkan satu sama lain. Meski pun budaya bukan merupakan satu-satunya faktor penentu di dalam kehidupan manusia, tetapi bagaimana seseorang bertindak, bagaimana berkomunikasi secara efektif dan dapat diterima lingkungan, dipelajari di dalam budaya, bagaimana manusia mengekspresikan dirinya, perasaannya, bagaimana ia berpikir, dan seterusnya, tercakup di dalam budayanya. Pengaruh budaya terhadap komunikasi dapat diringkas dalam pernyataan sederhana, yaitu apa yang dikatakan seseorang dan bagaimana mengatakan sebagian besar ditentukan oleh budayanya. Menurut Stella Ting-Toomey, komunikasi antar budaya didefinisikan sebagai proses pertukaran simbol, di mana individu-individu dari dua atau lebih komunitas budaya yang berbeda bertemu untuk saling berbagi makna dalam suatu situasi yang interaktif (Ting-Toomey, 1999: 16).

Samovar & Porter (2004) menyebutkan bahwa komunikasi antar budaya terjadi bilamana seorang anggota dari suatu budaya menghasilkan suatu pesan untuk dikonsumsi oleh anggota dari budaya lain. Selanjutnya komunikasi antar budaya pun berlangsung bilamana faktor-faktor keanggotaan kelompok budaya mempengaruhi proses komunikasi, baik pada tingkat kesadaran maupun ketidaksadaran manusia. Dengan demikian nampak jelas bahwa penekanan komunikasi antar budaya ada pada perbedaan budaya yaitu sebagai faktor penentu dalam berlangsungnya proses komunikasi.

Menurut Kim persoalan terpenting di dalam komunikasi antarbudaya yang membedakannya dari bidang lain adalah adanya perbedaan yang signifikan atau

relatif tinggi di dalam latar belakang pengalaman dari para komunikator yang disebabkan karena perbedaan-perbedaan budaya. Asumsi dasar dari pernyataan ini adalah bahwa individu yang berasal dari budaya yang sama, umumnya memiliki kesamaan (homogenitas) yang lebih besar di dalam keseluruhan latar belakang pengalamannya, dibanding dengan mereka yang berasal dari budaya yang berbeda. Jadi komunikasi antarbudaya mengacu pada fenomena-fenomena di mana partisipannya memiliki latar belakang budaya yang berbeda, masuk ke dalam kontak langsung maupun tidak langsung terhadap satu sama lain. Titik perhatian utama dari komunikasi antarbudaya bukanlah pada persamaan atau perbedaan dalam karakteristik budaya di antara pelaku-pelaku komunikasi melainkan fokus utamanya adalah pada proses komunikasi yang berlangsung dalam pertemuan tersebut. Maka konsep terpenting adalah kontak dan komunikasi merupakan ciri yang membedakan studi komunikasi antarbudaya dari studi-studi antropologi dan psikologi lintas budaya (Sunarwinadi: hal 8). Menjalinkan komunikasi antarbudaya bukanlah persoalan sederhana. Lewis & Slade (1994) menguraikan tiga kawasan yang paling problematik dalam lingkup pertukaran antarbudaya, yaitu kendala bahasa, perbedaan nilai, dan perbedaan pola perilaku kultural (Rahardjo, 2005: 54-55). Sehingga dibutuhkan adaptasi dari masing-masing pelaku komunikasi antarbudaya tersebut.

Dalam hubungannya dengan proses budaya komunikasi yang ditujukan kepada orang atau kelompok lain adalah sebuah pertukaran budaya. Dalam proses tersebut terkandung unsur-unsur kebudayaan, salah satunya adalah bahasa, sedangkan bahasa adalah alat komunikasi. Dengan demikian, komunikasi juga disebut sebagai proses budaya. Koentjaraningrat (dalam Nurudin, 2004) menyatakan kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Dari definisi tersebut layak diamati bahwa dalam kebudayaan itu ada; gagasan, budi dan karya manusia; gagasan dan karya manusia itu akan menjadi kebudayaan setelah sebelumnya dibiasakan dengan belajar. Memandang kebudayaan hanya dari segi hasil karyanya adalah tidak tepat. Demikian juga melihat sesuatu hanya dari gagasan manusia juga terlalu sempit. Dengan kata lain, kebudayaan menemukan bentuknya jika dipahami secara keseluruhan.

Dalam mempraktekkan komunikasi manusia membutuhkan peralatan-peralatan tertentu. Secara minimal komunikasi membutuhkan sarana berbicara seperti mulut, bibir dan hal-hal yang berkaitan dengan bunyi ujaran. Ada kalanya dibutuhkan tangan dan anggota tubuh lain (komunikasi non verbal) untuk mendukung komunikasi lisan. Ditinjau secara lebih luas dengan penyebaran komunikasi yang lebih luas pula, maka digunakanlah peralatan komunikasi massa seperti televisi, surat kabar, radio dan lain-lain. Komunikasi menghasilkan mata pencaharian hidup manusia. Komunikasi yang dilakukan lewat televisi misalnya membutuhkan orang yang digaji untuk "mengurusi" televisi. Sistem kemasyarakatan menjadi bagian tak terpisahkan dari komunikasi, misalnya sistem hukum komunikasi. Sebab, komunikasi akan efektif manakala diatur dalam sebuah regulasi agar tidak melanggar norma-norma masyarakat. Dalam bidang pers, dibutuhkan jaminan kepastian hukum agar terwujud kebebasan pers. Namun, kebebasan pers juga tak serta merta dikembangkan di luar norma masyarakat. Di sinilah perlunya sistem hukum komunikasi. Komunikasi akan menemukan bentuknya secara lebih baik manakala menggunakan bahasa sebagai alat penyampai pesan kepada orang lain. Wujud banyaknya bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi menunjukkan bahwa bahasa sebagai isi atau wujud dari komunikasi.

Bagaimana penggunaan bahasa yang efektif, memakai bahasa apa, siapa yang menjadi sasaran adalah manifestasi dari komunikasi sebagai proses budaya. Termasuk di sini juga ada manifestasi komunikasi sebagai proses kesenian misalnya, di televisi ada seni gerak (drama, sinetron, film) atau seni suara (menyanyi, dialog). Sistem pengetahuan atau ilmu pengetahuan merupakan substansi yang tak lepas dari komunikasi. Bagaimana mungkin suatu komunikasi akan berlangsung menarik dan dialogis tanpa ada dukungan ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan ini juga termasuk ilmu tentang berbicara dan menyampaikan pendapat. Bukti bahwa masing-masing pribadi berbeda dalam penyampaian, gaya, pengetahuan yang dimiliki menunjukkan realitas tersebut. Komunikasi sebagai proses budaya tak bisa dipungkiri menjadi obyektivasi antara budaya dengan komunikasi. Proses ini meliputi peran dan pengaruh komunikasi dalam proses budaya. Komunikasi adalah proses budaya karena di dalamnya ada proses seperti

layaknya sebuah proses kebudayaan, punya wujud dan isi serta kompleks keseluruhan. Sesuatu dikatakan komunikasi jika ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kebudayaan juga hanya bisa disebut kebudayaan jika ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya yang membentuk sebuah sistem.

Adaptasi digunakan untuk merujuk proses dinamis oleh tiap individu terhadap relokasi atas lingkungan budaya lain, membangun (atau membangun kembali) dan memelihara kestabilan, timbal-balik dan hubungan fungsional dengan lingkungannya. Adaptasi selalu membentuk kompromi (Gudykunst & Mody, 2002:259). Pada intinya semua proses adaptasi terletak pada aktifitas komunikasi yang menghubungkan pendatang baru pada lingkungan baru. Proses adaptasi pada budaya baru yang tidak dikenal merupakan dasar sebuah perjalanan perubahan personal dimana pendatang yang bersosialisasi dalam satu budaya (*enculturation*) membuka jalan ke dalam budaya lain. Proses adaptasi merupakan perangkat gerakan, dan akan berlanjut selama mereka tetap dalam kontak langsung dengan lingkungan. Secara bertahap dan tidak kelihatan, pendatang mendapatkan dan menyerap pembelajaran baru (*acculturation*) seperti halnya menanggihkan dan tidak mempelajari beberapa perilaku lama (*deculturation*), sehingga terus melaju menuju peningkatan kecocokan dan akhirnya berasimilasi dalam masyarakat lokal (Gudykunst, 1997:335).

Konsep transformasi tidak dapat dilepaskan dari situasi yang melibatkan proses adaptasi dalam komunikasi antar budaya. Taft (1977) menyebutkan ada lima situasi dimana individu berada dalam proses adaptasi lintas budaya. Lima situasi itu adalah: *sojourning*, *settling*, *subculture mobility*, *segregation* dan yang terakhir adalah perubahan dalam masyarakat. Dijelaskan juga bahwa *sojourning* dan *settling* meliputi mobilitas secara geografis, sedang *subculture mobility*, *segregation* dan perubahan dalam masyarakat tidak meliputi mobilitas secara geografis (Gudykunst, 1997: 335). Semua yang melibatkan situasi dari hasil perpindahan ke lokasi baru memerlukan penyesuaian. Misalnya mantan kombatan yang kembali ke dalam masyarakat sipil, pertemuan pelajar internasional, pasukan perdamaian, karyawan perusahaan asing, missionaries, personel militer yang ditempatkan di negara asing, diplomat, orang-orang yang bekerja di luar negeri, termasuk imigran dan pengungsi baik yang secara sukarela atau terpaksa pindah

ke negara lain untuk memulai kehidupan baru. Juga orang yang berpindah dari desa ke kota besar atau sebaliknya. Mereka semua berada dalam suatu situasi yang memerlukan adanya suatu derajat penyesuaian lintas budaya.

Kemampuan komunikasi yang dimiliki, pada gilirannya menyiapkan seperangkat bantuan dalam beradaptasi yang membantu pendatang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan personal mereka. Melalui komunikasi yang efektif, pendatang mampu meningkatkan kontrol atas perilaku mereka sendiri terhadap lingkungan lokal (Gudykunst dan Kim, 1997: p. 339). Dalam hal ini keefektifan komunikasi lebih dilihat sebagai upaya meminimalisir kesalahpahaman pada saat orang dari kebudayaan-kebudayaan berbeda saling berkomunikasi.

Berkaitan dengan studi-studi di atas Kim (1988, 1995, 2001) menyarankan suatu cara untuk memahami kebiasaan-kebiasaan di dalam adaptasi yang tidak memfokuskan pada lamanya waktu tetapi pada sejumlah besar kemudahan adaptasi (atau rintangan adaptasi) dari faktor-faktor kecenderungan individu di lingkungan yang baru dan kegiatan komunikasi antara mereka dengan lingkungannya. Model yang ada memasukkan faktor-faktor seperti psikologikal atau karakteristik personal, perilaku berkomunikasi atau *skill*, pengembangan hubungan interpersonal atau *prefelence* atau keefektifan dan karakteristik demografi. Untuk memperkirakan tingkatan adaptasi pendatang yang melintasi budaya kolektif dan individualistik, Gudykunst (1995) menerapkan tiga konsep inti yaitu: 1). Kecemasan, 2). Ketidakpastian dan 3). *Mindfulness*, (Gudykunst dan Maudy, 200 : p. 266).

Identitas dikemukakan oleh Sheldon Stryker (1980). Teori ini memusatkan perhatiannya pada hubungan saling mempengaruhi di antara individu dengan struktur sosial yang lebih besar lagi (masyarakat). Individu dan masyarakat dipandang sebagai dua sisi dari satu mata uang. Seseorang dibentuk oleh interaksi, namun struktur sosial membentuk interaksi. Dalam hal ini Stryker tampaknya setuju dengan perspektif struktural, khususnya teori peran. Namun dia juga memberi sedikit kritik terhadap teori peran yang menurutnya terlampau tidak peka terhadap kreativitas individu. Teori Stryker mengkombinasikan konsep peran (dari teori peran) dan konsep diri/self (dari teori interaksi simbolis). Bagi setiap peran

yang kita tampilkan dalam berinteraksi dengan orang lain, kita mempunyai definisi tentang diri kita sendiri yang berbeda dengan diri orang lain, yang oleh Stryker dinamakan "identitas". Jika kita memiliki banyak peran, maka kita memiliki banyak identitas. Perilaku kita dalam suatu bentuk interaksi, dipengaruhi oleh harapan peran dan identitas diri kita, begitu juga perilaku pihak yang berinteraksi dengan kita. Intinya, teori interaksi simbolis dan identitas mendudukan individu sebagai pihak yang aktif dalam menetapkan perilakunya dan membangun harapan-harapan sosial. Perspektif interaksionis tidak menyangkal adanya pengaruh struktur sosial, namun jika hanya struktur sosial saja yang dilihat untuk menjelaskan perilaku sosial, maka hal tersebut kurang memadai.

Krisis identitas pada dasarnya merupakan bagian dari perbincangan tentang teori identitas atau, lebih tepatnya, teori identitas sosial (*social identity theory*). Teori identitas sosial berpendapat bahwa gejala-gejala identitas sosial berbeda dengan gejala identitas pribadi. Identitas sosial berhubungan dengan perilaku kelompok yang berkaitan dengan motivasi dan artikulasi seseorang terhadap perilaku dan harapan-harapan masyarakat sekitarnya. Teori Identitas sosial juga berpendapat bahwa masyarakat itu terdiri atas berbagai kelompok yang satu sama lain memiliki pola hubungan dan kekuatan yang berbeda-beda. Seseorang pada suatu kelompok kemudian menilai dirinya dalam konsep, dan meletakkan dirinya dalam posisi-posisi tertentu yang memadukan antara harapan peran dirinya dalam masyarakat dan harapan masyarakat terhadap dirinya. Karena itu, seseorang boleh jadi memiliki identitas sosial yang beragam (*multi-faceted*) pada waktu yang sama karena beragamnya perannya dalam masyarakat, dan beragamnya harapan masyarakat di mana dia menjadi anggotanya, bahkan saling bertentangan satu sama lain. Akibatnya, seringkali seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak sanggup merumuskan identitas dirinya secara tepat, atau tidak sanggup memenuhi harapan perannya, atau memenuhi harapan masyarakatnya. Ketika hal ini terjadi, inilah yang disebut oleh sebagian ahli sebagai krisis identitas.

Biasanya pemahaman tentang teori identitas mengacu kepada perspektif interaksi-simbolik struktural (*structural symbolic-interactionism*) tentang perilaku



pilihan peran (*role choice behavior*). Asumsi teori *symbolic-interactionism* mengatakan bahwa kehidupan manusia itu bukanlah sekedar kumpulan perbuatan yang merupakan reaksi terhadap lingkungannya, melainkan ia adalah aktor aktif dalam kehidupannya karena adanya pilihan-pilihan di hadapannya. Pada waktu yang sama, teori identitas juga mengakui adanya keterbatasan pilihan manusia itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena adanya ikatan struktur sosial dan interaksi sosial.

Peran identitas juga mempengaruhi cara kita berkomunikasi dengan orang asing. Kita belajar mengenai perilaku apa yang diharapkan dalam membedakan peran saat kita melebur ke dalam budaya dan keanggotaan kelompok tersebut. Peran tergantung pada macam budayanya, adalah suatu keharusan bagi kita untuk mengetahui peran ekspektasi orang asing jika kita ingin memahami dan memprediksi secara akurat perilaku mereka. Variabel yang termasuk ke dalam pengaruh sosiokultural adalah variabel yang tercakup dalam proses perwujudan *tatanan sosial*. Salah satunya adalah tatanan personal, yang merupakan proses yang memberikan stabilitas dalam proses-proses psikologikal. Variabel yang mempengaruhi komunikasi dengan orang yang asing, misalnya termasuk pembentukan stereotipe dan sikap terhadap kelompok orang yang asing (misal: etnosentrisme, dan prasangka). Pengaruh atas pengharapan dalam interpretasi atas perilaku orang yang asing disalurkan melalui ketidakpastian dan kecemasan yang dialami. Komunikasi kita dengan orang asing dipengaruhi oleh kebudayaan kita dan keanggotaan kelompok yang kita bentuk dalam kebudayaan. Menguji pengaruh keanggotaan dalam kelompok sosial, identitas sosial dan hubungan peranan pada komunikasi dengan orang asing. Masing-masing faktor dipengaruhi oleh kebudayaan dan masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Keanggotaan dalam kelompok, sebagai contoh, pengaruh-pengaruh identitas sosial dan bagaimana kita melihat pada peranan kita dalam hubungan tersebut. Memulai dengan melihat pada keanggotaan kita dalam kelompok sosial.

Identitas sosial kita merupakan komponen terpenting konsep-diri yang mempengaruhi komunikasi kita dengan orang lain. Tajfel (1978) mengatakan bahwa kita mendefinisikan diri kita sesuai dengan dunia dimana kita berada. Salah satu alat kognitif utama yang digunakan adalah kategorisasi sosial, yaitu aturan

dalam lingkungan sosial dimana cara pengelompokan seseorang sesuai dengan individu tersebut (Tajfel, 1978). Untuk mengelola kecemasan dan ketidakpastian yang dialami, maka pelaku komunikasi harus sadar (*mindful*) akan komunikasi yang dilakukannya. Kebanyakan perilaku komunikasi yang dilakukan, merupakan kebiasaan (*habitual*). Saat melakukan komunikasi secara habitual, maka pelaku komunikasi mengikuti skenario yang ada. (Abelson, 1976).

Selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan memperbaiki citra jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial (kelompok, masyarakat) maka upaya mencapai identitas sosial positif dicapai melalui 1) mobilitas sosial dan 2) perubahan sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. Namun demikian jika peluang untuk mobilitas sosial tidak ada, maka kelompok bawah akan berusaha meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan menggeser statusnya ke tingkat lebih atas. Kalau kemungkinan menggeser ke posisi lebih atas tidak ada, maka usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan citra mengenai kelompok agar kesannya tidak terlalu jelek. (Hogg dan Abram, 1988; Sarwono, 1999).

## BAB III METODOLOGI

### I. METODE PENELITIAN

#### 1.1 Metode Penelitian Kualitatif

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana diungkapkan Sudikan (dalam Bungin 2003:53) yaitu salah satu rangkaian ilmiah baik untuk keperluan mengumpulkan data ataupun untuk menarik kesimpulan dari gejala-gejala tertentu. Arikunto (2002:136) menyebutkan, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Sedangkan menurut Seohartono (2000:9) metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Sebagaimana dikatakan Immanuel Kant (dalam Mulyana, 2001:19) bahwa manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu : "Dunia Fenomena dan noumena. Dunia *fenomena* adalah dunia yang kita alami dengan panca indera dan terbuka bagi peneliti ilmiah karena rasional. Sains meneliti dunia fenomena-dunia alami (natural world) dan nalar (reason) mengarahkan pengamatan itu. Dunia *noumena* tidak bisa didekati dengan dunia empiris karena bukan hal yang fisik atau empiris. Kedua bentuk itu terpisah setelah ada batas yang harus disadari oleh pikiran manusia. Lebih lanjut Immanuel Kant menjelaskan sebagai fenomena. Manusia terkait hukum-hukum alam, terbuka bagi penyelidikan ilmu pengetahuan dan pada sebab alami. Sebaliknya manusia juga noumena, karena punya jiwa, paling tidak sebagian dari manusia memiliki kemauan bebas". Menurut Nasution yang dikutip oleh Sugiono (2005: 60-61):

*"Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalahnya, focus, penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya".*

Dari uraian diatas, maka peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif yang mengasumsikan bahwa manusia bersifat dinamis, aktif, kreatif, cair dan memiliki kemauan bebas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif

diharapkan diperoleh data/informasi mendalam tentang subjek penelitian. Pertimbangan penggunaan metode kualitatif adalah berkaitan dengan tujuan penelitian, ingin mendapat gambaran dan menginterpretasikan realitas proses transformasi konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca MoU. Transformasi yang mulai dari proses komunikasi-dialog RI-GAM, proses reintegrasi, dinamika perubahan dari GAM ke KPA, transformasi politik dalam pilkada 2006, pembentukan partai lokal (PA), perjuangan memperebutkan parlemen Aceh dalam pemilu 2009. Dan bagaimana komunikasi dalam konteks budaya yang terjadi pasca MoU Helsinki berperan meminimalisir kendala-kendala dalam proses transformasi konflik Aceh.

Sedangkan strategi penelitian ini menggunakan studi kasus tentang realitas Proses transformasi konflik Mantan Gerakan Aceh Merdeka. Metode kualitatif secara khusus menghasilkan kekayaan data yang rinci. Data kualitatif menyediakan kedalaman dan kerincian melalui pengutipan secara langsung dan menginterpretasikan-mendeskripsikan yang teliti tentang situasi, kejadian, orang, interaksi, dan perilaku yang teramati melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian (Patton, 2006: p.5-6).

Untuk lebih mendapatkan akurasi data, peneliti melakukan observasi dilapangan di Aceh dan Jakarta. Observasi dilakukan dengan mengikuti dan menyaksikan sendiri bagaimana para informan yaitu mantan kombatan yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) maupun Partai Aceh (PA), pengurus BRA, aktifis, tokoh masyarakat, intelektual/akademisi baik di Aceh maupun di Jakarta dalam mengkonstruksikan realitas proses transformasi konflik mantan GAM Pasca MoU. Penelitian yang dibimbing oleh metode kualitatif didefinisikan sebagai: "Suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah". Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Peneliti menginterpretasikan

bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian dilakukan dalam latar (*setting*) yang alamiah (*naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan. Pandangan Cresswell (1994), Denzin & Lincoln (1994), Guba & Lincoln (1994), dan Moustyan (1995) (dalam Neuman, 1997:14), bahwa model kualitatif bercirikan mengkonstruksi realitas sosial, makna budaya, berfokus pada proses interaksi dan peristiwa-peristiwa, keaslian merupakan kunci, nilai hadir dan nyata (tidak bebas nilai), terikat pada situasi (terikat pada konteks), terdiri dari beberapa kasus atau subjek, bersifat analisis tematik dan peneliti terlibat.

### 2.1 Paradigma Penelitian

Paradigma berguna untuk memandu peneliti selama melakukan proses penelitian. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruksionisme (*constructionism*) atau sering disebut juga *Interpretivism* yang mana seluruh elemennya meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus menggunakan ruh konstruksionis. Konstruksionisme yang didasarkan pada teori sosiologi kritis Peter L. Berger dan Erving Goffman ini sering disebut dengan paradigma produksi atau pertukaran makna. Asumsi ontologis pada paradigma konstruktivisme adalah bersifat relatif. Artinya, realitas sosial dan suatu masalah yang diteliti merupakan realitas sosial buatan yang memiliki unsur relativitas yang cukup tinggi dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Asumsi *epistemologis* dalam pendekatan ini bersifat subjektif-dialektikal. Artinya pemahaman atau temuan suatu realitas yang terdapat di dalam proses transformasi konflik merupakan hasil dari penalaran peneliti secara subjektif dan sebagai hasil kreatif peneliti dalam membentuk realitas. Asumsi *aksiologis* dalam paradigma ini adalah peneliti bertindak sebagai *passionate participant*, yakni berperan sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Ada empat asumsi yang melekat pada pendekatan konstruksionis. *Pertama*, dunia ini tidaklah tampak nyata secara objektif pada pengamat, tetapi diketahui melalui pengalaman yang umumnya dipengaruhi oleh bahasa. *Kedua*, kategori linguistik yang dipergunakan untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori ini muncul dari interaksi sosial dalam kelompok orang pada waktu dan

tempat tertentu. *Ketiga*, bagaimana realitas tertentu dipahami pada waktu tertentu dan ditentukan oleh konvensi komunikasi yang berlaku pada waktu itu, karena itu, stabilitas dan instabilitas pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial ketimbang realitas objektif di luar pengalaman. *Keempat*, pemahaman realitas yang terbentuk secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas.<sup>83</sup> Paradigma ini memandang komunikasi sebagai suatu proses produksi dan pertukaran makna. Dua hal yang menjadi karakteristik penting dari paradigma ini adalah politik pemaknaan dan proses seseorang membuat gambaran tentang realitas dan komunikasi sebagai sebuah kegiatan yang dinamis (Eriyanto, 2002:40). Paradigma konstruksionis memperhatikan interaksi kedua pihak, komunikator dan komunikan, untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan.

Peter L. Berger dalam Eriyanto (2002:15) menyampaikan pendapat yang menarik tentang konstruksi sosial atas realitas. Baginya, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, atau diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Hasilnya adalah wajah plural dari realitas itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tiap individu dalam mengonstruksi realitas. Tiap orang memiliki *frame of reference* dan *field of experience* yang berbeda-beda, sehingga mereka secara bebas memaknai suatu hal dan mengonstruksi realitas yang mereka inginkan berdasarkan kerangka berpikir masing-masing. Konstruksi realitas yang dihasilkan memiliki dasar tertentu yang menyebabkan mereka meyakini kebenaran dari konstruksi tersebut. Berbagai konstruksi realitas yang dibuat individu menghasilkan konstruksi sosial atas realitas tertentu. Selain itu, konstruksi sosial bersifat dinamis. Di dalamnya terjadi proses dialektis antara realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif berkaitan dengan interpretasi dan pemaknaan tiap individu terhadap suatu objek. Hasil dari relasi antara objek dan individu menghasilkan penafsiran, yang berbeda-beda berdasarkan beraneka ragam latar belakang individu tersebut. Dimensi objektif

---

<sup>83</sup> Stephen P. Littlejohn, *Theories of Human Communication, Fifth Edition*, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1996), hlm. 179-180, dalam Eriyanto, op. cit, hlm 40-41.

dari realitas berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang ada di luar objek, seperti norma, aturan, atau stimulan tertentu yang menggerakkan objek.

Menurut Eriyanto (2002), penelitian yang menggunakan paradigma konstruksionis memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (a) Penelitian bertujuan untuk menentukan realitas yang terjadi sebagai hasil dari interaksi antara peneliti an objek penelitian. (b) Peneliti menempatkan diri sebagai fasilitator dari keberagaman pemaknaan yang ada, dengan melibatkan dirinya dengan realitas yang diteliti. (c) Makna yang dihasilkan dari suatu teks merupakan hasil negosiasi antara teks tersebut dengan peneliti. (d) Pemahaman tentang suatu realitas, atau hasil penelitian, merupakan hasil interaksi antara peneliti dan objek penelitian (bersifat transaksionalis). (e) Subjektivitas peneliti menjadi dasar dari proses analisis. (f) Empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan teks sangat ditekankan dalam rekonstruksi realitas yang diteliti. (g) Kualitas penelitian dilihat dari sejauh mana peneliti mampu menyerap dan mengerti bagaimana individu atau objek mengkonstruksi realitas.

Jika kita lihat dari perspektif paradigma konstruksionisme, maka dalam menyelesaikan proses transformasi konflik Aceh, individu-individu juga berperan penting selain, struktur seperti negara, hukum, Undang-Undang, organisasi internasional, NGO, dan lain-lain. Justru dalam perspektif konstruksionisme individu memiliki peran yang signifikan di dalam menyelesaikan proses transformasi konflik di Aceh. Paradigma konstruktivis melihat bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksikan. Fenomena sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah dikonstruksikan. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam hal ini pula komunikasi dilihat sebagai faktor konstruksi itu sendiri. Dalam pandangan konstruksionis, para pihak yang terlibat dalam proses transformasi konflik Aceh juga dipandang sebagai aktor/agen konstruksi. Mereka juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, mereka turut mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka. Konstruksionisme atau konstruktivis dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap individu menafsirkan dan berperilaku menurut kategori-kategori kenseptual

dari pikirannya. Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuknya yang mentah melainkan ia harus disaring melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada (Littlejohn, 2002: 111-112). Penelitian kualitatif dinyatakan mengonstruksi realitas sosial, karena penelitian kualitatif berlandaskan paradigma Konstruktivisme atau konstruksionisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, ini berarti ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh rasio.

## II. SUBJEK PENELITIAN

Subjek penelitian ini adalah individu-individu yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) maupun yang terlibat dalam Partai Aceh (PA), yang notabene sebagai mantan kombatan GAM. Subjek penelitian juga pengurus BRA, tokoh masyarakat Aceh, aktifis, intelektual/akademisi baik di Aceh maupun Jakarta. Subjek penelitian menggunakan informan yang masih aktif baik dalam tubuh KPA/PA, BRA dan tokoh masyarakat Aceh, akademisi/intelektual dan aktifis baik di Aceh maupun Jakarta yang sampai dengan sekarang masih aktif memperjuangkan damai Aceh.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive* dengan memperhatikan tingkat pengetahuan yang dimiliki informan mengenai masalah penelitian. Namun penentuan informan tetap dibatasi, yaitu mereka yang masih aktif dalam memperjuangkan dan mempertahankan proses transformasi damai Aceh pasca MoU Helsinki. Hal ini dilakukan karena kondisi Aceh pasca konflik yang ditandai dengan MoU Helsinki, masih menyimpan persoalan besar yaitu proses transformasi mantan kombatan GAM, masyarakat korban maupun masyarakat Aceh secara keseluruhan. Masih membutuhkan penyelesaian menyeluruh dengan berbagai cara, termasuk penerapan komunikasi yang efektif (politik dan budaya) dan teori-teori transformasi dan resolusi konflik. Disisi lain, mantan kombatan, korban konflik masih ada rasa kecemasan dan keterasingan ketika proses transformasi, misalnya proses integrasi ke dalam masyarakat berlangsung. Data yang dibutuhkan dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer



diperoleh melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung. Sumber data tersebut yaitu:

1. Mantan kombatan GAM yang tergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA).
2. Mantan kombatan GAM yang sudah menjabat sebagai kepala daerah di Aceh.
3. Tokoh masyarakat baik di Aceh maupun di Jakarta.
4. Aktivis (Mahasiswa, pengamat, wartawan, intelektual/akademisi, dan NGO)

Selain data primer, penelitian ini juga membutuhkan data sekunder yang diambil dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan seperti buku-buku, klipng koran, majalah internet, peraturan pemerintah serta undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, serta *unpublished data* lembaga pemerintah maupun yang dimiliki informan. Data ini perlu sebagai pendukung utama informasi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung.

### III. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data yang dibutuhkan disini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap sejumlah informan serta melalui observasi berpartisipasi (*participant observation*). Data ini merupakan data utama yang akan dilakukan pengenalisan. Sementara data sekunder adalah data berupa buku-buku, dokumen, catatan, majalah, koran, internet, serta perangkat perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian. Tehnik atau prosedur yang dipakai peneliti, dalam mengumpulkan data adalah:

#### a. *Wawancara Mendalam (in-depth interview)*

Untuk melengkapi data penelitian khususnya dalam memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini akan melakukan wawancara dengan informan. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur mirip dengan percakapan informal (Mulyana, 2001:180-181). Wawancara jenis ini dilakukan karena bersifat luwes, susunan pertanyaan atau kata-kata dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi, termasuk karekateristik sosial-budaya responden yang dihadapi. Maksud mengadakan

wawancara menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2006:186) antara lain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, tuntunan, kepedulian, dan lain-lain. Wawancara juga dilakukan dengan maksud untuk memverifikasikan dan khususnya untuk menentukan keabsahan data.

b. *Participant Observasi*

Teknik pengamatan atau observasi berperan serta pengamatan yang dilakukan sambil sedikit banyak berperan serta. Menurut Denzin (1978:183) analisis dokumen, wawancara dengan responden dan informan, partisipasi dan observasi langsung atau intropeksi. Metode ini dilakukan karena lebih menekankan logika penemuan (*logic of discovery*), suatu proses yang bertujuan menyarankan konsep-konsep atau membangun teori berdasarkan realitas nyata manusia (Mulyana, 2001:167). Ringkasnya metode ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam. Teknik observasi ini dilakukan dengan menggunakan buku catatan guna memperoleh dan mencatat data yang mungkin muncul diluar dugaan.

c. *Analisis Dokumen*

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian dari berbagai sumber data yang bermamfaat untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. Menurut Schatzman dan Strauss (dalam Mulyana, 2001 : 195) bahwa dokumen merupakan bahan yang penting dalam penelitian kualitatif. Selain itu juga menurut mereka, sebagian dari metode lapangan (*field method*), peneliti dapat menggunakan dan menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen ini sering menjelaskan sebagian aspek dari situasi tersebut.

Data primer penelitian ini adalah data mengenai pengalaman informan selaku mantan kombatan GAM, BRA/FKK, tokoh-tokoh, intelektual/akademisi dan aktivis yang pernah dan sampai sekarang masih fokus dan konsern terhadap proses transformasi GAM. Bagaimana mereka melihat dan merasakan proses transformasi damai berjalan pasca MoU. Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang dilakukan dengan cara tatap muka langsung dan dilanjutkan melalui telepon, sms, email dan chatting. Wawancara

ada yang dilakukan ketika mereka berada di dalam ruangan kerja dan ada juga dicarikan tempat khusus mengingat yang dibicarakan menyangkut persoalan sensitive dan krusial. Melalui wawancara mendalam dan bertatap muka langsung sengaja dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara lengkap dan akurat. Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas memberikan jawaban mereka.

Selain data primer, data juga didapat dari hasil pengamatan langsung peneliti di Aceh maupun Jakarta, terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan proses transformasi tersebut. Dengan melihat dan mengamati serta merasakan langsung suasana Aceh pasca MoU diharapkan dapat menambah kedalaman data ketika menganalisa data informan dan penelitian ini menjadi lebih akurat. Data-data ini juga diperkaya dengan hasil pengamatan dari sejarah berdirinya GAM, proses reintegrasi, berubah nama menjadi KPA, proses keterlibatan dalam Pilkada 2006, dinamika partai lokal dengan nama Partai Aceh (PA), sampai dengan dinamika komunikasi politik dalam demokrasi Pemilu 2009.

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena metode penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan dan peran serta peneliti yang menentukan keseluruhan skenarionya. Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian bertujuan untuk mendapatkan data yang valid. Hal ini dapat dipenuhi karena peneliti langsung ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan serta dibekali dengan pengetahuan dan pengenalan terhadap lokasi penelitian.

#### IV. STRATEGI ANALISIS DATA

Analisis konstruksionis-interpretive, analisis ini dimaksudkan untuk dapat menghasilkan uraian mengenai bagaimana suatu pemahaman atau pemaknaan kolektif tertentu dapat memperoleh sifatnya yang kolektif. Data utama yang dianalisis di sini adalah data kualitatif berupa percakapan-percakapan. Berdasarkan faham Fenomenologi terbentuknya pengetahuan manusia terdapat dua hal yang pokok yaitu subjek yang ingin mengetahui dan objek yang akan

diketahui. Subjek dan objek ini dapat dibedakan secara jelas dan tegas, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya harus ada, keduanya merupakan satu kesatuan asasi bagi terwujudnya pengetahuan manusia. Oleh Sonny Keraf dan Mikhael Dua (2001: 19) dinyatakan: "Supaya ada pengetahuan, keduanya niscaya ada, yang satu tidak pernah ada tanpa yang lain.....". Pendapat ini juga sejalan dengan pendapat Merleau Ponty (*dalam Bertens, 1985: 345*) yang menyatakan: "Ia (fenomenologi) sangat menekankan hubungan dialektis antara subjek dan dunianya: tidak ada subjek tanpa dunia dan tidak ada dunia tanpa subjek". Oleh karena itu menurut Husserl agar terwujud pengetahuan, subjek harus terarah pada objek agar dapat diketahui sebagaimana adanya, sebaliknya objek harus terbuka kepada subjek agar dapat pula diketahui sebagaimana adanya.

Fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl (1859-1938) merupakan metoda untuk menjelaskan fenomena dalam kemurniannya. Fenomena adalah segala sesuatu yang dengan suatu cara tertentu tampil dalam kesadaran manusia. Baik berupa sesuatu sebagai hasil rekaan maupun berupa sesuatu yang nyata, yang berupa gagasan maupun berupa kenyataan (Husserl dalam Delfgaauw, 1988:105). Selanjutnya dikatakan yang penting ialah pengembangan suatu metoda yang tidak memalsukan fenomena, melainkan dapat mendeskripsikannya seperti penampilannya. Untuk tujuan itu fenomenolog hendaknya memusatkan perhatiannya kepada fenomena tersebut tanpa disertai prasangka sama sekali. Seorang fenomenolog hendaknya menanggalkan segenap teori, pranggapan serta prasangka, agar dapat memahami fenomena sebagaimana adanya.

Moleong menjelaskan bahwa fenomenologi tidak berasumsi bahwa peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti. Inkuiri fenomenologi dimulai dengan diam. Diam merupakan tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Peneliti berusaha untuk masuk dalam dunia konseptual para subjek yang ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka disekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari (Maleong, 2000:9). Littlejohn, 1996:204 menyebut "*phenomenology makes actual lived experience the basic data of reality*", fenomenologi menjadikan pengalaman hidup yang sesungguhnya sebagai data dasar dari realitas. Dengan mengutip

pendapat Richard E. Palmer, Littlejohn lebih jauh menjelaskan bahwa fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi nyata sebagaimana aslinya, tanpa memaksakan kategori-kategori peneliti terhadapnya. Seorang ilmuan yang 'obyektif' menghipnotiskan sebuah struktur tertentu dan kemudian memeriksa apakah struktur tersebut memang ada; seorang fenomenolog tidak pernah membuat hipotesis, tetapi menyelidiki dengan seksama pengalaman langsung yang sesungguhnya untuk melihat bagaimana tampaknya.

Analisis *fenomenologi*, seperti diungkapkan oleh Mulyana bahwa pendekatan fenomenologi termasuk pada pendekatan subjektif atau interpretatif (Mulyana, 2001:59), yang memandang manusia aktif, kontras dengan pendekatan objektif atau pendekatan behavioristik dan struktural yang berasumsi bahwa manusia itu pasif. Creswell (1998:52) lebih jauh menjelaskan bahwa secara filosofis, fenomenologi berasal dari pemikiran Edmund Husserl (1859-1938) yang kemudian dilanjutkan oleh Heidegger, Satre dan Merleau-Porty dan digunakan sebagai landasan pemikiran untuk melakukan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Menurut Maurice Natanson, istilah fenomenologi dapat digunakan sebagai istilah generik untuk merujuk kepada semua pandangan ilmu sosial yang *menempatkan kesadaran manusia dan makna subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial*, seperti pandangan Max Weber, Charles Harton Cooley, George Herbert Mead, William I. Thomas, juga pandangan Alfred Schutz, Georg Simmel, Herbert Blumer, Erving Goffman, Peter L. Berger, Thomas Lukmann dan pada derajat tertentu pada psikolog Carl Rogert, Abraham Maslow dan Erich Fromm (Mulyana, 2001:20-21).

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan. Ada beberapa alasan utama mengapa pendekatan kualitatif dianggap lebih tepat digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. *Pertama*, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami permasalahan yang timbul dari interaksi sosial dalam setting alamiahnya, dan menginterpretasikan fenomena ini berdasarkan pengamatan dan pemaknaan yang diberikan informan. *Kedua*, realita bersifat multidimensi dan merupakan akibat dari kompleksitas situasi yang beragam. Oleh karena itu, kajian terhadap sebuah fenomena harus dilakukan

dengan menganalisa konteks yang mengitarinya, dan ini hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

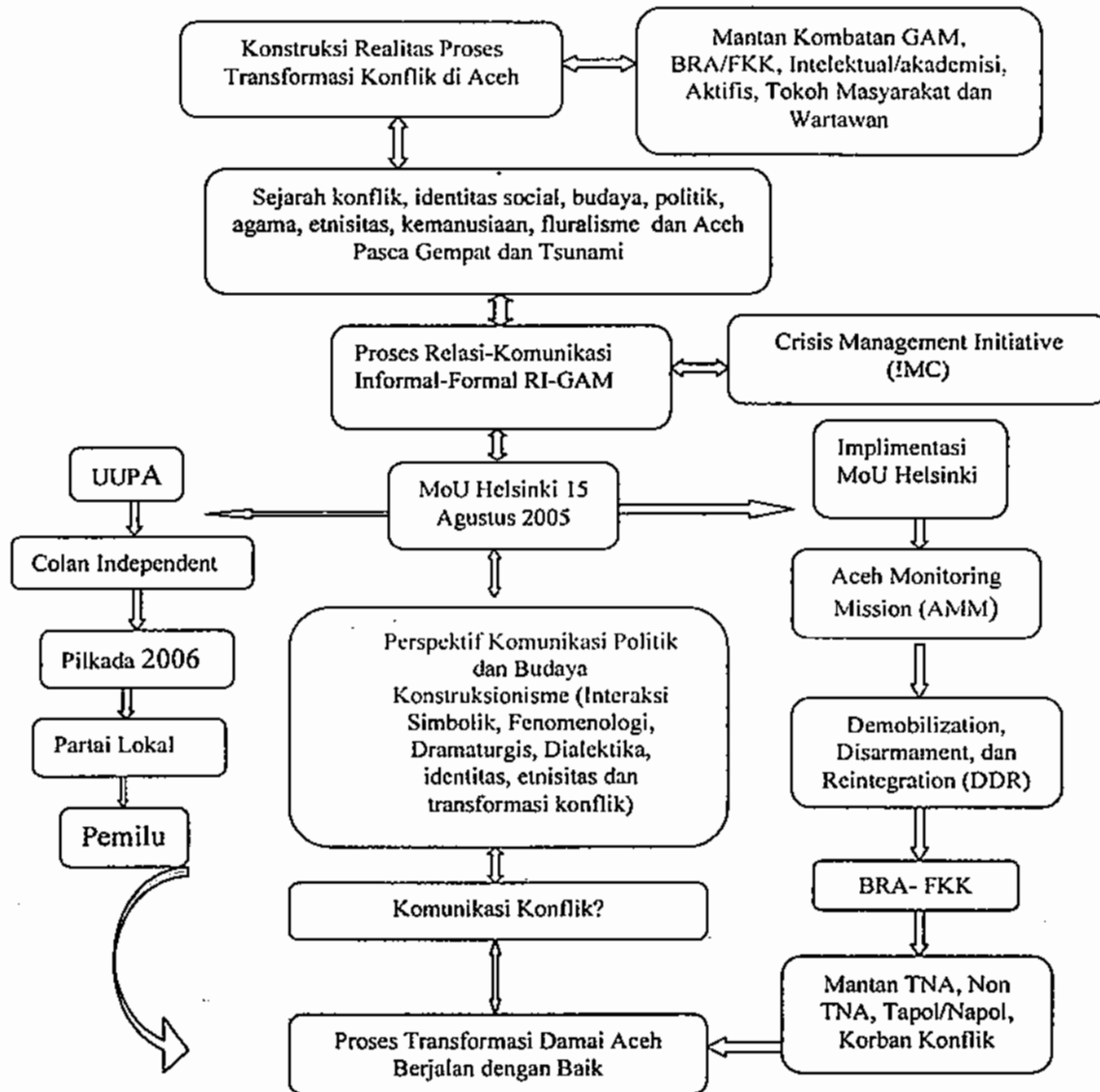
Penelitian ini juga tertuju pada pemecahan masalah yang ada dan bertujuan untuk melukiskan secara mendalam tentang realitas social, budaya dilapangan dalam proses transformasi konflik GAM pasca MoU. Berusaha menggambarkan dan menafsirkan data yang ada, sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya mengumpulkan dan menyusun data, tetapi juga menganalisis dan melakukan interpretasi terhadap data tersebut. Penelitian ini bergerak dari proses menjaring informasi dari kondisi yang ada dilihat dari sudut teoritis, maupun praktis sehingga lebih mengutamakan ketajaman analisis. Subjek penelitian ini adalah manusia, yang dinamis, artikulatif, lincah, dan memiliki kesadaran diri yang tinggi. Maka analisis yang menjamin asumsi itu tidak bias tidak haruslah menggunakan analisis interpretive-kualitatif. Tahap analisis data memegang peranan penting dalam penelitian kualitatif, sebagai factor utama penilaian kualitas penelitian. Kemampuan peneliti memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya memenuhi unsur reabilitas dan validitas atau tidak, sangat tergantung pada si peneliti. Penelitian kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal umum (tataran konsep).<sup>84</sup>

Strategi analisis data kualitatif-verifikatif merupakan sebuah upaya analisis induktif terhadap data penelitian yang dilakukan pada seluruh proses penelitian yang dilakukan. Format penelitian kualitatif-verifikatif mengkonstruksi format penelitian dan strategi untuk lebih awal memperoleh data sebanyak-banyak dilapangan, dengan mengesampingkan sementara peran teori.<sup>85</sup> Dengan demikian maka analisis- analisis data kualitatif cenderung menggunakan pendekatan logika induktif, dimana silogisme dibangun berdasarkan pada hal-hal khusus data dilapangan dan bermuara pada kesimpulan-kesimpulan umum.

---

<sup>84</sup> Rachmat, Kriyantono, *Tehnik praktis; riset komunikasi*. Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 192-193

<sup>85</sup> Prof. Dr.H. M. Burhan Bungin, S,Sos., M.Si, *Penelitian kualitatif; komunikasi, ekonomi, kebijakan public, dan Ilmu social lainnya*, Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 147

Gambar 3.1. Komponen Analisis Data Proses Transformasi Konflik di Aceh.<sup>86</sup>

<sup>86</sup> Model komponen Analisis data yang dikonstruksikan oleh informan terhadap proses transformasi Konflik yang sedang berlangsung di Aceh

## V. UNSUR-UNSUR VALIDITAS PENELITIAN

Penilaian kesahihan penelitian kualitatif biasanya terjadi sewaktu proses pengumpulan data dan analisis-interpretasi data (Kriyantono, 2006: 70-72). Berdasarkan penjelasan di atas maka keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan tiga cara, yaitu pemeriksaan kompetensi subyek penelitian, uji kebenaran dan kejujuran subyek dalam menyampaikan informasi (*trustworthiness*), dan pemeriksaan silang atas informasi dari subyek penelitian ke informan lain:

### 1. Kompetensi subjek penelitian

Informan sebagai subyek penelitian dipilih dengan batasan kriteria, yaitu mantan kombatan yang tergabung dalam KPA/PA, pengurus BRA/FKK, tokoh masyarakat, intelektual/akademisi, aktifis di Aceh maupun Jakarta. Melalui kriteria ini, informasi yang tidak memiliki pengalaman semasa konflik Aceh dianggap tidak kredibel sehingga diabaikan sebagai subyek penelitian.

### 2. Trustworthiness

*Trustworthiness* adalah menguji kebenaran dan kejujuran informasi yang disampaikan subjek (informan) mengenai apa yang mereka amati, alami selama proses transformasi dari konflik bersenjata menjadi perjuangan politik para mantan kombatan. Trustworthiness ini mencakup dua hal:

- a. *Authenticity*, yaitu memperluas konstruksi personal yang diungkapkan oleh subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti memberi kesempatan informan untuk mengungkap pengalaman mereka secara lebih mendalam dalam wawancara informal dan santai. Untuk memberi kebebasan pada informan dalam menceritakan pengalaman, pengamatan mereka.
- b. *Analisis Triangulasi*, yaitu menganalisis jawaban subjek penelitian dengan membandingkan dengan data empiris. Dalam hal ini jawaban subjek di cross-check dengan dokumen yang ada, antara lain:

*Triangulasi sumber*, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini informasi dan data yang diperoleh dari satu informan tentang pengalaman proses transformasi termasuk pengalaman ketidakpastian dan kecemasan yang mereka alami saat berinteraksi dalam masyarakat, dicek ulang lagi kepada beberapa informan lain.



*Triangulasi waktu*, mengingat perilaku manusia dapat berubah seiring berjalannya waktu, maka peneliti perlu mengadakan observasi lebih dari satu kali. Setelah wawancara dan observasi langsung di Aceh dan Jakarta sejak tahun 2006 dengan 2009. wawancara juga dilakukan melalui telepon, sms dan melalui sarana chatting internet. Sebagian wawancara tambahan juga dilakukan saat informan berada di Jakarta. Dengan wawancara ulang di periode waktu yang berbeda-beda ini diharapkan diperoleh data yang lebih valid.

### 3. Holic

Semua data yang diperoleh dari seorang informan di dialogkan dengan pendapat dan pandangan informan lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan titik temu antar data (*intersubjectivity agreement*).

Secara konseptual keabsahan data merupakan standart kepercayaan dari suatu penelitian. Moleong, (2005) dan Nasution (1996) menetapkan empat kriteria/teknik pemeriksaan data keabsahan data. Keempat kriteria tersebut adalah: *credibility* (derajat kepercayaan), *transferability* (keterkaitan), *dependability* (ketergantungan), *confirmability* (konfirmasi). Data yang sudah didapatkan perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi (Moleong, 2005:173). Teknik untuk mengukur tingkat kepercayaan data penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

#### a. Ketekunan Pengamatan

Penelitian mengamati dan mencermati secara lebu mendalam semua aspek-aspek yang diteliti, semua data yang diperoleh, dan wawancara yang dilakukan. Pengamatan didasarkan pada fokus penelitian ini. Sehingga setiap proses yang dilakukan dapat dilihat kredibilitasnya. Ini sangat membantu sekali terhadap keterbatasan waktu penelitian ini.

#### b. Triangulasi Data

Triangulasi adalah teknik yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Antar masing-masing metode pencarian data dilakukan perbandingan, misalnya antar hasil wawancara dengan pengamatan. Bisa juga antara pendapat seorang responden dengan responden lainnya.

c. *Diskusi dengan teman sejawat*

Hasil sementara penelitian ini terlebih dahulu didiskusikan dengan teman-teman sejawat, seperti teman kuliah atau pihak lain yang mengetahui tentang permasalahan yang diteliti, dimana akan terlihat hal-hal yang masih memerlukan penyempurnaan. Hal ini sangat membantu untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan data, sehingga penelitian ini mendapatkan keabsahan yang tinggi dan mampu menjawab permasalahan yang diteliti.

## VI. KETERBATASAN PENELITIAN

- a. Sifat penelitian ini tidak merefleksikan secara umum dan menyeluruh pengalaman informan seperti mantan kombatan GAM yang tergabung dalam KPA dan PA, BRA, tokoh masyarakat, Intelektual/akademisi, aktifis baik di Aceh maupun Jakarta, karena lingkup penelitian hanya informan yang masih aktif mengamati realitas proses transformasi konflik di Aceh.
- b. Mengingat penelitian ini dilakukan setelah perjanjian damai MoU Helsinki sudah berjalan hampir empat tahun maka kelemahan yang muncul adalah dalam konteks suasana, konsisi dan situasi Aceh ketika melakukan penelitian mengalami perubahan yang signifikan.
- c. Disisi lain karena dalam penelitian ini ingin menggambarkan dan menginterpretasikan realitas transformasi konflik Mantan Kombatan GAM sejak proses damai dimulai yang ditandai lahirnya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 sampai dengan proses transformasi dalam pemilu legeslatif 2009, maka menurut penulis semua fase-fase dalam transformasi tersebut mesti di analisis. Kelemahannya adalah antara lain banyaknya informasi dan bahan yang mesti ditampilkan, sehingga terkesan kurang fokus.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

### I. SEJARAH KONFLIK ACEH DAN PENYELESAIANNYA

Sejarah merupakan wacana yang selalu aktual. Sejarah tidak kenal kadaluarsa atau *expired*. Kecuali, jika sejarah dimanipulasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Yang diharamkan adalah masyarakat terlena dengan sejarah, jangan jadikan sejarah untuk meninabobokan rakyat.<sup>1</sup> Ketika kita menelusuri berbagai sumber, ternyata Aceh merupakan negara pertama di Asia Tenggara pada abad pertengahan yang sudah di kenal dan di Eropa. Tidak sedikit pembesar-pembesar Eropa berkunjung ke Aceh terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh juga telah menjalin hubungan kerjasama, relasi-komunikasi dan diplomatik dengan Turki pada dinasti Kesultanan Ottoman. Dari bahan-bahan perpustakaan luar negeri, Aceh menjadi menonjol pada masa Perang Aceh yang menghiasi media-media terkemuka di Eropa dan Amerika-Serikat. Bahkan Perang Aceh merupakan pemicu bangkitnya nasionalisme kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika dan Timur tengah lainnya melakukan perlawanan gigih mengusir kolonialisme dan imperialism Eropa.<sup>2</sup> Aceh mesti dilihat sebagai suatu identitas politik, hukum, sosial budaya dan ekonomi sudah lama terbentuk sejak awal abad ke XVI (1520 M). Yang ditandai terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayatsyah. Dua pilar yang mendasari dan mewarnai identitas masyarakat Aceh adalah Islam dan perdagangan. Masyarakat Aceh yang egaliter termasuk masyarakat ideal maritim yang tentunya amat berbeda dari ideal tipe masyarakat agraris.

Hasil wawancara, observasi, dokumen dan penelusuran penulis dari beberapa buku sejarah Aceh, Harry Kawilarang 2008, "Aceh dari Iskandar Muda Ke Helsinki", memaparkan kronologis sejarah Aceh secara sistematis. Mulai dari tahun 1350 ketika perang Pasai dengan Majapahit ketika Rajasanegara menguasai majapahit, perang tersebut dibawah kebijakan patih gajah mada.<sup>3</sup> Tahun 1513

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Harry Kawilarang, sekapur sirih " Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke helsinki, Bandar Publishing, 2008.

<sup>3</sup> Ada anggapan dalam masyarakat Aceh mengatakan Patih Gajah Mada meninggal di Aceh Timur yaitu di Manyapaet sekarang.

Aceh menjadi pusat perdagangan dan percaturan pedagang muslim dari Timur Tengah setelah Malaka dikuasai Portugis tahun 1512. Tahun 1514 Ali Mughayat Syah menjadi sultan Aceh pertama. Tahun 1520 Kesultanan Aceh menguasai seluruh pantai di Sumatera sepanjang selat Malaka. Tahun 1521 Portugis melakukan penyerangan terhadap Pasai, tahun 1537 Aceh menyerang Malaka untuk mengusir Portugis namun gagal. Pada 1552 Aceh mengirim utusan ke Sultan Ottoman di Istanbul untuk meminta bantuan melawan Portugis.

Pada Tahun 1607 Iskandar Muda menjadi Sultan Aceh yang mengakhiri konflik berkepanjangan. Tahun 1857 Aceh dan Belanda menandatangani perjanjian damai pencegahan pembajakan, namun pada tahun 1873 tepatnya 26 Maret Belanda menyatakan perang terhadap Aceh di Kapal perang Citadel Van Antwerpen dan tanggal 23 April Belanda menyerang Aceh namun Panglima Perang Belanda jenderal Kohler tewas tertembak pejuang Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman. Pada 25 Desember 1876 Belanda melakukan serangan ke dua namun tetap gagal. Perang Aceh-Belanda merupakan perang terlama dalam sejarah kolonial 1876-1896.

Pada Tahun 1939 tanggal 5 Mei para ulama mendirikan organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh dengan tujuan memperbaiki sistem pendidikan. Pada 12 Maret 1942 kekuasaan Belanda berakhir di Aceh karena perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Aceh. Pada tanggal 28 Maret Belanda menyerah kalah di Aceh.<sup>4</sup>

Tahun 1945 berkecamuk perang saudara di Aceh, 15 September Teuku Muhammad Daud Cumbok, putra ulee balang Gampong Cumpok menentang kemerdekaan RI di Aceh, kejadian ini dikenal dengan "Perang Cumbok". Pada 16 Juni 1948 Presiden Soekarno di Hotel Atjeh Kutaraja bersumpah atas nama Allah di depan masyarakat Aceh untuk memberikan hak-hak rakyat Aceh dan menyusun rumah tangga sesuai Syariat Islam. Tahun 1949 Rakyat Aceh melalui Daud Beureueh menggalang pengumpulan dana untuk membiayai pemerintah RI. Dalam dua hari terkumpul 500.000,- Dollar Amerika yang disalurkan 250.000 Dollar Amerika kepada angkatan Perang, 50.000 untuk perkantoran, 100.000

---

<sup>4</sup>Diolah dari berbagai sumber salah satunya Harry Kawilarang "Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki", Bandar Publiser Banda Aceh 2008, hlm. 1-2

untuk pengembalian pemerintah dari Yogyakarta ke Jakarta dan 1.000 kepada Pemerintah pusat melalui AA. Maramis. Kemudian Aceh mengumpulkan 5 kg emas untuk membeli obligasi pemerintah membiayai perwakilan RI di Singapura, pendirian Kedutaan Besar RI di India dan membeli dua pesawat terbang untuk transportasi pejabat RI. Namun demikian tanggal 23 Januari 1951 Perdana Menteri M. Natsir membacakan surat peleburan Propinsi Aceh ke Propinsi Sumatera Utara di RRI Banda Aceh. Tanggal 21 September 1953 Daud Beureueh memproklamkan Darul Islam setelah kongres ulama di Titeue Pidie.

Tanggal 4 Desember 1976 Hasan Tiro Mendeklarasikan Aceh Merdeka (AM) di Gunung Tjokka pada sabtu pagi Tiro Pidie. Tahun 1978-1982 ABRI menggelar "operasi Sadar", "Operasi Jeumpa", "Operasi Siwah" memburu anggota AM. Tahun 1986 sekitar 42 anggota Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) angkatan I mengikuti latihan militer di Kamp Tazura Libya. Bulan Mei tahun 1989 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan sandi Operasi Jaring Merah. Pada 17 Agustus 1998 Panglima ABRI Jenderal Wirando pada masa BJ. Habibie mencabut status Aceh sebagai daerah Operasi Militer (DOM) setelah sepuluh tahun diterapkan. Pada tanggal 5 Januari sampai 5 Maret 1999 TNI gelar, "Operasi Wibawa". Pada tanggal 3 Februari tragedi kemanusiaan di Idi Cut Aceh Timur.

Pada 4 Februari elemen mahasiswa, santri dan sipil yang diikuti 106 organisasi lainnya melalui Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS) mendirikan Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) di Banda Aceh. Pada tanggal 13-14 Desember 1999 diadakan musyawarah ulama Dayah Se Aceh di komplek Makam Syahkuala Banda Aceh mendesak pemerintah melaksanakan Referendum di Aceh sebagai jalan tengah antara otonomi khusus dan merdeka. Pada tanggal 8 November 1999 SIRA menggelar Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum (SU-MPR) di Mesjid Baiturrahman Banda Aceh yang di hadiri paling kurang 500.000 rakyat Aceh. Pada tanggal 29 Juli 1999 Megawati berjanji jika terpilih menjadi Presiden tidak akan menumpah setetes darahpun di Aceh. Pada tanggal 4 Desember 1999 diadakan Milad GAM secara

terbuka di Jeuneub Aceh Utara yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM) Teungku Abdullah Syafi'ie.<sup>5</sup>

Pada tahun 2001-2002 berdasarkan Inpres No.4 dan 7 tahun 2001 serta Inpres No. 1 tahun 2002 dilaksanakan operasi pemulihan keamanan. Tanggal 27 Januari 2000 Dubes RI untuk Jenewa Hasan Wirajudha bertemu dengan Hasan Tiro di Bavois Jenewa yang difasilitasi oleh Hendry Dunant Center (HDC). Hasan Tiro didampingi oleh Malek Mahmud dan Bahktiar Abdullah. Pada tanggal 12 Mei RI-GAM menandatangani Jeda kemanusiaan yang difasilitasi oleh HDC di Bavois yang dilakukan oleh Hasan Wirajudha (RI) dan Zaini Abdullah (GAM) pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Pada 2 Juni-2 September penerapan Jeda kemanusiaan I serta pada 15 September-15 Januari 2001 dilakukan Penerapan Jeda Kemanusiaan II. Pada 20 Juli 2001 enam juru runding GAM ditangkap di Banda Aceh yakni Teungku Nashiruddin Bin Ahmed, Teugku Amni Bin Ahmad Marzuki, Amdi Hamdani, Teuku Kamaruzzaman, Nasrullah Dahlawi dan Teungku Muhammad Usman Lampoh Awe. Pada 9 Agustus Presiden Megawati menandatangani UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sejak itu sebutan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menjadi Propinsi NAD. Pada tahun 2001-2002 Pemerintah melaksanakan operasi pemulihan keamanan berdasarkan Inpres No. 4 dan 7 tahun 2001 dan Inpres No. 1 tahun 2001. Pada tanggal 2-3 Februari 2002 RI dan GAM merintis dialog yang dimediasi oleh HDC di Jenewa Swiss. Delegasi RI dipimpin oleh Wiryono Sastrowardoyo, GAM diwakili Perdana Menteri Malek Mahmud. Pada tanggal 9-10 Mei 2002 dialog lanjutan RI-GAM di Jenewa. Tanggal 9 Desember 2002 setelah Jeda Kemanusiaan I dan II gagal, RI-GAM merintis perjanjian perhentian permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement (COHA)* yang ditandatangani oleh Zaini Abdullah (GAM) dan Wiryono Sastro (RI) di Jenewa.<sup>6</sup>

Tanggal 17-18 Mei 2003 Perundingan RI-GAM di Tokyo Jepang gagal dilaksanakan. Pada Tanggal 19 Mei-18 November Aceh ditetapkan sebagai daerah Darurat Militer (DM) II berdasarkan Kepres No. 28 Tahun 2003 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Tanggal 19 November- 18 Mei 2004 DM I

---

<sup>5</sup> Ibid., h. 6-8

<sup>6</sup> Ibid.,h. 9-10

diperpanjang ke DM II berdasarkan Kepres No. 97 Tahun 2003. Memasuki tahun 2004 tanggal 5 April Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada masa DM di Aceh. Pada 19 Mei-18 November 2004 DM II berakhir dilanjutkan Darurat Sipil (DS) I berdasarkan Kepres No. 43 tahun 2004 oleh Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 19 November-18 Mei 2005 DS I diperpanjang ke DS II berdasarkan Pereturan Presiden No. 2 Tahun 2004.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadilah Gempa Bumi 8,9 Skala Richter disusul gelombang Tsunami melanda hampir seluruh daerah Aceh dan Nias Sumatra Utara serta 11 negara lainnya. Pada tanggal 27 Desember 2004 GAM secara sepihak menyatakan gencatan senjata berkaitan dengan musibah Tsunami. Pada tanggal 27-29 Januari 2005 dialog RI-GAM pertama yang difasilitasi oleh yayasan Crisis Manajement Initiative (CMI). Pada 21-23 Februari 2005 dialog kedua RI-GAM di Helsinki. Tanggal 12-16 April 2005 dialog ketiga RI-GAM di Helsinki, tanggal 26-31 Mei dialog keempat RI-GAM di Helsinki, pada tanggal 12-17 Juli dialog kelima RI-GAM di Helsinki dan pada tanggal 15 Agustus 2005 RI-GAM melaksanakan perjanjian damai yang ditandatangani oleh Malek Mahmud (GAM) dan Hamid Awaluddin (RI) di Helsinki.<sup>7</sup>

Aceh sampai zaman pertengahan telah menjadi penghubung, jalur komunikasi, budaya, jalur perdagangan dari kerajaan-kerajaan Melayu, Afrika, India, China, Arabia, dan Eropa. Antara abad IX dan XIII gelombang para pedagang Timur Tengah dan Gujarat menyebarkan Islam di daerah yang sekarang dikenal sebagai Aceh, yang menjadi pintu gerbang Islam untuk menyebar lebih luas di kepulauan tersebut. Sampai pada akhir abad XIII raja-raja, menyebutkan diri mereka sendiri sebagai Sultan dan Malik, mengkonsolidasikan basis kekuasaan di negara-negara pelabuhan sepanjang pantai Aceh dan Sumatera. Baru pada awal abad XVI Aceh bersatu, bertepatan dengan dan sebagian dipicu oleh kedatangan para pedagang dan petualang Portugis di wilayah ini. Sampai awal abad XVII sultan-sultan berikutnya berusaha menyatukan Aceh menjadi sebuah kekuatan maritim regional yang menguasai Selat Malaka. Selama 'masa keemasan' ini Aceh, merupakan salah satu kekuatan asli setempat yang paling kaya dan paling

---

<sup>7</sup> Ibid., h. 11-12

kuat secara militer di Asia Tenggara. Namun, peperangan, persaingan perdagangan dan pertentangan internal menggerogoti kejayaan Aceh dan seiring waktu, Aceh kehilangan pengaruhnya. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan Eropa mulai mempersatukan otoritas mereka di wilayah ini. Pada tahun 1641 Belanda merebut Malaka dari Portugis; pengaruh Inggris juga mulai bangkit seiring dengan pembentukan pangkalannya di Penang pada 1786 dan penemuan Singapura pada 1819. Pada awal abad ke-19 Aceh menjadi pusat perhatian persaingan Belanda-Inggris.<sup>8</sup>

Prof Olle Törnquist Ph.D Peneliti ilmu politik dari University of Oslo, dalam sebuah diskusi di Banda Aceh Akhir November 2008, juga menggarisbawahi bahwa Aceh sejak zaman imperialis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, relasi-komunikasi, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional untuk mengkaji<sup>9</sup>. Setelah perang kemerdekaan selesai, rasa bangga rakyat Aceh atas nilai-nilai perjuangannya dalam menentang penjajah terusik dan berubah menjadi rasa kecewa serta merasa diperlakukan secara tidak adil. Pada tahun 1949, berdasarkan sebuah Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang, Aceh telah berstatus provinsi otonom. Mula-mula rasa kecewa dan ketidakadilan terasa sebagai akibat dari tindakan pemerintah pusat, yaitu Aceh tidak dikukuhkan statusnya menjadi sebuah provinsi dengan otonomi luas yang amat diharapkan para pemimpin dan masyarakat Aceh dan malah status provinsinya dicabut. Daerah Aceh diminimalisasikan statusnya menjadi sebuah keresidenan yang tunduk di bawah provinsi Sumatera Utara dengan ibu kota di Medan. Keputusan ini ditentang para alim ulama Aceh karena pengurusan Agama Islam, kebudayaan dan adat istiadat di Aceh dianggap akan mengalami kesulitan karena struktur corak masyarakat Sumatera Utara berbeda dengan masyarakat Aceh (Nurdin, Hamid, et.al, 1999: 7).

Sebagai akibat langsung dari kekecewaan dan rasa ketidak-adilan, para pemimpin dan masyarakat Aceh terhadap tindakan pemerintah pusat, tercetus

<sup>8</sup> Diambil dari berbagai sumber, antara lain dapat dilihat dalam Anthony Reid, *Asal Muasal konflik Aceh*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005); lihat juga Anthony Reid, "War, Peace and the Burden of History in Aceh, dalam *Asian Ethnicity*, vol. 5 No. 3, Oktober 2004; lihat juga Anthony Reid, *Verandah of Violence, The Background To the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006)

<sup>9</sup> Diskusi dengan Prof. Olle di Banda Aceh pada akhir 27 November 2008 yang oleh penulis dan juga dihadiri oleh kalangan wartawan di Nanggroe Aceh Darussalam



pemberontakan DI/TII di Aceh 21 September 1953. Peristiwa pemberontakan yang berlangsung selama delapan tahun ini menelan banyak korban jiwa. Konflik politik dan persenjataan antara Aceh dengan pemerintah pusat tersebut berakhir tahun 1959 dengan persetujuan yang disebut “penyelesaian secara prinsipil dan bijaksana”. Dalam penyelesaian itu DI/TII tidak dianggap menyerah, dan Aceh diberikan status provinsi daerah istimewa melalui suatu Keputusan Wakil Perdana Menteri RI. Isi dan wujud provinsi Daerah Istimewa Aceh adalah Aceh memperoleh keistimewaan dalam bidang agama, adat istiadat, dan pendidikan. Status provinsi daerah istimewa itu dikukuhkan dengan undang-undang (UU) No 18 Tahun 1965 tentang pemerintah daerah (Nurdin, Hamid, et.al, 1999: 8).

Ironinya, bukan mendapat penguatan tentang hak-hak istimewanya, tahun 1974 DPR RI mengeluarkan UU No 5 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan demikian, otomatis UU No 18 Tahun 1965 gugur. Dalam UU itu antara lain, dicantumkan, daerah Aceh masih berhak menggunakan sebutan daerah istimewa tetapi hanya sebagai sebutan saja. Namun butir keputusan ini masih ditafsirkan ada oleh banyak pemuka masyarakat di Aceh. Inilah yang makin menimbun rasa kekecewaan di kalangan masyarakat dan para pemimpin di Aceh (Nurdin, et.al, 1999; Chaidar, 1998). Kekecewaan lain juga disumbangkan oleh eksploitasi sumber alam Aceh tahun 60an yakni gas alam di Lokseumawe, yang dikelola Pertamina (dengan manajemen PT Arun) dengan 85% keuntungan untuk pemerintah dan 15% untuk Mobil Oil. Hasil eksploitasi gas alam ini sangat besar. Setiap tahun, diperkirakan rata-rata hasil kotor lading Arun US\$ 2.1 miliar atau lebih kurang US\$ 6 juta per hari. Sementara itu dana APBN yang kembali ke Aceh setiap tahun hanya sekitar Rp 700 miliar atau kira-kira US\$ 82 juta. Hal inilah yang menyulut kekecewaan masyarakat Aceh, bahwa apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat dari hasil tambang gas tersebut amatlah kecil dibandingkan dengan hasil yang telah dikeluarkan dari tanah Aceh. Ditambah lagi masyarakat yang tinggal disekitar proyek tersebut tidak banyak mendapat manfaat langsung. Masyarakat masih susah mendapatkan pekerjaan (Nurdin, et.al, 1999: 10)

Di bawah rejim militer dan otoriter Presiden Soeharto, kekecewaan rakyat Aceh sekali lagi mulai memuncak. Status daerah istimewa menjadi semakin tidak

bermakna dengan kecenderungan setralisme pemerintah di Jakarta, terlihat dari beberapa pembatalan atas upaya penerapan peraturan daerah dalam berbagai bidang, termasuk hukum Islam. Kemajuan industri, setelah penemuan cadangan gas bumi besar di utara Aceh pada tahun 1971, ditandai dengan migrasi pekerja dari luar Aceh dalam jumlah yang cukup besar ke wilayah ini dan dirasakan oleh banyak penduduk lokal sebagai mengganggu dan eksploitatif. Pada era 1970-an, hanya sejumlah kecil proporsi pendapatan dari Zona Industri Lhokseumawe kembali kepada pemerintah Aceh. Selain itu, akar masalah konflik Aceh karena tidak teraktualisasikannya identitas keacehan dalam wadah *nation state* yang dijalankan dengan sistem politik yang mendominasi, sentralistik, militeristik dan otoriter oleh pemerintah pusat.

Munculnya berbagai gerakan protes sipil sejak periode 1989-1999 adalah juga akibat langsung dari sistem tersebut. Dengan dalih menumpas Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) pemerintah sejak tahun 1989 menjadikan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) khususnya untuk tiga daerah utama yang dianggap basis GAM daerah ini juga tempat beroperasinya mesin-mesin ekonomi pemerintah bersama mitranya yaitu Aceh Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Dalam catatan investigasi masa DOM inilah berbagai praktek tindak kejahatan kemanusiaan (*crimes against humanity*) bahkan terjadi pembunuhan besar-besaran (*the crime of genocide*). dilakukan oleh militer di sepanjang Operasi Jaring Merah I hingga VIII. Walaupun ketiga bentuk perlawanan rakyat ini memiliki latarbelakang dan akar masalah yang berbeda tapi tetap dalam kerangka identitas keAcehan. Identitas disini lebih dipahami dalam konsepsi psikologik yaitu sistem kehidupan orang Aceh, seperti cara pandang, cara bersikap, cara bertindak, adat istiadat, normat-norma dan cara menjalankan kehidupannya. Identitas keAcehan lebih kepada membentuk citra diri; sebagai sistem sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi. Juga bentuk harga diri; lebih kepada cara masyarakat Aceh dalam melihat harkat dan martabatnya. Seperti sebutan masyarakat yang religius, pantang menyerah, militant, kritis, atau berani.

Berbagai kekecewaan masyarakat yang lahir dari rasa perlakuan tidak adil itu terakumulasi dan menimbulkan kembali keinginan untuk meningkatkan kembali upaya memperjuangkan perolehan otonomi yang seluas-luasnya dari

pemerintah pusat. Melalui berbagai diskusi dan negosiasi terus dilakukan masyarakat dan pemda kepada pemerintah pusat, namun tidak juga menghasilkan kesepakatan. Hal inilah yang mendorong munculnya gerakan separatis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok pemberontak seperti Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) atau yang sekarang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Titik penting penyelesaian konflik Aceh adalah ketika pemerintah menandatangani Kesepakatan Damai yang dikenal dengan Memorandum of Understanding Helsinki antara GAM-RI pada 15 Agustus 2005. Meski kesepakatan damai telah ditandatangani, berbagai bentuk konflik dan tembak menembak antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI masih berlangsung secara sporadis. Aceh belum sepenuhnya menjadi daerah terbuka bagi orang luar, bahkan sampai bencana tsunami kemudian terjadi pada Desember 2005.

Secara umum, konflik politik di Aceh dan khususnya pelaksanaan darurat militer telah menyebabkan tercerai berainya ikatan kekeluargaan yang didasarkan pada unit kecil lokasi (gampong dan mukim). Munculnya kelompok GAM di satu sisi telah mereduksi tatanan sosial kekeluargaan. Basis ikatan keluarga yang berbeda ideologi, semakin memudar, bahkan ada kecenderungan antar tetangga yang kenal saling dendam, karena bagaimana pun GAM juga berasal dari gampong-gampong sebagai unit sosial yang terkecil, dan mereka saling mengenal. Pada konteks yang lain, secara struktural dan budaya, konflik Aceh yang terlalu lama, telah mereduksi ketahanan sosial dan kultural masyarakat Aceh. Minimal modal sosial berupa kerjasama dan saling mengenal, serta saling memahami sebagai bagian integral masyarakat terkoyak akibat perbedaan ideologi sehingga diantara mereka saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dampak sosial budaya inilah yang cukup besar dirasakan oleh masyarakat Aceh. Tidak heran apabila sebagian dari mereka di masa konflik pernah "terancam" oleh pihak GAM, pada masa damai, terkesan "membalas dendam" dengan cara ikut membantu pihak TNI/POLRI (Nurhasim, et.al., 2006:154).

Adanya tindak kekerasan terhadap perempuan telah mengubah peran perempuan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat Aceh. Kecenderungan kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di beberapa wilayah konflik termasuk

Aceh. Sementara itu, juga pada masa Darmil, laki-laki menjadi target utama antara dua kelompok (GAM dan TNI), perempuanlah yang maju dan menggantikan suaminya pergi ke kebun atau bekerja untuk menghidupi keluarganya.<sup>10</sup>

Maka sangat wajar, ketika narasumber dalam penelitian ini senantiasa mengacu pada pemahaman sejarah Aceh secara utuh sebelum melakukan proses transformasi konflik Aceh. Memahami sejarah Aceh secara holistik akan memudahkan para pihak yang terlibat dalam proses transformasi konflik Aceh dapat berjalan dengan damai.

## II. TRANSFORMASI KONFLIK ACEH

Aceh merupakan propinsi wilayah yang terletak di bagian ujung utara pulau Sumatera. Ada banyak julukan yang dilekatkan pada wilayah terkaya di Asia Tenggara tersebut seperti Serambi Mekkah, Bumi Iskandar Muda, Tanah Lhee Sagoe atau Tanah Segitiga maupun Tanah Rencong. Dari sekian banyak julukan yang ada, julukan "Aceh bersimbah darah" mungkin paling cocok karena di wilayah yang kaya tersebut, bukan kemakmuran dan kesejahteraan yang ada, tetapi malapetaka baik karena perang maupun bencana alam<sup>11</sup>.

Konflik adalah penghujung dari tidak berfungsinya mekanisme konvensional dalam penyelesaian masalah sosial. Ketika berbagai masalah tidak dapat terselesaikan secara memuaskan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Mekanisme konvensional yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah kebijakan publik, baik yang dilakukan oleh negara atau stakeholder lainnya di luar negara. Aceh adalah satu dari sekian konflik yang terjadi di Indonesia. Konflik ini bahkan berlangsung selama tiga dekade. Konflik Aceh bersifat multidimensi karena juga berakar dari berbagai macam faktor penyebab. Mulai dari faktor historis, komunikasi, budaya, identitas, dan politik. Mungkin saja aspek-aspek dalam konflik yang mengakar di Aceh belum berakhir. Atau bahkan menyimpan ancaman terhadap perdamaian yang baru saja berhasil dibina.

<sup>10</sup> Sarah Nuraini Siregar, 2003-2004 "Impikasi Darurat Militer di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya", dalam *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*.

<sup>11</sup> Pendapat Iskandar Zulkarnaen. Ketua Pusat Studi Sosial Politik, dan Dosen FISIP Universitas Malikussaleh. Peneliti pada The Aceh Institute dalam sebuah diskusi dengan penulis di Kampus Unimal Juni 2008.

Akademisi dan intelektual Aceh melihat proses transformasi konflik di Aceh sebagai proses transformasi dalam segala lini kehidupan baik pada level individu maupun masyarakat. Hal ini seperti diungkapkan oleh Lukman Age 2005, dengan mengutip lima aspek transformasi konflik yang dirumuskan Hugh Miall, Oliver Rambotham dan Tom Woodhouse, barangkali patut menjadi acuan dalam melihat dinamika transformasi konflik melalui peace building. Pertama, *Transformasi Konteks*; dimana perlu dipahami bahwa konflik terkait dengan konteks regional atau internasional. Jika terjadinya perubahan dalam tingkat ini sedari awal disadari akan membawa dampak pada penyelesaian konflik. Jika sebelum tsunami masyarakat Internasional melihat Aceh sebagai wilayah konflik yang perlu mendapat perhatian, walaupun terasa tidak memadai, maka setelah tsunami telah berubah menjadi dinamis dan nyata. Misalnya prasyarat rekonstruksi dikatakan akan selamat jika ditopang dengan rekonsiliasi penyelesaian konflik secara damai. Rehabilitasi, rekonstruksi dan peace building dianalogikan mesti sejalan seiring agar tidak timpang. Negara donor dan NGO Internasional meletakkan landasan demikian dalam menyalur bantuannya.

Kedua, *Transformasi Struktur*; dimana struktur konflik merupakan gabungan dari aktor, isu dan pertentangan tujuan atau hubungan antara para pihak. Struktur konflik Aceh yang *assimetries* menjadi penghalang tercapainya penyelesaian yang adil dan permanen. Kedua pihak memahami ruang dan waktu, yang menyadari bahwa bukan konteksnya lagi berada dalam konflik yang *assimetries* kendati dalam perundingan Helsinki itu harga mahal yang diambil GAM melepaskan tuntutan kemerdekaannya. Dalam transformasi struktur ini, kepada Aceh diberikan hak menwujudkan pemerintahan sendiri (*self government*) dan berkewenangan membentuk partai politik lokal yang sebelumnya ditakutkan dalam sistem politik Indonesia. Ketiga, *Transformasi Aktor*; dimana perubahan aktor yang berkonflik juga merupakan salah-satu cara untuk mempermudah proses transformasi konflik. Konflik semakin mudah diselesaikan manakala terjadi perubahan dalam kepemimpinan para pihak. Tsunami meskipun tidak terlalu signifikan telah merubah beberapa aktor dalam konflik Aceh. Bila sebelum tsunami militer sangat berperan di Aceh, maka setelah tsunami terjadi pergeseran kekuasaan dan kewenangan, bahkan status darurat militer dicabut. Dibentuknya

BRR Aceh-Nias, BRA wujud transformasi aktor, FKK, juga keberadaan lembaga-lembaga asing, baik negara donor, lembaga PBB maupun NGO internasional, sehingga posisi aktor-aktor di Aceh mengalami perubahan.

Keempat, *Transformasi Isu*; aspek ini merupakan satu yang penting dalam transformasi konflik, karena konflik didefinisikan atas posisi pihak yang berkonflik terhadap sesuatu isu. Ketika GAM merubah posisinya atas isu kemerdekaan, sebenarnya ingin mentransformasikan konflik dari gerakan senjata ke gerakan politik. Langkah maju peace building saling berkait dari transformasi konteks, struktur dan aktor, sehingga keseluruhan substansi transformasi berubah menjadi agenda lain, atau isu lain sesuai kesepakatan. Hanya saja kompleksitas yang mengemuka menjadikan situasi berada dalam pusaran seolah kehilangan titik tekan transformasi. Misi rekonstruksi akibat tsunami dan agenda perdamaian sedang berimajinasi dalam isu yang baru, dan ini tersirat dalam agenda reintegrasi, Pilkada dan Pemilu legislatif setidaknya mampu menyelesaikan berbagai sengketa dalam jangka pendek. Kelima, *Transformasi Personal atau Kelompok*; ini berkaitan dengan perubahan dalam hati dan pikiran para pihak yang berkonflik, karena konflik berasal dari hati dan pikiran para aktor yang berkonflik. Diawal-awal perundingan sikap dipihak Indonesia sangat diragukan. Pemerintahan sipil Indonesia tetap bersikukuh bahwa GAM harus melepaskan tuntutan kemerdekaannya sebagai syarat pembicaraan damai. Malahan kalangan militer sama sekali tidak peduli atas alasan korban kemanusiaan akibat tsunami maupun ketika konflik, posisi kedua pihak tetap sama isu atau tujuan masing-masing. Bahkan Militer Indonesia mempersulit misi kemanusiaan masyarakat Internasional masuk ke Aceh. Ditingkat elit GAM, sikapnya rela melepaskan tuntutan kemerdekaan demi dimulainya pembicaraan damai merupakan sinyal adanya kesadaran untuk menghentikan kekerasan di Aceh.

Disisi lain konflik Aceh, narasumber<sup>12</sup> berpendapat bahwa realitas Aceh sebagai sebuah identitas dikonstruksikan secara sengaja dalam situasi konflik. Konflik memang di ciptakan demi kepentingan individu, kelompok bahkan Negara. Pendapat ini relevan dengan perspektif konstuksionis, memandang Aceh

<sup>12</sup> Diskusi informal di kampus Universitas Malikusaleh dengan tiga akademisi Fakultas Sosial dan Politik (T. Kemal Fasya, Ibrahim Chalik dan Naidi Faisal) November 2007.

sebuah identitas yang dikonstruksikan secara sengaja. Konstruksi ini kemudian digunakan sebagai instrumen untuk mengambil keuntungan dalam konflik. Apakah konflik Aceh sebenarnya tidak lebih hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikembangkan oleh teori konstruksionis? Konflik sebagai bahasa politik, alat untuk mencapai tujuan. Sementara itu realitas identitas komunal dikonstruksikan sedemikian rupa untuk dijadikan faktor konflik. Dalam setiap konflik Aceh selalu ada istilah: provokator, aktor intelektual, atau juga disebut "entrepeneur politik". Bisa juga konflik sebagai bahasa atau alat politik seperti menjatuhkan pemerintahan. Teori konstruksionisme mungkin bisa diibaratkan sebagai rumput kering, yang melihat realitas diversitas daerah, etnis/suku yang bodoh, miskin dan terpinggirkan yang telah dikonstruksikan sedemikian rupa layaknya rumput kering yang mudah terbakar. Sementara para entrepenur politik yang didukung oleh para oportunist konflik seperti minyak tanah dan api yang membakar.

Konflik bisa dihindari atau perdamaian bisa dibangun jika rumput selalu hijau atau tidak kering, atau jika terpaksa kering harus menyirami atau setidaknya jangan dibakar. Jika rumput kering memang sudah terbakar, maka tugas kita adalah menanam kembali rumput yang terbakar tersebut. Dalam hal ini peran para Peace builder<sup>13</sup> secara garis besar dibagi dua. *Pertama* menjaga rumput jangan sampai kering sehingga tidak mudah dibakar atau menanam kembali rumput yang telah terbakar. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan dengan dialog apapun namanya, seperti: *inter-faith*, *inter-ethnic*, *inter-cultural* dan *inter political power*. Atau jika konflik sudah terjadi maka para aktivis perdamaian harus melakukan resolusi konflik seperti dengan berbagai tekniknya seperti fasilitasi, negosiasi, mediasi hingga, rehabilitasi. *Kedua*, adalah menyimpan minyak dan mematikan api. Caranya adalah menangkap dan menyeret para provokator ke meja hijau. Kalau pengadilan hukum tidak menunjukkan keadilan, bisa dilakukan pengadilan politik atau pengadilan sosial.

Sejalan dengan peran Peace Builder diatas, maka strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat jaringan CSO untuk melakukan reformasi

<sup>13</sup> Peace builder dapat dikatakan sebagai para aktifis kemanusiaan dan perdamaian, LSM, intelektual/akademisi dan aktifis serta Media Massa

struktural. Jadi pilihannya adalah dua-duanya. Dalam perpektif konflik, CSO yang kuat adalah yang mampu melakukan tiga hal: memberikan masukan kebijakan (*policy inputs*), melengkapi kebijakan (*policy complemnet*) dan memberikan pengawasan kebijakan (*policy oversight*).<sup>14</sup> Bagaimanapun, negara atau pihak yang tengah berperang jarang bersikap rasional, bahkan mempercayai bahwa konflik perlu dilanjutkan karena merupakan cara yang paling efektif untuk meraih tujuan.<sup>15</sup> Dalam konflik komunal sukar untuk menemukan kepentingan yang objektif dan yang asli untuk dapat dinegosiasikan.<sup>16</sup> Richard Betts dan Leslie Gelb mengatakan, negosiasi sulit dilakukan dalam perang sipil karena adanya sumber atau pertarungan konflik yang tidak dapat dibagi, koalisi hanya mungkin apabila pertentangan tidak begitu fundamen.<sup>17</sup>

“...Untuk kasus Aceh, permasalahan konflik telah begitu mengakar, mulai dari persoalan agama, sosial, ekonomi, sampai politik dan keamanan. Setiap akar permasalahan, meskipun semula berdiri sendiri, pada tahap selanjutnya jalin menjalin menjadi satu dan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Kedua belah pihak telah secara tegas memosisikan dirinya masing-masing. Pemerintah Indonesia melihat Aceh sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan konsekuensi setiap gerakan yang bermaksud memecah atau memisahkan diri akan dianggap makar (pemberontakan). Di sisi lain, pihak GAM melihat dirinya sebagai pemerintahan resmi dari negara Aceh Merdeka yang kini tengah diduduki oleh Indonesia...”<sup>18</sup>

Dalam konteks Aceh, retorika perang total tidak hanya dimiliki oleh militer, tetapi juga elit sipil di tingkat parlemen yang menolak dialog sebagai instrumen utama resolusi konflik Aceh. Pertentangan antara RI dan GAM sangat fundamen dan kontradiktif. Satu pihak (GAM) menginginkan memisahkan diri, pihak lain (RI) ingin mempertahankannya. Pandangan lain dari Zartman yang mengungkap lima kesulitan dalam perspektif yang lebih komprehensif mengapa

<sup>14</sup> Diolah dari berbagai sumber, antara lain kesimpulan diskusi LIPI tentang peran pemangku jabatan dalam proses reintegrasi GAM pasca MoU Helsinki 2009

<sup>15</sup> J. Lewis Rasmussen, *op.cit*, h.37

<sup>16</sup> Joseph R. Rudolph, Jr. “Intervention in Communal Conflicts”, *Orbis*, Vol.39, No.2, (Spring 1995), h.261

<sup>17</sup> Stephen J. Stedman, “Negotiation and Mediation in Internal Conflict”, dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996), h.345

<sup>18</sup> Diskusi dan wawancara dengan akademisi/intelektual yaitu T. Kemal Fasya (Dosen Antropologi Fisip Unimal) di Lhokseumawe Juli 2009



mediasi dan negosiasi sukar dilakukan dalam konflik internal;<sup>19</sup> *Pertama*, tidak adanya keinginan untuk melakukan kompromi dari setiap pihak yang terlibat konflik. *Kedua*, situasi atau konteks yang ada belum memungkinkan untuk dilakukannya mediasi atau belum terciptanya kondisi *hurting stalemate*. *Ketiga*, ketiadaan agen yang mampu menjembatani antar pihak yang terlibat konflik. *Keempat*, belum terciptanya *hurting stalemate* menyebabkan pihak ketiga sulit untuk menemukan titik atau *entry point* untuk mengajak seluruh pihak bertikai duduk di meja perundingan. *Kelima*, persamaan identitas dan solidaritas cenderung tergantung pada konflik. Konfliklah yang akan melindungi identitas dan solidaritas tersebut sehingga tanpa konflik, dua hal tersebut akan lenyap. Dalam kasus Aceh, beberapa kesulitan yang diungkap Zartman berhasil diatasi, tetapi sebagian lagi tidak. Secara lebih halus, Wagner<sup>20</sup> mengatakan masalah dalam perang sipil adalah bukannya kompromi yang mustahil, tetapi kesulitan dalam menemukan cara memaksakan sebuah kompromi. Dan meskipun pihak-pihak yang ada mau melakukan kompromi atas tujuan-tujuan politiknya, ketakutan mereka mungkin akan mencegahnya untuk melakukan membuat sebuah keputusan dalam kompromi tersebut.

Berbagai kesulitan tersebut pada awalnya telah diterobos oleh HDC dengan cara menimbulkan rasa saling percaya melalui berbagai dialog. Namun, dalam mediasi konflik internal, tahap yang paling sulit bukanlah membuat kesepakatan bersama, tetapi di tingkat implementasi. Karena itu, Lave<sup>21</sup> menasehati agar proses implementasi penyelesaian konflik berhasil, maka harus mencakup: *Pertama*, kesepakatan bersama tentang standar cukup atas pemenuhan kebutuhan dasar dan kepentingan seluruh pihak dengan tidak mengorbankan nilai pokok dari pihak-pihak tersebut. *Kedua*, abadi, semua pihak yang bertikai memiliki komitmen untuk tidak akan mengingkari kesepakatan, bahkan ketika terjadi perubahan politik. *Ketiga*, ada implemenasi dan monitoring diri secara luas. *Keempat*, membangun standar *fairness* dan *justice* yang tidak semata-mata mencukupkan diri pada aksi kompromi. *Kelima*, menciptakan *advantage* dimana

<sup>19</sup> I. William Zartman. "Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), h.258-260

<sup>20</sup> Stedman, *op.cit*, h.344

<sup>21</sup> J. Lewis Rasmussen, *op.cit*, h.39-40

mematuhi kesepakatan akan lebih menguntungkan dibanding mengingkarinya. Tentu saja praktek di lapangan mengenai implementasi kesepakatan selalu banyak menemui kendala dan kegagalan. Kegagalan implementasi biasanya terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Kegagalan implementasi berkaitan erat dengan karakteristik perang. Ketika perasaan takut lebih besar dari pada kepercayaan terhadap musuh, perang dapat berlanjut kembali.

Menurut Stedman, adalah beberapa alasan mengapa implementasi sulit dilakukan;<sup>22</sup> *Pertama*, adanya upaya damai dari kelompok-kelompok yang bertikai tidak selalu diketahui atau diinginkan oleh semua anggotanya. Mendamaikan para pemimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit adalah mendamaikan para pengikutnya. Karena itu, narasumber akademisi berargumen bahwa sebelum seluruh kesepakatan damai di implementasikan, masyarakat internasional harus terlebih dahulu mengerti keinginan para pengikut dari setiap kelompok. Menyepakati kesepakatan bukanlah sebuah jaminan valid bahwa pelakunya lebih memilih damai daripada perang. *Kedua*, tidak selalu diketahuinya hasil yang diraih dari implementasi damai. Ini merupakan konsekuensi dari sebab pertama. *Ketiga*, selama masa implementasi, pihak-pihak yang berseteru selalu memanfaatkan kesempatan tersebut bukan untuk tujuan damai, melainkan melakukan resume, evaluasi untuk menunggu momen yang tepat dalam melakukan serangan. Karena itu, pada saat kondisi stabil tercapai, para pelaku transformasi konflik harus mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang mungkin muncul dari situasi tersebut. Masa *ceasefires* mungkin menolong warga sipil. Tapi jika masa itu digunakan juga oleh setiap pasukan untuk melakukan *re-group*, maka konflik akan menjadi semakin berkepanjangan. *Keempat*, tidak ada kohesivitas organisasi; selalu ada sayap atau faksi yang tidak setuju dan berada di luar komando untuk terus melakukan peperangan.

Selain sulit, Stedman juga mencatat berbagai problem implementasi damai.<sup>23</sup> *Pertama*, adanya kelompok yang merusak perjanjian setelah disepakati, segera setelah ia tahu bahwa ia kehilangan power. *Kedua*, adanya ketaatan yang tidak lengkap. *Ketiga*, tidak adanya koordinasi antara mediator yang mendesain

---

<sup>22</sup> Stephen J. Stedman, op.cit, h.364-365

<sup>23</sup> Ibid., h.368-369

kesepakatan dengan pihak-pihak yang harus mengimplementasikannya di lapangan. *Keempat*, kurangnya perhatian internasional pada saat kesepakatan akan diimplementasikan, seperti janji para donator yang akan memberikan bantuan saat negosiasi dilakukan namun tidak pernah dilakukan saat tahap implementasi tiba.

Kondisi riil di Aceh tidak tergambarkan oleh berbagai preskripsi bagi terlaksananya sebuah kesepakatan. Di pihak GAM, penerimaan atas inisiatif proses damai melalui dialog diselimuti berbagai maksud lain. GAM yakin tidak bisa mengalahkan TNI. Proses damai hanyalah strategi agar GAM tetap survive. GAM yakin akan terjadi disintegrasi di Indonesia seperti halnya di Soviet. Bagi GAM, kesepakatan damai antara Indonesia dengan GAM bukanlah hal penting, melainkan GAM hanya membutuhkan upaya-upaya agar dirinya tetap *survive* hingga saat disintegrasi itu tiba. Proses damai akan menjadikannya aman dari tindakan militer Indonesia. Pembicaraan damai hanya merupakan upaya GAM untuk melakukan konsolidasi organisasi. Di pihak Indonesia, sejak semula, ketika Jeda Kemanusiaan untuk Aceh ditandatangani 12 Mei 2000, pihak TNI tidak pernah mendukung karena menganggap jeda kemanusiaan akan memberikan kesempatan terhadap GAM untuk melakukan konsolidasi organisasi.<sup>24</sup> Kendati inisiasi proses perdamaian dimulai dari Pemerintah Indonesia, beberapa kelompok yang memiliki kekuatan dan pengaruh signifikan, seperti TNI, justru ambivalen atau tetap memperlihatkan sikap bermusuhan sementara GAM tidak pernah sedikitpun meredupkan semangat merdeka. Sikap menolak pembicaraan proses damai tidak hanya ditunjukkan oleh TNI dan Polri, tetapi juga oleh mayoritas anggota parlemen dari fraksi PDIP, Golkar dan TNI/Polri yang mencapai lebih dari 60% kursi dari total kursi di parlemen.<sup>25</sup> Namun demikian Perjanjian sudah selesai, yang tinggal adalah implementasi MoU di Lapangan.

"Saya gak yakin proses MoU lanjut, utamanya karena orang luar. Tapi kalau kita sebagai prajurit biasa membandingkan sama CoHA<sup>23</sup>, sudah banyak perubahan. Contohnya, pimpinan kami tidak pernah kasih tahu soal CoHA, kalau ada kesepakatan damai. TNI juga kelakuannya agresif waktu

<sup>24</sup> Kompas, 24 Nopember 2002, h.30

<sup>25</sup> ICG Asia Report, No. 17, 12 Juni 2001, *Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa pada Perdamaian Kekal*, h.10

jaman CoHA, sering bikin resah. AMM juga beda. Kalau ada masalah, AMM datang dan menyelidiki... Beda sekali."<sup>26</sup>

"Menurut penilaian saya jeda ketika CoHA<sup>27</sup> sangat berbeda dengan MoU yang sekarang ini, ketika CoHA kita tidak bisa terlalu bebas tetapi sekarang kita bisa berjabat tangan dengan mereka (TNI)."<sup>28</sup>

Gagalnya HDC di Aceh, walaupun kedua belah pihak berhasil melahirkan berbagai kesepakatan penting, mereka tidak pernah berhasil menemukan titik kompromi mengenai isu fundamental mengenai apakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI atau menjadi merdeka. Kegagalan mediasi bukan karena kegagalan di pihak mediator, melainkan lebih karena sikap keras para kelompok yang bertikai.<sup>29</sup> Pada bulan November 2003 Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, menginformasikan bahwa darurat militer diperpanjang. Mei 2004 Darurat militer diganti dengan darurat sipil meskipun jumlah tentara di Aceh masih pada level 40.000. Komando keamanan tertinggi dipindahkan dari TNI kepada Kepolisian. Yudhoyono mengunjungi Aceh pada bulan November, dan menjanjikan amnesty, bantuan ekonomi, dan otonomi daerah. Namun, 'darurat sipil' masih berlanjut.<sup>30</sup>

Bulan September 2005 Misi Pemantau Aceh (AMM) yang dipimpin oleh Uni Eropa memulai pekerjaannya dengan mandat enam bulan yang dapat diperpanjang. Pelucutan senjata GAM dan penarikan pasukan keamanan 'non-organik' dari Aceh berjalan dengan sukses. Antara September dan Desember 2005 berbagai konsultasi intensif dilakukan di Aceh tentang rancangan undang-undang pemerintahan sendiri di Aceh. Pada bulan Oktober 2005 GAM membentuk Majelis Nasional baru di Banda Aceh, sebagai otoritas politik tertinggi, dan Komite Peralihan Aceh (KPA) untuk mengawasi demobilisasi pasukan. Pada tanggal 4 Desember 2005, para pendukung pembentukan dua provinsi baru di Aceh berdemonstrasi di Jakarta. Sebuah rancangan Undang-undang tentang

<sup>26</sup> Diskusi dan wawancara dengan mantan kombatan GAM Wilayah Pase Kandang-Aceh Utara, Juli 2007

<sup>27</sup> CoHA (the Cessation of Hostilities Agreement) adalah kesepakatan damai terakhir yang berlaku dari Desember 2002 hingga Mei 2003.

<sup>28</sup> Diskusi dan wawancara dengan mantan kombatan GAM Wilayah Pase Seunuddon, Aceh Utara, Juli 2007

<sup>29</sup> Amitai Etzioni, "Mediation as A World Role for the United States", *The Washington Quarterly*, Vol.18, No.3, (Summer,1995), h.76

<sup>30</sup> Ibid

Pemerintahan Aceh, menggantikan undang-undang otonomi khusus, diserahkan ke Jakarta pada tanggal 5 Desember 2005, banyak pihak di Aceh yang menganggap rancangan undang-undang tersebut telah 'dilemahkan'.<sup>31</sup>



*Gambar 4.1.* Jenis GAM. Pasca Mou GAM dapat dikategorikan ke dalam berbagai macam definisi digunakan di Aceh untuk membedakan masyarakat yang aktif dalam GAM dan

penduduk desa, dan untuk membedakan antara berbagai macam kategori GAM. Dalam tulisan ini menggunakan istilah-istilah berikut untuk menjelaskan perbedaan kategori GAM: Tahanan politik (tapol): termasuk tahanan yang secara resmi diberi amnesti dari keputusan presiden tanggal 31 Agustus 2005 sebagai bagian dari MoU dan tahanan yang dibebaskan di Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2005. Perlu diketahui bahwa tidak semua tapol aktif terlibat dalam GAM. Beberapa dipenjarakan karena keterlibatannya dalam organisasi lain di Aceh atau karena salah dipenjarakan; Mantan kombatan: adalah mereka yang terlibat dalam cabang militer GAM saat MoU dikeluarkan. Pasukan ini kadang disebut Tentara Nanggroe Aceh (TNA). Non Kombatan: adalah anggota GAM yang berperan dalam fungsi sipil dan yang terlibat dalam struktur polisi dan pelatihan. Gabungan kedua kategori terakhir disebut GAM aktif atau masyarakat yang aktif terlibat dalam GAM saat MoU dikeluarkan. Kategori ini meliputi mantan kombatan GAM dan siapapun yang terlibat dalam GAM struktur sipil, polisi dan pelatih, tetapi tidak termasuk tapol; GAM yang kembali: adalah semua anggota GAM dan tapol.<sup>32</sup> Pelaksanaan kesepakatan damai memberikan dampak positif terhadap seluruh masyarakat Aceh. Penduduk menyebut kebebasan bepergian sebagai bukti dari kemajuan proses perdamaian. Selama konflik, masyarakat umum dilarang pergi ke lahan dan hutan. Bahkan sesaat sebelum penandatanganan MoU, masyarakat takut berbicara mengenai konflik. Bagi mereka yang berani berbicara, raut

<sup>31</sup> Ibid

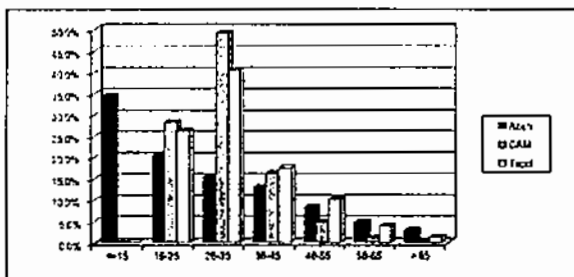
<sup>32</sup> Pendefinisian ini dipakai oleh Tim survey AMM, WorldBank dan UNDP dalam Laporan Kajian mengenai Kebutuhan Reintegasi GAM, 2006

wajahnya terlihat cemas.<sup>33</sup> Sekarang sudah berubah. Desa dan kota sudah mulai ramai. Di desa, warung kopi buka hingga larut dan penduduk tidak takut keluar rumah di malam hari.

“...Setelah damai MoU Helsinki, kita bisa lihat situasi dan kondisi Aceh sudah mulai ramai, orang gak takut keluar rumah, berdagang, ke tambak, sawah dan aktifitas lain..ya kita patut bersyukur tsunami juga membawa berkah bagi damai Aceh...”<sup>34</sup>

“...Kalau kita lihat di gampong-gampong di seluruh Aceh, sepertinya suasana damai sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh, ini harus dipertahankan. GAM sudah kembali lagi dalam masyarakat tanpa ada perbedaan yang mencolok ya memang ada tingkahlaku GAM yang masih arogan dan sombong namun itu kan bukan semua..kita gak usah membesar-besarkan hal itu malah nanti jadi sulit lagi..yang penting rakyat udah enakan cari rezeki itu yang penting...yang perlu diingat adalah damai ini harus kita jaga oleh siapapun...udah capek kita hidup dalam konflik terus...”<sup>35</sup>

Gambar 4.2: Perincian Umur GAM Aktif, Tahanan dan Populasi Umum.<sup>36</sup>



Hasil penelitian AMM 2006 memperlihatkan, berbeda dengan demografi umur secara umum di Aceh, mayoritas GAM yang kembaliberusia antara 18-35 tahun. Lebih dari

75% GAM aktif masuk ke dalam kategori umur tersebut, dibandingkan dengan 36% populasi umum. Hampir 90% GAM aktif dalam kategori umur ini adalah TNA atau calon TNA yang baru dilatih. Hal ini menunjukkan bahwa mantan kombatan diharuskan melakukan pekerjaan fisik yang sesuai untuk laki-laki muda. Dari sini juga diketahui bahwa GAM menerima laki-laki muda yang memiliki kesempatan terbatas dalam mendapatkan pekerjaan produktif yang menghasilkan

<sup>33</sup> Hal ini terlihat selama penelitian lapangan untuk kajian konflik sebelum MoU yang dilakukan pada bulan Juli 2005, Barron, Patrick, Samuel Clark and Muslahuddin Daud (2005). Conflict and Recovery in Aceh: An Assessment of Conflict Dynamics and Options for Supporting the Peace Process. Jakarta: World Bank/DSF

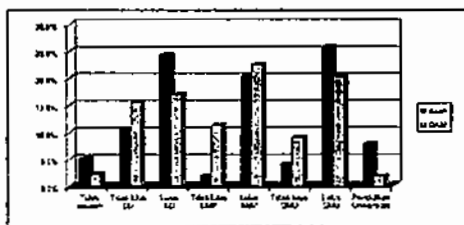
<sup>34</sup> Diskusi dan wawancara dengan Aktifis (Ketua BEM) Mahasiswa Universitas Malikussaleh (UNIMAL), September 2007

<sup>35</sup> Diskusi dan wawancara dengan Akademisi Unsyiah di Banda Aceh, pertengahan September 2007

<sup>36</sup> Survei AMM/WB (GAM aktif), survei IOM (tahanan) dan SUSENAS 2004 (populasi umum)

uang. GAM aktif yang berumur di atas 35 tahun biasanya lebih terlibat dalam struktur sipil dan polisi GAM daripada mereka yang lebih muda. Tapol yang diberi amnesti lebih tua daripada mantan kombatan. Meskipun mayoritas tapol yang diberi amnesti juga jatuh dalam kategori umur 16-35 tahun, rentang umur tahanan di atas 35 tahun lebih mirip dengan populasi umum. Tahanan tertua berusia 78 tahun.

Gambar 4.3: Tingkat Pendidikan GAM Aktif dan Masyarakat Umum Aceh.<sup>37</sup>

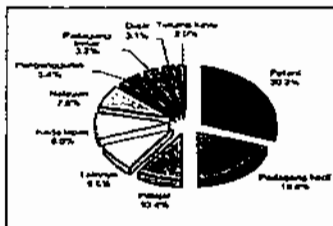


Sedangkan tingkat pendidikan, dibandingkan penduduk secara keseluruhan, lebih banyak anggota GAM yang menyelesaikan SD dan SMP tetapi lebih sedikit yang menyelesaikan tingkat yang lebih tinggi (lihat Gambar 2.3). GAM aktif di bawah 25 tahun atau di atas 46 tahun lebih banyak yang kurang berpendidikan dibandingkan yang berumur antara 26 hingga 45 tahun. Tapol memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan GAM aktif dan populasi umum. Hanya sedikit lebih dari 10% tapol yang tidak memiliki pendidikan formal dan hampir 50% hanya menyelesaikan SD. Pandangan umum di tingkat desa bahwa tingkat pendidikan GAM lebih rendah dari penduduk secara keseluruhan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Banyak penduduk desa yang berpikiran bahwa mereka bergabung dengan GAM karena memiliki tingkat pendidikan rendah. Oleh sebab itu mereka memiliki sedikit kesempatan lain atau tidak tahu ada yang lebih baik selain menjadi GAM aktif. Kemungkinan rendahnya tingkat pendidikan anggota muda GAM aktif (65.5% hanya menyelesaikan SMP atau di tingkat lebih rendah) menyebabkan munculnya pandangan tersebut. Namun secara keseluruhan, tingkat pendidikan GAM aktif di desa sangat mirip dengan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Kenyataannya, di banyak desa terdapat satu atau dua GAM aktif yang terpelajar dan dapat menjelaskan alasan ideologis untuk bergabung dengan GAM, terutama di lokasi-lokasi utama GAM di pesisir timur. Di beberapa kecamatan yang dikunjungi, tingkat pendidikan GAM yang

<sup>37</sup> Survei AMM/WB (GAM aktif) dan SUSENAS 2004 (populasi umum)

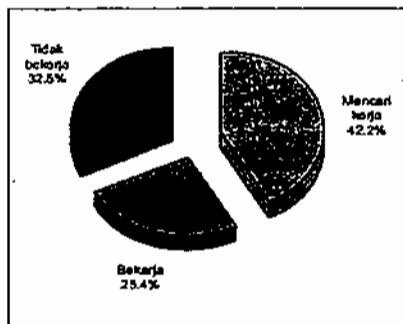
kembali lebih tinggi dari penduduk desa. Contohnya, di salah satu desa di kabupaten Pidie, sekitar 65% GAM yang kembali telah menyelesaikan SMP, dibandingkan dengan 45% populasi umum.

*Gambar 4.4: Pekerjaan GAM Aktif Sebelum Bergabung Dalam GAM.<sup>38</sup>*



Sebelum bergabung dengan GAM, mayoritas GAM aktif (94.6%) memiliki pekerjaan. Sebagian besar GAM yang kembali dulunya bekerja sebagai petani (mantan kombatan 30.2%, tapol 42.8%) atau pedagang kecil (mantan kombatan 19.6%, tapol 20.3%) - lihat Gambar 4. Hanya 5.4% GAM aktif tidak memiliki pekerjaan sebelum bergabung. GAM yang kembali dari kabupaten wilayah barat lebih banyak berasal dari sektor pertanian (38.9%) dibandingkan dengan kabupaten wilayah timur (25.3%). Di kabupaten wilayah timur, persentase GAM yang dulunya pelajar lebih tinggi (11.5% dibandingkan 7.1% di wilayah barat). Data ini mencerminkan besarnya jumlah mantan GAM dalam kategori umur 18-25 tahun di wilayah tersebut.

*Gambar 4.5: Status Pekerjaan GAM Aktif yang Kembali Saat Ini.<sup>39</sup>*



Mayoritas GAM yang kembali belum mulai bekerja. Setelah hampir enam bulan sejak dimulainya proses perdamaian, hanya 25.4% GAM aktif yang sudah mulai bekerja (lihat Gambar 5). Sisanya masih mencari pekerjaan (42.2%) atau tidak bekerja (32.5%). GAM aktif di wilayah timur sedikit lebih banyak yang sudah mulai bekerja (27.5%) dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh (21.5%). Dari semua yang bekerja, proporsi terbesar adalah di bidang pertanian (lihat Gambar 2.6). Tidak ada perbedaan yang berarti antara status pekerjaan GAM yang kembali di kota dan desa. Terdapat berbagai alasan mengapa GAM yang kembali belum mulai bekerja. Awalnya, GAM yang kembali memilih memuaskan diri

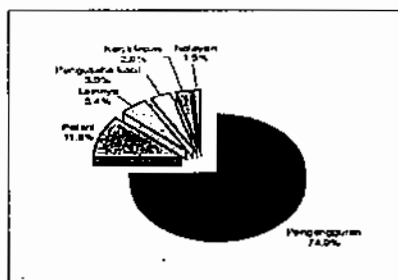
<sup>38</sup> Sumber: Survei AMM/WB 2006

<sup>39</sup> Ibid



dengan menghabiskan waktu bersama keluarga dan kawankawan, juga menyembuhkan diri dari pengalaman di gunung (saat menjadi separatis). Masa peralihan ini berjalan selama beberapa bulan dan keluarga mendukung mereka sepenuhnya. Namun sekarang, GAM yang kembali menyatakan bahwa kekurangan kesempatan dan modal menjadi alasan utama mereka belum kembali bekerja. Selain itu, beberapa GAM yang kembali dilarang bekerja karena menunggu perintah dari komandan. Di berbagai kabupaten, GAM yang kembali menjelaskan bahwa pemimpinnya sudah mengizinkan mereka untuk kembali bekerja karena kebutuhan. Mereka dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kembali ke sektor pertanian atau menemukan pekerjaan lepas, tetapi dilarang menemukan pekerjaan tetap. Namun situasi ini berbeda di tiap kabupaten, dan di beberapa kabupaten tergantung pada struktur komando di daerah tersebut.

Gambar .4.6: Pekerjaan GAM yang kembali Saat Ini.<sup>40</sup>



Dari semua mantan GAM yang kembali bekerja, mayoritas berkecimpung di bidang pertanian, perdagangan, atau pekerjaan sementara. Namun seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6, proporsi GAM aktif di setiap pekerjaan masih kecil karena banyak

yang tidak bekerja. Mereka yang memiliki akses terhadap lahan lebih mudah untuk kembali bekerja. Dari semua GAM aktif yang sudah bekerja, 72.7% memiliki akses terhadap lahan (dibandingkan dengan 55.5% responden lainnya dalam sampel).

Ibrahim Syamsuddin-KBS (Alm) mengatakan Pasca-MoU Helsinki, di Aceh tidak ada lagi kelompok sparatis. Separatis sudah selesai pasca-MoU.<sup>41</sup> Bentuk transformasi dalam tubuh GAM, juga ditandai dengan pembubaran struktur militer organisasi itu akhir Desember 2005, dengan membentuk komite Peralihan Aceh (KPA) yang dipimpin oleh Teungku Muzakir Manaf. Ketua AMM Peter Feith, mengatakan "kami tidak akan membiarkan mantan prajurit GAM

<sup>40</sup> Ibid

<sup>41</sup> Ibid.

telantar begitu saja seperti ayam kehilangan induk. Oleh karena itu, akan dibentuk KPA atau Komite Peralihan Aceh,"<sup>42</sup> KPA ini menjadi wadah peralihan pasukan GAM menjadi warga sipil biasa. GAM akan memulai hidup baru dengan nama Komite Peralihan Aceh (KPA). eks TNA otomatis akan di bawah Komite Peralihan Aceh.<sup>43</sup>

Pada bulan Januari 2006 Menteri Dalam Negeri menyerahkan rancangan UU tentang Pemerintahan Aceh yang telah direvisi kepada sekretariat negara; rancangan tersebut dipandang secara luas sebagai melemahkan otoritas yang dibayangkan sebelumnya untuk Aceh vis-à-vis pemerintah pusat. Isu yang dipermasalahkan lainnya adalah apakah kandidat independent dimungkinkan untuk ikut dalam pemilihan-pemilihan umum di Aceh. Pada bulan Februari 2006 Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dibentuk pada 11 Februari 2006, diberikan mandat untuk mengelola reintegrasi mantan anggota GAM dan kombatan. Pada 17 Februari, kantor Sentra Informasi Referendum Aceh (SIRA) diserang oleh mantan anggota milisi. Pada bulan Maret 2006 Fase enam bulan pertama AMM berakhir; perpanjangan selama tiga bulan disepakati dengan pengurangan jumlah pemantauan. Pada bulan Mei 2006, dalam sebuah kongres yang diadakan pada 22-23 Mei GAM memutuskan, di tengah faksionalisme yang pahit, untuk tidak ikut dalam konteks pemilu lokal tidak sebagai organisasi namun mengizinkan anggota-anggotanya untuk mencalonkan diri sebagai kandidat independent.

RI-GAM kembali melakukan pertemuan di Helsinki Finlandia untuk membahas sejumlah agenda terkait dengan kelangsungan hidup rakyat Aceh. Menurut informasi diperoleh di Den Haag, pertemuan tertutup tersebut berlangsung di salah satu hotel di Helsinki, Finlandia selama dua hari, yakni pada 4-5 Januari 2009. Menurut Koordinator World Acehnese Association (WAA), Tarmizi Age,<sup>44</sup> berdasarkan informasi yang ia diterima dari salah seorang delegasi GAM, pertemuan ini membahas agenda umum, seperti masalah keamanan dan hak-hak azasi masyarakat Aceh pasca konflik yang melibatkan kedua belah pihak. "Kami dapat informasi kalau pertemuan itu berlangsung secara tertutup dan hanya membahas masalah-masalah yang sifatnya umum,". GAM dan

<sup>42</sup> Serambi Indonesia, 21 Desember 2005

<sup>43</sup> Serambi Indonesia, 22 Desember 2005, Dibubarkan GAM ganti nama KPA

<sup>44</sup> Komunikasi via internet (Chatting) dengan saudara Tarmizi Age, 10 Januari 2009

Pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kredibilitas MoU yang telah ditandatangani kedua belah pihak di Finlandia pada 15 Agustus 2005 demi keberlangsungan perdamaian di Aceh. Dalam pertemuan tersebut, delegasi GAM, di antaranya diwakili Mentroe Malik, Dr. Zaini, Ampon Nazar dan Ibrahim Bin Syamsuddin (Alm), juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA). Sementara dari delegasi RI, di antaranya diwakili Menteri Infokom, Sofyan Djalil, dr. Farid Husain dan Dirjen Departemen Hukum dan HAM, Prof. Tuti. Pertemuan GAM dan RI itu dihadiri Juha Christensen dan Robert dari Yayasan Institute Perdamaian Indonesia (IPI) interpeace, Kelle dari Crisis Management Initiative (CMI) dan Pieter Fieth, Ketua Aceh Monitoring Mission (AMM).<sup>45</sup>

Namun pertemuan antara perwakilan pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Finlandia pada tanggal 4-5 Januari 2009 mendapat kritik Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi. Pertemuan tersebut bisa diartikan masih mengakui keberadaan GAM di Aceh. "Ini suatu pertemuan yang aneh menurut saya. Kenapa masih ada pertemuan di Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Ini berarti membenaran terhadap GAM. Kalau kita masih berunding dengan GAM dalam masalah keamanan dan lain-lain, berarti ada suatu pengakuan bahwa GAM itu masih ada,"<sup>46</sup> Seharusnya pemerintah Indonesia memiliki sikap yang tegas. MoU antara RI dan GAM sudah dilaksanakan, artinya, pemerintah Indonesia punya kewenangan untuk mengatur sendiri keadaan di dalam negeri. Pertemuan itu selayaknya tidak terjadi. Sudah menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pembinaan ke dalam terhadap pemerintah NAD.

"Jadi itu suatu setting menurut saya, pertemuan tersebut merupakan suatu langkah mundur untuk suatu masalah yang sangat krusial yang seolah-olah ada kegagalan dalam pelaksanaan MoU. Pemerintah harus jelaskan soal pertemuan tersebut,"<sup>47</sup>

<sup>45</sup>Waspada Online juga dapat di akses, [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=60083&Itemid=26](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=60083&Itemid=26), diakses pada, 2 Februari 2009

<sup>46</sup><http://www.detiknews.com/read/2009/01/06/183154/1064066/10/muladi-kritik-pertemuan-ri-gam-di-inlandia>, di akses 7 februari 2009.

<sup>47</sup><http://www.detiknews.com/read/2009/01/06/183154/1064066/10/muladi-kritik-pertemuan-ri-gam-di-inlandia>, di akses 7 februari 2009.

Namun demikian Prof Olle, berpendapat Inilah kesempatan sekaligus ujian bagi rakyat Aceh untuk menciptakan Aceh yang lebih damai dan demokratis. Karena itu, kendati telah mengecap madu perdamaian hampir 4 tahun,<sup>48</sup> masih ada pekerjaan rumah yang butuh perhatian serius yakni beberapa tantangan yang ia kemukakan dalam risetnya itu. Jika tidak ditanggapi sejak sekarang, maka demokrasi akan terancam karena bisa menyuburkan kolusi, korupsi dan nepotisme. Parahnya, dalam beberapa diskusi dan wawancara dengan tokoh-tokoh di Aceh, pria kelahiran Swedia itu menemukan bahwa perilaku yang tidak demokratis, seperti terjalannya pola-pola patronase, memberikan hak istimewa kepada kelompok tertentu dan dimaklumi oleh masyarakat. Dalilnya, Aceh masih menjalani masa transisi. Pria kelahiran Swedia itu mempertanyakan, berapa tahun dan berapa besar toleransi itu bisa dinikmati oleh mantan kombatan GAM? Dan kalangan aktivis Aceh serta intelektual "aneuk nangroe" menyatakan 5-10 tahun masa transisi itu. Setelah itu, mereka berbisnis secara profesional. Namun ada juga kalangan yang menjelaskan tidak ada masa transisi sebab Aceh sudah memiliki gubernur tetap yang dipilih secara demokratis.

Di sisi lain, Prof. Olle khawatir jika pembangunan ekonomi mendominasi wacana perdamaian di Aceh. Menurut dia, demi kelangsungan perdamaian, proses demokratisasi di Aceh selayaknya terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Dengan demikian terwujudnya pembangunan yang mencerminkan keinginan rakyat. Agar Aceh tidak jatuh dalam pola kesalahan yang sama, seperti yang lazim terjadi di daerah pasca konflik. Menitikberatkan pembangunan ekonomi secara berlebihan, dan mengesampingkan proses demokratisasi yang bersih, transparan dan akuntabel, akan menyuburkan praktek-praktek penyimpangan, baik secara politik maupun ekonomi. Akibatnya, akan ada kondisi yang terus menerus menguntungkan kelompok tertentu, mengabaikan penguatan demokrasi serta peningkatan partisipasi publik. Bahasa gampangya, jangan sampai pemenuhan hak-hak ekonomi menyumpal pemenuhan hak-hak politik dan demokrasi.<sup>49</sup>

Memang, pasca-perjanjian Helsinki, rakyat Aceh menikmati euforia di bidang politik. Hal ini bisa dipahami setelah 30 tahun lebih, hak-hak sipil

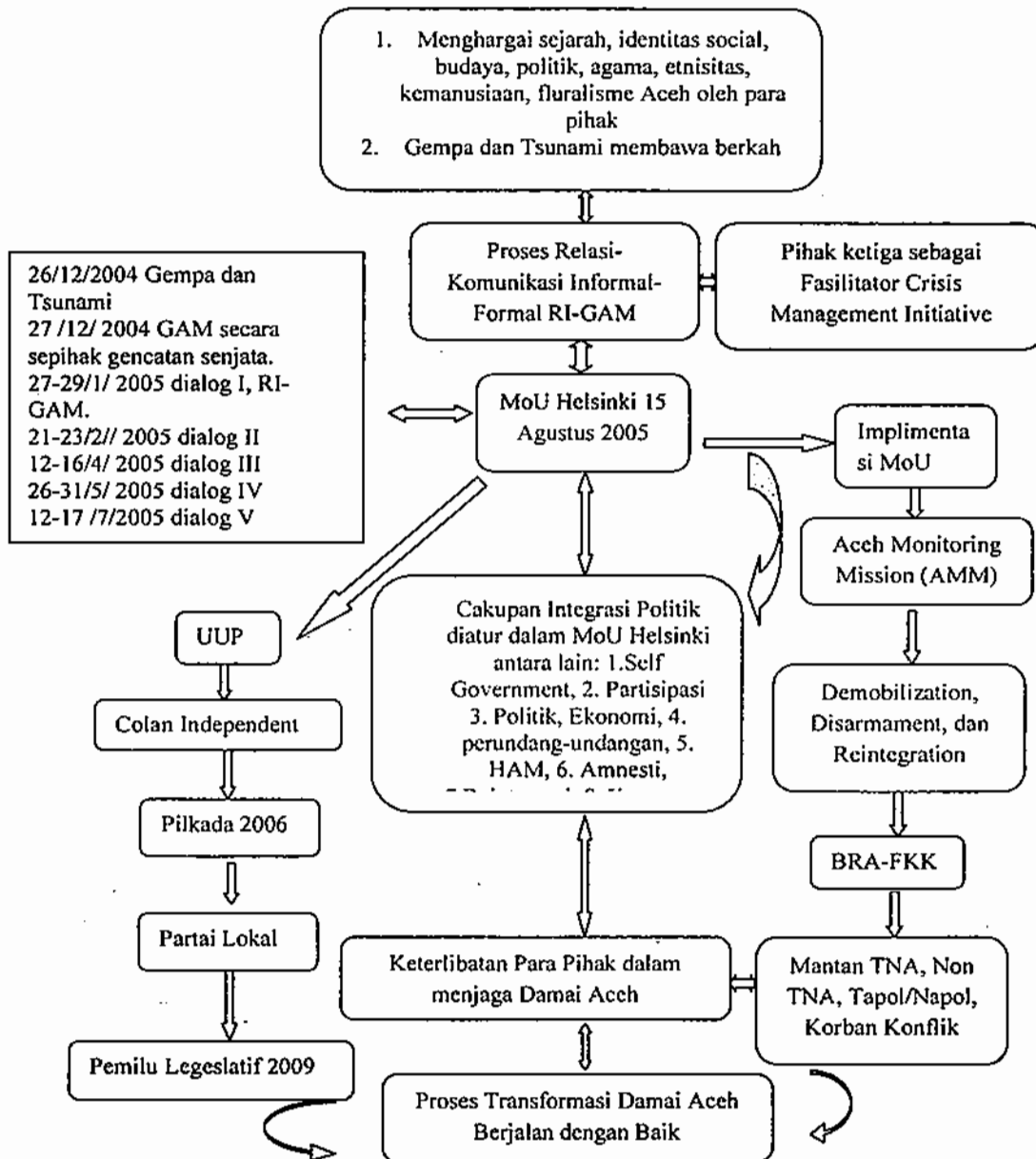
<sup>48</sup> Diskusi dengan Prof. Olle di Banda Aceh pada akhir 27 November 2008 yang diikuti oleh penulis dan juga dihadiri oleh kalangan wartawan di Nanggroe Aceh Darussalam

<sup>49</sup> Ibid

terbelenggu. Beberapa kalangan khawatir isu politik mendominasi, sehingga kemudian beranggapan pembangunan ekonomi harus mendapat prioritas saat ini. Isu politik dan demokrasi dianggap selesai sejak gubernur dan wakil gubernur baru terpilih, selebihnya rakyat cukup fokus “mengisi perut” mereka. Akibatnya, isu self government yang merupakan inti dari perjanjian Helsinki malah luput dari perhatian. Hasilnya, tidak semua butir-butir Helsinki menetes pada Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yang mengacu pada MoU Helsinki harus lebih ditelaah, dan dikupas, untuk diaplikasikan sebagai solusi perdamaian yang lebih berkelanjutan. Untuk perkara ini, penulis sependapat dengan Olle, yang sudah berpengalaman riset di Indonesia sejak tahun 1970-an. Pemerintah self government harus digali, dimaknai dan diterapkan, setelah rakyat Aceh untuk sementara menguburkan sodoran self determination alias referendum.

Rekomendasi umum penelitian LIPI (2003) terhadap persoalan Aceh sejalan dengan pandangan ini. Pemerintah seharusnya melakukan rekonstruksi sosial-kemanusiaan bagi Aceh melalui program-program yang nyata seperti pengentasan kemiskinan, meminimalkan pengangguran, rehabilitasi korban perang, rehabilitasi korban DOM. Selain itu, pemerintah juga harus membuat action plan tentang pembagian kekayaan alam secara teratur dan terstruktur dengan tahap-tahap yang pasti, termasuk penggunaannya bagi kesejahteraan rakyat aceh. Penelitian LIPI juga memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Aceh bukan karena faktor alam, namun lebih merupakan faktor struktural. Oleh karenanya diperlukan rekonstruksi industri. Terakhir adalah memberantas korupsi. MoU Helsinki, dengan mengacu pada berbagai pandangan yang menjadi dasar dari kriminologi kesejahteraan ini, adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memulihkan derita dan kerugian rakyat Aceh. Hanya saja tinggal di tahap implementasi melalui berbagai kebijakan yang berujung pada penciptaan Aceh yang lebih sejahtera. Proses transformasi konflik di Aceh sepertinya tidak semudah yang dibayangkan, mesti semua pihak terlibat secara proaktif. Proses tersebut terus berjalan sampai dengan saat ini dengan melewati berbagai fase. Dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.7. Proses Transformasi Konflik di Aceh.<sup>50</sup>



Beberapa point penting dalam nota kesepahaman (MoU) antara RI dengan GAM yang ditandatangani di Helsinki Finlandia ini adalah: *Pertama*, Aceh memiliki kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan. Kewenangan ini memperlihatkan Aceh yang otonom. Bahkan dalam hal kebijakan-kebijakan

<sup>50</sup> Analisis Penulis terhadap proses transformasi Konflik yang sedang berlangsung di Aceh

terkait dengan masalah Aceh, pemerintah pusat akan selalu mengkonsultasikannya dengan legislatif atau pemerintah Aceh. Aceh juga diperbolehkan menggunakan simbol, bendera dan himne sendiri. *Kedua*, khusus dalam bidang ekonomi, Aceh juga memiliki otonomi dalam sejumlah kebijakan, serta memperoleh penguasaan atas sumber daya alamnya sebesar 70%. *Ketiga*, pemerintah RI akan mematuhi kovenan internasional PBB mengenai hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. *Keempat*, pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh pemerintah Aceh. Beberapa ketentuan pokok dalam kesepakatan Helsinki terlihat dalam table 4.1.

Tabel 4.1. Beberapa ketentuan pokok dalam Kesepakatan Helsinki.<sup>51</sup>

POKOK PERSOALAN	KETERANGAN
Perdamaian Aceh	<p>Aceh akan menjalankan kewenangan diseluruh urusan publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan negara, masalah moneter dan fiscal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>Pemerintahan umum akan dilaksanakan pada bulan april 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh.</p>
Partisipasi Politik	<p>Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal (dengan jalan mengamandemen UU Pemilu) dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.</p>
Ekonomi	<p>Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri</p> <p>Aceh berhak atas 70% dari pendapatan dari kekayaan alamnya.</p> <p>Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara.</p>
Penegakan hukum	<p>Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Reintegrasi dan Rekonsiliasi) Aceh pasca tsunami.</p>
HAM	<p>Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer Aceh akan</p>

<sup>51</sup> Lihat MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2006; lihat juga Michel Ranner, Aceh Peacemaking after Tsunami," World watch Institute, lihat juga Ikra Nusa Bhakti dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, LIPI 2008, h. 22 dilihat juga <http://www.worldwatch.org/390/print>, h. 5.

Amnesti	diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.  Pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan.
Keamanan	Anggota GAM akan diberikan amnesty dan tahanan politik akan dibebaskan.  GAM akan membubarkan anggota bersentanya yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 Desember 2005.
Pengawasan	Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non-organik akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9.100 anggota polisi organik yang tetap berada di Aceh.  Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.

Ada sejumlah persoalan terkait dengan pelaksanaan kesepakatan damai Helsinki. *Pertama*, urusan demobilisasi dan pelucutan GAM dan penarikan pasukan non organik TNI dari Aceh diartikan berbeda oleh GAM dan pemerintah. Sesuai dengan MoU, GAM harus menanggalkan sayap militernya, selain itu pasukan non-organik TNI dan POLRI harus ditarik dari Aceh. Persoalan mengenai pelucutan dan demobilisasi telah berhasil diselesaikan melalui mediasi AMM yang beranggotakan pihak sipil dan militer dari Uni Eropaan dan anggota ASEAN. Pada 21 Desember 2005 GAM menyerahkan 142 senjata terakhir guna memenuhi ketetapan 840 senjata sesuai dengan MoU. Pada 31 Desember 2005, dilakukan upacara penarikan akhir atas 7.628 tentara dan 2.150 polisi yang melengkapi total jumlah pasukan yang ditarik menjadi 31.681. profesionalisme dan ketidakberpihakan yang ditunjukkan oleh AMM dalam membantu penerapan kesepakatan damai telah menuai banyak pujian dari pemerintah Indonesia, GAM dan masyarakat luas.<sup>52</sup>

<sup>52</sup> The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement: How Far have We Come? (Jakarta: The World Bank, Desember 2006), h. 1-5, lihat juga Internasional Crisis Group Asia Briefing No.44, Aceh: So far, So good, Jakarta/Brussels, 13 Desember 2005, tentang peran dan keberhasilan AMM lihat Kirsten E.Schulze, Mission Not So Impossible: The AMM Transistion from Conflick to Peace in Aceh, 2005-2006," Warking Paper No. 131, S. Rajaratnam School of Internasional Studies, Singapore, 29 Juni 2007. lihat juga pandangan mantan ketua Aceh Monitoring Mission, Piter Feith, The Aceh



Persoalan *kedua*, reintegrasi mantan anggota GAM baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial merupakan tugas yang sulit. Beberapa faktor dalam persoalan ini adalah masalah pendanaan, kompensasi yang tidak transparan, kecemburuan dari korban konflik Aceh terhadap GAM karena kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, penerimaan GAM oleh masyarakat Aceh, dan keanggotaan GAM untuk memberikan daftar anggotanya kepada pemerintah yang didasari kepada ketakutan GAM akan kegagalan MoU yang berbuntut pada mudahnya TNI dan POLRI untuk mengetahui kekuatan dan lokasi GAM di Aceh. Hingga februari 2006, laporan Bank dunia menunjukkan sekitar 75% anggota GAM yang kembali kemasyarakat masih menganggur. Selain itu, berkembang ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kemajuan bantuan reintegrasi dan kemarahan terhadap pemerintah dan para pemimpin GAM, terutama dari mantan pemberontak bersenjata (*combatant*) tingkat rendah dikarenakan banyaknya pemimpin mereka yang telah banyak memiliki mobil baru dan bertelepho genggam sementara mereka jauh dari hal itu. Kurangnya dukungan bagi para mantan *combatant* merupakan masalah serius. Hal tersebut dapat berakibat pada peningkatan angka kriminalitas dikarenakan anggota GAM yang patah arang tersebut kembali kepada pencarian pendapatan "alternatif" sebelumnya.<sup>53</sup> Persoalan *ketiga*, meskipun pemerintah mendirikan BRA yang terdiri atas pemerinta, LSM, intelektual, dan naggota GAM, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya dana, kewenangan yang terbatas, ketidakjelasan tugas kerja, dan program. Oleh karena itu LSM, intelektual manarik diri dari BRA.

Persoalan *keempat*, percepatan reintegrasi GAM juga tergantung pada penerimaan masyarakat Aceh. Oleh karenanya dibeberapa daerah di Aceh dilakukan upacara peusijek (penyejuk atau berdamai) oleh pemerintah dan masyarakat yang menyimbolkan adanya perdamaian. Hingga akhir 2996 terlihat tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat terhadap anggota GAM yang kembali. 90% anggota GAM tidak mengalami masalah ketika kembali dan hanya terdapat beberapa permasalahan kecil. Hal tersebut lebih karena mereka kembali

---

Peace Process. "Nothing Less Than Success," Special Report 184, United Institute of Peace, Maret 2007.

<sup>53</sup> The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement.....," h 3-4 di ambil dari Ikra Nusa Bhakti dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, LIPI 2008, h. 23

kekampung asalnya dan bertemu dengan penduduk yang telah mereka kenal sebelumnya.<sup>54</sup> Persoalan lain tentang reintegrasi anggota GAM yang tidak kalah pentingnya adalah 1. kurangnya penerimaan GAM oleh militer dan sebaliknya. 2. potensi konflik horizontal antara mantan GAM dan anggota milisi yang didirikan oleh militer. Masih terbukanya kemungkinan milisi menjadi pemilu konflik horizontal dimasa yang akan datang. 3. sekitar 75% mantan anggota aktif GAM berusi sekitar 18 sampai dengan 25 tahun. Bila anggota GAM yang berusia lebih tua dahulunya merupakan anggota berpendidikan yang terlibat dalam pemerintahan sipil GAM sedangkan kebanyakan anggota yang berusia muda kurang terdidik. Tidak mengherankan laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 75% mantan anggota GAM masih berstatus pengangguran.<sup>55</sup>

Persoalan *kelima*, penerimaan MoU dan reintegrasi GAM tidak menyentuh aspek integrasi sikap dan psikologi secara utuh terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota GAM berpendapat jika proses perdamaian gagal, mereka akan memilih untuk kembali ke hutan dan hutan lagi.<sup>56</sup> Artinya, hal tersebut tergantung pada konsistensi dan kesungguhan pemerintah untuk mengintegrasikan anggota GAM kedalam RI dan kemampuan pemerintah baru di Aceh untuk memberikan kemakmuran ekonomi kepada mantan anggota GAM dan masyarakat Aceh secara luas. Hal ini bergantung pada anggota GAM untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan politik barunya dan menanggalkan tuntutan kemerdekaan.

Memang damainya Aceh bukan ditentukan oleh masalah dana saja, tetapi juga sejauh mana stakeholders seperti Pemerintah pusat dan daerah, BRA, FKK, KPA, Intelektual/Akademisi, aktifis, tokoh agama, tokoh adat, LSM dan Pers. Berkomunikasi dan ikut berpartisipasi untuk mendorong proses transformasi konflik Aceh, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks ini transformasi dapat dipandang sebagai proses penyatuan kembali mantan GAM, korban konflik baik secara sosial, budaya maupun politik dan ekonomi kedalam masyarakat Aceh. Ini memberikan makna suatu transformasi konflik secara

<sup>54</sup> Detail lebih lanjut dapat dilihat pada World Bank, GAM Reintegration Need Assessment: Enhancing Peace Through Community-Level Programming, (Banda Aceh / Jakarta: World Bank/DSF, 2006).

<sup>55</sup> Ibid. lihat juga Moch. Nurhasim, Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki; Peluang dan Kendala", makalah seminar yang tidak diterbitkan.

<sup>56</sup> Waspada Online, www.waspada.co.id, 31 Agustus 2005

kontinu dan solid. *Pertama*, tidak sedikit yang memuji kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono-Yusuf Kall (SBY-JK) dalam menangani masalah Aceh.<sup>57</sup> Sejak pasangan ini berkuasa (2004), Aceh relatif mendapatkan perhatian yang sangat serius dari Pemerintah Pusat. Bahkan terobosan yang dibuat pemerintah tergolong berani. Secara umum dampaknya sangat signifikan terhadap kehidupan di Aceh. Khususnya dalam menciptakan Aceh yang damai. Keberhasilan pemerintah SBY-JK tersebut dalam menghentikan konflik bersenjata (GAM-TNI) dan melucuti hampir seluruh tentara GAM, merupakan langkah kongkrit untuk mengakhiri era kekerasan. Karena mereka mau untuk belajar dari pemerintahan yang sebelumnya yang senantiasa gagal dalam menyelesaikan Aceh secara damai, pemerintah SBY-JK membuat terobosan yang mengejutkan dengan mendekati aktor penting GAM untuk diajak berdialog dan menyelesaikan masalah Aceh secara bersama dengan pemimpin RI. Meskipun langkah ini tidak sedikit menimbulkan pro dan kontra, dan tidak sedikit juga kalangan yang menghargai keputusan pemerintah tersebut karena memberikan solusi kongkrit bagi perdamaian Aceh.

Disisi lain semangat yang ditunjukkan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam merespon proses transformasi juga cukup besar. Namun belum banyak catatan penting yang dimainkan pemda untuk mendorong proses tersebut.<sup>58</sup> Sebagai contoh, pada tahap awal prose damai Aceh peran pemerintah daerah tidak sebesar peran pemerintah pusat. Padahal dukungan penuh pemda terhadap BRA dan peningkatan efektifitas lembaga-lembaga yang ada ditingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung reintegrasi sangat diperlukan. Hal ini penting sebagai catatan bahwa kedepan pemda harus berperan lebih kongkrit dan aktif dalam mendorong dan menyukkseskan transformasi konflik termasuk proses reintegrasi Aceh. Harapan sebagian besar tokoh masyarakat lokal, cukup beralasan karena perhatian penuh pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota cenderung ke realisasi UU No.11 tahun 2006 (tentang Pemerintahan Aceh).

<sup>57</sup> Hasil diskusi dan wawancara dengan beberapa, akademisi, intelektual, tokoh Aceh, aktifis dan mantan kombatan GAM, Juni 2008

<sup>58</sup> Hasil wawancara mendalam Tim peneliti LIPI pada 23 Mei 2007 di Banda Aceh, dengan salah satu birokrat Pemprov Aceh mengatakan bahwa masalah reintegrasi dan transformasi konflik diserahkan sepenuhnya kepada BRA. Oleh karenanya Pemprov tidak ikut campur dan cenderung menyerahkan kepada BRA.

Kekhawatiran muncul karena proses transformasi termasuk reintegrasi Aceh terkesan dilaksanakan kurang maksimal dan kurang mendapatkan perhatian yang serius dari pemda. Pada saat yang sama muncul anggapan yang sama bahwa terutama proses reintegrasi adalah tugas dan kewajiban pemerintah pusat untuk menuntaskannya cenderung menguat. Padahal ketergantungan penuh pada pemerintah pusat sangat tidaklah tepat karena dalam konteks reintegrasi ini pemda dinilai lebih memahami daerahnya ketimbang pemerintah pusat. Apalagi BRA bertanggungjawab langsung kepada gubernur, sehingga sangat logis kalau sukses tidaknya reintegrasi sebagian akan ditimpakan kepada gubernur ketimbang presiden.

*Kedua*, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dibentuk atas inisiatif pemerintah pusat melalui intruksi presiden No. 15 tahun 2005. gubernur NAD menindaklanjutinya dengan mengeluarkan keputusan tentang pembentukan badan tersebut, 2 Mei 2006. meskipun dalam realisasinya menjadi tanggungjawab gubernur NAD, pemerintah pusat memberikan dana kepada BRA untuk mendukung semua aktifitasnya. Secara organisasi pengurusnya terdiri atas: pengarah: Menko Polhukam, Menko kesra, medagri, menkominfo, menteri hukum dan HAM, mensos, menkeu dan Ka Bapenas. Ketua: Gubernur NAD. Ketua harian dan 3 koordinator bidang. Sekretaris: 1 kepala sekretaris dan 1 wakil kepala sekretaris. Anggota: dinas-dinas terkait. Pembentukan BRA tidak lain dimaksudkan sebagai program pendampingan dari pusat. Adapun program utama BRA meliputi: (a) bantuan kesejahteraan dan sosial untuk masyarakat korban konflik dan (b). memfasilitas budaya lokal untuk perdamaian NAD. Strukturnya meliputi kelompok yang bekerja di beberapa bidang: ekonomi, polhukam (politik, hukum dan keamanan) dan HAM; sosial dan kesra (kesejahteraan masyarakat); data dan keuangan. Awalnya pengurus BRA terdiri dari birokrat dan TNI, mantan GAM, intelektual dan unsur masyarakat. Dalam perkembangannya, BRA mengalami perombakan pengurus baik karena adanya konflik internal maupun badan ini dinilai kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya karena kucuran dana yang kurang lancar. Oleh karena itu kepengurusan BRA terbaru akhirnya banyak dihuni oleh para birokrat dan sebagian lainnya dari unsur masyarakat. Dalam melaksanakan aktifitasnya, BRA didukung oleh Forbes (forum bersama) damai

Aceh dan badan pelaksana reintegrasi damai aceh dan badan pengawas damai aceh. BRA yang ditugasi untuk melaksanakan program-program dibidang ekonomi, bidang politik, hukum dan keamanan, Ham, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat serta bidang data dan evaluasi, cenderung menghadapi banyak kendala, dan munculnya kekecewaan dalam masyarakat.<sup>59</sup>

Padaahal secara bertahap, pemerintah telah mengucurkan dana ratusan milyar yang diberikan kepada mantan TNA, mantan napol dan korban konflik. Pada tahun 2006 misalnya, BRA telah mengucurkan dana reintegrasi sebesar Rp. 200 milyar, tahun 2007, direncanakan dana sebesar Rp. 700 milyar untuk program reintegrasi.<sup>60</sup> Secara keseluruhan, dana reintegrasi untuk para korban konflik, mantan GAM, mantan Pembela tanah air (Peta) direncanakan mencapai 1,5 trilyun, sedangkan yang sudah disalurkan pada tahun 2005-2006 Rp. 800 milyar. Meskipun belum semua jumlah dana tersebut dikucurkan pemerintah, sekurang-kurangnya pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung proses reintegrasi. Peliknya masalah yang dihadapi oleh pengurus BRA, khususnya berkaitan mengenai teknis dan dana, Yusni mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan lembaga ini sebagai lembaga tingkat nasional. Struktur organisasinya harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau dengan surat keputusan presiden. Wacana itu, sudah lama ada, hanya saja selama ini belum diusulkan kepada presiden. Masalahnya, bagaimana menghadapi dan mengantisipasi emosi korban yang cenderung tinggi di Aceh yang jumlahnya sangat banyak itu. Bagaimana pula bila yang pokok-pokoknya saja dari program BRA belum tersentuh; lantas masyarakat akan puas dan tidak kecewa. Oleh sebab itu, Yusni

<sup>59</sup> Hasil wawancara mendalam Tim peneliti LIPI dengan Forbes dan Sira selama bulan Mei 2007 bahwa kinerja BRA masih jauh dari yang diharapkan. Pengembalian hak politik, ekonomi, social dan budaya serta kemudahan ekonomi seperti jamainan social, pemilikan tanah dan pekerjaan belum memuaskan bagi korban konflik dan mnatan kombatan.

<sup>60</sup> Serambi Indonesia, 5 Februari 2007, kekurangan dana reintegrasi untuk tahun 2007 dalam APBN, menimbulkan kegusaran sejumlah kalangan di Aceh. Menurut Prof. Yusni Saby, kekurangan dana reintegrasi tahun 2007 diperkirakan mencapai Rp. 450 milyar. Ini adalah tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Kalau tidak program integrasi akan macet, sehingga dikhawatirkan berdampak buruk terhadap proses perdamaian di Aceh, yang sudah berjalan hamper dua tahun. Yusni Saby "kita harus terus memperjuangkan agar dana ini sesuai dengan komitmen awal pemerintah yakni Rp. 700 milyar. Karena ini adalah program pemerintah, bias saja pemerintah punya kebijakan lain yang kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan, saya yakin itu akan berhasil.

mengusulkan agar BRA kedepan memiliki otonomi mengelola dana sendiri agar programnya tidak tersendat-sendat.

*Ketiga*, pada tanggal 18 Maret 2007 pemerintah pusat membantu forum komunikasi dan koordinasi (FKK) yang semua pengurusnya adalah orang pusat. Mereka ini berasal dari beberapa departemen (Depdagri, Menkopolkam, Bapenas). FKK ini merupakan bagian dari Desk Aceh yang fokusnya adalah perdamaian dan reintegrasi dan lebih merupakan badan *ad hoc* atau yang menjembatani antara pemerintah pusat dan NAD, dan tidak mempunya perwakilan di daerah (Aceh). Oleh karena itu, FKK mengemban tugas khusus dalam konteks proses reintegrasi, yaitu untuk menginformasikan perkembangan proses damai dan reintegrasi di Aceh. Peran mediasi yang dilakukan oleh FKK ini bukan tanpa kritik. Tidak sedikit aktifis LSM Aceh yang memnpertanyakan peran atau posisi FKK dalam konteks perdamaian dan reintegrasi Aceh. Dalam acara peretemuan antara pengurus FKK dan sejumlah LSM dan tokoh lokal di Aceh (25 Mei 2007).<sup>61</sup> Secara eksplisit dipertanyakan posisi dan peran FKK khususnya dalam proses reintegrasi Aceh. Meskipun ketua FKK telah menjelaskan peran dan fungsi serta kedudukan FKK hanya sebagai badan *ad hoc* yang melakukan komunikasi dan tidak keputrusan dalam proses reintegrasi dan perdamaian Aceh, para aktivis tampaknya masih belum puas dengan jawaban tersebut. Sedangkan dari perspektif pemerintah pusat dengan dibubarkannya AMM berarti tanggungjawab masalah pertahanan, keamanan dan stabilitas Aceh ada di pundak pemerintah pusat. Sulit dipungkiri bahwa pemerintah pusat masih sangat mengkhawatirkan kondisi Aceh pasca MoU pada umumnya dan pasca pembubaran AMM pada khususnya. Ditataran empirik menunjukan bahwa masyarakat Aceh cenderung lebih percaya pada keterlibatan asing dalam menyelesaikan Aceh ketimbang kepada pemerintah pusat. Lemahnya kepercayaan mereka terhadap pemerintah pusat ini menjadi kendala tersendiri dalam penciptaan pola hubungan Jakarta-Aceh yang harmonis.

*Keempat*, Komite Peralihan Aceh (KPA) dibentuk untuk menjaga kendali dan sebagai sumber atau data informasi tentang mantan kombatan GAM.

---

<sup>61</sup> Penulis ikut hadir dalam pertemuan antara FKK dengan LSM serta tokoh-tokoh local Aceh yang diadakan di Forbes Aceh, 25 Mei 2007 Banda Aceh.

Pengurusnya terdiri atas panglima-panglima GAM dari tingkat kecamatan sampai provinsi. Menurut dari beberapa narasumber dari unsur GAM, KPA merupakan wadah bagi mantan kombatan agar mereka tidak merasa seperti anak ayam kehilangan induknya. Melalui wadah ini dimaksudkan agar mantan GAM atau kombatan tetap dalam kendali. Dalam konteks reintegrasi, data yang diberikan KPA sangat membantu dalam menginformasikan orang-orang mantan GAM yang perlu mendapatkan santunan. Dengan melihat posisi KPA dalam struktur organisasi sosial di Aceh, jelas bahwa KPA ini lebih mengutamakan kepentingan para mantan GAM atau kombatan. Demikian juga dalam kaitannya dengan proses reintegrasi, KPA menempatkan diri sebagai informan atau narasumber penting personil mantan GAM atau kombatan yang harus mendapatkan dana dari BRA.

Namun dalam perkembangannya KPA cenderung memperluas cakupan perannya seperti yang ditunjukkan di Aceh Utara dengan menggantikan posisi dan peran lembaga-lembaga non-formal seperti ulama, tokoh adat, keuchik, mukim. Kecenderungan memperluas cakupan kerja KPA ini meresahkan masyarakat. Karena itu akan melumpuhkan tugas utama para ulama, tokoh adat, keuchik, dan mukim. Bila sebelum ada KPA para tokoh tersebut sangat berperan penting di masyarakat, namun sekarang peran tersebut cenderung diambil alih oleh KPA. Perluasan peran KPA tersebut bisa jadi akan menyerupai intervensi militer dalam kehidupan masyarakat bila tidak ditempatkan pada posisinya yang tepat. Oleh karena itu, kajian secara serius dan cepat sangat diperlukan, untuk memberikan solusi atas peran KPA yang proporsional dalam konteks reintegrasi. Ini dimaksudkan agar KPA tidak mengulangi kesalahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tempo dulu yang terlihat dalam politik dan birokrasi. Masalahnya, tidak tertutup kemungkinan KPA cenderung mengikuti sepak terjang ABRI, yaitu menempatkan lembaganya paralel dengan birokrasi.<sup>62</sup>

*Kelima*, dari beberapa elemen kekuatan yang ada dalam masyarakat, peran pers dan LSM cenderung signifikan dalam mendorong proses transformasi konflik ke arah positif termasuk reintegrasi. Sedangkan peran tokoh agama dan adat belum memberikan kontribusi yang kongkret karena beberapa organisasi

---

<sup>62</sup> Hasil penelitian LIPI tentang reintegrasi pasca MoU tahun 2007, penulis terlibat secara aktif dalam penelitian LIPI tersebut.

keagamaan dan adat juga baru terbentuk pasca 1998, khususnya jumlahnya makin banyak sejak otonomi khusus diterapkan di Aceh (UU No.18 tahun 2001). Pada dasarnya semua elemen kekuatan dalam masyarakat Aceh sepakat untuk mewujudkan Aceh yang damai. Hal ini antara lain tercermin dalam hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan lokal<sup>63</sup> dan berita-berita yang dimuat oleh beberapa koran lokal. Semangat mereka sama, yaitu keluar dari konflik. Perbedaan dalam derajat berkontribusi dalam proses transformasi melalui reintegrasi sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki sehingga ada yang mampu memberikan perannya lebih kongkret, tetapi ada juga yang cenderung normatif.

Dapat dipastikan proses transformasi konflik Aceh dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik melibatkan semua pihak atau stakeholders seperti pemerintah pusat-daerah, intelektual/akademisi, aktifis, LSM, BRA, FKK, KPA maupun dunia Internasional. Pada level daerah ada beberapa pihak yang mesti terlibat secara aktif dalam proses tersebut. Untuk memperjelas peran para pihak tersebut di Aceh, berikut ini disajikan table ringkasannya.

*Tabel 4.2. Posisi para pihak dalam proses transformasi konflik di Aceh.<sup>64</sup>*

Institusi/tokoh	Fungsi dan peran di Tataran Praksis
Pemerintah Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Fasilitator Transformasi Konflik termasuk Reintegrasi</li> <li>2. Membarikan bantuan dana melalui BRA</li> <li>3. Membantu proses Transformasi konflik antara lain melalui proses reintegrasi dan FKK</li> </ol>
Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong realisasi proses reintegrasi dan sekaligus menjembatani kepentingan pusat dan daerah</li> <li>2. Lebih berperan sebagai coordinator dan komunikator ketimbang bertindak riil dalam realisasi program-program reintegrasi.</li> <li>3. Memonitor jalannya reintegrasi (sebagai mata dan telinga pemerintah pusat)</li> </ol>

<sup>63</sup> Penelitian LIPI tentang peran pemangku Jabatan dalam proses reintegrasi, tahun 2007

<sup>64</sup> Diolah dari berbagai sumber dan dikombinasikan dengan salah satu hasil penelitian LIPI yang ditulis oleh R.Siti Zuhro dalam Laporan Penelitian LIPI tentang Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, 2007



Pemerintah Aceh	Memerankan peran terbatas dalam proses reintegrasi dan menyerahkan semua tugas reintegrasi kepada BRA.
Badan Reintegrasi Aceh (BRA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat strategi, kebijakan, program dan prosedur pemberdayaan ekonomi dan bantuan social untuk korban konflik (sebagai pedoman bagi BRA Kabupaten/Kota)</li> <li>2. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi (untuk mantan TNA, mantan Tapol/Napol, GAM non TNA dan relawan PETA)</li> <li>3. Memonitor dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi dan bantuan social untuk korban konflik yang dilakukan oleh BRA kabupaten/Kota.</li> <li>4. Mendata dan mengklasifikasikan mantan kombatan dan korban konflik serta menyalurkan dana ke mereka.</li> <li>5. Menyalurkan bantuan penguatan ekonomi kepada mantan kombatan GAM dan memberikan dana kompensasi dalam bentuk diyat bagi korban konflik.</li> <li>6. Memantau proses verifikasi kelayakan dan memastikan bahwa bantuan digunakan secara produktif.</li> </ol>
Komite Peralihan Aceh (KPA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai kekuatan politik setengah militer dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, peran KPA memberikan informasi/data kepada BRA tentang mantan kombatan GAM yang berhak mendapat dana bantuan.</li> <li>2. Di beberapa Kabupaten/kota, seperti Aceh Utara peran dan fungsi KPA cenderung menggantikan posisi ulama, tokoh adat, <i>keuchik</i>, dan mukim. Artinya ada perluasan peran dan fungsi KPA yang tidak semata-mata sebagai pemberi informasi atau data.</li> </ol>
Pers	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengubah wajah pers menjadi lebih damai yang mendukung sosialisasi proses transformasi konflik dengan mengedepankan terwujudnya Aceh yang damai.</li> <li>2. Menginformasikan dan memperkuat upaya membangun tali silaturahmi diantara mantan kombatan, warga korban konflik, warga umum dan aparat pemerintah termasuk TNI/Polri.</li> <li>3. Mengubah opini masyarakat dengan menonjolkan pentingnya membangun perekonomian Aceh.</li> <li>4. Pers cenderung memuat berita-berita yang menyejukkan ketimbang konflik, untuk lebih menciptakan stabilitas politik di Aceh.</li> </ol>

Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO-CSO)	Secara umum, LSM-LSM baik dalam negeri maupun luar negeri memainkan peran penting baik dalam aspek ekonomi maupun psikologi, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan politik. Hal ini dilakukan seiring dengan upaya realisasi program <i>trust building</i> untuk menciptakan kebersamaan diantara warga yang terbelah demi tercapai transformasi yang positif.
Forum Bersama (Forbes)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forbes berfungsi sebagai penasehat dalam realisasi proses transformasi melalui program-program BRA.</li> <li>2. Forbes juga sebagai komite pemantau yang melibatkan KPA, kelompok sipil dan perwakilan masyarakat.</li> </ol>
Tokoh adat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ikut mensosialisasikan proses transformasi konflik dan reintegrasi meskipun belum maksimal.</li> <li>2. Lembaga adat ikut berperan penting dalam menciptakan Aceh yang damai.</li> </ol>
Tokoh Agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemuda Agama berperan penting dalam menyerukan Aceh yang damai dan menjauhkan konflik.</li> <li>2. Perannya lebih bersifat himbauan, anjuran dan ajakan kepada masyarakat agar ikut menunjang proses transformasi konflik melalui proses reintegrasi.</li> </ol>
Intelektual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran kongkrit intelektual dalam proses transformasi konflik melalui reintegrasi adalah mendorong realisasidan percepatan proses transformasi konflik melalui proses reintegrasi</li> <li>2. Banyak intelektual/akademisi local yang bergabung dalam badan-badan/lembaga dilokal untuk menciptakan Aceh yang damai dan demokratis. Sebagai contoh, Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry (Prof. Yusni Saby) pernah menjabat ketua BRA, Penulis sebagai Dosen di Unimal juga pernah terlibat dalam BRA Kabupaten Aceh Utara tahun 2006.</li> <li>3. Melalui tulisan-tulisannya, para intelektual juga berperan signifikan dalam menyuarakan Aceh yang damai.</li> <li>4. Ikut mengkritisi kebijakan pemerintah bila itu dinilai bertentangan dan tidak konsisten dengan tekad mewujudkan transformasi melalui reintegrasi.</li> </ol>

Selain itu keterlibatan pihak internasional, baik itu PBB, organisasi internasional, negara, individu atau NGO, tidak dapat serta merta masuk ke dalam arena konflik sebuah Negara begitu saja. Laue mensyaratkan tiga kondisi yang

harus terjadi jika intervensi pihak ketiga ingin berjalan secara efektif.<sup>65</sup> *Pertama*, adanya keinginan untuk bernegosiasi atau terlibat dalam aktifitas *problem solving*. Tanpa keinginan tersebut, intervensi tidak akan pernah terjadi kendati ada hakim yang memerintahkannya. *Kedua*, tersedianya forum yang dapat disepakati oleh semua pihak. Forum tersebut haruslah memenuhi criteria tempat, kondisi dan *setting* yang tepat, memungkinkan terjangkau oleh media, dan lain lain. *Ketiga* adalah adanya kredibilitas pihak yang melakukan intervensi. Dalam konflik internal, kondisi pertama biasanya sukar terjadi dalam konflik sebab setiap kelompok selalu memiliki asumsi negatif atau kebencian yang mendalam terhadap lawannya. Setiap kelompok lebih suka menyelesaikan masalah secara *win-lose-solution* dengan menggunakan kekuatan kekerasan atau militer. Untuk itu, masyarakat internasional harus menciptakannya dan memaksakan kondisi tersebut kepada setiap kelompok yang bertikai. Pemaksaan ini bisa bersifat halus, seperti upaya pendekatan politik yang menjelaskan sisi negatif atau destruktif dari diteruskannya konflik dari pada menciptakan damai, atau pemaksaan yang bersifat koersif, seperti sanksi baik secara ekonomi, politik atau militer terhadap setiap kelompok yang bersikeras memilih jalan kekerasan. Intervensi pihak ketiga harus melahirkan hasil-hasil yang inovatif. Untuk itu, Fisher mensyaratkan empat strategi penting yang harus dilakukan;<sup>66</sup> menimbulkan motivasi positif yang saling mutualistik; menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur; mendiagnosa berbagai isu dan proses konflik, dan; membuat aturan interaksi melalui rangkaian kerjasama *problem solving*.

Selain PBB, organisasi regional dan individu, NGO juga merupakan actor transformasi konflik yang diakui dalam masyarakat internasional. Secara Umum NGO didefinisikan sebagai lembaga *private, voluntary, non-profit*; dimana anggota-anggotanya mengkombinasikan kemampuan, cara dan energi mereka dalam mencapai tujuan dan idealita.<sup>67</sup> Walaupun tidak memiliki legalitas formal

<sup>65</sup> James H. Laue. "The Emergence of Institutionalization of Third Party Roles in Conflict", dalam John Burton and Frank Dukes (eds). *Conflict: Reading in Management and Resolution*, London: MacMillan, 1990, h.267-268

<sup>66</sup> Ronald J. Fisher. "Interactive Conflict Resolution" in I.W. Zartman and J.L. Rasmussen (eds.). *Peace making in international Conflict: Methods and Techniques*, Washington D.C.: USIP, 1997, h.259

<sup>67</sup> Farouk Mawlawi, "New Conflicts, New Challenges: The Evolving Role for Non-Governmental Actors", *Journal of International Affairs*, Vol.46, No.2, (Winter 1993), h.392

sekuat PBB atau organisasi regional, NGO adalah organisasi yang paling mampu menjembatani berbagai kesulitan yang dihadapi aktor-aktor lain dalam penyelesaian konflik dan transformasi konflik. Ketiadaan kedaulatan yang dimiliki organisasi non-pemerintah menjadi senjata kuat baginya untuk memasuki wilayah-wilayah terlarang tanpa kekhawatiran penolakan pengakuan resmi. HDC dan CMI adalah dua contoh NGO internasional. Ada beberapa alasan mengapa dalam resolusi konflik NGO memiliki peranan sangat penting bahkan lebih berpengaruh dari dua aktor lainnya. Pertama, *un-officialstatus*; kedua, *impartial*; ketiga, komitmen dan tanggungjawab dalam jangka panjang; keempat, mampu memberikan peringatan dini dan aksi preventif.<sup>68</sup> Aksi preventif dan peringatan dini mampu dilakukan oleh NGO karena mereka dapat mempelajari berbagai kultur dan sejarah kedua belah pihak secara obyektif. Informasi ini bisa mereka dapat kandi jaringan-jaringan NGO yang relatif lebih mudah didapat daripada jaringan-jaringan resmi yang harus mengikuti berbagai protokoler kenegaraan. Diplomasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi antar pemerintah merupakan diplomasi *track one (official mediation)*. Jika gagal, maka diplomasi *track two (unofficial)* kadang-kadang menjadi alternatif yang relatif mudah diterima.<sup>69</sup> Kehadiran *unofficialactors* dalam penyelesaian konflik sangat membantu para *official actors*.<sup>70</sup> Mediasi *un-official* jauh lebih mampu menyelesaikan masalah daripada seorang diplomat profesional sekalipun dalam mencegah jawaban-jawaban hipotetik. Para praktisi *unofficial* lebih mampu menjadikan konflik *win-lose* atau yang didasarkan atas *power* menjadi ke arah terbentuknya komunikasi, *confidence building*, *problem solving*, sehingga menjadi *win-win situation*.

### III. REINTEGRASI SETENGAH HATI

Tujuh bulan setelah MoU Helsinki di tandatangani, kemajuan telah tercapai dalam melaksanakan butir-butir kesepakatan. GAM telah menyerahkan 840 senjata, 31.681 TNI dan Polri meninggalkan propinsi Aceh, GAM secara resmi ditarik. Misi Monitoring Aceh (AMM) dengan sukses mengawasi proses

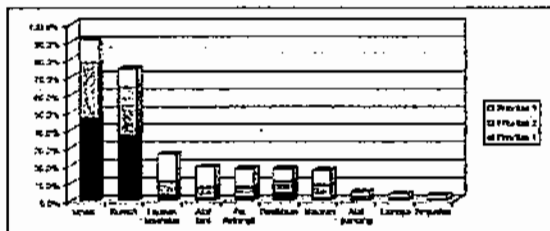
<sup>68</sup> *ibid*, h.396-403

<sup>69</sup> *ibid*, h.397

<sup>70</sup> J. Lewis Rasmussen. "Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington, D.C., USIP, 1997, h.42

pelucutan, penampungan, demobilisasi, dan menyelidiki beberapa dugaan pelanggaran terhadap butir kesepakatan. Saat itu juga Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (RUU-PA) dibahas di Aceh dan Jakarta. Bagian 3 dari Nota Kesepahaman mengatur proses untuk membantu reintegrasi mantan kombatan GAM dan tahanan politik (Tapol/Napol) ke kampung-kampung dalam masyarakat Aceh, yang meliputi kemudahan ekonomi, rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik, alokasi tanah pertanian, pekerjaan, dan jaminan sosial untuk mantan kombatan, Tapol/Napol serta masyarakat yang terkena dampak. Kebutuhan GAM dalam bereintegrasi dapat dipertanyakan. Ada sedikit irisan (cleavage) antara kombatan dan masyarakat umum. Namun pengalaman internasional menunjukkan bahwa peralihan dari kehidupan militer ke kehidupan masyarakat bisa bermasalah dan berbagai kelompok, termasuk perempuan, bisa tersisih di dalam proses itu. Setiap orang membutuhkan pekerjaan dan keahlian baru. GAM yang kembali membutuhkan tempat tinggal, tanah, dan akses terhadap layanan kesehatan. Masyarakat juga perlu mendapatkan bantuan.<sup>71</sup>

Gambar 4.8: Prioritas Kebutuhan GAM Aktif.<sup>72</sup>



Dari berbagai survey menyebutkan bahwa GAM yang kembali kekurangan modal sebagai rintangan terbesar dalam meningkatkan mata

pencapaian. Pernyataan ini khususnya sesuai bagi mereka yang ingin bekerja di bidang pertanian dan yang ingin mendirikan usaha kecil. Beberapa GAM yang kembali berbicara banyak mengenai peluang kerja yang tersedia di daerahnya dan bantuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan peluang tersebut. Hasil survey AMM, Worldbank 2006,<sup>73</sup> menunjukkan kebutuhan sesuai dengan prioritas oleh GAM aktif yang disurvei. Pemberian modal dianggap sebagai kebutuhan

<sup>71</sup> Diskusi dan Pendapat Dr. Nasir Arafat Ketika masih menjadi Ketua BRA Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe 2006, saat itu penulis masih aktif dalam struktur lembaga BRA Aceh Utara tahun 2006

<sup>72</sup> Hasil Survey AMM-Worldbank, Mei 2006

<sup>73</sup> Hasil Survey AMM-Worldbank, Mei 2006

terpenting (91.7% mengatakan bahwa pemberian modal adalah prioritas, dan 46.9% prioritas utama), diikuti dengan pembangunan rumah (74.6%), layanan kesehatan (26.2%), pelatihan ketrampilan (18.4%) dan pendidikan formal (18.3%). Secara umum, GAM aktif laki-laki dan perempuan memprioritaskan kebutuhan yang serupa.

"Kebutuhan kami sama dengan masyarakat Kami ingin diperlakukan sama. Kalau tidak maka akan menimbulkan konflik baru. Lebih baik kalau anda membuat program-program untuk masyarakat, seperti kami ini kan masyarakat, jadi kami sudah termasuk di dalamnya."<sup>74</sup>

"Saya bergabung dengan Aceh Merdeka tahun 1987, sekarang disebut GAM. Ketika saya di Malaysia saya belajar bagaimana berdagang dan menjalankan usaha. Ke depan saya punya harapan yang cukup besar, tetapi saya gak punya modal. Mungkin akan kembali menjadi petani. Sebenarnya saya mau berdagang lagi, membeli dan menjual barang. Tapi tidak di desa ini tapi di tempat lain yang lebih ramai, mungkin di Sigli atau di Banda Aceh."<sup>75</sup>

Bantuan modal juga dibutuhkan untuk mereka yang ingin mendirikan usaha kecil atau yang ingin menjadi pedagang. Terdapat korelasi antara siapa yang mengutamakan modal dan siapa yang ingin menjadi pedagang.

"Yang kami butuhkan sekarang adalah modal. Kalau ada modal, apapun bisa kami buat. Masalahnya sekarang gak ada modal. Kami gak mau lagi jadi petani atau ke hutan, karena dulu kami adalah petani. Bagaimana bisa makmur kalau kerjanya cuma petani?"<sup>76</sup>

"Sebagai pemimpin GAM di sini, saya meminta agar kami diberi modal. Kalau tidak begitu bagaimana bisa hidup. Modal dalam bentuk apapun jadi...asal kami bisa gunakan dan dikembangkan untuk dipakai nanti. Yang paling berguna ya modal bentuk uang tunai...dari sini setiap orang bisa memutuskan mau dipakai untuk apa; ada yang mau menanam padi atau bikin coklat atau buka toko...fleksibel lah."<sup>77</sup>

"Dasar permasalahan adalah ekonomi. Kami perlu modal. Kalau kami tetap susah seperti sekarang, nantinya kami bisa mencuri supaya tetap hidup. Kami punya keluarga dan anak-anak yang perlu dikasih makan. Kami perlu kerja bukan cuma mengisi perut tapi juga membantu masyarakat. Kami minta modal dan pekerjaan bukan cuma buat kami saja,

<sup>74</sup> Hasil wawancara Tim Survey AMM-WB, 2006 dengan Mantan kombatan Manggeng Aceh Barat Daya

<sup>75</sup> Hasil wawancara Tim Survey AMM-WB, 2006 dengan Mantan kombatan Tiro/Truseb, Pidie

<sup>76</sup> Hasil wawancara Tim Survey AMM-WB, 2006 dengan Mantan kombatan GAM Indrapuri, Aceh Besar

<sup>77</sup> Hasil Diskusi dan wawancara dengan Pimpinan mantan kombatan GAM Keude Gerobak Aceh Timur, Juli 2007

tapi juga untuk masyarakat, mereka juga kan menderita karena tsunami dan konflik." <sup>78</sup>

"Kalau ada modal saya mau membuka kebun. Ada 8 hektar tanah yang bisa dibuka. Tanah itu asalnya kebun karet tetapi sekarang sudah tua dan tidak ada getah lagi. Kalau diberi modal, saya mau membuka lahan tersebut. Sambil menanam tanaman tua juga diselingi tanaman muda. Tanaman muda sudah bisa dipanen sambil menunggu tanaman tua." <sup>79</sup>

"Saya punya pikiran untuk mengajak semua pemuda desa. Ada lahan 200 hektar dan saya akan ajak pemuda untuk menggarap lahan itu. Nanti akan kita tanam sawit, coklat, kopi dan palawaija. Kalau lahan di sini banyak, tetapi modal yang gak ada untuk memulainya. Saya ajak bukan hanya pemuda GAM tapi semua pemuda yang ada di desa ini. Kita tidak membedakan GAM dengan pemuda desa. Siapa saja yang ingin bekerja." <sup>80</sup>

"Itulah (kegiatan mantan TNA) yang menjadi beban bagi saya selaku perwakilan GAM di AMM... Karena mereka tidak akan dapat diatasi kalau masih pengangguran. Mereka tidak punya uang, mereka punya beban hutang." <sup>81</sup>

Untuk pelaksanaan reintegrasi sebagai tujuan jangka panjang program, reintegrasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kedua program disarmament maupun demobilisation, pada tahapan realisasinya tetap saja bersumber juga pada MoU. Pada point 3 tentang Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, terutama butir 3.2, telah secara eksplisit dijelaskan pengaturan dan pelaksanaan reintegrasi. Selain itu, salah satu butir secara spesifik menjelaskan dan memprioritaskan juga tiga subjek penerima manfaat program reintegrasi, yakni: Mantan kombatan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesty, semua masyarakat korban. Berangkat dari itu, reintegrasi sebagai tujuan jangka panjang dalam tahap membangun perdamaian di Aceh pasca konflik memerlukan komprehensifitas aspek yang dimandatkan dalam MoU. Atau secara lebih sederhana, reintegrasi mutlak mempersyaratkan dua aspek dominan yang musti diprioritaskan, antara lain: jaminan atas situasi keamanan dan mengedepankan keadilan distributif dalam pengelolaan bantuan sosial maupun ekonomi.

<sup>78</sup> Hasil wawancara Tim Survey AMM-WB, 2006 dengan Mantan kombatan GAM Krueng Sabee, Aceh Jaya

<sup>79</sup> Hasil Diskusi dan wawancara dengan mantan Tapol GAM, Nisam Aceh Utara, Juli 2007

<sup>80</sup> Hasil wawancara Tim Survey AMM-WB, 2006 dengan Mantan kombatan GAM Kluet Tengah, Aceh Selatan

<sup>81</sup> Hasil Diskusi dan wawancara dengan Perwakilan GAM untuk AMM Aceh Utara, Juli 2006

Dalam analisis demikian, maka untuk pengelolaan secara institusionalnya Pemerintah telah menghadirkan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) sebagai pemegang mandat utama reintegrasi. Badan ini secara normatif diawali oleh Instruksi Presiden dan terbentuk melalui SK Gubernur, yang mengalami perubahan hingga 3 (tiga) kali. Sayangnya dalam perubahan yang dimaksud, sekaligus telah mengampulasi mandat dan kewenangan institusi BRDA dalam pengelolaan keuangan secara otonom. Hasilnya, BRDA sebagai pemegang mandat reintegrasi yang menetapkan kebijakan, merumuskan kebutuhan, melaksanakan program dan kegiatan, tidak mampu bekerja secara maksimal dalam memenuhi dua aspek dominan diatas. Masyarakat Aceh pada umumnya dan semua mantan pasukan GAM, tahanan politik yang memperoleh amnesti, maupun korban konflik pada khususnya, tentu menanam kekecewaan pada salah satu kausalitas kelemahan lembaga BRDA yang demikian, sebagai sebuah institusi pemegang mandat reintegrasi Aceh. Sehingga, sangat dikhawatirkan reintegrasi Aceh di bawah BRDA sebagai institusinya terancam gagal,<sup>82</sup> dimana sekaligus memberikan sumbangan atas kegagalan paket MoU damai Aceh yang mustinya dapat terlaksana secara utuh (indivisibility).

Aceh Pasca Konflik yang ditandai oleh sebuah pengakuan secara fakta (de facto) dan hukum (de jure)nya melalui MoU Helsinki, jauh lebih membutuhkan perhatian dan waktu yang relatif lebih lama untuk diselesaikan. jika dibandingkan dengan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik Aceh yang hancur akibat bencana Gempa dan Tsunami.<sup>83</sup> Yang demikian merupakan sebuah keniscayaan, mengingat proses damai Aceh masih harus melalui masa transisi dalam tahapan menjaga perdamaian (*peace keeping*), kemudian menuju tahapan membangun perdamaian (*peace building*). Didalamnya senantiasa berkaitan erat dengan pembenahan atas berbagai bidang, baik bersifat material maupun inmaterial yang telah hancur sebelumnya akibat konflik.<sup>84</sup>

Sebuah definisi yang paling dekat tentang reintegrasi dalam konteks Aceh, sekurangnya terdapat dalam kaidah-kaidah panduan perlucutan, demobilisasi,

<sup>82</sup> Wawancara dengan Teuku Kemal Fasya September 2007 di Lhokseumawe

<sup>83</sup> Diskusi dan wawancara dengan Juru Biracara KPA Ibrahim Bin Syamsuddin-KBS (Alm) Maret 2008 di Hotel Kartika Candra Jakarta

<sup>84</sup> Ibid



reintegrasi di Aceh yang dibuat oleh ILO pada Desember 2005 yakni, reintegrasi adalah sebagai sebuah proses di mana mantan gerilyawan (dan orang-orang yang bergantung pada mereka) memasuki kehidupan sipil dan bergabung kembali dengan masyarakat sipil melalui komunitas (baru atau lama) mereka. Maka menurut pendapat penulis, secara ideal konsep program reintegrasi di Aceh musti mampu memberikan pendekatan dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya yang dianggap relevan sesuai dengan konteksnya. Sedianya, dimaksudkan untuk mempercepat terciptanya pra-kondisi memasuki atmosfer kehidupan sosial yang normal dan tertuju pada terciptanya situasi keamanan manusia (*human security*). Perwujudan reintegrasi yang demikian, dianggap penting karena selalu mempertimbangkan adanya saling keterkaitan dari berbagai aspek pendekatan dan terdapat keutuhan (*indivisibility*) pelaksanaan program didalamnya. Dan tentunya hasil yang diperoleh dapat dipandang, jauh lebih memiliki komprehensifitas dalam rangka penyelesaian berbagai kerentanan konflik, yang secara dominan masih menjadi referensi utama bagi masyarakat Aceh pasca perjanjian damai.

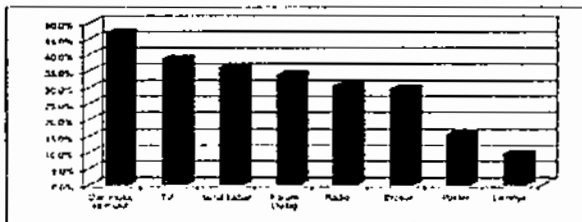
Terminologi reintegrasi dalam konteks tertentu dapat saja menjadi sesuatu yang kontroversial, terutama menyangkut posisi pihak-pihak yang terlibat. Subyek reintegrasi, dalam konteks konflik di Aceh adalah mantan anggota GAM, adalah mereka yang ada diluar masyarakat yang "normal" dan harus dibawa kembali kedalam masyarakat. Untuk masuk kedalam masyarakat, mantan anggota GAM harus menyesuaikan diri terhadap nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat sebagai pihak yang benar. Posisi ini yang sering kali ditolak oleh mantan kombatan, karena mereka merasa bahwa mereka sudah terintegrasi dengan masyarakat dan tidak membutuhkan sebuah proses reintegrasi atau tidak sepakat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah.

...kami ini rakyat Aceh, sejak lahir sudah menjadi rakyat Aceh, budaya-adat, norma dan lain lain sudah mendarah daging, hanya saja kami lama di hutan, gunung dan itupun masih di Aceh, jadi ketika damai dan turun gunung ya.. kami secara otomatis kembali ke kampung masing-masing ketemu sama semua sanak saudara, jangan memposisikan kami ini sebagai kombatan GAM sebagai orang luar jadi susah nanti...<sup>85</sup>

<sup>85</sup> Diskusi dan wawancara informal di kedai kopi kecamatan Tanah Jambo Aye dengan salah satu mantan kombatan wilayah Pase, 7 Agustus 2007 menjelang dua tahun MoU damai Aceh.

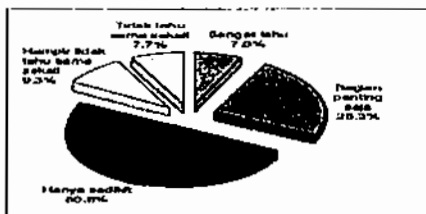
Menghindari kontroversi tersebut, Brian Gormally merumuskan sebuah definisi yang longgar mengenai reintegrasi sebagai rangkain proses, didasarkan pada konsep sebuah perdamaian yang inklusif, yang dirancang untuk meningkatkan kesempatan bagi mantan kombatan untuk memainkan bagian yang utuh dalam sebuah masyarakat baru yang hendak dibangun pasca konflik. Dalam konteks Aceh isi MoU Helsinki menunjukkan bahwa tidak ada persoalan antara pemerintah RI dan GAM mengenai definisi reintegrasi. Kedua belah pihak sepakat bahwa, sebagai bagian dari proses perdamaian, mantan anggota GAM dan tahanan politik perlu diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat sepenuhnya.<sup>86</sup>

Gambar 4.9: Sumber Pemahaman mengenai MoU di Antara GAM Aktif.<sup>87</sup>



Namun yang jadi permasalahan adalah pemahaman terhadap MoU masih kurang. Hasil survey AMM-WB 2006 memperlihatkan hal tersebut.

Gambar 4.10: Pengetahuan GAM Aktif Mengenai MoU.<sup>88</sup>



Possibility *charity* reintegrasi sebagai sebuah proses reintegrasi, ekonomi dan politik membutuhkan waktu yang lebih lama dan kesiapan organisasi atau badan-badan yang mengintegrasikannya. Sebagaimana telah

disebut diatas, bahwa bada-badan yang dibentuk kinerjanya masih kurang maksimal. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada posibilitas reintegrasi sosial, ekonomi dan politik. Persoalan kesiapan dana, dan itu berarti komitmen dari pemerintah pusat pun turut mempengaruhi, sejauh mana BRA sebagai lembaga pelaksana program reintegrasi dapat bekerja secara maksimal. Banyak pihak mengartikan reintegrasi adalah 'pembauran kembali'

<sup>86</sup> Kesimpulan dari diskusi dengan anggota BRA dalam menyusun Program BRA tahun 2007 di Hotel Sahid Jakarta awal 2007, Penulis dan Indra J. Piliang diundang sebagai "pengamat" proses reintegrasi Aceh

<sup>87</sup> Hasil Survey AMM/WB 2006

<sup>88</sup> Ibid

mantan kombatan GAM kedalam aktifitas sosial kemasyarakatan. Definisi demikian tidak memiliki landasan kuat sosiologis dan realitas yang terjadi dalam masyarakat. GAM yang semasa perjuangan menerapkan metode gerilya dimana masyarakat menjadi benteng utama perjuangan telah berhasil mempertahankan eksistensi politik GAM selama 28 tahun di Aceh. Artinya, pembauran ini mengindikasikan bahwa pembauran GAM dan masyarakat tidak menemukan titik yang krusial karena GAM itu sendiri secara sosiologis adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dalam tatanan masyarakat gampong di Aceh yang masih kental memiliki kekerabatan garis keturunan serta kekerabatan perkawinan yang terjadi, menjadikan GAM sebagai bagian dari kekerabatan famili itu sendiri.

Reintegrasi Aceh secara umum harus didefinisikan sebagai pembauran kembali masyarakat Aceh kedalam tatanan sistem politik dan ekonomi Indonesia setelah sekian lama mengalami degradasi kepercayaan dari masyarakat Aceh terhadap semua yang berbau Indonesia. Reintegrasi ekonomi politik secara yuridis formal telah memiliki landasannya sendiri melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh; yang meskipun tidak memberikan kepuasan yang mendalam namun sudah bisa diterima oleh masyarakat Aceh dengan catatan untuk melakukan perubahan yang lebih maju dikemudian hari. Sebenarnya, semangat UU No 11/2006 adalah reintegrasi GAM dan masyarakat Aceh yang selama ini tidak memiliki saluran politik formal kedalam kancah perpolitikan di Indonesia. Pilkada 2006 di Aceh adalah indikator utama keberhasilan reintegrasi politik rakyat Aceh kedalam perpolitikan di Indonesia dimana Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar tidak lagi hanya menjadi monopoli atau perpanjangan elemen perlawanan di Aceh tetapi juga menjadi bagian dari pemerintahan pusat di Aceh. Hal ini juga terjadi pada tujuh Kabupaten/Kota yang dalam Pilkada kemarin dimenangi oleh GAM. Hubungan yang seperti ini dalam kaca mata sosiologi politik sebenarnya sangat menguntungkan pemerintahan Indonesia, dimana memiliki "tangan-tangan" yang dipercayai dan dipatuhi oleh masyarakat Aceh.

Integrasi politik kedua pasca pilkada akan terjadi melalui pembentukan partai politik Lokal (Parlok). Kecolongan pemerintah pusat dalam hal ini adalah pada pengrebutan otoritas penjabaran dan pemaknaan UU No.11/2006 tentang parlok yang harus dilakukan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Tindakan politik

ini adalah signal ketidakpercayaan pemerintah pusat terhadap masyarakat Aceh untuk mengatur internalnya sendiri. Sepatutnya peraturan detil tentang Parlok cukup dilakukan melalui pembuatan Qanun oleh DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh). Pembuatan PP Parlok yang saat ini digodok oleh pemerintah masih memberikan indikasi total ketidakpercayaan mereka terhadap kepatuhan dan komitmen politik yang telah ditunjukkan oleh masyarakat Aceh. Kekhawatiran saya adalah PP yang akan dikeluarkan oleh pemerintah akan menambah unsur atau item ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah dan sistem politik Indonesia.

Ketakutan kita adalah reintegrasi politik akan berjalan dengan tatanan yang keropos. Yang akan memperkokoh reintegrasi politik tidak hanya dimensi yuridis formal saja tetapi juga harus dibarengi oleh komitmen dan political will dalam segala bentuk dan aspek dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh. Hubungan yang hanya berlandaskan pada aspek yuridis formal biasanya akan bersifat normatif dan kaku bila tidak diimbangi dengan pola membantu dengan sungguh-sungguh memajukan dan menyelesaikan kasus Aceh secara komprehensif. Undang-undang dan segala bentuk perangkat hukum lainnya adalah infrastruktur komitmen dan political will yang mana dapat diadakan dan diadakan sesuai dengan kebutuhan, komitmen dan political will pemerintah.

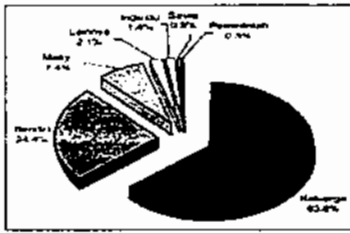
Rumus utama dalam reintegrasi politik ini adalah; semakin banyak campur tangan pemerintah pusat dalam mengatur perjalanan politik dan pemerintahan di Aceh akan membuka peluang kepada masyarakat Aceh bersatu dan menemukan perbedaan antara dirinya dengan pemerintah pusat. Biarkan diversitas politik terjadi dengan sendirinya di Aceh dan peran pemerintah pusat diluar kewenangan yang dimilikinya adalah berada pada posisi membantu. Tindakan jempit bola yang nantinya diperankan oleh pemerintah pusat juga dalam kaitan membantu dan bukan intervensi.

Kalau diperhatikan aturan reintegrasi yang diimplimentasikan dalam UU No. 11 Thn. 2006 tentang Pemerintah Aceh, sudah cukup jelas untuk segera melakukan tahapan-tahapan reintegrasi. Tentu banyak hal yang harus dipersiapkan pra kondisi. Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan: Legislatif Aceh akan merumuskan kembali ketentuan hukum bagi Aceh

berdasarkan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak-hak Sipil dan Politik dan mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Reintegrasi kedalam masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia, semua orang yang telah diberikan amnesti atau dibebaskan dari Lembaga Perasyarakatan atau tempat penahanan lainnya akan memperoleh semua hak-hak politik, ekonomi dan sosial serta hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses politik baik di Aceh maupun pada tingkat nasional. Orang-orang yang selama konflik telah menanggalkan kewarganegaraan Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka. Pemerintah RI dan Pemerintah Aceh akan melakukan upaya untuk membantu orang-orang yang terlibat dalam kegiatan GAM guna memperlancar reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian kemudahan ekonomi bagi mantan pasukan GAM, tahanan politik yang telah memperoleh amnesti dan masyarakat yang terkena dampak. Suatu Dana Reintegrasi di bawah kewenangan Pemerintah Aceh akan dibentuk.

Pemerintah RI akan mengalokasikan dana bagi rehabilitasi harta benda publik dan perorangan yang hancur atau rusak akibat konflik untuk dikelola oleh Pemerintah Aceh. Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan untuk memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut: Semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.

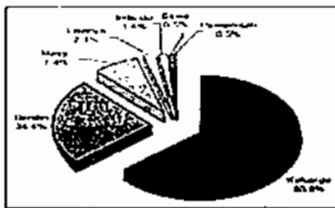
Gambar 4.11. Pemilik Lahan yang Digunakan GAM Aktif.<sup>89</sup>



Berkaitan dengan masalah lahan, bukanlah masalah bagi GAM yang kembali dan yang tertarik untuk menekuni bidang selain pertanian. Namun terdapat persentase yang cukup signifikan dari responden (19.5%) yang menginginkan informasi tentang

akses terhadap lahan. Dari mereka yang memiliki akses terhadap lahan, mayoritas menyatakan bahwa lahan tersebut milik sendiri atau milik keluarga. Gambar 9 menunjukkan bahwa 63.8% memiliki akses terhadap lahan yang merupakan milik keluarga dan 24.4% memiliki lahan sendiri. Sangat sedikit jumlah GAM yang kembali yang menyewa lahan atau menggunakan lahan milik masyarakat. Data ini menunjukkan bahwa GAM yang kembali lebih suka bekerja untuk diri sendiri atau keluarga dan bukan untuk majikan.

Gambar 4.12. Pemilik Lahan yang Digunakan GAM Aktif.<sup>90</sup>



Banyak pihak melihat kasus Aceh dengan keinginan terjadinya rekonsiliasi antara pihak GAM dan RI secepat-cepatnya. Padahal dalam setiap sejarah konflik bersenjata, di mana kekerasan negara (*state's violence*) telah menjadi andil utama pencipta

masalah, langkah rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan hadir cepat. Ada banyak prakondisi yang perlu dipersiapkan. Salah satu yang sangat penting adalah membangun kepercayaan (*trust building*). Dari sejak Jeda Kemanusiaan hingga CoHA masalah kepercayaan baru menjadi langkah untuk memulai, dan belum konsisten sebagai sikap matang penyelesaian konflik. *Trust* terkait sikap untuk jujur terhadap diri sendiri dan terbuka terhadap lawan. Kepercayaan bukan sesuatu yang mudah didefinisikan dengan ukuran-ukuran praksis, tetapi melibatkan totalitas mental yang membiarkan diri sendiri menjadi orang lain dan orang lain adalah bagian untuk menilai diri sendiri. Menghadapi musuh yang telah bertahun-tahun di hutan dan dianggap tidak pernah eksis sungguh tidak mudah. Kepercayaan perlu ditumbuhkan dan tidak bisa secara alami tumbuh. Kerja keras

<sup>89</sup> Ibid

<sup>90</sup> Ibid

untuk mempercayai musuh akan menentukan jawaban-jawaban kreatif yang bahkan belum terpikirkan sebelumnya. Kita akan terbiasa dengan suasana yang tidak tertebak dan tidak mudah menyalahkan bahwa musuh adalah penyebabnya.<sup>91</sup>

Proses transformasi konflik dengan menerapkan reintegrasi hanya bagi GAM, Tapol/Napol, korban konflik akan menuai persoalan baru di Aceh. Kita mesti ingat kembali, Aceh mengalami penderitaan berganda dalam urusan ini. Bukan hanya eksploitasi, kejahatan, kekerasan, dan hegemonisasi yang dipaksakan masuk ke jantung masyarakat, namun juga ke pikiran kebudayaan. Kekerasan terhadap pikiran kebudayaan merusak keluwesan kultur lokal dalam membangkitkan hasrat terdalam dan imajinasi untuk tumbuh sehat dan berkembang. Kekerasan atas kebudayaan menyebabkan masyarakat menjadi mudah lupa bahwa negara pernah berjanji dan mengingkari sendiri janjinya. Setiap janji dari pemerintah dipahami sebagai sesuatu yang baru, dan sejarah seolah-olah memulai perjalanannya di titik itu. Kini, resistensi Aceh terhadap Jakarta menguat dan menyebar relatif merata di setiap daerah, tidak hanya yang berasal dari daerah konflik. Resistensi lokal Aceh tidak simplistik GAM, tapi juga sebagian besar masyarakat Aceh yang menjadi objek pembangunan akhirnya mengintrodusir identitas baru keacehannya atau etno-nasionalisme. Identitas baru ini memantapkan kesadarannya melalui pengalaman mengurai rasa bosan, sumpek, dan apokaliptik atas ketidakberhasilan proyek Indonesia beroperasi secara etis dan ontologis di tanah Serambi Mekkah. Cahaya baru yang muncul dari gerakan identifikasi dan subjektivisasi nasionalisme tidak juga langsung berjalan mulus. Nasionalisme Aceh mungkin adalah kata mujarab untuk meng-*counter* nasionalisme Indonesia yang tengah penuh bercak noda, namun itu tidak cukup. Ketika aksi yang dipersiapkan hanya tindakan strategis, dalam pengertian mempersiapkan hadirnya sebuah sistem politik kekuasaan, maka bisa jadi imajinasi atas kedaulatan baru (*new sovereignty*) itu lowong dari partisipasi luas masyarakat Aceh. Akhirnya yang muncul adalah eksploitasi kekuasaan atas nama gerakan suci kebangsaan. Kendala ini yang terlihat ketika prinsip perjuangan solidaritas Aceh hanya mengintrodusir GAM sebagai representasi ketidakpuasan

---

<sup>91</sup> Diskusi dan wawancara dengan Moch. Nurhasyim Peneliti LIPI di Jakarta Mei 2009 di Kantor LIPI Jakarta

masyarakat Aceh terhadap Jakarta. Belum lagi instrumentalisasi koersif yang dimilikinya membuat imajinasi solidasitas melemah dan tertumbuk kepada kelompok yang memiliki senjata, yang berarti kelompok berkuasa. Padahal, jika melihat peta gerakan sosial yang terjadi di Aceh, seperti salah satunya yang tersimbolkan dalam aksi massal referendum 8 November 1999, kekuatan resistensif tersebut bukanlah GAM. Di sana berkumpul kelompok intelektual, kelompok muda, mahasiswa, politisi progresif, komunitas miskin, korban kekerasan negara, kelompok perempuan, dan seluruh kelompok marginal lainnya. Salah satu tantangan yang penting direspons adalah apakah nota kesepahaman yang ditandatangani tersebut telah masuk dalam buhul-buhul darah dan membentuk kesadaran pihak-pihak bertikai, selanjutnya secara bertanggungjawab membidani lahirnya sejarah baru bagi Aceh dan Indonesia, sejarah perdamaian dan demokrasi? Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik Aceh akan dilihat sebagai referens utama penyelesaian konflik keamanan yang bisa saja berulang di masa depan. Menyelesaikan sejarah kekerasan dan beralih ke cara-cara beradab adalah prinsip utama untuk mengubah watak pusat agar menjadi pelayan dan pendengar sungguh-sungguh suara daerah, dan bukan sebagai pendorong eksploitasi dan politik atas nama.<sup>92</sup>

Namun, potensi konflik itu bisa dicegah apabila para pihak yang dulu terlibat konflik menyikapinya secara bijaksana dengan mempererat rasa saling percaya. Demikian, antara lain, pernyataan yang mengemuka dalam pidato perdamaian yang disampaikan Ketua Harian Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), Muhammad Nur Djuli, Kasdam Iskandar Muda, Brigjen TNI Hari Purnomo, Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA), Ibrahim Syamsuddin KBS (Alm), dan mantan juru runding GAM, Munawar Liza Zainal pada puncak peringatan tiga tahun MoU Helsinki di Blangpadang. Hadir pula dalam acara itu Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Ketua DPRA, Sayed Fuad Zakaria, yang mewakili Kapolda Aceh, perwakilan Uni Eropa di Aceh, serta ratusan pengunjung. Selain, menyampaikan pidato perdamaian, para pihak didampingi

<sup>92</sup> Kesimpulan diskusi tentang "Dua tahun damai Aceh" yang dilaksanakan oleh Pengurus Asrama Mahasiswa Aceh (FOBA) Setiabudi Jakarta 26 Agustus 2007, dengan Pembahas Kamaruddin Hasan (Akademisi), Muslahuddin Daud (World Bank), T. Kemal Fasya (Akademisi-Antropolog)



Wagub Muhammad Nazar melepas merpati putih dari atas panggung sebagai simbol perdamaian.<sup>93</sup>

Muhammad Nur Djuli (ketua Harian BRA) menyebutkan, ada lima hal utama yang dia nilai bisa menjadi fondasi bagi perekat perdamaian di Aceh. Yaitu, pemerintah harus menyelesaikan proses reintegrasi dengan maksimal, memelihara keamanan agar tetap kondusif, di samping meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendidikan, penegakan hukum, serta perlu ada rekonsiliasi antara para pihak yang pernah berkonflik. Untuk mewujudkan kelima hal itu, saat ini Pemerintah Aceh dihadapkan pada beberapa kendala krusial yang siap menghadang di depan mata dan bisa membangkitkan kembali potensi konflik. Seperti halnya proses politik menjelang Pemilu 2009 yang di dalamnya juga melibatkan partai politik lokal (parlok). Selain itu, masyarakat Aceh juga akan dihadapkan pada potensi konflik lain menyusul berakhirnya BRR NAD-Nias pada April 2009. Kita yakin semua tantangan itu bisa kita hadapi dengan sebuah kebersamaan dan jangan pernah lalai.<sup>94</sup>

Beberapa tantangan lainnya pascatiga tahun MoU Helsinki juga diungkapkan Juru Bicara KPA, Syamsuddin Ibrahim KBS (Alm). Ada tiga sudut pandang yang saat ini dinilai belum berjalan optimal di lapangan ketika MoU genap berusia tiga tahun. Pertama, dari sisi korban konflik. Saat ini belum semua korban konflik di Aceh yang merasakan makna perdamaian. Masih banyak korban konflik di Gampong pedalaman yang hidup susah, karena bantuan yang diberikan tidak sampai ke tangan mereka. Para korban konflik hanya mendengar ada bantuan, tapi mereka belum merasakannya. Dari sisi para mantan kombatan GAM juga mengalami masalah yang sama. Banyak di antara mantan GAM saat ini hidup tidak menentu, karena setelah mereka berintegrasi ke dalam masyarakat ternyata mereka tidak punya pekerjaan. Bantuan yang diharapkan juga tidak merata, kecuali hanya sebagian mereka yang masuk dalam daftar mantan kombatan GAM serta tapol/napol yang mendapat dana reintegrasi dari pemerintah. Sisi ketiga, terkait dengan pembetukan parlok. saat ini kehadiran

<sup>93</sup> Dalam kesempatan tersebut Penulis berkesempatan hadir untuk mengikuti acara memperingati tiga tahun damai Aceh juga dapat di akses di [www.serambinews.com](http://www.serambinews.com), Aceh masih dibayangi potensi konflik, di akses 20 Agustus 2008

<sup>94</sup> Diskusi di kantor BRA Banda Aceh 21 Agustus 2008, pendapat yang sama juga disampaikan dalam acara tiga tahun memperingati damai Aceh di Banda Aceh.

parlok menjadi sangat sensitif dan bisa memicu konflik baru. Terutama dalam menghadapi Pemilu 2009 mulai muncul indikasi berbagai praktik intimidasi dan propaganda.

Dalam cakupan program BRDA bahwa untuk reintegrasi bidang politik, hukum, keamanan dan HAM merupakan cakupan yang mendasar bagi upaya untuk mendorong reintegrasi secara politik. Dari Program reintegrasi bidang politik, dapat dianalisis bahwa program-program integrasi bidang politik dan pengembalian hak relative sulit dilakukan, ketimbang program-program yang bersifat kompensasi ekonomi. Tabel dibawah ini sekurang-kurangnya menggambarkan tingkat kesulitan implimentasi integrasi bidang politik, yaitu:

Tabel 4.3. Program Integrasi Politik dan Implementasi<sup>95</sup>

Program	Implementasi	Problematic
Melanjutkan sosialisasi MoU	Sosialisasi MoU Helsinki masih dilakukan secara parsial	Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menjelaskan bahwa hampir sebagian besar mantan <i>combatant</i> GAM kurang memahami langkah-langkahnya kompensasi politik dan ekonomi
Mendorong penyusunan RUUPA	Sudah dilakukan	Munculnya kekecewaan tertentu dari pihak GAM atas sejumlah pasal dalam UU No.11/2006 yang dipandang tidak sejalan dengan butir-butir MoU Helsinki
Mendorong Pilkada 2006 tepat waktu	Masih dalam proses	Pilkada telah dilakukan tepat waktu tanggal 11 Desember 2006, namun di beberapa lokasi seperti di Aceh tengah, Aceh barat dan Banda Aceh karena sebagian besar pemilih tidak terdaftar. Fenomena Pilkada 2006 di Aceh menimbulkan "kekecewaan politik", dan potensi rivalitas politik antara calon independen dan partai politik.
Mendorong pendirian partai lokal	Belum dilakukan	Upaya untuk mengalihkan GAM menjadi sebuah kekuatan ideologis belum sepenuhnya berhasil dilakukan. Komite transformasi Aceh yang semula dianggap sebagai transformasi GAM tampaknya masih belum maksimal

<sup>95</sup> Diolah dari berbagai sumber, salah satu dari Moch. Nurhasyim dalam Laporan Penelitian LIPI tentang Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, 2007

Mendorong pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi (KKR)	Belum dilakukan	Dengan dihapusnya UU tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi, institusi KKR di Aceh tidak akan bekerja maksimal untuk mendorong rekonsiliasi, apalagi KKR di Aceh tidak menganut sistem retroaktif.
Mendorong pembentukan komisi bersama penyelesaian klaim	Belum dilakukan	Potensial tidak dapat diwujudkan, karena UU KKR dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.
Memberi dukungan kepada AMM	Sudah dilakukan	AMM secara fungsional berhasil menjadi katalisator bagi kedua belah pihak yang bertikai. Pasca bubarnya AMM ditakutkan kurang adanya lembaga yang dapat dipercaya oleh kedua belah pihak yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.
Mendorong rehabilitasi PNS yang terlibat GAM	Sudah dilakukan ( termasuk pemberian amnesty terhadap 2100 mantan anggota GAM)	Masalah dilapangan yang terjadi berkaitan dengan tingkat pendidikan mantan GAM yang rata-rata dibawah SLTA
Mendorong mantan GAM menjadi TNI/POLRI	Belum dilakukan (akan terganjal oleh aturan teknis untuk menjadi anggota TNI/POLRI karena sebagian mantan anggota GAM tidak berpendidikan)	Masalah dilapangan yang terjadi berkaitan dengan tingkat pendidikan mantan GAM yang rata-rata dibawah SLTA
Mendorong pemulihan kewarganegaraan	Sudah dilakukan	Dilakukan melalui penertiban KTP merah putih yang berlaku pada operasi terpadu dengan KTP yang sifatnya nasional
Mendorong pembentukan pengadilan HAM di NAD	Belum dilakukan	Masih belum dapat diwujudkan

Ada kecenderungan bahwa sosialisasi MoU masih kurang dilakukan, sehingga muncul persepsi lain. Sebagaimana mantan TNA masih menganggap bahwa Aceh sedang berlaku pemerintahan sendiri (*self-government*). Salah seorang anggota KPA yang diwawancarai di Aceh Utara menyebutkan hal itu.<sup>96</sup> Padahal untuk keberhasilan integrasi politik dan pencapaian tujuan integrasi itu sendiri, sosialisasi menjadi salah satu kuncinya. Pada masa-masa awal implimentasi MoU Helsinki, adanya AMM (*Aceh Monitoring Mission*), selaian berfungsi sebagai

<sup>96</sup> Diskusi dan wawancara dengan anggota KPA di wilayah Kandang, Aceh Utara, Juni 2007.

pemantauan, didalamnya juga terdapat forum konsultasi antara RI-GAM dalam bentuk CoSA yang sebagian unsurnya juga melibatkan masyarakat dalam rangka sosialisasi damai dan integrasi. Setelah AMM bubar secara resmi pada Desember 2006, dibentuk forum koordinasi dan komunikasi Damai Aceh (FKK Aceh) dibawah Menkopolkam sebagai penggantinya. Namun sebagaimana dijelaskan oleh ketua FKK bahwa fungsi sosialisasi FKK ini masih sangat terbatas, sehingga masih belum dapat menjangkau masyarakat secara luas.<sup>97</sup> Dampaknya ada persepsi lain bahwa perundingan di Helsinki masih dipandang jalan bagi referendum dan kemerdekaan di Aceh. Hal ini menurutnya terjadi di beberapa wilayah perdamaian (gampong-gampong), karena proses sosialisasi yang salah.<sup>98</sup>

Dibidang politik yang paling penting dan mendasar untuk instrumen integrasi politik adalah partai lokal. Salah satu tujuan dari integrasi politik GAM adalah bagaimana mentransformasi GAM sebagai kekuatan kombatan (bersenjata) menjadi kekuatan politik, kekuatan mantan kombatan-Tentara Nasional Aceh (TNA) dulu AGAM (Angkatan Gerakan Aceh Merdeka) – dibubarkan didepan AMM pada akhir Desember 2005. Namun setelah mereka membentuk KPA sebagai wadah baru mantan anggota GAM, tampaknya upaya pemerintah masih terlalu minim untuk mendorong transformasi kekuatan kombatan menjadi kekuatan politik yang dapat dikontrol oleh Undang-Undang. Metamorfosis TNA menjadi KPA, dan bukan sebagai partai politik, menyebabkan lembaga ini tidak dapat diatur dan tunduk pada kerangka perundang-undangan. Akan sangat berbeda apabila KPA langsung menjadi partai politik, maka segala tingkah lakunya akan diatur menurut UU Partai Politik.

Metamorfosis ini menyebabkan beberapa konsekwensi, pertama, KPA masih identik dengan TNA, karena secara struktural, organisasi KPA disusun mirip dengan TNA. Kedua organisasi ini sangat eksklusif dan tertutup, yang keanggotaannya hanya berasal dari mantan GAM. Bahkan untuk anggota GAM yang menyerah sebelum MoU Helsinki terjadi (pada saat darurat militer) tidak dianggap sebagai kelompok mereka. Ketiga, KPA dalam praktiknya menjadi kekuatan politik setengah militer dalam kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan

<sup>97</sup> Wawancara dengan Ketua FKK di Banda Aceh, Juni 2007.

<sup>98</sup> Ibid.

dalam dunia ekonomi. Padahal salah satu tujuan dari upaya reintegrasi adalah terciptanya pembauran secara sosial dan politik. Karena proses cenderung eksklusif, KPA menjadi sebuah organisasi adalah yang hanya diperuntukkan untuk mantan TNA GAM, gejala semacam ini kurang baik bagi KPA dan mantan GAM sendiri karena upaya untuk menciptakan pembauran politik dan sosial di Aceh dapat terganggu. Salah satu karena eksklusifitas mantan anggota GAM yang kemudian menjadi sebuah kekuatan politik yang cenderung tertutup. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurang berperannya Pemerintah RI dalam melakukan pengawasan bagi upaya-upaya pembauran sosial dan politik sebagai masalah satu cara untuk mereduksi gagasan-gagasan masa lalu, dan untuk membangun Aceh baru sebagai tujuan dari munculnya konsep reintegrasi sebagaimana disebut dalam MoU Helsinki. Lemahnya pengawasan ini, karena integrasi identik dengan program bagi-bagi uang dari Pemerintah RI kepada beberapa kelompok. *Charity* integrasi dan/atau integrasi berbasis ekonomi yang saat ini, tampak sekali dari konsep yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sebagai implementasi dari MoU Helsinki.<sup>99</sup>

Konsentrasi program-program reintegrasi BRDA sejak dibentuk hingga saat ini, lebih pada masalah kompensasi dana dibidang ekonomi dan pemberdayaan dibidang sosial budaya. Untuk pemberdayaan ekonomi diberikan kepada mantan TNA, Tapol/Napol dan masyarakat korban konflik, dan kelompok lainnya (GAM non TNA, GAM menyerah pra MoU, dan Peta – Pembela Tanah Air). Sementara untuk bidang sosial budaya, bentuk programnya adalah diyat, rumah dibakar/rusak, korban cacat, dan pelayanan medis.

*Tabel 4.4. Analisis atas program bidang ekonomi BRA (BRDA.)<sup>100</sup>*

Memberi kemudahan ekonomi	Sulit dilakukan, karena pada praktiknya, program-program lebih bersifat sesaat, berupa kompensasi	Program-program BRA (BRDA) sejak awal berdirinya hanya fokus pada program-program yang berkaitan dengan kompensasi ekonomi. Untuk desain sebuah program ekonomi yang sifat
---------------------------	---	--

<sup>99</sup> Ikra Nusa Bakthi, dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, P2P-LIPI, Pustaka Pelajar, 2008

<sup>100</sup> Diolah dari berbagai sumber, salah satu dari Moch. Nurhasyim dalam Laporan Penelitian LIPI tentang Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, 2007

		cakupannya untuk pemberdayaan ternyata bukan menjadi tugas dan peran dari BRA (BRDA) padahal ini yang paling penting untuk dipikirkan.
Memberi kesempatan kerja	BRA (BRDA) tidak menyentuh program-program ini.	Program ini hanya sebatas untuk memberikan peluang bagi mantan combatan diberi tempat seperti pada beberapa lembaga, seperti BRA (BRDA), BRR atau lembaga lainnya, tapi memberi kesempatan kerja untuk kategori mantan combatan GAM mantan non-combatan GAM dan masyarakat korban konflik ternyata masih belum ada perencanaannya.
Alokasi lahan pertanian, dsb	Tidak berjalan sesuai dengan rencana, bahkan tidak ada implementasi mengenai butir ini.	Sejumlah praktik program BRA (BRDA) justru mengganti kompensasi untuk lahan pertanian ini dengan sejumlah uang, akibatnya lahan yang dijanjikan sebagaimana yang tercantum dalam butir MoU Helsinki tidak dapat diimplementasikan. Padahal gagasan itu adalah untuk mendorong mantan kombatan untuk menanggalkan sifat diri mereka dan orientasinya untuk tidak lagi mengangkat senjata.

Dari table 4.4, diatas, tampak bahwa dari program-program reintegrasi ini masih berjangka pendek, ibarat memberi kue ditengah orang lapar. Meskipun dalam judul disebut sebagai dana pemberdayaan ekonomi, dalam praktiknya program-program tersebut bukan dalam wujud pemberdayaan ekonomi, karena sifat penggunaan dana sebagian besar adalah untuk konsumsi, menyambung hidup, dan bukan untuk menciptakan pekerjaan atau lapangan kerja dan bidang usaha. Bahkan ada yang memperoleh dana bantuan rumah terbakar/rusak, ternyata tidak digunakan untuk membangun rumah, tetapi untuk membeli motor Honda. Kasus ini misalnya terjadi di Aceh Utara.<sup>101</sup> Secara umum, rincian program-program BRDA hingga Mei 2007 tampak pada tabel 4.5 dibawah ini:

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ketua BRA Aceh Utara, Mei 2007.

Tabel 4.5. Penyaluran Dana Reintegrasi (hingga Mei 2007).<sup>102</sup>

No	Kelompok sasaran	Target	Realisasi				Sisa
			2005	2006	Total	%	
<b>A. Pemberdayaan ekonomi</b>							
1	Mantan TNA	3000 orang	1000 orang	2000 orang	3000 orang	100.00	0 orang
2	Tapol/Napol	2035 orang	0 orang	1500 orang	1500 orang	73.71	535 orang
3	Masyarakat korban konflik	221 kecamatan	0 kecamatan	67 kecamatan	67 kecamatan	30.32	154 kec.
4	Kelompok lainnya						
	a. GAM non TNA	6.200 orang	1200 orang	500 orang	6200 orang	100.00	0 orang
	b. GAM menyerah pra MoU	3.204 orang	500 orang	2.704 orang	3204 orang	100.00	0 orang
	c. PETA	6.500 orang	1.000 orang	3000 orang	4000 orang	61,54	2500 orang
<b>B. Bidang Sosial</b>							
1	Diyat	21.000 orang	517 orang	597 orang	20114 orang	95.78	1403 orang
2	Rumah dibakar/Rusak	14.000 orang	3.253 unit	1.725 unit	4978 unit	35,56	9022 unit
3	Korban Cacat	3.600 orang	0 orang	550 orang	550 orang	15,28	3050
4	Pelayanan Medis	3 paket	1 paket	1 paket	2 paket	66,67	1 paket
5	Kegiatan Budaya	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0,00	1 paket

Dari table 4.5, diatas untuk program pemberdayaan ekonomi, terdapat empat kelompok sasaran yaitu mantan TNA, Tapol/Napol, masyarakat korban konflik dan kelompok lainnya. Masing-masing kelompok sasaran mendapatkan bantuan dana yang berbeda-beda. Untuk mantan TNA yang berjumlah 3000 orang mendapat bantuan 25 juta masing-masing orang. Chek telah diserahkan pada tanggal 29 November 2006 hingga 22 Mei 2007. oleh karena itu untuk mantan TNA ini sesuai dengan jumlah dalam MoU Helsinki telah diberikan bantuan untuk

<sup>102</sup> Forbes Damai Aceh, Mei 2007, juga dapat di lihat dalam Moch. Nurhasyim Laporan Penelitian LIPI tentang Reintegrasi Politik Aceh Pasca MoU Helsinki, 2007

seluruhnya. Masalahnya jumlah TNA yang disebutkan dalam MoU Helsinki tidak dapat menampung jumlah yang riil yang ada dilapangan. Estimasi jumlah bahkan diatas 30.000 orang bahkan mencapai 40.000 orang.<sup>103</sup> Karena jumlahnya yang terlalu besar, akhirnya penyaluran dana tidak langsung kemasing-masing orang, bahkan dalam realisasinya dana dibagi-bagi oleh KPA karena penyaluran tidak diberikan kepada yang bersangkutan, tetapi melalui panglimanya masing-masing.<sup>104</sup>

Dari penelitian lapangan nampak jelas bahwa tiap kombatan menerima kurang dari Rp. 1 juta tiap tahap. Survei kuantitatif yang dilakukan oleh AMM/WB 2006 menunjukkan bahwa mayoritas (68.7%) GAM menerima sejumlah uang. Rata-rata satu kombatan atau anggota GAM menerima Rp. 170.000-Rp. 260.000 tiap tahap. Alasan utamanya adalah karena GAM sering memberikan dana pada anggota lain dan kelompok rentan, seperti anak yatim-piatu dan janda dari kombatan GAM. Tidak ada bukti bahwa berkurangnya nilai bantuan adalah karena perbuatan korupsi oleh pemerintah atau GAM.

"Kita tahu uang 1 juta itu diberikan untuk 3000 orang mantan TNA yang ada di dalam MoU. Sudah ada kesepakatan untuk pembagian uang ini. Pembagian uang nya oleh Panglima Sagoe diberikan kepada siapa saja, termasuk janda konflik. Kita hanya menerima Rp. 50.000 per orang."<sup>105</sup>

"Untuk bantuan dari AMM saya belum terima tetapi kalau dari panglima ada diberikan, dan mungkin saja uang yang dari panglima itu dari AMM. Kami kan tidak tahu karena kami ini bisa dikatakan anak-anak karena ada yang lebih di atas kami lagi. Dana yang diberikan itu untuk uang rokok sebesar 110 ribu."<sup>106</sup>

<sup>103</sup> Wawancara dengan mantan Ketua BRA Aceh, Prof. Yusni Sabi, di Banda Aceh, Mei 2007. hal ini juga diakui oleh sebagian besar narasumber yang diwawancarai, bahwa jumlah GAM yang disebutkan dalam MoU Helsinki tidak dapat menampung seluruh jumlah GAM yang riil di lapangan.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Ketua FKK di Banda Aceh, Juni 2007.

<sup>105</sup> Diskusi dan wawancara dengan mantan Kombatan GAM Wilayah Pase Seunuddon Aceh Utara, Agustus 2007

<sup>106</sup> Ibid.



Tabel 4. 6: Masukan untuk Meningkatkan Mata Pencaharian bagi GAM yang Kembali.<sup>107</sup>

Pilihan	Bantuan Modal	Pelatihan Ketrampilan	Pembangunan Sektor Swasta	Akses Khusus Thd. Pekerjaan
(1) Menetap di desa asal - kembali ke pekerjaan semula	...		* (meningkatkan akses pasar)	
(2) Menetap di desa asal - beralih pekerjaan	...	...	** (penciptaan lap. kerja dan akses pasar)	.
(3) Pindah dari desa asal - pekerjaan sama	** (tergantung jenis pekerjaan)		** (penciptaan lapangan kerja)	**
(4) Pindah dari desa asal - beralih pekerjaan	** (tergantung jenis pekerjaan)	..	** (penciptaan lapangan kerja)	...

\* Kebutuhan prioritas rendah. \*\* Kebutuhan prioritas sedang. \*\*\* Kebutuhan prioritas tinggi.

Akibatnya dana bantuan yang direncanakan jadi modal awal minimal untuk bertahan hidup, rata-rata hanya memperoleh 5 jutaan. Ini sebagai konsekuensi mantan TNA yang ditanggung dalam MoU Helsinki hanya 3000 orang. Masalahnya adalah bagaimana dengan munculnya kompensasi terhadap kelompok yang berkategori lain (seperti mantan GAM non TNA, mantan GAM yang menyerah sebelum MoU, dan PETA (Pembela Tanah Air), yang mirip milisi yang muncul pada saat konflik dan sebagian besar pada masa darurat militer. Sementara bagi kelompok sasaran lainnya, seperti masyarakat korban konflik, yang tersebar di 221 kecamatan, baru sekitar 30,32 persen dapat dipenuhi. Rata-ratanya mereka mendapat bantuan dana yang variatif. Untuk korban meninggal, diberi dana diyat sebanyak 3 juta masing-masing orang, hingga mencapai 60 juta rupiah, jumlah ini didasarkan pada hukum Islam, bahwa untuk penggantian seseorang yang terbunuh itu sekitar 50 ekor unta, diperkirakan oleh BRA sebanyak 60 juta rupiah.<sup>108</sup> Padahal rata-rata sebagian besar baru menerima satu kali, meskipun sudah ada yang keempat kali. Bila satu tahun mereka mendapat bantuan sebesar 3 juta rupiah, untuk mencapai angka 60 juta rupiah dibutuhkan waktu sekitar 20 tahun. Untuk bantuan rumah rusak atau terbakar, masing-masing korban diberikan bantuan antara 34,5 juta hingga 35 juta, sebagai kompensasi agar mereka dapat membangun rumah kembali.<sup>109</sup> Terhambatnya penyaluran dana untuk tahun 2006, khususnya bagi diyat dan bantuan cacat serta bantuan rumah

<sup>107</sup> Survey AMM/WB, 2006

<sup>108</sup> Diskusi dan wawancara dengan mantan Ketua BRA, Prof. Yusni Sabi, di Banda Aceh, Awal Mei 2007.

<sup>109</sup> Ibid

yang dibakar/rusak, karena adanya pengalihan dana untuk membiayai AMM sebesar 20 milyar. Masa tugas AMM yang diperpanjang hingga pelaksanaan Pilkada Aceh, menyebabkan dana operasional AMM harus ditanggung oleh BRA. Akhirnya dana tersebut diambilkan dari dana yang awalnya telah diprogramkan untuk masyarakat korban konflik, diyat, korban cacat dan rumah yang dibakar/rusak.

Tabel 4.7. Strategi Mata Pencaharian GAM Aktif<sup>110</sup>

No.	Strategi Mata Pencaharian		Persentase <sup>32</sup>
	Tetap dalam Pekerjaan yang Sama (Ya/Tidak)	Tetap dalam Desa yang Sama (Ya/Tidak)	
1	Ya	Ya	43.1%
2	Tidak	Ya	26.0%
3	Ya	Tidak	6.1%
4	Tidak	Tidak	1.3%
5	Tidak tahu apakah ingin tetap dalam pekerjaan yang sama atau desa yang sama		23.5%

Seperti diketahui bahwa reintegrasi ekonomi adalah; memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Aceh, mantan kombatan

GAM, korban konflik dan 62% masyarakat yang saat ini terpaksa hidup dalam garis kemiskinan. Pemerintah terlihat lalai dan terkesan terlambat dalam penanganan reintegrasi ekonomi kesemua stake holder diatas. Dimana-mana kesuksesan reintegrasi politik sangat ditentukan dari kesuksesan reintegrasi ekonomi. Pemerintah sangat terpaku pada jumlah 3000 mantan petempur GAM, 6000 sipil GAM dan 63.000 korban konflik dengan mengandalkan pada jumlah uang dan dana yang dimiliki oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang dari segi jumlah terlihat sangat sedikit dan tidak akan mencukupi. Sebagai Badan Pemerintah yang juga melibatkan unsur dari GAM telah menyalurkan bantuan ekonomi kepada 3000 mantan petempur GAM dimana masing-masing menerima 25 juta rupiah. Untuk korban konflik, BRA akan mengalokasikan dana bantuan sebesar 70 hingga 170 juta melalui sistem basis kemasyarakatan untuk per-desa. Nominal tersebut sangat tergantung pada tinggi dan rendahnya eskalase konflik di masing-masing desa. Secara ekonomi, saya melihat ada keterpisahan konsepsional

<sup>110</sup> Studi lapangan kualitatif AMM/WB 2006

dimana pemerintah tidak menjadikan pemberdayaan ekonomi korban konflik dan mantan petempur sebagai bagian dari agenda pembangunan ekonomi daerah.

*Tabel 4 8. Jenis Pekerjaan Baru yang Diminati GAM Aktif<sup>111</sup>*

Pekerjaan Baru yang diminati	Persentase GAM kembali yang ingin pekerjaan baru dan tetap tinggal di desa asal
Pedagang kecil	52.2%
Pedagang besar	26.5%
Petani	2.4%
Pegawai negeri	2.4%
Tukang kayu	2.3%

Dalam hal ini pemerintah belum memiliki konsep apapun. Bantuan yang diberikan masih bersifat

emergency response dan tidak menyentuh semua lapisan masyarakat korban konflik. Sepatutnya, pemulihan Aceh secara keseluruhan adalah bagian kongkrit dari pemulihan Aceh pasca konflik dan tsunami. Pendekatan yang dipakai haruslah pendekatan individual dan pendekatan kolektif yang berbasis pada landasan teritorial gampong/mukim serta sektor ekonomi yang akan dikembangkan.

Ada beberapa masalah yang menjadi kendala dilapangan: a). Masalah konsep, Pemerintah belum memiliki konsep terpadu dalam pelaksanaan reintegrasi ekonomi. Pada praktek yang terjadi adalah try and error. Pada tahap awal BRA menyerukan kepada masyarakat korban untuk membuat proposal permohonan bantuan ekonomi yang nantinya akan dinilai oleh tim BRA untuk kemudian akan disalurkan bantuan keuangan modal. Ketika masyarakat dengan susah payah membuat proposal, kemudian pemerintah meniadakan konsep pembuatan proposal tersebut. b). Masalah komunikasi dan informasi, Pemerintah gagal menyediakan sarana komunikasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang gerak aktifitas reintegrasi ekonomi kepada mantan petempur GAM dan masyarakat korban sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan aktifitas reintegrasi ekonomi. Hal ini telah mengundang banyak keresahan dan berkembangnya kesesatan informasi dikalangan masyarakat dibawah yang kemudian dapat meresahkan masyarakat seperti; terjadinya pertentangan antara bawahan dan atasan dalam tubuh KPA, sesama masyarakat korban, masyarakat korban dengan KPA dan KPA-masyarakat korban dengan pemerintah. c). Organisasi Untuk menjamin terlaksananya program reintegrasi,

<sup>111</sup> survey AMM/IWB, 2006

Pemda melalui SK Gubernur membentuk sebuah lembaga yang kemudian disebut BRDA (Badan Reintegrasi Damai Aceh). Dalam perjalanannya SK Gubernur tidak cukup memberikan kepercayaan yang besar bagi pemegang mandat untuk menjalankan program reintegrasi karena dalam pelaksanaannya kebijakan yang diambil senantiasa bertabrakan dengan kebijakan dari perwakilan institusi pusat dalam hal ini institusi TNI. Hal inilah yang kemudian mengundang perwakilan GAM dan masyarakat sipil serta Ketua BRDA sebelumnya terpaksa mengundurkan diri.

Untuk kemudian BRDA diketuai oleh seorang Rektor pada waktu yang bersamaan. Dinas Sosial ditunjuk sebagai implementor program reintegrasi ekonomi ditingkat kabupaten terbukti gagal dan terlihat hanya bersifat kaku dan tidak terarah karena dinas sosial tidak memiliki pengalaman dalam penanganan program pasca konflik. d). Dana Ketersediaan dana bagi penanganan eksese konflik di Aceh terlihat tidak menjadi perhatian besar bila dibanding dengan penanganan post tsunami. Hal ini terlihat dari alokasi dana, kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh BRA jauh dari apa yang dimiliki oleh BRR yang menanggapi tsunami. Anggaran BRDA dua tahun belakangan adalah 793 Miliar dan untuk tahun 2007 sebesar 700 miliar dimana acceptable-nya adalah 350 miliar dan sisanya akan dianggarkan ulang dalam APBN susulan pertengahan tahun mendatang. Fokus utama perolehan dana bersumber dari APBD dan APBN, sementara bantuan yang bersumber dari luar tidak berhasil diperoleh karena sumberdaya organisasi yang terbatas serta peran pemerintah yang terkesan malu-malu meminta bantuan untuk program reintegrasi di Aceh. e). Masyarakat politik di Aceh dalam proses reintegrasi, penglibatan masyarakat politik di Aceh dalam rangka pelaksanaan program reintegrasi masih belum sepenuhnya optimal. Terlihat seperti adanya kurang pemahaman elemen partai politik di Aceh akan pentingnya upaya rehabilitasi dan reparasi masyarakat korban konflik. Masyarakat korban konflik untuk saat ini masih menjadi elemen yang terpisah dari permasalahan yang terjadi.

Disisi lain, TNI masih terlihat memiliki peran banyak dalam persoalan sosial politik di Aceh, meskipun dalam kesepakatan Helsinki tertulis eksplisit bahwa fungsi dan tugas TNI adalah pertahanan dari serangan luar negeri. TNI

masih terlihat banyak menanggapi soal-soal yang berkaitan dengan masalah keamanan yang dalam pembagian tugas negara adalah kewenangan kepolisian. TNI masih terlihat reaksioner dalam menanggapi issue-issue seperti, keamanan Pilkada, pemakaian PIN GAM, pembagian keuangan reintegrasi antara milisi dan mantan petempur GAM, penolakan pembentukan struktur KPA di Simeulue dan banyak lagi yang lainnya. Peran aktif TNI menyikapi persoalan sosial politik akan ikut memperkeruh suasana perdamaian yang masih berusia muda. Dalam hal ini perlu sebuah perhatian yang serius kepada para jurnalis untuk tidak menanyakan hal-hal yang tidak menjadi kewenangan TNI dalam persoalan sosial politik. Setiap jawaban yang dijawab oleh TNI akan mempengaruhi opini publik masyarakat dan memberikan peluang kepada TNI sebagai unsur pertahanan menyetir kebijakan publik. Disisi lain, posisi perempuan dalam reintegrasi, ketika konflik berkecamuk posisi perempuan Aceh memainkan peranan yang signifikan dibidang advokasi keluarga. Perempuan menjadi penyelamat bagi anggota keluarganya yang memiliki masalah dengan TNI/Polri mahupun GAM. Perempuan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga ketika suami-suami mereka terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halaman karena konflik. Perempuan juga sering menjadi objek kekerasan negara dalam konflik di Aceh. Organisasi GAM pada saat dan fase tertentu juga merekrut dan memobilisasi perempuan untuk keperntingan perjuangannya. Semangat "mempedulikan" perempuan terlihat kendor pada saat program reintegrasi direncanakan dan dijalankan.

BRA Aceh utara yang diketuai oleh Tgk. Nurdin, mengadakan sosialisasi tentang pencairan dana korban konflik di Balai Desa Kecamatan Dewantara, pada sabtu 25 Oktober 2008. Dalam kesempatan tersebut Ketua BRA menyatakan, menampung aspirasi masyarakat korban konflik yang mengadu tentang adanya khabar dilakukan pemotongan dana saat dilakukan pembayaran dana tersebut oleh pihak BRA.

"saya tidak melakukan pemotogan sedikitpun dana tersebut, itu hanya diada-ada oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dan apabila ada oknum yang datang untuk meminta persen dari pengurusan yang dilakukan, jangan di layani, kalau pun ada pihak yang mengatas namakan BRA meminta persen atas pengurusan dana tersebut, masyarakat silahkan mengadu ke pihak BRA

atau yang berwajib dan saya akan menindak tegas bila terdapat kejadian seperti itu".<sup>112</sup>

besarnya dana yang di kucurkan kepada pihak BRA Aceh Utara untuk di kucurkan kepada masyarakat penerima, berasal dari APBN 2008, Aceh Utara mendapat porsi yang lebih besar. Rincian Bantuan tersebut antara lain, Rumah yang di bangun sebanyak 451 Unit rumah dari anggaran APBN dan 718 Unit rumah dari anggaran APBA sehingga Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe dilakukan pembangunan 1169 Unit rumah pada tahun 2008. Bukan hanya itu saja tetapi BRA juga menganggarkan dana untuk yang meninggal akibat konflik sebanyak 6000 orang, Cacat Tapol dan Napol dan imbas konflik sebanyak 1225 orang dari APBN dan dari APBA sebanyak 1049 orang. Dana yang di peroleh perorang adalah Rp. 10 juta Rupiah, sedangkan untuk anak yatim akibat konflik sebanyak 3100 orang mendapatkan bantuan berupa beasiswa masing-masing menerima Rp. 1,8 Juta Rupiah. Bulan November 2008 ini akan di cairkan dana untuk pembangunan rumah saja sedangkan yang lain akan menyusul tahap selanjutnya.

Namun demikian, banyaknya laporan dan masukan masyarakat terkait kinerja BRA Aceh Utara yang dinilai sangat lambat. DPRK Aceh Utara melalui komisi E memanggil lembaga ini untuk menjelaskan kondisi riil. Sebab selama ini banyak laporan adanya indikasi pemotongan dana juga tebang pilih penerima bantuan. Menurut Ketua Komisi E Saiful Mahdi, pihaknya telah memanggil BRA Aceh Utara dan menanyakan sejumlah hal terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat korban konflik. Sebab selama ini pihaknya banyak mendapatkan masukan bahwa banyak warga yang berhak mendapat bantuan tidak mendapatkannya.

"Pihak BRDA telah kita undang untuk memberikan penjelasan terkait penyaluran bantuan selama ini. Pihaknya mengakui kalau masih ada pihak yang belum mendapat bantuan baik rumah maupun lainnya. Alasan mereka karena jumlah kuota bantuan yang sangat terbatas. Namun dalam pertemuan itu kami berpesan agar BRA benar-benar menyalurkan bantuan secara tepat, dari tahun 2006 hingga 2007, jumlah proposal masuk katagori rumah terbakar mencapai 6.000. Tetapi dari hasil verifikasi hanya sekitar 4.000 proposal rumah yang dinyatakan layak dibantu. Sedangkan yang baru

---

<sup>112</sup> Pada kesempatan tersebut penulis berkesempatan hadir dan berdiskusi informal dengan Ketua BRA Aceh Utara

diselesaikan dalam dua tahun lalu hanya sekitar 878 unit rumah. Sementara untuk tahun 2008 akan dibangun sebanyak 1.169 unit, Terlepas dari laporan pihak BRDA, pihak dewan akan tetap melakukan pengawasan dan meminta masyarakat dapat memberikan laporan jika ada terlihat penyimpangan. Sehingga program pemerintah yang bertujuan agar para korban konflik terberdayakan dapat terwujud".<sup>113</sup>

BRA pada tanggal 21-29 Juni 2008 telah melakukan verifikasi ulang data korban konflik penerima bantuan rumah dan diyat di empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe. Verifikasi ulang merupakan saringan terakhir untuk menentukan para penerima bantuan yang benar-benar berhak. Verifikasi ulang dilakukan sebagai respon BRA terhadap keberatan masyarakat akan data hasil verifikasi sebelumnya yang dinilai masih memasukkan beberapa nama penerima yang tidak berhak. Proses verifikasi ulang dilakukan dengan cara mengirim tim BRA Propinsi Aceh, khususnya Badan Pelaksana BRA, APRC, dan Badan Pengawas BRA. Tim BRA Pusat dan BRA kabupaten/kota kemudian berkomunikasi dengan Pemda setempat, mulai dari Bupati, Camat, hingga ke Tuha Peut dan Geuchik untuk mengecek dan memastikan data korban konflik penerima bantuan hasil verifikasi sebelumnya dengan data yang mereka miliki. Metoda penyaringan secara detail, kasus per kasus, ini telah menghasilkan jumlah pasti para penerima bantuan dana reintegrasi yang tidak dipertentangkan lagi. Hasil verifikasi ulang di Aceh Utara, Aceh Tamiang, Lhokseumawe dan Langsa yang meliputi 48 kecamatan dan 1.193 Gampong, menemukan kenyataan dari 9.276 data penerima rumah yang tercatat sebelumnya, jumlah penerima yang dapat dipastikan kebenarannya hanya 2.969 orang atau 31,8 persen. Namun tim verifikasi ulang juga mendapati fakta adanya 1.251 penerima bantuan rumah yang sebenarnya berhak, tapi tidak termasuk ke dalam daftar yang dimiliki BRA. Dengan demikian secara keseluruhan, data akhir jumlah rumah yang harus dibangun di empat kabupaten/kota tersebut mencapai 4.214 unit. Sebagaimana sudah menjadi kebijakan BRA, bantuan perumahan diberikan kepada pemilik yang rumahnya dibakar/dirusak total pada masa konflik. Dengan demikian jumlah rumah yang harus dibangun BRA berkurang 42,5 persen dibanding data yang ada sebelumnya.

---

<sup>113</sup> Diskusi tentang kinerja BRA Aceh Utara, diruang komisi E DPRK Aceh Utara Juli 2008

Sementara data untuk penerima diyat yang diverifikasi ulang di 25 kecamatan dan 647 gampong mengalami perubahan sebanyak 8,7 persen. Untuk tahun 2008, BRA menargetkan bantuan perumahan sebanyak 8.398 unit rumah. Sebanyak 7.350 unit akan dibiayai APBN dan 1.048 unit lainnya dibiayai APBA. Nilai bantuan per unit rumah sebesar Rp 40 juta. Sedangkan bantuan dana diyat Rp 3 juta per tahun dan bea siswa anak yatim Rp 1,8 juta per tahun.<sup>114</sup>

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aceh Working Groups atau AWG mendesak Badan Reintegrasi Aceh atau BRA lebih memfokuskan diri pada tugas serta peran awalnya, seperti diamanatkan butir 3.2 nota kesepahaman Helsinki tentang tahap reintegrasi. Pernyataan itu disampaikan Usman Hamid (Kontras), dalam jumpa pers AWG. BRA sudah melenceng dari kewajiban utama terkait proses reintegrasi mantan anggota GAM dan malah mengurus masalah lain yang bukan tugasnya. Turut hadir dalam jumpa pers itu Amiruddin (Elsam), Choirul Anam (AWG), dan Rafendi Djamin (HRWG). Selain itu, personel BRA juga diminta mampu bersikap independen, imparial, dan bekerja penuh waktu di dalam BRA. Beberapa waktu sebelumnya GAM menyatakan menarik diri dari BRA akibat persoalan yang terjadi di dalamnya. "Kami khawatir masalah muncul lebih karena perbedaan persepsi internal. Belum lagi tidak ada transparansi pengelolaan dana reintegrasi sebesar Rp 800 miliar itu sudah dipakai apa saja, berapa sisa yang ada, dan bagaimana pertanggungjawabannya.". Persoalan internal, diperumit dengan keberadaan divisi Kementerian Bidang Politik Hukum dan HAM yang dinilai banyak pihak justru malah menyeret BRA ke dalam wilayah politik sehingga berdampak menghambat kinerjanya. Salah satu pemicu persoalan ketika BRA tidak lagi memfokuskan diri pada proses reintegrasi para mantan anggota GAM, melainkan juga dipaksa untuk bersikap akomodatif terhadap elemen lain. Akibatnya, proses itu menjadi tercampur aduk ketika kelompok masyarakat lain, yang merasa menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, diminta mengajukan proposal untuk menerima

---

<sup>114</sup> Hasil diskusi dan wawancara dengan Tim BRA Aceh Utara di Lhokseumawe Juli 2008



dana kompensasi. Akibatnya, hingga April tercatat 40.000 proposal masuk ke BRA dan baru sekitar 700 proposal dinyatakan layak secara administratif.<sup>115</sup>

Pelaksanaan reintegrasi tidak boleh hanya sekedar menjawab kebutuhan material berupa bantuan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu memperkuat insentif kelompok-kelompok lain dalam mendukung perdamaian. Dimensi keamanan juga mutlak diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi, dan ketegangan yang sedang muncul ataupun yang laten adalah hal paling penting yang musti diperhatikan sebagai langkah strategis dalam merencanakan intervensi socio-ekonomi lanjutan pasca-konflik, untuk memperkokoh pembangunan yang damai. Perspektif penulis memandang bahwa, konsep Reintegrasi di Aceh secara ideal menghendaki re-orientasi pada dua aspek yang penulis anggap dominan bersandar pada tujuan terciptanya human security, yakni pada aspek keamanan dan sosial ekonomi.

Program reintegrasi tidak dapat berjalan sendiri sebagai sebuah program tunggal, yang kemudian cenderung dimaknai lebih lanjut secara sempit bahwa, program reintegrasi akan selesai dengan pemberian ataupun bantuan materi atau ekonomi semata pada subjek korban konflik. Program reintegrasi Aceh musti bersinggungan dan berjalan beriringan dengan pendekatan aspek lain yang sesungguhnya secara lebih jelas telah tertulis didalam materi muatan MoU Helsinki. Dengan kata lain, program reintegrasi adalah menjalankan secara utuh mandat MoU, baik melalui jaminan terselenggaranya pemerintahan Aceh melalui regulasi Undang-Undang Pemerintah Aceh dan terjaminnya partisipasi politik masyarakat dalam berdemokrasi; adanya Penegakan HAM melalui ratifikasi kovenan hak sipil dan ekonomi, sosial budaya serta pembentukan KKR dan Pengadilan HAM; diberikannya Amnesti serta terpenuhinya hak para mantan kombatan (GAM), tahanan politik maupun narapidana politik, maupun korban konflik; serta adanya konsistensi pada pengaturan keamanan dan reformasi sektor keamanan di Aceh. Inilah gambaran umum hasil analisis tentang adanya mis-pemahaman program reintegrasi oleh pihak-pihak elit yang menjadi masukan buruk bagi perjalanan program reintegrasi di Aceh memasuki tahun ke empatnya,

---

<sup>115</sup> Kompas, 13 Juni 2006 "Perdamaian Aceh: BRA Harus Perbaiki Kinerja dan Lebih Fokus pada Tugas"

sehingga telah berakibat pada memuainya rasa keadilan, modal sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang berhak, yang semestinya telah dapat menjadi batu pijakan pada proses perdamaian Aceh secara berkelanjutan.

Lebih lanjut identifikasi pokok permasalahan yang kian serius untuk memperoleh tanggapan guna membenahi program reintegrasi Aceh, yakni; pertama, tentunya tetap tertuju pada institusi yang diberikan mandat penuh dalam perwujudan reintegrasi. Dalam hal ini, Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) menjadi fokusnya. Kedua adalah potret daripada dinamika sosial yang berkembang dimasyarakat pasca konflik serta akibat daripada pelaksanaan program reintegrasi Aceh.

Dalam implementasi program Reintegrasi Aceh terdapat beberapa problematika yang inhern. Perspektif pertama yang menekankan tinjauannya pada pendekatan secara institusional setidaknya telah menunjukkan beberapa kelemahan, diantaranya adalah: 1). Pembentukan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) hanya dengan Surat Keputusan Gubernur. Kondisi ini, berakibat pada terbukanya peluang intervensi oleh struktur Pemerintahan yang lebih tinggi dari posisi Gubernur. 2). Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) belum memiliki kejelasan atas konsep strategisnya (*blueprint*). 3). Penekanan yang hanya tertuju pada aspek ekonomi unsich melalui konsepnya yang bersifat bantuan (*charity*). 4). Sistem Menejerial lembaga Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) yang lemah. 5). Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) belum berperspektif korban. 6). Bantuan ekonomi seringkali tidak tepat sasaran dan diikuti juga dengan realisasinya yang korup. 7). Adanya indikasi kuat telah diterapkannya exit strategi BRDA yang terkesan sebagai praktek cuci tangan dari permasalahannya yang menumpuk melalui finalisasi data korban konflik serta mekanisme komplain perorangan bagi korban konflik.

Sedangkan pada perspektif berikutnya, yakni tentang potret dinamika sosial yang berkembang di masyarakat pasca konflik serta akibat daripada pelaksanaan program reintegrasi Aceh, menunjukkan juga beberapa temuan yang sekiranya bisa dijadikan sebuah catatan, yakni: 1). Eksisnya kekuatan ex-kombatan GAM yang bernaung di bawah koordinasi Ormas KPA dan partai PA. Mereka cenderung memperoleh kemudahan akses terutama dalam proses rehabilitasi-

rekonstruksi, sehingga diakui ataupun tidak terjadi mobilisasi akses sumberdaya pada suatu golongan tertentu yang berakibat pada terjadinya segregasi sosial bermotif kesenjangan sosial dan ekonomi. 2). Belum semua mantan kombatan terutama Inong Balee mendapat bantuan reintegrasi. Sementara untuk milisi, yang tidak di atur dalam MoU justru mendapatkan bantuan. 3). Banyaknya masyarakat korban yang merasa diperlakukan secara tidak adil atas kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program reintegrasi, terutama tidak puas dengan pelaksanaan distribusi bantuan yang di ekspresikan melalui tuntutan keras atas pembenahan kinerja Institusi BRDA. 4). Meningkatnya kriminalitas yang bertendensi kepentingan Politik.

"Proses damai apa? Saya masih lihat luka-luka suami tiap hari, dia gak bisa kembali kerja di sawah karena dipukuli banyak kali, proses damai ini nggak ada artinya bagi saya dan suami saya karena lukanya masih terasa. Kapan ada proses penyembuhan? Damai ini untuk pemerintah dan GAM elit saja. Tapi gimana dengan damai di hati? Rasanya masih sakit tiap hari...jangan dana reintegrasi atau dana apalah namanya, untuk biaya ngobatin suami aja gak ada..damai apa ni...."<sup>116</sup>

#### IV. PILKADA SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI KONFLIK

Suksesnya pilkada 2006 di Aceh menjadi tonggak demokratisasi, pasca terpilihnya gubernur/wagub dan bupati/wabup/walikota/walkot di NAD. Komunikasi politik menjadi sangat dibutuhkan, perbedaan latar belakang politik antara GAM dan non GAM mestinya sudah menjadi masa lalu, yang terpenting adalah bagaimana mendorong kesejahteraan ekonomi di Aceh. Pilkada Aceh juga telah meruntuhkan "mistik" politik nasional, partai-partai nasional yang memiliki representasi di DPR ternyata tidak memiliki basis konstituen massa, kecenderungan klaim politik partai atas representasi rakyat di parlemen ternyata tidak terbukti dalam pilkada di Aceh. Pilkada yang dilaksanakan di Aceh pada 11 Desember 2006, memberikan fakta yang spektakuler dan mengejutkan dengan terkumpulnya jumlah suara yang memenangkan pasangan Irwandi Yusuf-M. Nazar sebagai Gubernur dan Wakil Gubenrnur Aceh. Kalau GAM/KPA memang ingin serius mengarahkan jalannya pemerintahan, strategi menguasai parlemen

<sup>116</sup> Diskusi dan wawancara dengan istri mantan kombatan GAM wilayah Pase Tanah Jambo Aye, juli 2007

lokal dalam Pemilu 2009 adalah keharusan. UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh bukan hanya membutuhkan kalangan profesional, birokrat, dan teknokrat andal, melainkan juga pihak yang menjiwai semangat di balik pasal-pasal itu.

Paket Irwandi-Nazar menjadi simbol tampilnya generasi muda GAM mendobrak kekuasaan GAM tua. Ironisnya, Muzakir Manaf yang terjepit. Ia sempat meneteskan air mata melihat indikasi perpecahan ini. Saat itu Mantan Komandan Perang TNA ini kelihatan sedang kebingungan menghadapi dua tekanan besar yang amat berat. Di satu sisi ia harus tunduk terhadap keinginan para tokoh tua GAM, di sisi lain ia tidak ingin berseberangan dengan ribuan mantan anggota TNA yang dulu berada di bawah kendalinya. Seakan tak kuasa menahan beban itu, ia mengenang masa lalu, kalau pasukan GAM masih kompak menggalang perjuangan. Kalangan elit GAM memintanya untuk mengarahkan semua mantan TNA dan GAM di daerah mendukung pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah, tapi suara arus bawah justru berbeda. Orang-orang GAM di daerah menginginkan adanya calon yang lebih mengakar. Muzakir pun jadi kelimpungan. Ditekan dari atas, disodok dari bawah.

“Sudah banyak sekali saudara kita yang syahid dalam perjuangan ini. Sungguh sangat saya sayangkan sekarang kita tidak bisa sependapat”<sup>117</sup>

Tapi di lapangan politik, jelas beda. Apa boleh buat, pria yang kerap dipanggil mua'lim oleh anak buahnya itu tak bisa melawan kepedihan. Sedih membayangkan GAM tidak lagi bersatu padu. Tapi untuk dukungan arus bawah, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pilihan anak buahnya. Pemilihan kepala daerah langsung di Aceh tahun ini memang menghadirkan banyak sejarah baru. Momen Pilkada ini menjadi awal mencuatnya kerapuhan di dalam tubuh GAM. Perbedaan pendapat mencuat antara arus bawah yang dikomandoi pimpinan GAM wilayah – dengan kelompok generasi tua yang dimotori anggota GAM senior. Tanda-tanda ketidakharmonisan itu sebenarnya sudah terlihat sejak duek pakat Bansa Aceh Sigom Donja – pertemuan akbar GAM seluruh dunia – yang berlangsung di Banda Aceh 20-22 Mei 2006. Kala itu diadakan rapat khusus untuk memilih siapa yang bakal dicalonkan GAM dalam Pilkada Gubernur Aceh.

<sup>117</sup> Pertemuan petinggi GAM di Wisma Daka, Banda Aceh Selasa 22 Agustus 2006 lalu.

Sebelum pertemuan berlangsung, kelompok elit GAM, seperti Usman Lampoh Awe, Zakaria Zaman, Zaini Abdullah dan Ilyas Abet menginginkan agar pasangan Humam Hamid dan Hasbi Abdullah mendapat dukungan dari seluruh anggota GAM. Kenyataannya, arus bawah bersuara lain. Mereka memilih Teungku Nashiruddin sebagai calon Gubernur dan Muhammad Nazar sebagai wakilnya. Belakangan Nashiruddin mengaku tidak siap. Tinggallah Nazar sendirian tanpa pasangan. Dalam situasi seperti itu, sebenarnya majelis GAM bisa saja melakukan penyaringan ulang untuk mencari figur menggantikan Nashiruddin. Tapi hal itu tidak dilakukan. Sebaliknya, pimpinan GAM menyampaikan pengumuman mengejutkan bahwa mereka tidak ambil bagian dalam Pilkada Aceh tahun ini. "Jika ada anggota GAM yang maju, silahkan. Tapi bukan mengatasnamakan GAM. Mereka maju secara personal," Perdana Menteri GAM Malik Mahmud.

Ada dua makna yang tersirat dari keputusan ini. Pertama, pimpinan GAM tidak ingin terjadi perpecahan dalam tubuh organisasi mereka, karena sebagian mendukung pasangan Humam-Hasbi dan sebagian lagi mendukung calon berbeda. Kedua, boleh jadi langkah ini merupakan kebijakan untuk membulatkan suara GAM bagi pasangan Humam dan Hasbi. Sebab bagaimanapun, paket ini akan terus maju melalui jalur dukungan PPP. Sampai satu bulan setelah keputusan itu disampaikan, memang belum muncul masalah di lapangan. Paket Humam-Hasbi tampaknya bakal melaju mulus menggotong suara dari basis GAM. Hampir setiap minggu mereka berkeliling Aceh melobi tokoh masyarakat dan ulama yang berpengaruh. Sudah pasti orang penting GAM ikut pula digandeng. Humam Hamid sendiri cukup kondang di Aceh. Ia adalah adik Farhan Hamid, politikus PAN yang kini duduk di DPR RI. Sampai saat ini ia tercatat sebagai dosen di Fakultas Pertanian Unsyiah.

Sedangkan Hasbi Abdullah adalah adik kandung Zaini Abdullah, Menteri luar Negeri GAM yang bermukim di Swedia. Semasa Orde Baru, Hasbi pernah dijatuhi vonis selama 14 tahun penjara. Seiring jatuhnya kekuasaan Soeharto, Hasbi kemudian dibebaskan pada September 1998. Sejak itu namanya menghilang dari peredaran. Ia sempat menetap di Bandung untuk menyelesaikan pendidikan S-3 bidang Tata Negara di Universitas Padjajaran. Baru setelah

perdamaian Helsinki, nama Hasbi baru mencuat kembali. Pasangan Humam-Hasbi sebenarnya cukup populer di Aceh. Apalagi sampai Juli lalu hanya Hasbi satu-satunya anggota keluarga GAM yang tampil sebagai kandidat. Masalah muncul ketika mencuat kabat kalau Muhammad Nazar bertekad terus maju. Ia berpasangan dengan Irwandi Yusuf, perwakilan senior GAM untuk AMM. Irwandi dicalonkan sebagai gubernur sedang Nazar wakilnya. Mereka menggunakan jalur independen untuk melesat ke atas. Pasangan muda ini ternyata lebih mendapat dukungan suara dari basis GAM. Sejumlah tokoh GAM dari Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Selatan dan Aceh Tengah ada di belakang mereka.

Elit GAM yang tadinya mengira langkah Humam dan Hasbi sudah mulus, mulai kelabakan. Apalagi Nazar dan Irwandi sukses memotori aksi memperingati setahun MoU Helsinki 15 Agustus di Banda Aceh, yang dihadiri ribuan massa dari berbagai daerah. Lantas, majelis GAM memutuskan untuk mengadakan rapat dengan mengundang sejumlah perwakilan GAM dari semua wilayah. Hadir dalam rapat itu, antara lain Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Usman Lampoh Awe, Ilyas Abet, dan Zakaria Zaman. Mereka ini adalah tokoh-tokoh tua yang merupakan generasi pertama GAM. Acara berlangsung di Wisma Daka, Lampineung, Banda Aceh 22 Agustus 2006. Pertemuan diadakan tidak lain untuk menggiring seluruh anggota GAM memberikan dukungan kepada pasangan Humam dan Hasbi. Bukan kepada pasangan Irwandi-Nazar. Panglima GAM Muzakir Manaf diminta pula untuk mempengaruhi seluruh mantan anggota TNA di semua wilayah agar mematuhi permintaan itu.

Tidak semua petinggi GAM diikutkan dalam pertemuan tersebut. Irwandi dan Nazar tidak hadir. Sofyan Dawood yang menjabat sebagai juru bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) saat itu juga tidak tampak. Mencuat kabar kalau mereka memang sengaja tidak diundang karena dari awal terang-terangan menyatakan tidak mendukung pasangan Humam dan Hasbi. Tokoh GAM tentu berharap pertemuan itu bakal sukses dan meminta semua wilayah mendukung seruan mereka. "Kami minta agar semua elemen GAM di daerah untuk mendukung pasangan ini," Zakaria Zaman, mantan menteri pertahanan GAM. Malik Mahmud, Usman Lampoh Awe dan tokoh GAM lainnya ikut menguatkan pernyataan itu. Tapi yang terjadi, hampir semua perwakilan wilayah yang hadir menolak

himbauan itu. Bahkan sempat terjadi perdebatan antara wakil-wakil daerah dengan petinggi GAM. Ada yang mempertanyakan status Hasbi Abdullah yang bukan orang militan GAM. Hasbi disebut-sebut menghilang kala GAM tengah berkutat dengan perjuangan pasca reformasi hingga masa darurat. Pencalonan Hasbi juga dituding sarat dengan nuansa nepotisme karena ia adalah adik kandung Zaini Abdullah. Yang lebih keras adalah suara kritis untuk Humam Hamid. Seorang mantan panglima wilayah GAM mengungkap tract record Humam yang turut mendukung berlakunya daerah operasi militer (DOM) di Aceh. Humam Hamid ikut sebagai salah seorang penandatangan bersama tujuh pejabat Aceh lainnya, termasuk Gubernur Ibrahim Hasan untuk meminta pengiriman pasukan besar-besaran di Aceh pada 1989. Kala itu Humam menjabat sebagai Ketua KNPI Aceh. Kisah-kisah masa lalu ini menjadi senjata ampuh anggota GAM daerah untuk menolak mendukung pasangan Humam-Hasbi.

“Kami tidak melihat mereka sebagai representasi GAM untuk Pilkada mendatang. Kami tidak akan mendukung pasangan itu,”<sup>118</sup>

Ada pula wakil daerah yang mempertanyakan konsistensi sikap pimpinan GAM.

“Dulu sudah bilang bahwa GAM tidak berpihak. Kok sekarang minta kita mendukung Humam dan Hasbi. Itukan tidak konsisten,”<sup>119</sup>

Debat panjang antara utusan wilayah dan elit GAM inilah yang membuat Muzakir kelimpungan. Tadinya ia diminta elit GAM untuk mempengaruhi anggota GAM daerah. Nyatanya Muzakir tidak mampu. Sampai akhirnya ia meneteskan air mata. Hingga usai pertemuan, tidak ada kata sepakat yang dicapai. Sebaliknya, gesekan antara kelompok GAM tua dengan anak-anak muda mulai memanas. Perpecahan kian terlihat manakala kelompok muda dan perwakilan daerah, ramai-ramai menyatakan dukungan untuk pasangan Irwandi dan Nazar. Paket Irwandi -Nazar sendiri dideklarasikan lima hari setelah pertemuan itu. Dibanding saat deklarasi Humam dan Hasbi, deklarasi paket Irwandi-Nazar pada 27 Agustus 2006 lalu terasa kental dengan nuansa GAM. Kalau pasangan H20 dideklarasikan di Aceh Jaya saat berlangsungnya pertemuan PPP, maka pasangan Irwandi dan Nazar mendeklarasikan diri di kantor pusat

<sup>118</sup> Wawancara dan diskusi via telpon/HP dengan TGK. Teungku Abrar Muda, mantan panglima GAM dari wilayah Aceh Selatan, 23 Agustus 2006

<sup>119</sup> Wawancara dan diskusi via telpon/HP dengan Munawarliza Zein, salah seorang anggota majelis GAM yang sekarang menjadi Walikota Sabang

GAM Banda Aceh. Hadir pula sejumlah tokoh-tokoh GAM yang dikenal militan dan merakyat. Hampir semua penglima GAM wilayah mendukung pasangan ini. Beberapa eks pemimpin TNA, seperti Sofyan dawood, Jamaica, Muchsalmina, Fauzan Azima dan Muharram ada di belakang mereka. Yang mengejutkan, beberapa pejabat daerah, seperti Ketua DPRD Aceh Sayed Fuad Zakaria, Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Drs T Saiful Ahmad B.Mu.E, Wakadispora Aceh T Rayuan Sukma, serta beberapa pejabat daerah lainnya tampak menyemarakkan acara. Bachtiar Abdullah, juru bicara GAM Swedia yang dikenal sangat dekat dengan Malik Mahmud, juga ada di belakang Irwandi dan Nazar. Acara deklarasi pasangan anak muda itu berlangsung sangat meriah. Suasana kian semarak ketika Irwandi dan Nazar tampil berpidato dengan menggunakan pakaian tradisional Aceh. Salawat badar, Hikayat Perang Sabil dan pidato politik dari sejumlah tokoh ikut mewarnai suasana deklarasi. Begitu kuatnya dukungan arus bawah untuk pasangan itu, sampai-sampai Sofyan Dawood yakin kalau 80 persen suara anggota GAM dan TNA diberikan kepada pasangan Irwandi-Nazar.

“Hampir seluruh daerah memberikan dukungan untuk pasangan ini. Kami tidak ragu lagi untuk memilih mereka,”<sup>120</sup>

Untuk memuluskan langkah, Irwandi dan Nazar harus mampu mendapatkan dukungan dari 3 persen penduduk Aceh. Hal itu dibuktikan dari pengumpulan tandatangan dan fotocopy kartu identitas. Jika penduduk Aceh 4,2 juta, berarti setidaknya mereka harus memperoleh 122 ribu suara. Tapi hal itu sama sekali tidak merisaukan bagi Irwandi. Jangan heran, sebab jauh-jauh hari mereka sudah melakukan aksi gerilya untuk memperoleh dukungan rakyat. Bahkan saat pendeklarasian 27 Agustus 2006, Nazar mengaku kalau mereka telah memperoleh dukungan 200 ribu massa GAM. Padahal batas waktu pengumpulan suara baru akan ditutup pertengahan September 2006.

“Kami siap berkampanye untuk memenangkan Pilkada Aceh, kami ingin membawa angin perubahan bagi rakyat Aceh,”<sup>121</sup>.

<sup>120</sup> Diambil dari beberapa media lokal salah satu dari serambi Indonesia, 28 Agustus 2006 tentang komentar Sofyan Dawood yang saat itu masih menjadi juru bicara KPA

<sup>121</sup> Serambi Indonesia, 27 Agustus 2006



Irwandi Yusuf adalah Dokter Hewan alumnus Unsyiah ini akan menyampaikan konsep-konsep pembangunan yang berkeadilan, dengan penegakan hukum sebagai tonggak utamanya. Tidak mudah untuk menghitung peluang Irwandi dan Nazar memenangkan Pilkada 2006. Apalagi masing-masing kandidat memiliki basis massa tersendiri. Sebut saja pasangan Malik Raden-Sayed Fuad Zakaria yang menggunakan Golkar sebagai lokomotif politiknya. Ada pula paket Azwar Abubakar dan Nasir Djamil yang merupakan gabungan dua kekuatan PAN dan PKS. Kandidat lain pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasangan Humam dan Hasbi pun tidak bisa disepelekan. Munculnya paket Irwandi dan Nazar tidak membuat kedua pria asal Pidie ini kehilangan tenaga. Hasbi sendiri yakin kalau ia masih mendapat dukungan dari massa GAM. Selain itu, ada tiga partai yang mendukung mereka, selain PPP, juga ada PIB dan PDI.

Hambatan-hambatan psikologis-politis mesti diminimalisir, sehingga GAM akhirnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari masa depan Aceh. Perhatian kepada komponen masyarakat Aceh lainnya juga layak dilakukan. Bagaimanapun, kalau mengikuti data-data statistik yang resmi, tidak banyak masyarakat Aceh yang menjadi anggota GAM. Jangan sampai GAM dipandang mendapatkan perlakuan emas, sementara yang lain dianggap pelengkap. Kemenangan GAM/KPA dalam Pilkada 2006 menjadi titik awal bagi GAM/KPA untuk dapat menguasai parlemen dalam pemilu 2009.

IRNA, yang dulu berseberangan dengan pemerintah RI, menang IRNA adalah sang kuda hitam. Jakarta wajar terperangah atas kemenangan pasangan yang diusung GAM dan SIRA. Beberapa pihak bahkan ketar-ketir, mereka menuntut satu hal, GAM harus dibubarkan<sup>122</sup>. Bahkan dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) periode Juli-Agustus 2006, didapati sebanyak 81,2 persen dari responden menuntut hal serupa. GAM harus bubar karena ide-idenya yang separatis. Sekjen PDIP Pramono Anung mengungkapkan "belum dilantik saja, sudah minta revisi UU dan mendorong parpol lokal, tapi saya tidak membayangkan kalau mereka dominan dalam eksekutif". Nada lebih keras datang dari Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Muladi, yang juga salah

<sup>122</sup> Baca *Saat Rakyat Aceh Harus Memilih Nawala* edisi IV, The WAHID Institute No. 4/Th. I/Desember - Maret 2007.

satu pengurus Partai Golkar. "Irwandi harus membubarkan GAM, yang selama ini bercita-cita memerdekakan Aceh jika sudah jadi gubernur, kalau tidak mau, komitmen Irwandi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diragukan."<sup>123</sup>

Petinggi GAM pernah berujar akan membubarkan organisasi GAM pasca MoU Helsinki. Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah mengatakan "GAM akan membubarkan diri dan berjuang lewat jalur politik,"<sup>124</sup> Walaupun, latar belakang Gubernur Irwandi Yusuf terbiasa mengkampanyekan pemisahan Aceh dari RI, sementara Wagub M. Nazar dari SIRA memfasilitasi pilihan itu, namun dalam soal ideologi keduanya termasuk sekuler dan pragmatis.<sup>125</sup> Merdeka tak ada lagi dalam agenda GAM. Senjata telah dipotong dan tentara telah dibubarkan.<sup>126</sup> Pasangan IRNA diperkirakan hanya akan memfokuskan pemerintahan Aceh pada soal-soal krusial. Di antaranya perbaikan ekonomi, pembentukan *clean government* yang bebas dan transparan, pemerintah yang peduli lingkungan dan HAM.<sup>127</sup> Bahkan peneliti dari International Crisis Group (ICG) Sidney Jones menyakinkan bahwa Irwan Yusuf akan pragmatis.<sup>128</sup> Kini, IRNA sudah duduk di kursi Gubernur dan Wagub. Pihak yang lain boleh meradang. Tetapi, pilihan dan keputusan rakyat Aceh harus dihormati.

Sidney Jones dalam sebuah diskusi di Banda Aceh menyebutkan memang setelah melalui beberapa fase maka fase transformasi selanjutnya yang mesti dilalui adalah proses Pilkada 2006 di harapkan berjalan dengan baik dan demokratis.

"...saya yakin Pilkada nanti di Aceh akan berjalan dengan baik, GAM atau KPA mesti dapat memposisikan dirinya dengan baik, kalau pilkada dapat berjalan secara demokratis tanpa intimidasi dan ancaman dari pihak manapun, proses transformasi politik berjalan dengan baik di Aceh..."<sup>129</sup>

Nasir Jamil sebagai salah seorang anggota DPR-RI dari PKS sebagai tokoh Aceh, ketika tanya mengenai apakah proses Pilkada yang lalu di Aceh

<sup>123</sup> *Nawala* Edisi IV, The Wahid Institute No.4/th.I/Desember-Maret 2007

<sup>124</sup> <http://www.Serambinews>, edisi 28/4/2006. Diakses 1 Juni 2008

<sup>125</sup> Indra J. Piliang, "Otonomi Paham Separatis" *Tempo* (18/12/06)

<sup>126</sup> Komentar Munawar Zain salah seorang tokoh GAM. Sekarang menjadi Walikota Sabang di *Radio Nederland Wereldomroep* (28/12/06).

<sup>127</sup> Teuku Kemal Fasya, wawancara dengan *Nawala* Edisi IV The Wahid Institute No. 4/th.I/Desember-Maret 2007

<sup>128</sup> Saat rakyat Aceh Harus Memilih, *Nawala* Edisi IV, The Wahid Institute No. 4/th.I/Desember-Maret 2007

<sup>129</sup> Diskusi dengan Sidney Jones, Agustus 2006

apakah sudah mencerminkan keinginan rakyat Aceh dengan dimenangi kelompok independen yang notabene dari mantan GAM sehingga dapat memuluskan proses transformasi konflik dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik yang diperankan oleh mantan GAM.

“...kita mesti percaya bahwa itulah pilihan rakyat Aceh, walaupun terdapat banyak kelemahannya, hanya saja kita berharap pilihan rakyat tersebut benar-benar dapat memajukan Aceh kedepan...saya kira proses transformasi dari konflik bersenjata menuju politik sudah mulai berjalan, namun kita jangan lupa bahwa kekurangan dan kelemahan proses tersebut mesti menjadi pelajaran untuk ke depan..”<sup>130</sup>

“...walaupun banyak terjadi tarik-menarik kepentingan dalam proses Pilkada Aceh kemarin, namun sudah berjalan dengan baik, politik sulit diprediksi, dan itulah yang terjadi di Aceh, dimanapun di dunia itu pasti seperti itu...kita sudah masuk dalam kancah politik..”<sup>131</sup>

Bagaimana agar tantangan itu bisa diantisipasi oleh duet IrwandiYusuf-Muhammad Nazar? Prof. Olle Törnquist menyebutkan kemenangan mereka yang dipantau oleh Uni Eropa ini menjadi modal kuat mewujudkan Aceh yang transparansi, demokrasi dan berkeadilan. Dengan tim kerja yang apik, kerja sama yang harmonis dengan legislatif, tidaklah sulit mantan kombatan GAM (Irwandi) dan aktivis pro demokrasi (Nazar) itu mengayuhkan roda pemerintah. Tentu saja perlu lembaga atau individu yang mengawasi roda kebijaksanaan Irwandi-Nazar. Maklum saja, kalau sudah mendapat kekuasaan, orang cenderung melakukan korupsi atau melupakan tujuan utama. Di sisi lain, Olle justru berpendapat, kontrol publik melalui pemberdayaan organisasi massa yang terlahir murni berdasarkan aspirasi dari bawah justru lebih ampuh. Masyarakat bawah bagaimana pun lebih tahu dan paham akan kebutuhan mereka. Karenanya, melalui perhatian yang tepat, partisipasi publik yang aktif dan kritis merupakan sumber daya alternatif yang tak bisa dianggap enteng bagi kelanjutan perdamaian di Aceh. Tentunya tak akan lekang dari ingatan kita, ketika Belanda mengirimkan Snouck Hurgronje untuk mengetahui rahasia kekuatan dan militansi rakyat Aceh dalam berperang. Pada akhirnya, Snouck-melalui berbagai karya tulis ilmiahnya, seperti “Aceh di Mata Kolonialis-berhasil menemukan cara menaklukkan bangsa keras

<sup>130</sup> Diskusi dengan Nasir Jamil 2008 di Asrama Mahasiswa Aceh Foba Jakarta

<sup>131</sup> Diskusi dan wawancara dengan (Alm) Ibrahim bin Syamsuddin (KBS) Desember 2008 di Jakarta

kepala ini yakni politik adu domba sesama bangsa Aceh dan meredam akses demokratisasi rakyat Aceh.

## V. PARTAI LOKAL SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI KONFLIK

Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakir Manaf mengatakan, pendirian Partai GAM adalah bagian dari implementasi MoU Helsinki. Sehingga pihaknya hanya berjuang lewat politik untuk mensejahterakan rakyat. Hal itu tersirat dalam pidatonya usai meresmikan kantor sekretariat Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai GAM di Banda Aceh, "kalau ingin Aceh maju, mari bersama-sama kita kawal perdamaian yang telah dirasakan masyarakat".<sup>132</sup> Peresmian kantor itu dihadiri sekitar 150 orang termasuk sejumlah mantan petinggi GAM lainnya seperti Usman Lampoh Awe, Darwis Jeunib, Tgk. Hamzah serta alim ulama. Muzakir menilai, transformasi konflik dan kedamaian yang mulai dirasakan masyarakat Aceh saat ini sudah cukup baik, walau dikhawatirkan ada tindakan pihak-pihak yang dapat merusak buah dari kesepakatan Helsinki. "Kita khawatir ada yang lempar batu sembunyi tangan,". Sejak ditandatanganinya MoU Helsinki, tindakan kriminal masih marak terjadi di Aceh dan bahkan ada yang menggunakan senjata api dan bahan peledak. Hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses perdamaian di Aceh. KPA telah mengidentifikasi kelompok pelaku kriminal disertai bukti-bukti dan telah membicarakan hal itu dengan pihak terkait. Namun tindakan-tindakan yang dinilai dapat merusak perdamaian itu, merupakan sifat tidak puas manusia. Maka perlu kesadaran dan hati yang ikhlas sehingga apa yang dicita-citakan bersama yaitu perdamaian abadi di Aceh dapat tercapai. "Yang diharapkan ke depan melalui partai lokal ini dapat mensejahterakan GAM dan masyarakat Aceh, bahkan Indonesia. Itulah cita-cita kita".<sup>133</sup>

Dalam jumpa pers di kantor GAM Banda Aceh 28 Desember 2005, Muzakir Manaf baru kedua kali muncul di depan publik setelah MoU Helsinki dan pertama kali muncul setelah Pembubaran Teuntara Neugara Aceh (TNA), menurutnya setelah pembubaran TNA, semua anggota militer telah kembali menjadi warga sipil biasa. Hal ini dikarenakan GAM konsisten melaksanakan

<sup>132</sup> Waspada online : Partai GAM Sesuai MoU, senin 07 Juli 2007

<sup>133</sup> Ibid.

butir-butir yang dicapai kedua belah pihak dalam perundingan Helsinki. Ditanya soal tugas KPA ke depan, menurutnya proses perubahan mantan kombatan GAM akan dilakukan secara perlahan dan akan diprioritaskan kepada perbaikan ekonomi masing-masing anggota kombatan. "KPA perlahan-lahan mengalihkan mantan prajurit di lapangan. Kami akan berusaha semua bekas TNA bisa memperoleh perbaikan ekonomi atau kerja,". "kami menjalankan semua kehendak MoU. Kami semua patuh dan tidak ada senjata lagi." <sup>134</sup>

GAM kemudian mendirikan partai politik lokal sesuai dengan amanat MoU Helsinki 15 dan UUPA, dalam hal ini keberanian memilih dan bermetamorfosis sepertinya tidak berjalan mulus. Lobi-lobi politik mesti dijalankan oleh GAM untuk meloloskan Partainya. Hal ini terlihat ketika GAM harus mengganti nama, lambang, ideologi partai lokalnya kesekian kalinya. Itulah sejarah, kini sejarah itu kembali terjadi dalam konteks politik Aceh. Partai GAM kembali mengubah nama dan lambang dari Partai Gerakan Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh. <sup>135</sup> Walaupun perubahan ini dilihat sebagai sejarah pahit bagi GAM pada periode pertama transformasi menjadi gerakan politik untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Perubahan Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan sangat sadar dan tulus, walaupun sebagian penganalisa politik melihat perubahan ini merupakan sesuatu tekanan dari pemerintah pusat terhadap GAM. Sehingga GAM tidak ada pilihan untuk menyelamatkan partai agar bisa lolos dalam verifikasi yang dilakukan kanwil Depkumham Aceh.

Memang satu segi itu merupakan pilihan alternatif bagaimana di ujung tanduk sebagai syarat yang diletakkan oleh pemerintah kepada GAM. Tidak ada pilihan lain kecuali mengubah nama partai dan lambang. Apa yang lebih penting adalah, perubahan ini merupakan suatu pertanda iktikat baik GAM menjalankan amanah perjanjian Helsinki dan UUPA. Hal itu dijelaskan sendiri oleh Juru bicara Partai Aceh, perubahan nama dan lambang partai adalah suatu proses politik dan memenuhi persyaratan nasional yang tertulis didalam butir 1.2.1. MoU Helsinki dan UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta menyahuti

<sup>134</sup> Harian Waspada Kamis, 29 Desember 2005

<sup>135</sup> <http://Serambinews>, Edisi 22/05/2008. Diakses 1 Juni 2008

PP.No. 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik lokal di Aceh. Di situ diatur dari tata cara pendaftaran, anggaran dasar, kerja sama dengan partai nasional, penyelesaian perselisihan hingga pembubaran partai. Dalam pasal 22 ayat 4 peraturan itu disebutkan ketentuan bahwa nama, lambang, dan tanda gambar tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan lambang negara, lambang lembaga negara, lambang pemerintah, lambang pemerintah daerah, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik atau partai politik lokal lain. Perubahan nama tersebut juga untuk menjawab kecurigaan beberapa kalangan terhadap keberadaan partai GAM, sekaligus untuk menjalankan proses reintegrasi, rekonsiliasi, dan perdamaian yang hakiki. Terutama untuk menjalankan perundang-undangan yang sesuai di dalam NKRI.<sup>136</sup> Namun sepertinya Pemerintah Pusat masih juga menghambat dan terkesan kurang ikhlas dengan proses implementasi MoU dan UUPA. Pemerintah Pusat kemudian menerbitkan aturan baru setelah mereka melarang lambang Partai GAM. Di akhir Desember 2007, keluar Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Aturan ini menjelaskan jenis lambang daerah, kedudukan dan fungsi, desain, hingga rincian aturan penempatan lambang dan logo daerah. Pada ayat 4 pasal 6 pada Bab Desain Lambang Daerah tercantum kalimat ini, Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain dan logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik. Yang dimaksud logo dan bendera organisasi terlarang maupun gerakan separatis diterangkan dalam bagian penjelasan. Yaitu, "logo dan bendera bulan sabit yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Aceh, logo burung mambruk dan bintang kejora yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Papua, serta bendera benang raja yang digunakan oleh gerakan separatis di Provinsi Maluku." Motif pelarangan pun jadi jelas. Bulan sabit dan bintang merupakan lambang yang dipakai Hasan Tiro sebagai lambang pada bendera Front Pembebasan Aceh Sumatera yang diproklamasikannya pada Desember 1976. Front itu kemudian dikenal dengan nama GAM, julukan yang diberikan pemerintah terhadap gerakan kemerdekaan Aceh.

---

<sup>136</sup> <http://serambinews>, edisi 22/05/2008, diakses 1/6/2008

Aturan tadi jadi pembicaraan utama dalam *round table meeting* di Jakarta awal Februari 2008. Dialog tersebut di fasilitasi oleh Forum ini disponsori Institute for Indonesian Peace-Interpeace Aceh Program. Forum ini mempertemukan petinggi GAM dan pemerintah pusat untuk membahas perkembangan dan keberlangsungan perdamaian di Aceh. Pada *Round Table Meeting* pertama, wakil GAM yang hadir, antara lain Perdana Menteri Malik Mahmud, Menteri Luar Negeri Zaini Abdullah, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzzakir Manaf, dan juru bicara Ibrahim bin Syamsuddin. Aturan ini juga sempat diprotes Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sebab penerbitan peraturan itu, menurut Irwandi, tak melalui konsultasi dengan Gubernur Aceh seperti yang tercantum di Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 tahun 2006. Ia juga cemas PP Nomor 77/2007 bakal merusak perdamaian di Aceh. Atas nama pemerintah Aceh, Irwandi mengirim bernomor 188.31/545 kepada pemerintah di pada 4 Januari 2008. Salah satu bunyi poin surat itu adalah “meminta agar Pemerintah Pusat agar mencabut dan meninjau ulang Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2007”, serta mengatur kembali aturan tersebut setelah melalui proses konsultasi dengan gubernur dan mendapat pertimbangannya.

Pemerintah Jakarta tidak menggubris protes Irwandi. Sebaliknya, belakangan GAM memilih jalan kompromi. Pada Kamis 25 Februari 2008, lambang partai GAM berubah jadi logo “GAM”. Kepanjangan GAM di logo ini bukan “Gerakan Aceh Merdeka”, melainkan menjadi “Gerakan Aceh Mandiri”. Ternyata pemerintah belum tenang juga. Mereka keberatan dengan kata “gerakan” dalam nama partai GAM. Kalau pemerintah pusat berkebaratan dengan kata “gerakan” mestinya juga Partai Gerindra juga dipertanyakan, karena ada kata “gerakan”? Namun Partai GAM kemudian berganti nama jadi Partai Aceh. Mengalah untuk menang. Juru bicara Adnan Beuransah menegaskan bahwa Partai Aceh bakal mengusai kursi parlemen di Aceh. Setelah berubah nama terbukti pada 23 Mei 2008, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta mengumumkan bahwa 12 dari 14 partai lokal di Aceh lulus verifikasi, termasuk Partai Aceh.<sup>137</sup>

<sup>137</sup> Diolah dari berbagai sumber, salah satunya dapat diakses di <http://www.pantau.or.id>.

Setelah memberikan kepanjangan nama Partai GAM menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM), dan menghapus lambang bintang bulan dari bagian tengah bendera, petinggi partai politik lokal kembali mewacanakan pergantian nama, dari Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) menjadi Partai Aceh. Wacana pergantian nama ini disebut-sebut sebagai bagian dari pemulusan langkah menyambut Pemilu 2009. Maka ini adalah perubahan kedua yang dilakukan oleh para pengurus parlok tersebut. Sebelumnya, Senin 25 Februari 2008, Dewan Pimpinan Pusat Partai GAM (tanpa kepanjangan), telah mengganti akte nama dan lambang partai. Pergantian ini didaftarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai GAM, TM Nazar, bersama anggota pendiri partai, di antaranya Adnan Beuransah dan Hasbi Abdullah, ke Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM (Kanwil Depkumham) Aceh. Saat itu, langkah tersebut dilakukan oleh Petinggi Partai GAM dalam menjawab surat yang dikirim oleh Depkumham Aceh, bahwa Partai GAM sebelumnya hanya memenuhi persyaratan formal, namun belum memenuhi persyaratan substansial, sehingga Kanwil Depkumham Aceh tidak bisa memverifikasi Partai GAM.

Perubahan nama dan lambang mendapat apresiasi dari Plt Kanwil Depkumham Aceh, Syamsul Bahri yang mengatakan bahwa langkah itu menunjukkan itikad baik pimpinan Partai GAM untuk menjunjung tinggi semangat perdamaian, rekonsiliasi, dan reintegrasi ke dalam NKRI. Dewan Pimpinan Partai GAM kembali mewacanakan perubahan nama Partai Gerakan Aceh Mandir (GAM) menjadi Partai Aceh (PA). Namun, langkah ini belum resmi dilakukan oleh petinggi partai tersebut.

"Memang kami sudah lama mewacanakan hal itu. Namun, hingga kini pun belum bisa memutuskan secara resmi sebelum ada instruksi pimpinan," Adnan Beuransah. Perubahan nama partai GAM ini hanya sebagai langkah "penyesuaian" saja. Artinya, kita menyesuaikan dengan warna politik itu sendiri, hingga saat ini partai GAM telah melalui berbagai kendala. Namun, pihaknya tetap komit dengan penyelesaian yang demokratis. Partai GAM menganut filosofis air, konotasi air harus dimaknakan sebagai yang tetap mengalir meski ia berbenturan dengan batu. Jika terbentur, ia akan mencari celah agar bisa tetap mengalir, bahwa kebijakan itu juga bukan sebagai langkah mundur untuk menyongsong Pemilu 2009. Kita mungkin bisa mundur selangkah, jika memang untuk maju beberapa langkah".<sup>138</sup>

<sup>138</sup> Serambi Indonesia, Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh, Kamis 1 Mei 2008



Sementara itu, kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Depkumham Aceh, Syamsul Bahri yang dikonfirmasi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan seputar wacana pergantian nama dari para pengurus Partai GAM. "Kita belum tahu itu," katanya melalui saluran telepon kemarin sore.<sup>139</sup>

"..Perubahan lambang dan akronim merupakan langkah mundur, tapi dilakukan demi langgengnya perdamaian yang sedang berjalan di Provinsi Aceh. "Meskipun berubah, namun tidak akan mengubah semangat dan tujuan yang dicetuskan sejak partai ini didirikan. Semua ini bagian dari kecintaan kami kepada rakyat dan juga demi langgengnya perdamaian, kepada pihak-pihak yang berseberangan hendaknya berhenti berasumsi yang menjerus kepada rusaknya nilai demokrasi dan perdamaian. Partai GAM kini telah mengubah akronim GAM dari Gerakan Aceh Merdeka menjadi Gerakan Aceh Mandiri. Lambang partai pun diubah dari bulan bintang menjadi cukup dengan tulisan GAM. Di sudut lambang tersebut bertuliskan Partai Gerakan Aceh Mandiri. Semoga setelah perubahan ini tidak ada lagi suara miring terutama dari pusat (Jakarta, red) tentang kebenaran ikrar kami kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Semoga saja rekan-rekan seperjuangan juga mau memahami dan tidak lagi saling menyalahkan apa pun yang terjadi dengan partai hari ini dan selanjutnya adalah bentuk partisipasi politik kita atas kesepakatan damai".<sup>140</sup>

Berangkat dari perubahan tersebut, GAM mengambil langkah mundur. Ini menjadi bukti bahwa GAM siap mengalah atas nama perdamaian dan sikap gentleman untuk menarik kembali atas apa yang menjadi keyakinan sebelumnya. Perubahan itu bukanlah sebuah tindakan tiba-tiba dan tergopoh-gopoh. Kami sadar bahwa apa pun yang telah kami cetuskan sebelumnya sesuai dengan harapan rakyat dan cita-cita bersama, ke depan polemik ini tentu tidak mendapat tempat lagi. Andaiapun kemudian, setelah perubahan ini, polemik masih terus berlangsung maka patut diduga mereka adalah musuh bagi orang yang cinta damai. Harapan kami ini akan menutup episode dugaan absurd tentang ideologi kami dan ketaatan kami terhadap semua poin MoU Helsinki.<sup>141</sup>

"Perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi dalam lambang dan nama partai merupakan bagian tak terpisahkan dalam konteks ini (menjaga perdamaian dan melegalkan partai). Namun, apapun nama dan lambang yang kemudian disahkan menjadi peserta Pemilu 2009, maka partai itu

<sup>139</sup> Serambi Indonesia, Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh, Kamis 1 Mei 2008

<sup>140</sup> <http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/27/09453281/gamgerakan.aceh.mandiri>  
GAM=Gerakan Aceh Mandiri Rabu, 27 Februari 2008

<sup>141</sup> Ibid

adalah partainya mantan GAM/KPA, perubahan-perubahan itu juga untuk meredakan tudingan dari para ultranasionalis baik di Jakarta maupun di Aceh sendiri”.

Selama ini pihaknya mulai sering dituding sedang menyusun skenario referendum setelah partainya menguasai parlemen Aceh.

“Tudingan-tudingan seperti itu jelas-jelas sebagai upaya pembusukan kepada kami dan MoU Helsinki secara keseluruhan. Sampai saat ini kami tetap komit untuk melanjutkan proses perdamaian ini dan tidak ada lagi kamus merdeka dalam benak kami, karena itu, dalam memenuhi harapan masyarakat, pihaknya tidak akan membawa kepada hal-hal yang akan merusak harapan-harapan tersebut. Karena, bila pihaknya memiliki tujuan untuk tidak tunduk kepada negara Republik Indonesia, maka GAM tidak akan turun gunung dan memberikan senjatanya untuk dipotong-potong (decommissioning). Sementara tudingan yang dilancarkan bahwa pihaknya sedang membuat skenario tersembunyi untuk menuntut kemerdekaan, adalah jelas-jelas dilakukan oleh orang-orang yang anti-damai. Harapan kami, para elit politik dan kekuasaan baik di pusat ataupun di Aceh agar lebih saling bahu-membahu dan membangun sikap positif thinking demi kedamaian dan kemakmuran negeri ini.”<sup>142</sup>

Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Ibrahim Bin Syamsuddin, perubahan nama Partai GAM menjadi Partai Aceh, merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung pihak GAM dalam rangka melanggengkan perdamaian yang telah hadir di bumi Serambi Mekkah. Kesepakatan Helsinki kami tanda tangani dengan segala resiko yang telah kami pikirkan jauh-jauh sebelumnya. Tumpahan darah dan air mata saudara dan teman-teman kami cukup menjadi pelajaran untuk terus merawat damai ini. Apa yang yang dinikmati masyarakat karena perdamaian tidak akan kami pertaruhkan dengan rusaknya.<sup>143</sup> Konsekuensi inilah yang dipertaruhkan oleh elite-elite GAM sehingga mereka lebih suka menganut filosofis air, di mana air akan tetap mengalir meski ia berbenturan dengan batu. Jika terbentur, air akan mencari celah agar bisa tetap mengalir.<sup>144</sup> Pendekatan ini akhirnya membawa kemenangan bagi GAM di mana Partai Aceh sebagai partai mantan kombatan GAM termasuk 6 partai lokal Aceh yang lolos verifikasi Kanwil Depkumham Aceh. Dengan

<sup>142</sup>

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/23/06022754/demi.perdamaian.nama.partai.gam.harus.diubah>, Jumat, 23 Mei 2008

<sup>143</sup> <http://serambinews>, edisi 23/05/2008, diakses 1/6/2008

<sup>144</sup> <http://serambinews>, edisi 02/05/2008, diakses 1/6/2008

demikian Partai Aceh telah sah dan diakui secara hukum sebagai satu partai politik yang akan mengikuti pemilu tahun 2009 di Aceh.<sup>145</sup>

Menurut Kakanwil Depkum dan HAM ini, parlok itu tidak menyimpang dari ketentuan yang ada, termasuk dengan beberapa kali perubahan yang dilakukan Partai Aceh, seperti masalah lambang dan logo serta nama partai. Terkait dengan masalah itu, Razali Ubit<sup>146</sup> menjelaskan kesepakatan untuk mengubahnya memang melalui jalan panjang. "Tapi sekali lagi saya katakan berkat kesepahaman dan saling pengertian dalam konteks menjaga perdamaian Aceh, akhirnya Partai Aceh tersebut lolos dari verifikasi. Partai Aceh sendiri memiliki azas Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>147</sup> Semuanya itu berkat iktikad baik semua pihak untuk melanjutkan cita-cita perdamaian Aceh seperti yang tertuang dalam MoU Helsinki dan Undang-undang No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). "Sesuai UU tentang parlok yang tidak boleh menggunakan lambang atau simbol negara serta adanya kata-kata gerakan untuk sebuah partai politik. Kemudian, kami bermusyawarah sehingga dengan saling pengertian maka jadilah Partai Aceh," Sebelum menjadi Partai Aceh, partai yang didirikan anggota Komite Peralihan Aceh (KPA) itu bernama Partai GAM (tanpa kepanjangan). Kemudian pengurusnya mengganti lagi menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM) dan terakhir menjadi Partai Aceh diketuai Muzakkir Manaf.

Kini Partai GAM telah menjadi Partai Aceh (PA) yang mempunyai misi mentransformasikan sekaligus membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari persepsi partai revolusi menjadi partai pembangunan. Walaupun ini bukanlah suatu perkara mudah terutama di kalangan mantan anggota GAM yang sudah terbiasa melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata kemudian berubah menjadi gerakan politik pembangunan. Memang semua ini membutuhkan waktu untuk mentransformasikan segala pemikiran tersebut. Bagi elite GAM mereka sadar peperangan yang telah dilakukan selama 30 tahun melawan pemerintah Indonesia tidak membawa hasil apa-apa kecuali kerugian jiwa dan harta benda

<sup>145</sup> <http://serambinews>, edisi 24/05/2008, diakses 1/6/2008

<sup>146</sup> Lihat juga wawancara Acehkini dengan Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Aceh, edisi Juni 2008

<sup>147</sup> <http://serambinews>, edisi 12/6/2008, diakses 13/6/2008

masyarakat yang tidak berdosa. Peperangan telah menyebabkan pembodohan terhadap generasi Aceh serta kehancuran peradaban bangsa Aceh. Realita sejarah ini yang telah dialami selama peperangan 30 tahun di Aceh. Realita ini pula menimbulkan kesadaran elite-elite GAM untuk melakukan perjuangan politik demokrasi untuk memperjuangkan masa depan Aceh yang lebih bermartabat.

Bagaimana Partai Aceh mengambil semangat perjuangan dari berbagai belahan dunia, ini menjadi program partai dalam menggariskan agenda-agenda pembelaan rakyat. Dengan demikian Partai Aceh akan benar-benar menjadi partai rakyat yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kebebasan rakyat. Partai Aceh perlu membuka diri kepada semua elemen untuk menjelaskan visi, misi dan program partai secara terbuka. Sehingga Partai Aceh akan benar-benar menjadi satu partai alternatif bagi perjuangan rakyat Aceh. Yang lebih penting Partai Aceh harus menjadi partai yang siap mempertaruhkan segala sesuatu untuk membebaskan rakyat Aceh dari segala penindasan, kebodohan dan penderitaan. Bukan sebaliknya Partai Aceh hanya perlu kepada rakyat pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Setelah wakil partai Aceh mendapat kekuasaan, mereka lupa kepada nasib rakyat yang telah memberi amanah perjuangan. Mereka telah menjadi gila kuasa.<sup>148</sup>

Kalau keadaan ini terjadi maka nasib rakyat Aceh tetap sama walaupun siapapun yang memerintah. Mereka tetap akan menjadi objek dan tidak pernah menjadi subjek. Cita-cita mewujudkan Aceh yang lebih aman, damai, tentram dan sejahtera akan terwujud dengan kemenangan dan kesederhanaan perilaku mereka. GAM akan sukses melakukan transformasi kalau mereka mampu mempertahankan beberapa keuntungan politik yang telah mereka miliki berupa popularitas. GAM memiliki beberapa popularitas di Aceh. *Pertama*, popularitas sebagai bekas gerakan bersenjata yang menuntut kemerdekaan di Aceh. Secara politis GAM telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Aceh selama puluhan tahun. Hal ini bisa dilihat oleh dukungan rakyat terhadap GAM. *Kedua*, secara organisatoris, GAM memiliki garis organisasi komando dari kota sampai ke desa. Hal ini menjadikan pesan-pesan politik GAM bisa disampaikan secara efektif.

<sup>148</sup> <http://www.theglobejournal.com/detilopini.php?id=33>, Partai Aceh satu pilihan alternatif, Efendi Hasan. Diakses 12/6/2008

*Ketiga*, secara personal tokoh-tokoh GAM sangat populer di mata masyarakat karena terjadinya proses personifikasi dalam tubuh GAM. Popularitas ini menjadikan GAM penting bukan hanya karena keterlibatan mereka dalam pilkada dan juga perubahan jati diri mereka menjadi partai politik, tetapi juga karena mereka menjadi kekuatan gravitatif yang bisa mempengaruhi pergerakan sumber daya politik di Aceh. Pendulum politik seolah meletakkan GAM sebagai kunci kemenangan dalam pilkada untuk merebut dukungan politik dari rakyat. Faktor lainnya yang bisa membuat GAM sukses menjalani metamorfosis adalah konsistensi dukungan internasional kepada proses perdamaian dan demokrasi di Aceh. Kendati AMM hanya berada di Aceh sampai Juni 2006 lalu, penting untuk meminta komitmen Uni Eropa supaya mereka tetap memberi perhatian yang sungguh-sungguh sampai situasi transisi di Aceh bisa dilewati, minimal hingga seluruh institusi demokrasi terbentuk dan berfungsi, termasuk pengawalan pemilu 2009.

Menyangkut reaksi elit politisi nasional yang mempersoalkan eksistensi GAM sebagai sebuah institusi, tidak satupun elit GAM yang berbicara berbeda. Semuanya serempak menyatakan tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar. Pasalnya, perjanjian Helsinki tidak mengatur hal itu secara eksplisit. Yang diatur hanyalah demobilisasi Tentara Nangroe Aceh (TNA) dan pelarangan penggunaan atribut kemiliteran GAM saja. Meski kompak, sebenarnya sebagian elit GAM menyadari adanya kekhawatiran di kalangan elit nasional terhadap iktikad baik mereka. Namun, mereka juga menyangkan kekurangpekaan elit nasional terhadap perasaan sebagian elit GAM lainnya yang merasa kalah. Perasaan itu semakin menyeruak setelah UU Pemerintahan Aceh dilansir. UU ini dianggap tak sesuai dengan aspirasi rakyat Aceh. Salah satunya soal kewenangan dalam urusan migas.

Karena itu, elit-elit ini untuk sebagian bisa memahami jika Komite Peralihan Aceh (KPA) bersikeras mendirikan Partai GAM. Sebagaimana diketahui, KPA merupakan wadah yang disiapkan untuk menampung TNA yang telah dibubarkan. KPA dipimpin oleh Muzakir Manaf (panglima GAM). Didirikannya partai ini dianggap bisa menjawab berbagai persoalan sekaligus. *Petama*, dengan adanya partai GAM, maka bisa dicegah sedini mungkin upaya

pihak-pihak tertentu (ditengarai elit-elit Jakarta) yang mencoba 'membajak' jajaran GAM masuk ke partai-partai politik mereka. *Kedua*, dengan adanya partai GAM sebagai wadah satu-satunya saluran politik eksponen GAM maka dapat dihindari kemungkinan terpecahnya suara GAM. Dengan begitu, *ketiga*, keberadaan partai GAM setidaknya memberikan sebuah jalan untuk memperoleh kompensasi kewenangan politik.

Lahirnya partai lokal terutama Partai Aceh yang dikemukakan oleh mantan GAM, meraka telah mampu memperlihatkan identitas dan etnisitas ke Aceh yang tidak mungkin diabaikan begitu saja oleh Negara. Namun kemudian muncul pertanyaan, apakah dengan munculnya partai lokal di Aceh akan memperkuat nasionalisme etnisitas atau identitas lokalitas? Bagi penulis persoalan etnisitas yang dimunculkan dengan berbagai bentuk baik dalam politik, sosial budaya menjadi penting. Alfin Toffles<sup>149</sup> menyebutkan bahwa abad ke-21, masalah etnisitas akan kembali mengemuka karena dipicu oleh kegagalan negara nasional memfasilitasi dialog antar-etnik dan mewujudkan kehidupan politik-ekonomi yang berkeadilan. Hal persoalan ini yang terjadi puluhan tahun di Aceh, dengan identitas lokal yang mulai sirna akibat dominasi kekuasaan pemerintah pusat yang sentralistik. Persoalan komunal kemudian berubah menjadi persoalan etnisitas dan identitas lokalitas.

## VI. PEMILU LEGESLATIF SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI KONFLIK

Pemilu legeslatif 2009 merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan di Aceh paska konflik. Pemilu 2009 di Aceh bukan hanya ajang untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif semata, tetapi juga merupakan bagian terpenting dari tahapan transisi Aceh pasca perdamaian terwujud yang akan menjadi garis demarkasi antara Aceh baru dan lama. Karenanya Pemilu 2009 di Aceh juga menimbulkan gairah demokarsi tersendiri bagi masyarakat yang berdampak pada kemajuan tatanan politik di Indonesia guna semakin mempererat

---

<sup>149</sup> Diolah dari berbagai sumber salah satunya Pierre van den Berghe *The Ethnic Phenomenon* (1981)

ikatan persatuan dan kesatuan bangsa. Gairah demokrasi baru tersebut adalah dengan ikutnya partai politik lokal di Aceh sebagai kontestan dalam Pemilu 2009.

Keikutsertaan partai nasional dan partai lokal dalam Pemilu 2009 di satu sisi harus dimaknai sebagai agenda strategis transformasi politik Aceh dari konflik bersenjata menjadi kompetisi politik secara demokratis. Namun di sisi lain merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap gesekan-gesekan kepentingan, ideologi dan cita-cita yang kerap merapuhkan rasa saling percaya antar entitas politik lokal dan nasional. Selain itu, banyaknya kontestan Pemilu di Aceh telah menciptakan tantangan yang semakin besar bagi pemerintah dan komunitas Aceh untuk menjamin terpenuhinya hak-hak politik bagi semua warga tanpa diskriminatif. Gesekan multi kepentingan antar kontestan dikhawatirkan menjadi celah baru menguatnya kembali konflik kekerasan di Aceh yang sangat mungkin untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain yang pesimis terhadap keberlanjutan perdamaian di Aceh tegasnya. Intimidasi, kekerasan dan intervensi untuk memenangkan atau menghambat partisipasi orang untuk dipilih dan memilih baik yang dilakukan oleh organisasi masa, partai politik maupun aparat keamanan merupakan pelanggaran terhadap hak politik setiap warga negara. Hak politik diwujudkan dalam bentuk hak warga negara untuk turut serta memilih atau dipilih dalam pengisian jabatan-jabatan publik, baik di pemerintah atau eksekutif maupun badan perwakilan rakyat (legislatif). Hak politik juga berarti keikutsertaan rakyat dalam proses pengambilan keputusan publik secara sadar dan sukarela.

Konstitusi negara kita telah secara tegas mengatur tentang perlindungan terhadap hak politik warga negara, Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 menyatakan "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan pasal 28E ayat 3 yang menyatakan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Jaminan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul juga ditegaskan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 serta pasal 24 ayat 1 dan 2. Demikian juga halnya dengan Kovenan Internasional Hak Sipil Politik yang menyatakan hak untuk berkumpul dan berserikat merupakan hak asasi manusia (pasal 21 dan pasal 22). Tidak ada pembatasan yang dapat

dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain. Kovenan ini sudah diratifikasi oleh pemerintah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2005 sehingga sudah menjadi ketentuan hukum yang mengikat semua warga negara.

Dalam konteks Aceh jaminan terwujudnya hak-hak politik di satu sisi harus dijamin oleh negara yang menuntut adanya netralitas aparat keamanan dalam mengawal dan mengamankan Pemilu secara proporsional dan profesional. Disisi lain, kedewasaan para kontestan Pemilu dan rakyat pemilih untuk mendukung pelaksanaan Pemilu secara damai dan demokratis juga harus dikedepankan. Implementasi hak-hak politik akan terganggu apabila ditemukan adanya pihak-pihak yang melakukan pemaksaan untuk memilih salah satu partai, atau memaksa masyarakat untuk tidak memilih salah satu partai, baik yang dilakukan oleh kontestan Pemilu, aparat keamanan, pemerintah sipil maupun oleh organisasi masyarakat lainnya. Adanya provokasi, intimidasi, maupun teror yang ditujukan untuk mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2009 serta adanya tindakan penyimpangan kewenangan, tugas dan fungsi oleh aparat keamanan dalam menjalankan tugasnya di lapangan.<sup>150</sup>

Pemilu legeslatif 2009 tersebut, disertakan enam partai lokal, termasuk Partai Aceh. Lima partai lokal lainnya adalah Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Atjeh (PDA), dan Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS). Kehadiran partai lokal yang bertarung bersama 38 partai politik nasional itu sesuai dengan amanat nota kepehaman (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 dan Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan serapan informasi pengamat

<sup>150</sup> Sikap Koalisi Ngo Ham Aceh, Posko Masyarakat Sipil Pantau Pemilu Aceh: Pelaksanaan Pemilu secara adil, jujur dan damai merupakan tanggung jawab kita bersama dan segala tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh siapapun merupakan pelanggaran terhadap hak politik warga negara. Posko ini nantinya akan melakukan pemantauan terbatas pada pelaksanaan Pemilu di Aceh dengan fokus kerja pemantauan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran hak-hak politik serta netralitas aparat keamanan dalam pelaksanaan Pemilu. Posko ini terdiri dari KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, Koalisi NGO HAM, ACSTF, LINA, Beujroh, Katahati Institute, Aceh Institute, GeRAK Aceh, AJMI, FAA, Radio Komunitas Suara Perempuan, People Crisis Center (PCC), SPKP HAM Aceh, KKP Aceh, Care Aceh. Banda Aceh 2009.



dan tokoh masyarakat setempat, serta survei lembaga pemantau, kekuatan partai lokal itu dibagi menjadi dua kategori. Yakni partai dengan kekuatan penuh (Partai Aceh, SIRA, dan PRA) serta partai dengan kekuatan menengah (PBA, PDA, dan PAAS).

Mayoritas pengurus dan caleg tiga partai kategori pertama tadi adalah anak muda. Mereka juga dinilai memiliki sejarah menonjol dalam perjuangan “kemerdekaan Aceh”. Partai Aceh dengan mayoritas anggotanya mantan kombatan GAM memang merupakan jelmaan GAM. Bahkan partai ini sebelumnya ngotot memakai nama GAM. Partai SIRA dikenal sebagai LSM yang menggalang kampanye referendum untuk menentukan masa depan Aceh. Sedangkan PRA merupakan kumpulan aktivis kampus dan intelektual muda, yang juga berkecenderungan menentukan masa depan Aceh seperti Partai Aceh dan SIRA. Adapun tiga partai dengan kekuatan menengah merupakan kumpulan kaum mapan dan senior dalam percaturan politik. Tiga partai ini disokong politisi berpengalaman dari lintas partai. Melihat latar belakangnya, kehadiran enam partai lokal itu tidak bisa dipandang remeh. Hal ini pun diakui politisi partai nasional jauh sebelum pemilu dilaksanakan. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Teuku Taufiqulhadi<sup>151</sup>, misalnya, memprediksi bahwa persaingan partai nasional dengan enam partai lokal di Aceh akan berlangsung ketat. Namun ia tak mengira bahwa Partai Aceh akan begitu melesat.

Kemenangan Partai Aceh itu, dengan angka cukup telak pula, sontak membuat banyak pihak terkejut. Ketua Bale Pemenangan Pemilu Partai SIRA, Shadia Marhaban,<sup>152</sup> misalnya, terus terang menyatakan kekagetannya. Ia mengatakan, kemenangan saingannya sesama partai lokal itu sungguh di luar perkiraan banyak pihak. Kemenangan ini sempat disambut aksi pembakaran 20 toko di Kabupaten Bener Meriah, dua hari setelah pemungutan suara. Di wilayah ini, Partai Aceh menang telak dengan mengantongi suara di atas 70%. Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, memperkirakan bahwa intimidasi itu disebabkan adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu, jika Partai Aceh menang, para caleg dan

<sup>151</sup> Diskusi dengan Teuku Taufiqulhadi disela-sela kesibukannya sebagai Caleg dari Partai Nasional PPP, di Banda Aceh, April 2009

<sup>152</sup> Diskusi di kedai kopi Solong Ulee kareng Banda Aceh pasca perhitungan suara hasil pemilu legeslatif 9 April 2009

pengurus partai akan berbuat macam-macam yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Irwandi menepis kekhawatiran itu. Begitu pula Bupati Aceh Utara, Ilyas A. Hamid, yang mantan Panglima Muda GAM Wilayah Pasa. Ia menegaskan, kemenangan Partai Aceh itu tidak akan membangkitkan kembali semangat separatisme di sana dan tidak akan membuat mereka memisahkan diri dari NKRI. "Aceh tetap dalam bingkai Indonesia".<sup>153</sup>

Selain intimidasi, kemenangan Partai Aceh juga dibarengi komentar-komentar miring yang meragukan kemampuan politisi partai itu kelak setelah duduk di lembaga legislatif. Otto Syamsuddin Ishak,<sup>154</sup> pengamat politik dari Imparsial, misalnya, menilai kemenangan partai politik lokal itu bisa menghambat pembangunan Aceh karena persoalan sumber daya manusia. Menurut pengamatannya, hampir semua politikus partai lokal, termasuk Partai Aceh, masih kurang pengalaman dan relatif rendah tingkat pendidikannya. Ia mengingatkan, agar fungsi parlemen berjalan dengan baik, para caleg dari partai lokal yang terpilih itu mesti menjalani berbagai pendidikan dan pelatihan yang relevan. Menanggapi hal itu, Muzakir Manaf hanya tersenyum. Ia menilai tuduhan itu sangat berlebihan.

"..Inilah orang kita, tidak mau percaya sama orang lain, melecehkan orang lain. Menganggap orang lain bodoh semua, tidak melihat kenyataan di lapangan, kita bertekad tidak akan membawa Aceh ke mana-mana selain ke arah yang lebih baik bagi semua rakyat..."

Senada dengan bosnya, caleg terpilih dari Partai Aceh, Zulkifli bin Cut Ahmad alias Dolly, menjelaskan bahwa sebagian caleg dari Partai Aceh (PA) bergelar S-1, S-2, dan S-3.

"..Sebagian caleg Partai Aceh pernah mengikuti berbagai studi di luar negeri. Beberapa di antara mereka memiliki pengalaman diplomasi yang baik, Partai Aceh akan mampu menggodok para wakilnya itu menjadi legislator andal."

Di samping yang meragukan, tidak sedikit pula pihak yang menyambut kemenangan Partai Aceh dengan lapang dada dan mempercayai kemampuan politisi partai itu. Misalnya Syafruddin Budiman, anggota DPR Aceh dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Syafruddin menilai, tidak perlu mengkritisi

<sup>153</sup> Serambi Indonesia, 10 April 2009

<sup>154</sup> Serambi Indonesia, 11 April 2009

apalagi meragukan sumber daya manusia Partai Aceh, sebab yang lebih penting adalah memberikan saran dan masukan. Kita menaruh harapan cukup besar pada wajah baru legislator dari Partai Aceh, yang sebagian besar jebolan pesantren terpadu. Setidaknya, "Tidak tertutup kemungkinan mereka bisa lebih bersih dari (pengaruh) KKN.

Dengan berakhirnya pemilu legislatif beberapa waktu yang lalu, perolehan suara para parpol sudah dapat diprediksi melalui penghitungan cepat (*quick count*). Untuk sementara kursi di DPRA maupun kursi DPRK mayoritas dikuasai oleh parpol Partai Aceh (PA). Ini merupakan suatu bukti nyata bahwa peran dari PA masih sangat besar berpengaruh besar didalam rakyat Aceh. Rakyat mengetahui bahwa PA identik dengan masa lalu yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang masih amat melekat di lingkungan masyarakat. Meskipun dalam pelaksanaan pemilu legeslatif kemarin di sejumlah TPS-TPS KPA/PA secara leluasa dan sistematis ada indikasi melakukan intimidasi agar mencontreng PA sebagai pilihannya walaupun secara hukum susah untuk dapat dibuktikan. Jika kita cermati dengan perolehan suara hampir 50% persen suara yang diperoleh oleh PA, sudah dapat dipastikan bahwa kekuatan digedung perlemen nanti maka akan semakin solid dan kuat. Kita tidak dapat merubah realita tersebut karena memang itulah kenyataan di lapangan yang terjadi di Aceh saat ini.

Jauh sebelum Pemilu legeslatif 9 April 2009 berlangsung, mantan Ketua MPR RI, Amien Rais 22 November 2008, menyatakan, rakyat Aceh berpeluang untuk menentukan nasib sendiri (*self determination*) pasca pemilu 2009. Penentuan nasib itu dapat dilakukan dengan syarat partai politik lokal di Aceh mampu meraih 60 persen suara pada Pemilu legislatif 2009. Pernyataan itu diungkap Amien Rais dalam talk show di Warung Kopi Solong, Ulee Kareng, Banda Aceh,<sup>155</sup>. Amien, analisis tersebut merupakan pendapat pribadinya setelah mencermati kondisi politik di Aceh menjelang Pemilu 2009. Selain Amien, talk show yang diselenggarakan Forum LSM dan dihadiri sekitar seratusan warga itu, juga menghadirkan Direktur Eksekutif APRC<sup>156</sup>, Yarmen Dinamika, sebagai

<sup>155</sup> <http://www.indoforum.org/showthread.php?t=62567> , Sabtu, 22 November 2008, Amien Rais: Aceh Berpeluang Tentukan Nasib Sendiri, di akses 27 November 2008

<sup>156</sup> APRC sebagai badan yang dibentuk gubernur untuk membatu BRA memiliki tujuh mandat. Salah satunya memantau implementasi klausul MoU yang berisi 71 pasal. Sejak AMM

pembicara pendamping. Namun Amien tidak menjelaskan secara detail maksud dari pemahaman self determination tersebut. Ia juga tidak menyinggung terkait halnya referendum atau negara federal bagi Aceh.

"Di dunia sekarang ini yang namanya right of self determination masih ada tertera dalam 'United Nations Declaration of Human Right'. Jadi self determination right setiap bangsa itu memang masih tetap hangat, kalau partai lokal mampu menggalang di atas 60 persen suara, itu artinya ada arah baru bagi Aceh. Tapi apa arah baru itu, terserah partai lokal. Tetapi kalau misalkan suara partai nasional masih gede, jadi saya kira arah ke NKRI masih tetap ada, dua kemungkinan yang dapat terjadi dan merubah arah masa depan Aceh. Salah satunya partai lokal diprediksi bakal mendominasi suara di Pemilu Legislatif 2009. Bila parlok mampu meraup 60 persen suara, maka tinjauan untuk self determination berpeluang terjadi. Namun bila parlok hanya mampu meraih sekitar 35 suara maka, peluang itu sangat kecil dan Aceh masih dalam konteks NKRI. Jadi ini semacam analisis sederhana dan paling elementer tentang masa depan kita di sini, dan ini adalah pendapat saya pribadi, keberadaan parlok pada Pemilu 2009 dinilai juga berpeluang mengancam keberadaan partai nasional. Meskipun masih dalam batas uji coba sederhana, implikasinya akan sangat besar. Kalau nanti lebih 60 persen voters di Aceh memberikan preferensi kepada parlok, ini merupakan sinyal kiamat kecil kepada partai nasional. Ini prediksi bisa ya bisa tidak, tergantung pada perkembangan situasi".<sup>157</sup>

Khusus di Aceh, bila parlok mendominasi perolehan suara signifikan dinilai adalah sebuah proses yang positif, artinya akan ada sebuah perubahan bagi masa depan rakyat Aceh. Tapi, kata dia, kalau apa yang berlaku di Aceh ini juga berlaku di Papua dan Kaltim, maka hal tersebut sudah dipandang sebagai kondisi yang serius. "Saya kira itu merupakan perkembangan yang sudah serius," Pemilu di Aceh diharapkan bisa berjalan demokratis tanpa menimbulkan konflik horizontal. Karena, katanya, bila ini terjadi maka akan menjadi acaman bagi perdamaian di Aceh. Terlebih lagi, katanya, saat ini diperkirakan masih ada oknum-oknum yang masih berpaham "Acehphobia" (ketakutan pada Aceh) yang kapan saja bisa muncul dan merusak perdamaian yang sudah tertata di Aceh pasca MoU Helsinki. Sementara itu, Direktur Eksekutif APRC Yarmen Dinamika menyebutkan, satu-

---

meninggal Aceh Desember 2006, ada 15 pasal yang belum terlaksana. Pasal tersebut ada yang langsung berkaitan dengan pemerintah, misalkan soal KKR, pengadilan HAM dan penyelesaian klaim bersama.

<sup>157</sup> Ibid.

satunya yang telah terwujud setelah AMM pergi adalah pembentukan partai lokal. Dari 11 partai, hanya enam yang lolos verifikasi dan bisa ikut pemilu".<sup>158</sup>

Dalam konteks substansi MoU, ada empat hal penting mesti dijalankan pemerintah maupun GAM. Antara lain, para pihak berkomitmen menyelesaikan konflik dengan damai dan bertekad menciptakan kondisi pemerintahan Aceh yang demokratis dan adil melalui Pemilu 2009. Kedua hal tersebut dinilai sangat penting karena menjadi dasar bagi Pemerintah dan GAM untuk memandu proses transformasi politik di Aceh, khususnya transformasi GAM sebagai entitas pasukan perang menjadi entitas partai politik. "Maka penting sekali bagi APRC melakukan pengawalan pemilu ini, tanpa harus mengusik konstruksi perdamaian yang sudah ada".<sup>159</sup>

Fajran Zain analis The Aceh Institut dalam sebuah diskusi bertajuk "kemenangan partai lokal di Aceh," di Banda Aceh,<sup>160</sup> Kemenangan partai lokal di Provinsi Aceh yaitu Partai Aceh (PA) Pada Pemilihan umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2009. Disebabkan faktor isu yang dimunculkan seperti implementasi memorandum of understanding (MoU) Helsinki, yang dinilai belum optimal dan ideologi yang jelas. Dalam hal tersebut Fajran merincikan tiga faktor penting yang membawa mereka menguasai perolehan 33 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Tiga faktor itu adalah kampanye yang telah dilakukan sejak 1976 dibawah kendali Tgk. Hasan Di Tiro lewat pasukan bersenjata sampai Penanda tangan MoU 15 Agustus 2005, memiliki struktur, visi, ideologi, sistem organisasi tidak seperti lima partai lokal Aceh lainnya dan fenomena meningkatnya kasus kriminalitas menjelang pelaksanaan Pemilu yang dialamatkan kepada setiap partai politik peserta Pemilu terutama PA yang tidak pernah terungkap pelakunya oleh pihak kepolisian. Hal itu, membuat masyarakat yakin untuk mendukung PA yang mampu untuk mempertahankan perdamaian di Aceh dibandingkan partai lokal lainnya. Ketiga faktor itu telah mampu menambah kredit poin bagi partai bernomor urut 39 itu dihati rakyat Aceh. Dalam melanjutkan perdamaian yang sedang berlangsung dan membawa kemakmuran

<sup>158</sup> Ibid.

<sup>159</sup> Ibid.

<sup>160</sup> Kesimpulan penulis tentang diskusi yang bertajuk "kemenangan Partai Lokal di Aceh" pada Jum'at 8 Mei 2009 di Banda Aceh, dalam diskusi tersebut penulis berkesempatan hadir menjadi peserta diskusi

kepada rakyat Aceh nantinya lewat keterwakilan mereka di DPRA. Disamping itu PA mendapatkan posisi pada setiap tipikal pemilih yaitu pemilih rasional yaitu sifat fanatic pada tokoh dibelakangnya seperti Irwandi Yusuf dan konsisten terhadap kerja yang telah mereka lakukan. Terakhir pemilih yang menentukan pilihannya dalam lima menit terakhir saat berada di tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif tersebut hampir setengah dari 69 kursi yang tersedia di DPRA ditempati oleh Partai Aceh. Dengan demikian aspirasi percepatan perubahan Aceh akan lebih cepat dengan pihak eksekutif juga berasal dari pihak PA yaitu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Namun tidak tertutup kemungkinan aspirasi yang disampaikan tidak akan tertampung bila proses konsolidasi internal tidak berjalan dengan semesitnya. Dengan memungkinkan akan adanya sikap ingin munculnya masing-masing legislator kepermukaan. Mengatasi hal tersebut, PA harus melakukan konsolidasi internal dalam memperkuat kesolidan mereka dalam memperjuangkan hak rakyat serta mengatur agenda-agenda taktis dalam mengimplementasikan penyempurnaan MoU dan review UUPA. Sementara untuk Partai lokal peserta Pemilu yang tidak lolos untuk tetap kritis dalam mengontrol kinerja pemerintah dan anggota parlemen dalam memberikan kontribusi terhadap kebijakan-kebijakan yang mereka terbitkan. Di sisi lain dia mengatakan, PA juga harus melakukan konsolidasi yang intens dengan para Legislator Aceh DPR RI asal Aceh, karena mereka memiliki peran penting untuk memperjuangkan dilevel nasional dengan jumlah kuota 13 orang.

“Meski proses perubahan itu membutuhkan waktu, keinginan yang dicita-citakan oleh rakyat itu dapat diimplementasikan dengan hadirnya PA dalam kancah politik di Aceh dalam menentukan arah dan pembangunan Aceh dalam jangka lima tahun mendatang.”<sup>161</sup>

Bahwa mesin Politik PA masih sangat efektif mempengaruhi suara Rakyat Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberhasilannya dalam Pilkada 2006 dan kemenangan dalam Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu. Artinya kemana arah angin PA-KPA kesitu pula arah rakyat Aceh. Tentu hal ini akan sangat signifikan dalam Pilpres 8 Juli 2009. Aceh tidak berdiri sendiri dalam semua proses

---

<sup>161</sup> Ibid.

transformasi konflik yang masih belum selesai. KPA-PA juga tidak berdiri sendiri dalam memaknai dan membawa arah Aceh, mereka membutuhkan dukungan semua pihak baik di Aceh termasuk pemerintah hasil Pilpres 2009. Untuk itu, menjadi penting bagi Aceh dalam menentukan strategi memilih Presiden dan Wakil Presiden.

“..kita tahu urusan Aceh banyak tersangkut di pusat (pemerintah pusat-red), sehingga tidak mungkin kita hanya berpangku tangan di Aceh, walaupun PA boleh dikatakan berhasil dalam pemilu kemarin, urusan UUPA misalnya mesti dikembalikan sesuai dengan MoU Helsinki dan banyak hal lain yang mesti dibicarakan dengan pusat..”<sup>162</sup>

## VII. KOMUNIKASI SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI KONFLIK

Konstruksi realitas proses transformasi konflik di Aceh menjadi menarik dianalisis ketika proses transformasi tersebut membawa arah perubahan dalam berbagai segi kehidupan bagi rakyat Aceh maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Siapa saja berhak dan bebas mengkonstruksikan realitas tersebut, tidak terkecuali mantan kombatan GAM sendiri yang tergabung dalam KPA atau yang tergabung dalam Partai Lokal PA, demikian juga kalangan akademisi/intelektual, aktifis, media, tokoh masyarakat bahkan lembaga seperti BRA. Realitas transformasi konflik dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik (GAM) tersebut sudah berjalan hampir empat (4) tahun kalau kita batasi waktu atau fase dimulai sejak MoU Helsinki. Proses dialektika secara dinamis dalam transformasi konflik telah dipertontonkan secara jelas oleh rakyat Aceh dan bangsa Indonesia. Relasi-komunikasi timbal-balik telah mampu mengantarkan Aceh dari situasi dan kondisi konflik menuju damai.

Proses konstruksi realitas transformasi konflik ini akan sangat menarik ketika dihadapkan dengan paradigma konstruksionisme (*constructionism*) atau sering disebut juga *Interpretivism* yang mana seluruh elemennya meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi harus menggunakan ruh konstruksionis. Konstruksionisme yang didasarkan pada teori sosiologi kritis Peter L. Berger dan Erving Goffman ini sering disebut dengan paradigma produksi atau pertukaran

<sup>162</sup> Wawancara via telpon dengan salah satu mantan GAM yang lolos menjadi legislator DPRA, Juni 2009

makna. Asumsi ontologis pada paradigma konstruktivisme adalah bersifat relatif. Artinya, realitas proses transformasi konflik yang diperlihatkan di Aceh merupakan realitas sosial buatan yang memiliki unsur relativitas yang cukup tinggi dan berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial terutama para pihak yang terlibat dalam proses transformasi konflik di Aceh. Asumsi *epistemologis* dalam pendekatan ini bersifat subjektif-dialektikal. Artinya pemahaman atau temuan suatu realitas yang terdapat di dalam komunikasi proses transformasi konflik merupakan hasil dari penalaran peneliti secara subjektif dan sebagai hasil kreatif peneliti dalam membentuk realitas. Asumsi *aksiologis* dalam paradigma ini adalah peneliti bertindak sebagai *passionate participant*, yakni berperan sebagai fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial. Ada empat asumsi yang melekat pada pendekatan konstruksionis. *Pertama*, dunia ini tidaklah tampak nyata secara objektif pada pengamat, tapi diketahui melalui pengalaman yang umumnya dipengaruhi oleh bahasa. *Kedua*, kategori linguistik yang dipergunakan untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori ini muncul dari interaksi sosial dalam kelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. *Ketiga*, bagaimana realitas tertentu dipahami pada waktu tertentu dan ditentukan oleh kovensi komunikasi yang berlaku pada waktu itu, karena itu, stabilitas dan instabilitas pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial ketimbang realitas objektif di luar pengalaman. *Keempat*, pemahaman realitas yang terbentuk secara social membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas.<sup>163</sup> Artinya, bagaimana para informan dalam penelitian ini mengkonstruksikan realitas transformasi konflik Aceh berperilaku dalam kehidupan sehari-hari juga ditentukan oleh realitas yang mereka pahami. Paradigma ini memandang komunikasi sebagai suatu proses produksi dan pertukaran makna. Dua hal yang menjadi karakteristik penting dari paradigma ini adalah politik pemaknaan dan proses seseorang membuat gambaran tentang realitas dan komunikasi sebagai sebuah kegiatan yang dinamis (Eriyanto, 2002:40). Paradigma konstruksionis memperhatikan interaksi kedua pihak,

<sup>163</sup> Stephen P. Littlejohn, *Theories of Human Communication, Fifth Edition*, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1996), h. 179-180, dalam Eriyanto, *op. cit.*, h.40-41.



komunikator dan komunikan, untuk menciptakan pemaknaan atau tafsiran dari suatu pesan.

Peter L. Berger dalam Eriyanto (2002:15) menyampaikan pendapat yang menarik tentang konstruksi sosial atas realitas. Baginya, realitas tidak dibentuk secara ilmiah, atau diturunkan oleh Tuhan, tetapi dibentuk dan dikonstruksi. Hasilnya adalah wajah plural dari realitas itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tiap individu dalam mengonstruksi realitas. Tiap orang memiliki frame of reference dan field of experience yang berbeda-beda, sehingga mereka secara bebas memaknai suatu hal dan mengonstruksi realitas yang mereka inginkan berdasarkan kerangka berpikir masing-masing. Konstruksi realitas yang dihasilkan memiliki dasar tertentu yang menyebabkan mereka meyakini kebenaran dari konstruksi tersebut. Berbagai konstruksi realitas yang dibuat individu menghasilkan konstruksi sosial atas realitas tertentu. Selain itu, konstruksi sosial bersifat dinamis. Di dalamnya terjadi proses dialektis antara realitas subjektif dan realitas objektif. Realitas subjektif berkaitan dengan interpretasi dan pemaknaan tiap individu terhadap proses transformasi konflik Aceh sebagai objek. Hasil dari relasi antara objek dan individu menghasilkan penafsiran, yang berbeda-beda berdasarkan beraneka ragam latar belakang individu tersebut. Dimensi objektif dari realitas berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang ada di luar objek, seperti norma, aturan, atau stimulan tertentu yang menggerakkan objek. Dalam hal ini ada mantan kombatan GAM yang sudah tergabung dalam KPA dengan membawa nama organisasi atau komunitasnya menilai realitas Aceh pasca MoU Helsinki sampai dengan saat ini dalam proses transformasi konflik menuju damai, bahwa Aceh akan memiliki pemerintahan sendiri yang lebih independen dan berkurangnya campurtangan pemerintah pusat di Aceh, namun masih dalam RI. Sebagai realitas subjektif penilaian anggota tersebut tidak salah karena hal itu tergantung frame of reference dan field of experience masing-masing individu.

“...transformasi konflik di Aceh pasca MoU dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik sudah jalan dengan baik, walaupun disana-sini masih terdapat kekurangan..kami sudah mereformasikan diri dari gerakan bersenjata menuju perjuangan politik, senjata semua sudah dimusnahkan, kami sudah ada organisasi baru KPA yang menampung semua mantan kombatan GAM dan GAM sipil, kami ikut menjaga Pilkada 2006 kemarin

sehingga berjalan sukses, ya..memang ada insiden-insiden kecil tapi itu tidak mengganggu proses pilkada yang demokratis..kami kira semua pihak mesti terlibat aktif menjaga damai Aceh yang dengan susah payah kita raih, BRA, KPA, pemerintah daerah dan pusat, masyarakat semua mesti bekerja keras untuk menjaga damai. MoU Helsinki menthi menjadi landasan awal dalam menjalankan transformasi ini..saya kira kita dan pemerintah pusat sudah komit tentang itu..Aceh mesti memiliki pemerintah sendiri yang lebih independen dengan mengurangi campur tangan Jakarta dan tetap dalam RI..”<sup>164</sup>

Namun pendapat Juru bicara KPA tersebut sangat berbeda dengan mantan kombatan GAM yang tidak masuk atau tidak bergabung dengan KPA.

“...Sampai saat ini, saya belum mendapat apa-apa termasuk dana reintegrasi yang sudah dijanjikan, saya tidak tau apakah nama saya terdaftar atau karena saya tidak masuk dalam KPA wilayah sehingga saya belum mendapat apa-apa. Mereka enak-enak dengan mobil mewah padahal dulu sama-sama berjuang dalam hutan...watee lam uteun sapoe khen-watee treun u kota ka beda kheu, padahal yang jadi Gubernur, bupati dan ketua BRA orang GAM...”<sup>165</sup>

Kalau strukturalisme lebih percaya pada struktur maka konstruksionisme, justru sebaliknya, ia percaya pada individu-individu yang otonom yang bisa melakukan perubahan sosial. Tradisi konstruksionisme kemudian melahirkan tradisi sosiologi yang berbeda. Di Amerika misalnya melahirkan Sosiologi Interaksionisme, pengagasnya adalah Simmel dan George Herbert Mead. Sementara di Eropa melahirkan sosiologi fenomenologi, pengagasnya antara lain Max Weber, Alfred Schutz, Bergson, dan E. Husserl). Tokoh utamanya adalah Max Weber. (1864-1922). Kita mungkin tidak bisa melupakan pandangan fenomenologi dan konstruksi sosial yang diusung oleh E. Husserl dan Alfred Schutz. Fenomenologi merupakan bentuk dari idealisme yang semata-mata tertarik pada struktur-struktur dan cara-cara bekerjanya kesadaran manusia. Transformasi konflik Aceh yang dipahami, dalam pandangan fenomenologi, merupakan ciptaan dari kesadaran-kesadaran yang ada di dalam kepala individu masing-masing. Proses bagaimana manusia membangun dunianya adalah melalui proses pemaknaan yang berawal dari arus pengalaman. Fenomenologi menempatkan peran individu sebagai pemberi makna, dan dari proses pemaknaan

<sup>164</sup> Diskusi dan wawancara dengan Juru Bicara KPA Ibrahim bin Syamsuddin (Alm) di Asrama Mahasiswa Aceh (FOBA) Jakarta September 2008.

<sup>165</sup> Wawancara dengan salah satu mantan kombatan GAM di wilayah Pase kecamatan seunuddon Aceh Utara, 25 Agustus 2008

oleh individu inilah yang kemudian menghasilkan tindakan yang didasari oleh pengalaman sehari-hari yang bersifat intensional. Individu kemudian memilih sesuatu yang mesti dilakukan berdasarkan makna tentang sesuatu, dan mempertimbangkan pula makna objektif (masyarakat) tentang sesuatu tersebut.

Artinya dalam menyelesaikan proses transformasi konflik Aceh, individu-individu juga berperan penting selain, struktur seperti negara, hukum, Undang-Undang, organisasi local, nasional dan internasional, NGO, dan lain-lain. Justru dalam perspektif konstruksionisme individu memiliki peran yang signifikan di dalam menyelesaikan proses transformasi konflik di Aceh. Paradigma konstruktivis melihat bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksikan. Fenomena sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah dikonstruksikan. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam hal ini pula komunikasi dilihat sebagai faktor konstruksi itu sendiri. Dalam pandangan konstruksionis, para pihak yang terlibat dalam proses transformasi konflik Aceh juga dipandang sebagai aktor/agen konstruksi. Mereka juga turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, mereka turut mendefinisikan apa yang terjadi, dan secara aktif membentuk peristiwa dalam pemahaman mereka.

Konstruksionisme atau konstruktivis dipakai untuk menjelaskan suatu teori yang menyatakan bahwa setiap individu menafsirkan dan berperilaku menurut kategori-kategori kenseptual dari pikirannya. Realitas tidaklah muncul begitu saja dalam bentuknya yang mentah melainkan ia harus disaring melalui cara orang itu memandang setiap hal yang ada (Littlejohn, 2002: 111-112). Penelitian kualitatif dinyatakan mengonstruksi realitas sosial, karena penelitian kualitatif berlandaskan paradigma konstruktivisme atau konstruksionisme yang berpandangan bahwa pengetahuan itu bukan hanya merupakan pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi rasio subjek yang diteliti. Pengenalan manusia terhadap realitas sosial berpusat pada subjek dan bukan pada objek, ini berarti ilmu pengetahuan bukan hasil pengalaman semata, tetapi merupakan juga hasil konstruksi oleh rasio.

Pendekatan konstruksionis tumbuh berkat dorongan kaum interaksi simbolik dari karya-karya Schutz, Berger, dan Luckman. Pendekatan ini terutama memandang bahwa kehidupan sehari-hari terutama adalah kehidupan melalui dan dengan bahasa. Bahasa tidak hanya mampu membangun simbol-simbol yang diabstraksikan dari pengalaman sehari-hari, melainkan juga “mengembalikan” simbol-simbol itu dan menghadirkannya sebagai unsur yang objektif dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat asumsi yang melekat pada pendekatan konstruksionis. *Pertama*, dunia ini tidaklah tampak nyata secara objektif pada pengamat, tetapi diketahui melalui pengalaman yang umumnya dipengaruhi oleh bahasa. *Kedua*, kategori linguistik yang dipergunakan untuk memahami realitas bersifat situasional, karena kategori ini muncul dari interaksi sosial dalam kelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. *Ketiga*, bagaimana realitas tertentu dipahami pada waktu tertentu dan ditentukan oleh kovensi komunikasi yang berlaku pada waktu itu, karena itu, stabilitas dan instabilitas pengetahuan banyak bergantung pada perubahan sosial ketimbang realitas objektif di luar pengalaman. *Keempat*, pemahaman realitas yang terbentuk secara sosial membentuk banyak aspek kehidupan lain yang penting. Bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari ditentukan oleh bagaimana kita memahami realitas.<sup>166</sup>

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pertama kali memperkenalkan istilah konstruksi realitas pada tahun 1966 melalui bukunya *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*. Mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, dimana individu secara intens menciptakan suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Tesis utama dari Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus-menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. Seseorang baru menjadi seorang pribadi yang beridentitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.

<sup>166</sup> Stephen P. Littlejohn, *Theories of Human Communication, Fifth Edition*, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1996), h. 179-180, dalam Eriyanto, op. cit, h. 40-41.

Proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan, Berger menyebutnya sebagai momen. *Pertama*, eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupu fisik. Adalah sudah sifat dasar manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia tidak dapat kita mengerti sebagai ketertutupan yang lepas dari dunia luarnya. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia dengan kata lain manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. *Kedua*, objektivasi, yaitu hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisasi yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini, masyarakat menjadi suatu realitas suigeneris. Hasil dari eksternalisasi kebudayaan itu misalnya, manusia menciptakan alat demi kemudahan hidupnya, atau kebudayaan non-materil dalam bentuk bahasa. Baik alat tadi maupun bahasa adalah kegiatan eksternalisasi manusia ketika berhadapan dengan dunia, ia adalah hasil dari kegiatan manusia. Setelah dihasilkan, baik benda atau bahasa sebagai produk eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang objektif. Bahkan ia dapat menghadapi manusia sebagai penghasil dari produk kebudayaan. Kebudayaan yang telah berstatus sebagai realitas objektif, ada di luar kesadaran manusia, ada "di sana" bagi setiap orang. Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami setiap orang.

*Ketiga*, internalisasi, proses internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subyektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi, manusia menjadi hasil dari masyarakat. Realitas itu bukanlah sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan, tidak juga sesuatu yang dibentuk secara ilmah. Tapi sebaliknya, ia dibentuk dan dikonstruksi. Oleh karena itu, realitas berwajah ganda/plural. Setiap orang bisa memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Setiap orang yang mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan

tertentu, dan lingkungan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing.

Paradigma konstruksionis melihat bagaimana suatu realitas sosial dikonstruksikan. Fenomena sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah dikonstruksikan. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam hal ini pula komunikasi dilihat sebagai faktor konstruksi itu sendiri. Ketika manusia coba memahami tentang realitas sosial tadi melalui fase eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi maka pada hakikatnya manusia dalam proses komunikasi. Komunikasi di sini tidak dilihat dari perspektif paradigma transmisi. Komunikasi dilihat lebih kepada bagaimana komunikasi membentuk konstruksi tentang apa yang dipercaya manusia tersebut sebagai realitas sosial. Komunikasi yang terjadi dalam tataran komunikasi simbolik. Bahasa, sebagai alat komunikasi manusia pada hakikatnya tercipta berkat proses konstruksi sosial. Manusia menciptakan bahasa dan bahasa pula yang menciptakan manusia. Keduanya melakukan proses yang dialektis. Dan begitu pula seterusnya.

Konstruktivisme sebagai suatu pandangan yang lain terhadap dunia, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Khun bahwa semesta secara epistemologi merupakan hasil konstruksi sosial.<sup>167</sup> Pengetahuan/pandangan manusia dibentuk oleh kemampuan tubuh indrawi dan intelektual asumsi-asumsi kebudayaan dan bahasa tanpa kita sadari. Bahasa dan ilmu pengetahuan bukanlah cerminan semesta, melainkan bahasa membentuk semesta, bahwa setiap bahasa mengkonstruksi aspek-aspek tertentu dari semesta dengan caranya sendiri. Peter Dahlgren mengatakan realitas sosial setidaknya sebagian adalah produksi manusia, hasil proses budaya, termasuk penggunaan bahasa.<sup>168</sup> Masyarakat merupakan produk manusia dan manusia merupakan produk masyarakat. Baik manusia dan masyarakat saling berdialektika diantara keduanya. Masyarakat tidak pernah sebagai produk akhir, tetapi tetap sebagai proses yang sedang terbentuk.<sup>169</sup>

<sup>167</sup> D. Gahral Adian, *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Traju, 2002)

<sup>168</sup> Eriyanto, *Op. Cit.*, dalam pengantar Deddy Mulyana, M.A., h. xi

<sup>169</sup> *Ibid.* h. 13

Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tidak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi, seperti halnya hubungan antara manusia dengan masyarakat. Little John (1999), menjelaskan hal ini dalam *genre interactionist theories*. Dalam teori ini, dijelaskan bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. Komunikasi (interaksi) merupakan sarana belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial-struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial. Tidak ada perubahan dalam masyarakat tanpa peran komunikasi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa komunikasi hadir pada semua upaya bertujuan membawa ke arah perubahan. Meskipun dikatakan bahwa komunikasi hadir dengan tujuan membawa perubahan, namun ia bukan satu-satunya alat dalam membawa perubahan sosial. Dengan kata lain, komunikasi hanya salah satu dari banyak faktor yang menimbulkan perubahan masyarakat.

David K. Berlo dari *Michigan State University*, dalam Cangara, menyebutkan bahwa komunikasi sebagai instrument interaksi social berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Byrnes, 1965). Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian damai di Aceh ditentukan oleh kemampuan komunikasi para pihak yang terlibat dan mengkonstruksikannya. Proses komunikasi ini yang terus menerus berlangsung baik secara individu, kelompok/komunitas bahkan dalam Negara dalam upaya mengkonstruksikan realitas kehidupan. Dalam proses konstruksi pemikiran inilah rakyat Aceh terus berdinamika untuk membangun dunianya yang lebih baik keluar dari konflik.

Ketika proses dialog berlangsung di Helsinki empat tahun lalu, pasca konflik yang ditandai dengan MoU Helsinki dan ketika mantan kombatan GAM

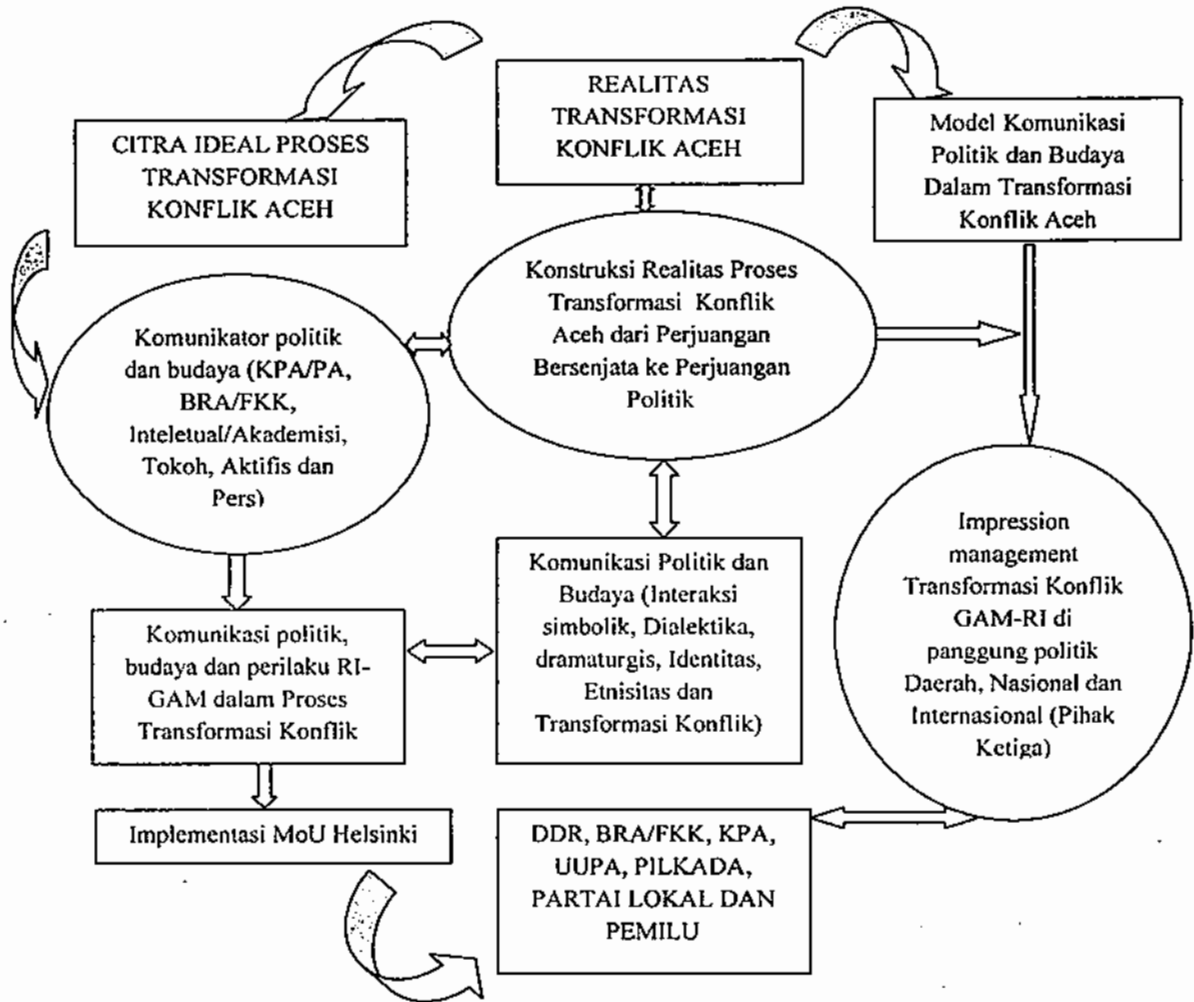
kembali berbaur dengan masyarakat. Dalam fase-fase tersebut dipata dilihat bagaimana mantan kombatan GAM menampilkan diri dengan gaya, penampilan dan tingkah lakunya. GAM berusaha membangun panggungnya yang mesti di akui oleh siapapun. Sepertinya dunia panggung GAM tersebut bahkan rakyat Aceh secara keseluruhan sangat relevan ketika teori dramaturgis yang diperkenalkan oleh Erving Goffman.<sup>170</sup> Bahwa dengan teori dramaturgis menyebutkan bahwa kita dengan sengaja menampilkan diri kita (*self presentation*) seperti yang kita kehendaki. Yang ditampilkan atau dipresentasikan sebagai *front*. *Front* terdiri dari *setting* atau panggung (*stege*), *appearance* (penampilan) dan *manner* (tingkah laku). Goffman berasumsi bahwa seseorang bagaimanapun harus membuat atau mengatur peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang muncul sebagai suatu kejadian yang terorganisasi bagi seseorang akan menjadi realitas pada orang tersebut pada saat itu. Goffman menyebutkan apa yang nyata bagi individu adalah definisi terhadap situasi (*the definition of the situation*).

---

<sup>170</sup> Pemikiran Ervin Goofman dalam Littlejohn 1996, tentang Dramaturgis di ulas secara lugas oleh Deddy Mulyana dalam 'metode penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya, Bandung; Remaja Rosdakarya 2001.



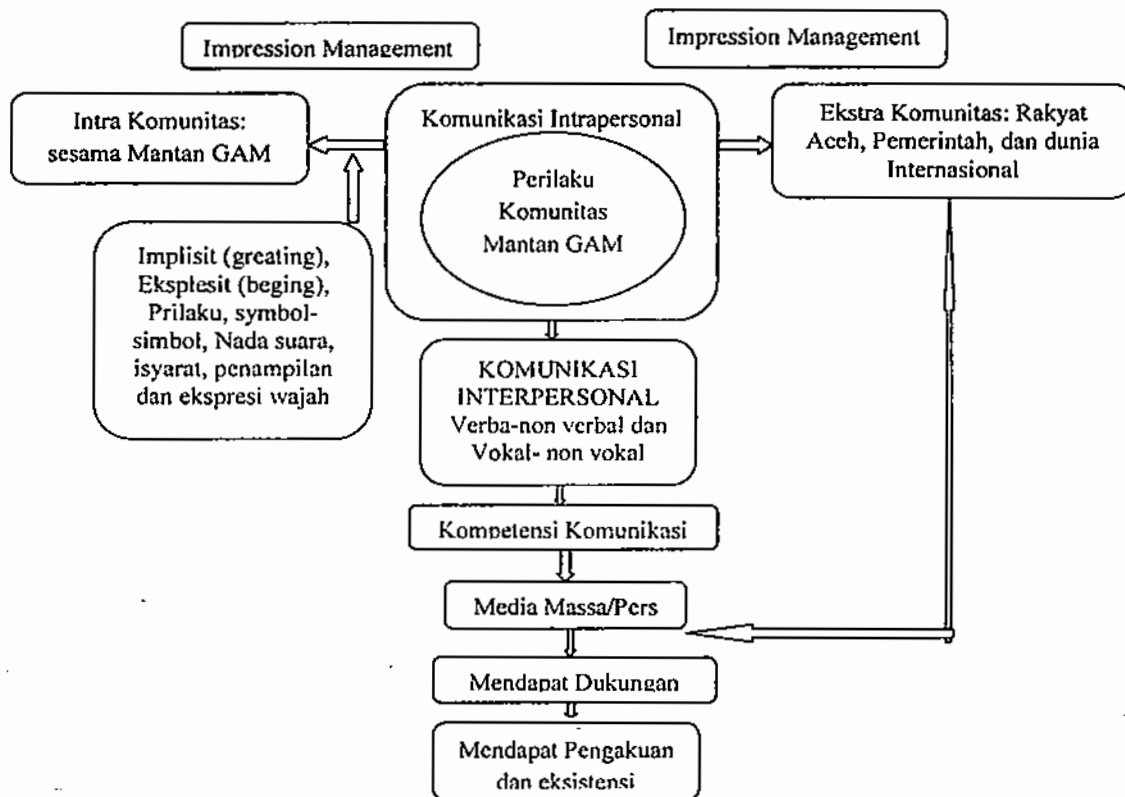
Gambar.4.13. Analisis model konstruksionis terhadap Realitas Proses Transformasi Konflik Aceh.



Dalam konten mantan Kombatan GAM, juga dapat dianalisis komunikasi yang dijalankan. Suatu tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki makna bagi yang melakukannya maupun bagi yang menyaksikannya. Suatu tindakan sosial bermakna tersebut dapat dikatakan juga sebagai suatu peristiwa komunikasi dan tindakan yang menunjukkan suatu peristiwa komunikasi dapat di sebut sebagai komunikasi. Perilaku komunikasi mantan kombatan berlangsung dalam dua panggung besar yaitu panggung yang pesertanya terdiri dari sesama mereka atau dapat disebut intra komunitas. Kedua panggung yang tampak keluar dengan rakyat, pemerintah dan dunia internasional atau dinamakan ekstra komunitas. Sebagai aktor mantan kombatan GAM bermain dan memerankan lakonnya

seseorang seperti apa yang dibayangkannya. Proses dramaturgis ini melalui apa yang disebut *impression management* atau pengelolaan kesan. Model komunikasi yang ditampilkan oleh para pihak terutama mantan kombatan GAM dalam upaya mendapat pengakuan dan eksistensi diri dapat digambarkan, sebagai berikut:

Gambar: 4.14. Model Komunikasi Mantan Kombatan Pasca MoU Helsinki dalam mengelola kesan



Penjelasan Berger dan Luckman di atas memperlihatkan bahwa realitas dalam pandangan konstruksi sosial sangat mementingkan proses dialogis berkesinambungan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, terutama pada pemaknaan yang dibentuk masing-masing individu tersebut tentang dunia. Kualitas lain yang disebutkan oleh Berger dan Luckman adalah pemaknaan "*here and now*" pada manusia tentang keberadaan dan tujuan mereka di dunia. Konstruksi sosial yang ditawarkan oleh Berger dan Luckman ini dipengaruhi oleh konsep Fenomenologi, khususnya dari Alfred Schutz. Schutz menjelaskan tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat,

yakni: dunia sehari-hari, sosialitas, dan makna (Novri Susan, 2003, dalam Rosyadi, 2008). Dunia sehari-hari adalah urutan pertama dari kenyataan. Ia menjadi dunia yang paling fundamental dan esensial bagi manusia. Sosialitas berpijak pada teori tindakan sosial Max Weber. Tindakan sosial yang terjadi setiap hari selalu memiliki makna. Sumbangan Schutz yang utama bagi gagasan fenomenologi adalah mengenai makna dan bagaimana makna membentuk struktur sosial.

Dalam hal ini Juru bicara KPA mengkonstruksikan damai Aceh sebagai upaya bersama yang mesti di jaga sampai kapanpun.

“...Proses damai di Aceh, kalau kita ambil masa sejak presiden BJ. Habibie, Abdurahman, Megawati dan terakhir dengan lahirnya MoU Helsinki 15 Agustus 2005 pada masa Presiden SBY-JK, merupapakn proses yang snagat panjang dan melelahkan, saya kira proses ini penting, prose itu sama pentingnya dengan hasil....kita tidak hanya berdialog dalam bentuk forum-forum namun juga pertemuan secara pribadi..kita bicara secara pribadi sering kita lakukan dengan pihak RI saat itu...jadi saya kira semua sumberdaya kita tumpahkan untuk mencapai damai ini...yang penting kita bias hidup secara normal....”<sup>171</sup>

Berdasarkan kenyataan sosial yang ada, Berger da Luckman menganggap bahwa unsur terpenting dalam konstruksi sosial adalah masyarakat, yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau norma, baik itu norma adat, agama, moral dan lain-lain. Dan, semua itu nantinya akan terbentuk dalam sebuah struktur sosial yang besar, seperti institusi dan pertemuan. Struktur sosial atau institusi merupakan bentuk atau pola yang sudah mapan yang diikuti oleh kalangan luas di dalam masyarakat. Akibatnya institusi atau struktur sosial itu mungkin saja terlihat mengkonfrontasikan individu sebagai suatu kenyataan obyektif dimana individu harus menyesuaikan dirinya. Kenyataan obyektif adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena yang memiliki keberadaannya berdasarkan interaksi individu dan masyarakat. Sementara itu, kenyataan obyektif yang menjadi pengetahuan merupakan kepastian bahwa fenomena itu nyata dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik, di dalam konteks tertentu. Dengan demikian, kenyataan sosial adalah kesepakatan bersama manusia terhadap pengetahuan dalam kehidupan sehari-sehari yang muncul dari proses dialogis.

<sup>171</sup> Diskusi dan wawancara dengan Juru Bicara KPA Ibrahim Bin Syamsuddin, akhir September 2008 di Jakarta

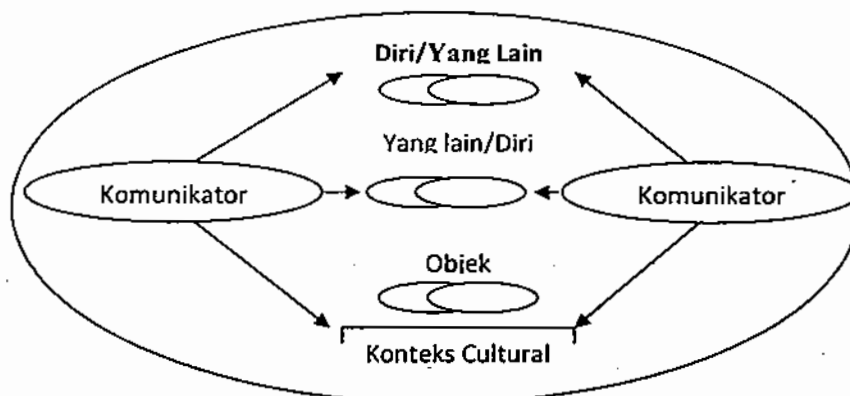
Kehidupan sehari-hari menampilkan realitas obyektif yang ditafsirkan oleh individu dan dimaknai secara subyektif. Transformasi Konflik Aceh merupakan sebuah realitas obyektif yang dimaknai berbeda oleh berbagai kelompok, seperti mantan kombatan GAM/KPA, PA, Intelektual/Akademisi, Tokoh-Tokoh, Pers dan Aktifis. Perbedaan makna ini tidak hanya terjadi antarkelompok namun juga intrakelompok (individu-individu).

...Saya kira dalam proses transformasi konflik ini, tidak bisa kita hanya melihat pihak-pihak tertentu saja yang berperan..ada kondisi lain seperti kejenuhan rakyat terhadap konflik yang terus menerus, kondisi psikologis, sosial dan budaya baik pada level individu maupun masyarakat sudah berada pada titik melelahkan..jadi semua factor terlihat maupun tidak berperan penting dalam proses ini..."<sup>172</sup>

Hasil interaksi sosial secara dialektika yang terjadi di Aceh dengan melibatkan berbagai pihak membentuk pengetahuan damai bersama. Pengetahuan ini tidak hanya Aceh, Indonesia namun menjadi landasan dalam penyelesaian konflik-konflik di berbagai belahan dunia. Pengetahuan damai bersama yang dilakukan berulang-ulang berubah menjadi pembiasaan. Pembiasaan yang telah berlangsung memunculkan pengendapan dan tradisi, yang kemudian diwariskan ke generasi berikut dan dijaga kelestariannya oleh suatu lembaga/instansi bahkan negara. Dalam tradisi Interaksi simbolik mengandung pokok-pokok tentang komunikasi dan masyarakat. Jerome Manis dan Bernard Meltzer dalam Litteljhon, 1995:159-160, mengatakan ada tujuh dasar teori dan proposisi dalam interaksi simbolik yaitu :1) Manusia memahami sesuatu dengan menandai makna pada pengalaman mereka. 2) Pemaknaan adalah belajar dari proses interaksi antar manusia. 3) Semua struktur dan institusi sosial dihasilkan oleh interaksi manusia dengan yang lainnya. 4) Perilaku individu tidak ditentukan dengan kejadian-kejadian yang telah terjadi, melainkan dengan kerelaan. 5) Pikiran terdiri dari ucapan yang tersembunyi, merefleksikan interaksi satu sama lain. 6) Perilaku diciptakan atau dihasilkan dari interaksi kelompok sosial dan 7) Seseorang tidak dapat memahami pengalaman manusia dengan mengamati perilaku tersembunyi.

<sup>172</sup> Diskusi dan wawancara dengan aktifis Aceh di Jakarta (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Jakarta- KMPAN) di Jakarta Agustus 2008

Menurut Fisher 1986:139-270, pada dasarnya ada empat perspektif dalam ilmu komunikasi: mekanistik, psikologis, interaksional, dan pragmatis. Para peserta komunikasi menurut model interaksional adalah orang-orang yang mengembangkan potensi manusiawinya melalui interaksi sosial. Tepatnya melalui apa yang disebut pengambilan peran orang lain (*role-taking*). Diri (*self*) berkembang lewat interaksi dengan orang lain, dimulai dengan lingkungan terdekatnya seperti keluarga (*significant others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap permainan (*play stage*) dan terus berlanjut hingga kelingkungan luas (*generalized others*) dalam suatu tahap yang disebut tahap pertandingan (*game stage*). Dalam interaksi itu, individu selalu melihat dirinya melalui perspektif (peran) orang lain. Maka konsep-diri pun tumbuh berdasarkan bagaimana orang lain memandang diri individu tersebut. (Mulyana, 2004:160). Model atau pola komunikasi yang sesuai menurut Fisher (1986 : 242) untuk menggambarkan pola komunikasi interaksional adalah sebagai berikut: Gambar 4.15. Model Interaksional Komunikasi Manusia.<sup>173</sup>



Menurut model interaksional di atas, orang-orang sebagai peserta komunikasi bersifat aktif, reflektif, dan kreatif, menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit, dan sulit diramalkan. Blumer dalam Fisher, 1986:241, dalam hal ini mengemukakan tiga premis yang menjadi dasar model ini, *Pertama*, manusia bertindak berdasarkan makna-makna yang diberikan individu terhadap lingkungan sosialnya (simbol verbal, simbol nonverbal, lingkungan fisik). *Kedua*, makna didapatkan dan berhubungan langsung dengan interaksi sosial yang

<sup>173</sup> Lihat Aurbey Fisher "Teori-Teori Komunikasi", 1996 : 241-242

dilakukan individu dengan lingkungan sosialnya, *Ketiga*, makna diciptakan, dipertahankan, diubah dan dikembangkan lewat proses penafsiran yang dilakukan individu dalam berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu individu terus berubah, maka masyarakat pun ikut berubah melalui interaksi.

George Herbert Mead (1863-1931), yang juga dikenal sebagai seorang sosiolog pragmatis, ia berkeyakinan bahwa semua teori sosial yang ada harus dapat diuji secara praktis, termasuk semua hal tentang kebenaran, pengetahuan, moralitas, dan politik. Interaksionisme simbol merupakan teori yang dicanangkannya sebagai studi perilaku individu dan atau kelompok kecil masyarakat melalui serangkaian pengamatan dan deskripsi. Metode ini berlandaskan pada pengamatan atas apa yang diekspresikan orang meliputi penampilannya, gerak-geriknya, dan bahasa simbolik yang muncul dalam situasi sosial. Para interaksionis mengambil cara pandang dari masyarakat dari bawah, sebagaimana situasi yang diciptakan oleh individu-individu tersebut. Kontribusi untuk teori sosial ini juga dilakukan oleh Charles Horton Cooley (1864-1929), seorang sosiolog Amerika yang pernah dekat dengan Mead. Cooley membangun teori relasi sosial yang tak bertitik berat pada kondisi individual (mikro) maupun sosial (makro), dengan meyakini bahwa kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Cooley banyak berbicara tentang konsep diri sifat-sifat manusia, kelompok primer dalam pembentukan sifat manusia, interaksi antara pemimpin politik dan massanya, dan pentingnya arti sosial dalam nilai keuangan. Di sisi lain, William I. Thomas (1863-1947), juga sosiolog interaksionis Amerika, memusatkan teorinya atas sifat saling ketergantungan organis antar individu dan lingkungan sosialnya dengan metoda yang hampir dapat dikatakan sama dengan metode Mead dan Cooley. Misalnya, Thomas berusaha mengidentifikasi faktor-faktor psikologis dan biologis yang dibawa sejak lahir dan menjelaskan perilaku manusia itu; ia menyimpulkan ada empat hal dasar keinginan manusia, yaitu: 1) keinginan untuk pengalaman baru, 2) keinginan untuk dihargai, 3) keinginan untuk menguasai, 4) keinginan untuk merasa aman.

Thomas yakin bahwa perilaku manusia tidak dapat dimengerti dengan baik semata sebagai respon reflektif dari stimulus lingkungan. Ia percaya bahwa ada definisi subyektif yang penting yang ada di antara stimulus dan respon. Seorang

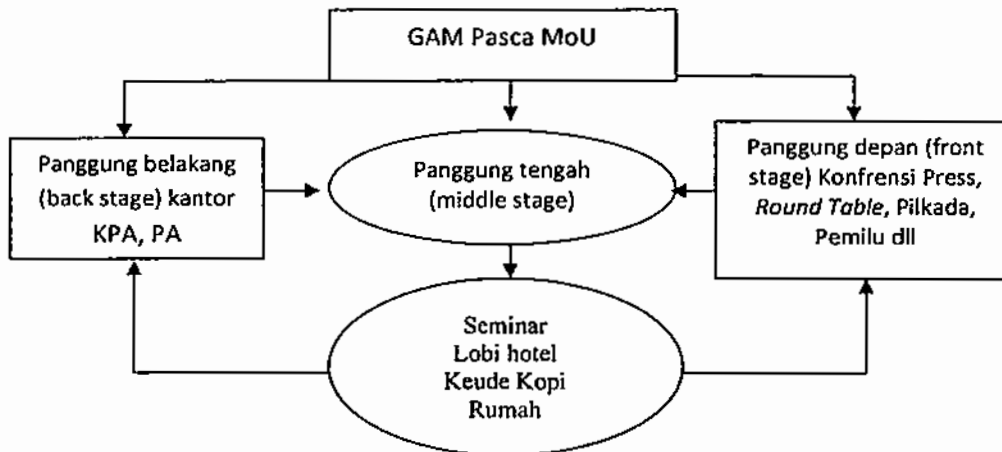
sosiolog interaksionis lain, Erving Goffman (1922-1983), menitikberatkan teorinya pada konsep dramaturgi. Ia menganalisis berbagai strategi individu dalam meraup kepercayaan sosial melalui konsep-konsep teater, seperti manajemen kesan dan sebagainya. Misalnya, ia menganalisis bagaimana orang cenderung untuk saling menutupi kesalahan dengan teman, atau minimal berpura-pura tidak tahu dan tidak memperhatikan kesalahan teman, dan seterusnya. Lebih jauh ia juga banyak berbicara tentang dasar kontekstual interaksi sosial seperti pemahaman bersama sebagai kerangka di mana peristiwa-peristiwa sosial terjadi. Pendeknya dengan memperhatikan simbol-simbol yang digunakan oleh individu dalam interaksi sosial, interaksionis berkeinginan untuk mencari keterhubungan antara yang terjadi dari tingkat *mikrososial* ke *makrososial* secara komprehensif.

Keberhasilan transformasi damai Aceh tidak hanya ditentukan oleh lembaga/instansi yang telah dibentuk, namun yang lebih penting adalah peran dan tingkah laku para aktor seperti mantan kombatan GAM dan pihak RI dalam hal ini TNI juga mesti dijaga tingkah lakunya dalam masyarakat. Kalau kita ambil pendapat Erving Goffman, bahwa panggung belakang atau interaksi sesamanya yang tidak tampak dalam masyarakat mungkin tidak memberikan dampak atau pengaruh secara cepat, namun panggung depan yaitu interaksi dalam masyarakat akan cepat membawa dampak dan pengaruh.

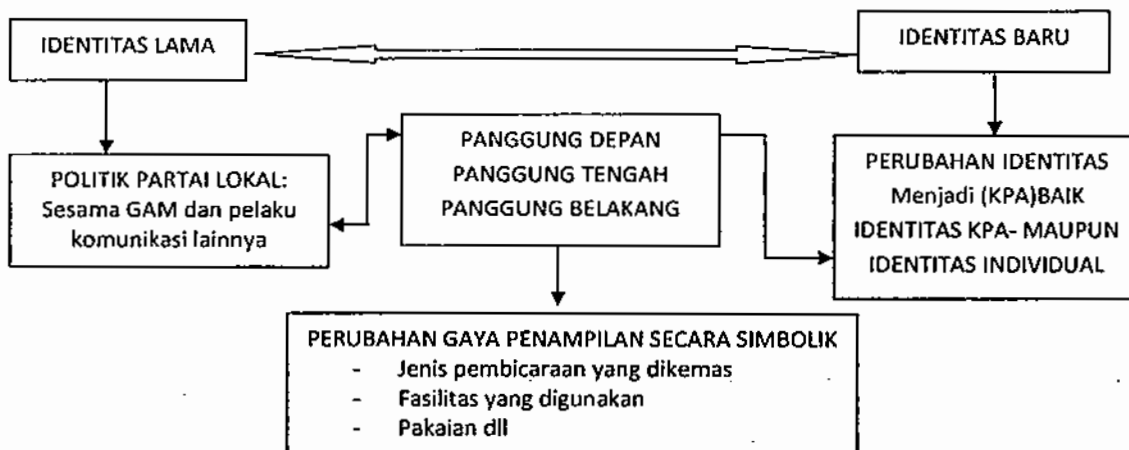
“...Mereka (GAM-red) yang kembali dalam masyarakat kalau kita lihat masih kurang bicaranya..tegur aja kadang gak ada.. mereka hanya dengan kelompoknya..ada kesan sombong dan angkuh, dengan gaya dan pakaian yang mudah ditandai bahwa mereka mantan GAM, dengan sepatu besar dan tinggi, saya tidak tau apakah di daerah lain juga seperti itu ...jadi gaya-gaya militer masih terlihat, mungkin ini mantan TNA baru-baru, tapi ada juga yang baik mau kemeunasah, ngobrol-ngobrol di keude kopi, ya mestinya mereka dan masyarakat jangan ada lagi perbedaan, semua merasakan konflik...sudah cukuplah...”<sup>174</sup>

<sup>174</sup> Diskusi dan wawancara informal dengan Tokoh Masyarakat (Keuchik) di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, Juli 2007

Gambar.4.16. Model panggung Komunikasi GAM Pasca MoU Helsinki



Gambar: 4.17. Faktor individual GAM dan peran mereka Pasca MoU Dalam Masyarakat Aceh



### VIII. KOMUNIKASI BUDAYA SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI

Konflik berkepanjangan di Aceh, sampai kemudian berhasil mencapai damai 2005 lalu, di sadari ataupun tidak peran identitas budaya, etnisitas memainkan peran yang besar. Mesti dipahami bahwa globalisasi kebudayaan saat ini menunjukkan dua wajah yang berbeda. Ibarat satu keping mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi globalisasi mengarahkan semua orang untuk mengadopsi pola kebudayaan yang seragam dengan wataknya yang mekanis fungsional namun di lain sisi, kecenderungan yang pertama ini telah melahirkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa identitasnya terancam seiring gelombang



penyeragaman ini. Secara teoritik, modernisasi memang keniscayaan sejarah yang sulit disangkal, namun secara empirik selalu saja ada deviasi-deviasi yang memaksa untuk menerima bahwa modernisasi tidak selamanya berwajah tunggal. Ahmed Gurnah, misalnya, melihat globalisasi budaya tidak sesederhana sebagai sebuah homogenisasi budaya sebagaimana diyakini para teoritikus perkembangan yang positivistik, tetapi di dalamnya terdapat proses seleksi, pertukaran, dan pengaruh yang rumit antarbudaya. Pengalaman sebuah kebudayaan berinteraksi dengan kebudayaan lain sudah pasti bersifat parsial. Jarang salah satu diantaranya mendominasi sepenuhnya dan dapat mengambil alih dan menggantikan kebudayaan yang dianggap subordinat itu.<sup>175</sup>

Kondisi ini mengingatkan kita pada teori Benedict Anderson tentang Indonesia sebagai “komunitas terangan” di awal tahun 1990-an. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara bangsa (*nation state*), melainkan negara dengan banyak bangsa. Artinya, imajinasi tentang kewarganegaraan, tentang nasionalisme, tidak terbangun di atas fondasi kultural yang kokoh, tetapi semata-mata berdasarkan klaim politis yang serba retak. Dengan kata lain, Indonesia adalah konsep yang mungkin terlampau ambisius sebuah konsep yang diangankan mampu merangkum kemajemukan ekspresi kebudayaan dari Sabang sampai Merauke dalam satu momen aktivitas berpikir. Istilah rekaan Adolf Bastian, seorang etnolog Jerman itu, mulai digugat secara terang-terangan. Cara sebagian rakyat Aceh dan Papua merayakan hari jadi mereka setiap bulan Desember adalah contohnya. Secara terang-terangan, mereka menyatakan dirinya bukan sebagai orang Indonesia. Sikap politik ini didasarkan atas identifikasi bahwa secara biologis rakyat papua misalnya adalah bangsa Papua, tergabung dalam rumpun Melanesia, ras Negroid, bukan seperti kebanyakan orang Indonesia yang berasal dari rumpun Melayu. Munculnya sikap politik seperti itu tentu tidak dapat dipisahkan dari politik kebudayaan penguasa Orde Baru yang haus akan keseragaman. Cara membangun identitas kolektif kebangsaan tidak didasarkan atas komunikasi mutual yang mengafirmasi kemajemukan, tetapi melalui proses eksklusi yang represif. Kemajemukan ekspresi kebudayaan, yang dihayati oleh lebih dari 500 suku bangsa dan diekspresikan melalui lebih dari 512 bahasa, tidak

<sup>175</sup> Alan Scott (ed.), *The Limits of Globalization*, 1997: 120

ditempatkan sebagai modal sosial, melainkan dicurigai sebagai bibit-bibit perpecahan.<sup>176</sup>

Tidak adanya kekuatan dominan yang berhak mengatur pergaulan antarbudaya, dalam hal ini kekuatan negara yang represif, merupakan peluang tersendiri jika disikapi secara tepat. Meminjam istilahnya Lyotard, Indonesia saat ini relatif terbebas dari bercokolnya “narasi besar” yang berwatak totaliter. Vakumnya konsep, ide, gagasan, yang berambisi atas tafsir dunia memberi peluang bagi tampilnya narasi-narasi kecil yang heterogen dan plural. Pluralisme kebudayaan ini idealnya dapat disikapi sebagai medan pertukaran simbolik yang produktif dan komplementer. Pada ranah praktis, tidak adanya kekuatan dominan juga memberi peluang bagi terjadinya persilangan kategori-kategori identitas ketika masing-masing pihak ditemukan dalam kepentingan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, *ingroup favoritism* dan *outgroup derogation* akan berkurang. Identitas sosial menjadi lebih mudah ditembus, sehingga memungkinkan terciptanya identitas hibrid. Identitas hibrid merupakan identitas baru yang terbentuk dari persilangan kategori-kategori tertentu yang didasari atas kesadaran untuk mencari simpul kerjasama yang mutual dalam ruang publik.<sup>177</sup>

Satu hal menarik dari persilangan kategori ini adalah akan melahirkan banyak titik singgung dari kategori-kategori sosial yang melekat pada individu atau kelompok. Persilangan ini tentu bukan sekedar persilangan atribut, tetapi juga melibatkan proses kognitif untuk saling mengenal dan memahami, sehingga potensi konflik dan kerentanan relasi sosial antar individu dan antar kelompok menjadi lebih kecil. Ketika individu menyandang banyak identitas, berarti dia memiliki dimensi sosial-psikologis yang banyak pula. Persilangan kategori berpotensi dapat meningkatkan rasa kesatuan dalam wadah identitas sosial yang baru, antara lain *pertama*, persilangan kategori memungkinkan individu berafiliasi dengan beberapa kelompok, sehingga dapat mereduksi loyalitas pada satu kelompok saja. Identifikasi ganda ini juga akan melahirkan loyalitas ganda. *Kedua*, persilangan kategori melahirkan kesadaran bahwa anggota *outgroup* juga bisa menjadi *fellow* sehingga sikap-sikap negatif terhadap *outgroup* akan

<sup>176</sup> Kompas, Sabtu, 27 Desember 2008

<sup>177</sup> *Ibid.*

berkurang. *Ketiga*, persilangan kategori memungkinkan interaksi antar individu dari kelompok yang berbeda menjadi semakin intensif, sehingga mobilitas lintas batas kelompok juga akan meningkat.<sup>178</sup>

Berangkat dari pemahaman bahwa setiap ekspresi kebudayaan memiliki nilai-nilai positifnya masing-masing, dan tidak ada superioritas satu budaya atas budaya lainnya, maka keragaman budaya seharusnya bisa menjadi modal sosial dan tidak mengarah pada proses saling mengeksklusi. Jika dicermati secara serius, tentu banyak sekali titik singgung diantara keragaman ekspresi kebudayaan di Indonesia jika kategori-kategori sosial yang dimilikinya dipersilangkan satu sama lain. Titik singgung tersebut merupakan modal utama bagi terciptanya dialog dan kerjasama multikultural yang berkeadilan. Cara merumuskan persatuan memang sepatutnya diawali dari mencari persamaan atas kategori-kategori tersebut, bukan malah membuat formulasi baru yang justru meluruhkannya, sebagaimana pernah dilakukan pemerintahan terdahulu.

Disisi lain, Teori identitas sosial (*social identity theory*) berpendapat bahwa gejala-gejala identitas sosial berbeda dengan gejala identitas pribadi. Identitas sosial berhubungan dengan perilaku kelompok yang berkaitan dengan motivasi dan artikulasi seseorang terhadap perilaku dan harapan-harapan masyarakat sekitarnya. Teori Identitas sosial juga berpendapat bahwa masyarakat itu terdiri atas berbagai kelompok yang satu sama lain memiliki pola hubungan dan kekuatan yang berbeda-beda. Seseorang pada suatu kelompok kemudian menilai dirinya dalam konsep, dan meletakkan dirinya dalam posisi-posisi tertentu yang memadukan antara harapan peran dirinya dalam masyarakat dan harapan masyarakat terhadap dirinya. Karena itu, seseorang boleh jadi memiliki identitas sosial yang beragam (*multi-faceted*) pada waktu yang sama karena beragamnya perannya dalam masyarakat, dan beragamnya harapan masyarakat di mana dia menjadi anggotanya, bahkan saling bertentangan satu sama lain. Akibatnya, seringkali seseorang atau suatu kelompok masyarakat tidak sanggup merumuskan identitas dirinya secara tepat, atau tidak sanggup memenuhi harapan perannya,

---

<sup>178</sup> Brown, R. & Gaertner, S. (eds.), *Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*, 2003: 321

atau memenuhi harapan masyarakatnya. Ketika hal ini terjadi, inilah yang disebut oleh sebagian ahli sebagai krisis identitas.

Biasanya pemahaman tentang teori identitas mengacu kepada perspektif interaksi-simbolik struktural (*structural symbolic-interactionism*) tentang perilaku pilihan peran (*role choice behavior*). Asumsi teori symbolic-interactionism mengatakan bahwa kehidupan manusia itu bukanlah sekedar kumpulan perbuatan yang merupakan reaksi terhadap lingkungannya, melainkan ia adalah aktor aktif dalam kehidupannya karena adanya pilihan-pilihan di hadapannya. Pada waktu yang sama, teori identitas juga mengakui adanya keterbatasan pilihan manusia itu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena adanya ikatan struktur sosial dan interaksi sosial.

Ada beberapa premis yang biasanya dipegangi oleh teori identitas. Pertama, bahwa manusia itu adalah aktor dan reaktor sekaligus. Kedua, bahwa tindakan manusia itu dibentuk oleh penafsiran dirinya tentang situasi interaksi yang sedang dihadapinya. Dan ketiga, bahwa penilaian seseorang terhadap dirinya (*self-conception*) merupakan titik pertemuan antara tindakannya dan interaksinya dengan sekitarnya. Perlu dicatat bahwa belakangan pemahaman sosiologi modern tentang masyarakat juga berkembang dengan menekankan langgengnya pola-pola interaksi dan hubungan dalam masyarakat yang kemudian menjadi inti dari struktur sosial. Pada gilirannya struktur sosial ini cenderung resisten terhadap perubahan dan cenderung mengulangi sifatnya itu, sehingga perilaku orang sebetulnya sangat ditentukan oleh struktur masyarakatnya itu dan bukan merupakan hasil pilihan-pilihan yang bebas sebagai aktor. Pemahaman ini membawa kita kepada pengertian lebih lanjut bahwa identitas sosial dan persepsi tentang krisis identitas sosial itu akan lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor luar dan lingkungan sosial yang mengitarinya.

Bagi penulis percaya bahwa proses komunikasi yang baik dalam setiap aktifitas kehidupan sehari-sehari akan membawa arah harmonisasi dan keseimbangan. Sehingga terhindar dari konflik dan bahkan dapat menyelesaikan konflik dalam katagori apapun. Rahardjo, 2005:67, mengatakan tujuan manusia berinteraksi melalui komunikasi memiliki berbagai alasan. Diantaranya, komunikasi dilakukan untuk mengabarkan kepada orang lain mengenai sesuatu,

untuk menghibur orang lain, untuk mengubah perilaku atau sikap seseorang, dan untuk menguatkan paran akan mengurangi kecemasan, karena individu-individu hanya akan sedikit mengalami ketidakpastian dalam interaksi berikutnya. Sebaliknya bila ekspektasi-ekspektasi tersebut tidak akurat atau meleset, maka individu-individu akan kehilangan kepercayaan.

## IX. FAKTOR-FAKTOR TRANSFORMASI KONFLIK ACEH

Dari hasil observasi, analisis dokumen, diskusi dan wawancara, diketahui bahwa pada dasarnya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan sekaligus kelemahan proses transformasi konflik Aceh dari perjuangan bersenjata ke perjuangan politik. Persoalan juga muncul dalam menafsirkan MoU Helsinki antara pihak RI dan GAM. *Pertama*, usaha demobilisasi dan pelucutan GAM dan penarikan pasukan non organik TNI dari Aceh diartikan berbeda oleh GAM dan pemerintah. Sesuai dengan MoU, GAM harus menanggalkan sayap militernya, selain itu pasukan non-organik TNI dan POLRI harus ditarik dari Aceh. Persoalan mengenai pelucutan dan demobilisasi telah berhasil diselesaikan melalui mediasi AMM yang beranggotakan pihak sipil dan militer dari Uni Eropas dan anggota ASEAN. Pada 21 Desember 2005 GAM menyerahkan 142 senjata terakhir guna memenuhi ketetapan 840 senjata sesuai dengan MoU. Pada 31 Desember 2005, dilakukan upacara penarikan akhir atas 7.628 tentara dan 2.150 polisi yang melengkapi total jumlah pasukan yang ditarik menjadi 31.681. profesionalisme dan ketidakberpihakan yang ditunjukkan oleh AMM dalam membantu penerapan kesepakatan damai telah menuai banyak pujian dari pemerintah Indonesia, GAM dan masyarakat luas.<sup>179</sup>

Persoalan *kedua*, reintegrasi mantan anggota GAM baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial merupakan tugas yang sulit. Beberapa faktor dalam persoalan ini adalah masalah pendanaan , kompensasi yang tidak transparan, kecemburuan

<sup>179</sup> The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement: How Far have We Come? (Jakarta: The World Bank, Desember 2006), hal 1-5, lihat juga Internasional Crisis Group Asia Briefing No.44, Aceh: So far, So good, Jakarta/Brussels, 13 Desember 2005, tentang peran dan keberhasilan AMM lihat Kirsten E.Schulze, Mission Not So Impossible: The AMM Transition from Conflict to Peace in Aceh, 2005-2006," Working Paper No. 131, S. Rajaratnam School of Internasional Studies, Singapore, 29 Juni 2007. lihat juga pandangan mantan ketua Aceh Monitoring Mission, Piter Feith, The Aceh Peace Process. Nothing Less Than Success," Special Report 184, United Institute of Peace, Maret 2007.

dari korban konflik Aceh terhadap GAM karena kompensasi yang diberikan oleh pemerintah, penerimaan GAM oleh masyarakat Aceh, dan keanggotaan GAM untuk memberikan daftar anggotanya kepada pemerintah yang didasari kepada ketakutan GAM akan kegagalan MoU yang berbuntut pada mudahnya TNI dan POLRI untuk mengetahui kekuatan dan lokasi GAM di Aceh. Hingga februari 2006, laporan Bank dunia menunjukkan sekitar 75% anggota GAM yang kembali kemasyarakat masih menganggur. Selain itu, berkembang ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kemajuan bantuan reintegrasi dan kemarahan terhadap pemerintah dan para pemimpin GAM, terutama dari mantan pemberontak bersenjata (*combatant*) tingkat rendah dikarenakan banyaknya pemimpin mereka yang telah banyak memiliki mobil baru dan bertelephon genggam sementara mereka jauh dari hal itu. Kurangnya dukungan bagi para mantan combatan merupakan masalah serius. Hal tersebut dapat berakibat pada peningkatan angka kriminalitas dikarenakan anggota GAM yang patah arang tersebut kembali kepada pencarian pendapatan "alternatif" sebelumnya.<sup>180</sup>

Persoalan *ketiga*, meskipun pemerintah mendirikan BRA yang terdiri atas pemerintah, LSM, intelektual, dan anggota GAM, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya dana, kewenangan yang terbatas, ketidakjelasan tugas kerja, dan program. Oleh karena itu LSM, intelektual manarik diri dari BRA. Persoalan *keempat*, percepatan reintegrasi GAM juga tergantung pada penerimaan masyarakat Aceh. Oleh karenanya di beberapa daerah di Aceh dilakukan upacara peusijek (penyejuk atau berdamai) oleh pemerintah dan masyarakat yang menyimpulkan adanya perdamaian. Hingga akhir 2006 terlihat tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat terhadap anggota GAM yang kembali. 90% anggota GAM tidak mengalami masalah ketika kembali dan hanya terdapat beberapa permasalahan kecil. Hal tersebut lebih karena mereka kembali kekampung asalnya dan bertemu dengan penduduk yang telah mereka kenal sebelumnya.<sup>181</sup>

<sup>180</sup> The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement.....," hal 3-4

<sup>181</sup> Detail lebih lanjut dapat dilihat pada World Bank, GAM Reintegration Need Assessment: Enhancing Peace Through Community-Level Programing, (Banda Aceh / Jakarta: World Bank/DSF, 2006).

Persoalan lain tentang reintegrasi anggota GAM yang tidak kalah pentingnya adalah 1) kurangnya penerimaan GAM oleh militer dan sebaliknya. 2) potensi konflik horizontal antara mantan GAM dan anggota milisi yang didirikan oleh militer. Masih terbukanya kemungkinan milisi menjadi pemicu konflik horizontal dimasa yang akan datang. 3) sekitar 75% mantan anggota aktif GAM berusi sekitar 18 sampai dengan 25 tahun. Bila anggota GAM yang berusia lebih tua dahulunya merupakan anggota berpendidikan yang terlibat dalam pemerintahan sipil GAM sedangkan kebanyakan anggota yang berusia muda kurang terdidik. Tidak mengherankan laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 75% mantan anggota GAM masih berstatus pengangguran.<sup>182</sup> Persoalan *kelima*, penerimaan MoU dan reintegrasi GAM tidak menyentuh aspek integrasi sikap dan psikologi secara utuh terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota GAM berpendapat jika proses perdamaian gagal, mereka akan memilih untuk kembali ke hutan dan hutan lagi.<sup>183</sup> Artinya, hal tersebut tergantung pada konsistensi dan kesungguhan pemerintah untuk mengintegrasikan anggota GAM kedalam RI dan kemampuan pemerintah baru di Aceh untuk memberikan kemakmuran ekonomi kepada mantan anggota GAM dan masyarakat Aceh secara luas. Hal ini bergantung pada anggota GAM untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan politik barunya dan menanggalkan tuntutan kemerdekaan.

Tabel. 4..9. Beberapa ketetapan pokok dalam kesepakatan Helsinki.<sup>184</sup>

POKOK PERSOALAN	KETERANGAN
Perdamaian Aceh	Aceh akan menjalankan kewenangan diseluruh urusan publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan negara, masalah moneter dan fiscal, kebebasan dan peradilan dan kebebasan beragama, dan kebijakan lain yang berada dalam kewenangan pemerintah Republik Indonesia.
Partisipasi Politik	a. Pemerintahan umum akan dilaksanakan pada bulan april 2006 untuk pilkada gubernur dan pejabat daerah terpilih lainnya, dan pada tahun 2006 untuk DPRD Aceh.

<sup>182</sup> Ibid. lihat juga Moch.Nurhasim, Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki;Peluang dan kendala”, makalah seminar yang tidak diterbitkan.

<sup>183</sup> Waspada Online, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id); 31 Agustus 2005

<sup>184</sup> Lihat MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM yang ditandatangani di Helsinki pada 15 Agustus 2006; lihat juga Michel Ranner, Aceh Peacemaking after Tsunami,” World watch Institute, diunduh dari <http://www.worldwatch.org/390/print>, h. 5.

	b. Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi pendirian partai politik lokal (dengan jalan mengamandemen UU Pemilu) dalam jangka waktu satu tahun atau selambat-lambatnya 18 bulan sesudah penandatanganan MoU.
Ekonomi	a. Aceh berhak melakukan pinjaman luar negeri Aceh berhak atas 70% dari pendapatan dari kekayaan alamnya. b. Aceh akan diberikan hak dan tidak dihalangi untuk membuka akses luar negeri melalui laut dan udara. c. Perwakilan GAM akan dilibatkan dalam BRR (Badan Reintegrasi dan Rekonsiliasi) Aceh pasca tsunami.
Penegakan hukum	Pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh anggota militer Aceh akan diadili dalam pengadilan sipil di Aceh.
HAM	Pengadilan HAM dan komisi kebenaran dan rekonsiliasi akan didirikan.
Amnesti	Anggota GAM akan diberikan amnesty dan tahanan politik akan dibebaskan
Keamanan	a. GAM akan membubarkan anggota bersenjata yang berjumlah 3000 dan menghancurkan 840 senjatanya antara 15 September dan 31 Desember 2005. b. Secara bersamaan pasukan militer dan polisi non-organik akan ditarik dan hanya 14.700 pasukan organik militer dan 9.100 anggota polisi organik yang tetap berada di Aceh.
Pengawasan	Uni Eropa dan anggota ASEAN akan berperan dalam Aceh Monitoring Mission (AMM). Tugas lembaga tersebut adalah mengawasi proses pelaksanaan HAM, demobilisasi, pelucutan senjata, dan kemajuan reintegrasi dan menengahi perselisihan.

Faktor lain adalah Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf-M. Nazar. Pilkada dimulai ketika DPR-RI dan pemerintah meratifikasi UU Pemerintahan Aceh (UU No.11/2006) pada 11 Juli 2006. Pilkada telah diselenggarakan diseluruh Aceh pada 11 Desember 2006 guna memilih gubernur, bupati dan walikota di Aceh. Pada pilkada gubernur terdapat 8 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pilkada gubernur pertama di Aceh itu dimenangkan oleh pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dengan perolehan suara sebesar 38,2%. Seorang pengamat politik menilai hasil dari pilkada tersebut sebagai kemenangan besar bagi demokrasi di Aceh.<sup>185</sup> Artinya masa depan Aceh berada ditangan pasangan tersebut. Jika Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar

<sup>185</sup> Liem Sie Liong "Resounding Victory for Democracy in Aceh, Tapol, Buletin, Januari 2007, lihat juga Liem Sie Liong, The Struggle for Peace and Democracy in Aceh, "Tapol Buletin, Agustus 2007. gambaran lengkap mengenai Pilkada di Aceh dan independent kandidat yang didukung GAM menang dalam Pilkada, Jakarta/Brussels, 29 November 2006, lihat juga Asis Group Briefing No.61, Indonesia: How GAM Won in Aceh, Jakarta/Brussels, 22 March 2007.



berhasil menciptakan perdamaian dan membangun perekonomian Aceh, artinya mantan pihak seteru pemerintah pusat itu mampu memerintah Aceh. Akan tetapi hal itu tergantung pada perubahan sikap Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dari seorang pemimpin pemberontak menjadi pejabat negara. Irwandi Yusuf terutama, harus mengubah kebiasaan sebelumnya sebagai panglima perang. Dengan kata lain, dia tidak dapat menggunakan kekuasaannya melalui paksaan kepada elit politik lainnya, khususnya anggota DPRD untuk mencapai tujuan politiknya. Dia harus merubah dirinya dari seorang panglima perang menjadi pejabat negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh. Masalah apapun yang timbul antara pemerintah pusat di Jakarta dan aktor politik di Aceh harus diselesaikan melalui resolusi konflik yang demokratis, bukan dengan cara kekerasan.

Mungkin akan muncul kesulitan bagi mantan pemberontak untuk menjadi administrator yang baik ketika ia menjabat dalam pemerintahan. Memimpin gerakan gerilya sangatlah berbeda dengan mengelola provinsi. Jika ia dan wakil gubernurnya gagal dalam mengembangkan perekonomian dan menjaga stabilitas keamanan, maka akan memunculkan masalah. Salah satu kemungkinannya adalah Aceh akan kembali ke situasi konflik. Apapun hasil pemerintahan Aceh dalam lima tahun mendatang, permasalahan di Aceh harus dipecahkan melalui demokrasi. Bila tidak Aceh akan berbalik arah dari demokrasi menjadi konflik bersenjata.

Di semua wawancara pasca-Pilkada, Irwandi mengatakan dengan jelas dia akan mengutamakan kesejahteraan masyarakat miskin di Aceh terutama petani dan nelayan, dan peningkatan pelayanan publik. Dia ingin membangun hubungan langsung antara Aceh dengan pasar dunia, tanpa melalui perantara dari Medan lagi. Target jangka menengah dan jangka panjang meliputi perbaikan fasilitas pelabuhan, pembangunan dan perbaikan jalan, memfasilitasi hubungan transportasi antara Aceh dan Malaysia, termasuk didalamnya penerbangan Banda Aceh-Kuala Lumpur, menghidupkan kembali perkebunan kelapa sawit yang terbengkalai, mengundang usaha *joint venture* dibidang agrobisnis.<sup>186</sup> Sejumlah bupati terpilih

<sup>186</sup> Sidney Jones, "Priorities for a GAM-led Government in Aceh, The Jakarta Post," Indonesia Outlook 2007: Politics and Social Welfare", dapat diakses pada [http://www.thejakartapost.com/Outlook/pool\\_109b.asp](http://www.thejakartapost.com/Outlook/pool_109b.asp).

juga akan mengutamakan pada program perbaikan taraf hidup masyarakat pedesaan dan akar rumput. Hal ini disebabkan antara lain dahulu akar pemberontakan adalah dari desa. Mereka berjanji meningkatkan perekonomian dan kemakmuran, layanan kesehatan, pembangunan jalan yang lebih baik dan irigasi, dan pengurangan pengangguran.<sup>187</sup> Namun masih menjadi pertanyaan bagaimana cara mereka mewujudkan tujuan tersebut.

Beberapa tantangan besar akan dihadapi oleh pejabat terpilih oleh mantan GAM. *Pertama*, seperti yang disampaikan oleh Sidney Jones, Direktur Proyek Asia Tenggara dari Internasional Crisis Group (ICG), salah satu tantangan besar bagi pejabat terpilih yang mantan GAM adalah mengatasi budaya korupsi, patronase dan kelambanan birokrasi.<sup>188</sup> Segala praktek buruk dimasa pemerintahan yang lalu kini telah menjadi praktek umum. Berdasarkan dua buah penelitian, satu oleh Bank Indonesia dan satu lagi oleh Universitas Padjadjaran, menyimpulkan bahwa akibat dari desentralisasi dan otonomi khusus adalah alih-alih menjadi provinsi terkaya, Aceh malah menjadi provinsi yang paling korup. Bahkan penelitian Bank Indonesia menegaskan persepsi umum Aceh adalah provinsi yang paling korup di Indonesia.<sup>189</sup> Memang korupsi, kolusi, nepotisme gaya baru telah menjadi praktik umum setelah tiga tahun penandatanganan MoU Helsinki. Laporan ICG menyatakan, pekerjaan dan kontrak kerja kini memihak kepada pemenang: kesetiaan kepada GAM telah menggantikan koneksi dengan pemerintah pusat ataupun komandan tentara setempat sebagai kunci bagi kesempatan politik atau usaha dan mantan komandan sayap bersenjata GAM, sekarang disebut Komite Peralihan Aceh (KPA), menjadi pemerintah bayangan, memainkan peran yang sama dengan militer pada masa lalu *vis-à-vis* pejabat sipil.<sup>190</sup>

<sup>187</sup> Edward Aspinal, *Guerillas in Power*, "Inside Indonesia," <http://insideindonesia.org/content/view/616/47>, h. 3.

<sup>188</sup> Sidney Jones, "Priorities for a GAM-led Government in Aceh, The Jakarta Post," *Indonesia Outlook 2007: Politics and Social Welfare*, dapat diakses pada <http://www.thejakartapost.com/Outlook/pool109b.asp>.

<sup>189</sup> Patrick Barron dan Samuel Clark, "Decentralizing Inequality? Center Periphery Relations, Local Governance, and Conflict in Aceh", *Social Development Papers, Conflict Prevention*, Paper No. 39/Desember 2006, h. 16-17.

<sup>190</sup> Crisis Group Asia Report No.139, *Aceh: Post Conflict Complications*, Jakarta/Brussels, 4 Oktober 2007, h. 1.

Sejauh ini, Gubernur terpilih mantan GAM, Irwandi Jusuf memang masih tetap populer dimata masyarakat, dan bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi dia juga disoroti karena sering bepergian keluar negeri dan Jakarta serta kurang memperhatikan perumusan dan penerapan kebijakan. Ditingkat provinsi dan banyak kabupaten, menarik investasi adalah prioritas bagi pejabat mantan GAM. Namun seperti kebanyakan dari mereka (seperti pejabat terdahulu yang dekat dengan Jakarta) persetujuan sebuah proyek lebih disebabkan oleh adanya keuntungan bagi pejabat pribadi dibandingkan keuntungan bagi rakyat.<sup>191</sup> Konsekuensi dari semua itu adalah peningkatan kapasitas pejabat dan birokrat ditingkat provinsi dan kabupaten, pengurangan korupsi di semua tingkat pemernitahan dan mantan komandan GAM, regulasi persaingan antara politisi GAM dan non-GAM dan persaingan antara pemimpin GAM dan KPA merupakan keharusan untuk melanjutkan perdamaian. *Kedua*, masyarakat Aceh juga risau dengan praktek kolusi antara eksekutif lokal dan legeslative di Aceh sebagaimana yang pernah terjadi dimasa lalu. Walaupun belum ada laporan mengenai praktek ini, sangat mungkin eksekutif mencoba membuat kesepakatan untuk melancarkan agenda pembangunan pemerintah daerah (Pemda).

*Ketiga*, persoalan peningkatan kapasitas pemimpin baru pemerintahan dan aparat Pemda. Dalam hal ini Pemda memiliki kapasitas yang rendah dalam mengelola pendapatan dan menerjemahkannya dalam sebuah hasil pembangunan yang nyata, seperti: perencanaan dan anggaran, akunting dan pelaporan, pelaksanaan audit oleh pihak eksternal, regulasi dan pengelolaan hutang publik dan investasi. Kebanyakan pejabat mantan GAM dan aparat Pemda tidak memiliki kapasitas perencanaan dan anggaran. Oleh karena itu, perencanaan dan anggaran yang efektif merupakan kunci agar keuntungan yang diperoleh dari MoU/LoGA dapat dikelola dengan konstruktif. Status otonomi khusus bagi provinsi Aceh berarti aparat pemda tidak hanya bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan pemerintah pusat tetapi juga perancangan dan pengimplementasian kebijakan yang diperlukan di daerah. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengalokasikan dana yang memadai ke tiap kabupaten; mengidentifikasi prioritas pembangunan jangka pendek-menengah-panjang dan menerjemahkannya

---

<sup>191</sup> Ibid

kedalam rancangan strategis; memahami dan menanggulangi kemiskinan; mengidentifikasi dan memperbaiki kesenjangan wilayah dan sektoral.<sup>192</sup>

*Keempat*, hubungan antara GAM dan TNI. Apakah TNI memiliki rencana cadangan (*contingency plant*) rahasia? Sejauh ini TNI bertindak profesional, walaupun masih ada jurang lebar kecurigaan antara TNI dan GAM. Namun masih terjadi kerisauan luas di Aceh mengenai operasi intelijen Indonesia yang melibatkan dukungan mantan “kelompok anti separatis” yang dianggap sebagai mendukung agenda nasionalis. Masyarakat Aceh juga risau apakah intelijen militer Indonesia memiliki rencana cadangan rahasia di tahun 2008 untuk menggagalkan GAM dari kemenangan dalam pemilihan anggota DPRA pada pemilu 2009. mereka juga risau dengan perilaku polisi dilapangan berkaitan dengan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Pasca penandatanganan MoU Helsinki, hanya ada dua insiden yang melibatkan GAM dan anggota TNI dalam paruh pertama September 2005 dan tidak ada insiden yang dilaporkan sejak AMM beroperasi secara penuh.<sup>193</sup> Namun begitu terdapat 7 insiden GAM-Pemerintah RI (yang termasuk pemerintah disini TNI dan POLRI) yang terjadi disekitar Oktober<sup>194</sup> dan lima insiden pada November. Selain itu terdapat dua insiden ketegangan yang dilaporkan pada bulan November, sedangkan konflik ditingkat lokal meningkat menjadi 75 insiden, peningkatan yang lebih dari 100% dari bulan Oktober.<sup>195</sup> Tahun 2005 berakhir dengan baik dengan hanya menimbulkan 2 insiden yang terjadi pada Desember, salah satunya melibatkan aparat (TNI dan POLRI).<sup>196</sup> Tahun 2006 diawali dengan catatan positif dengan tidak adanya konflik GAM-Pemerintah dibulan Januari, tetapi memasuki Februari terjadi sebuah insiden penting antara GAM dan Pemerintah RI yang dilaporkan terjadi di Blang Pidie, Aceh Barat Daya.<sup>197</sup>

Antara Maret hingga Mei 2006 tidak terjadi insiden antara GAM dan Pemerintah RI, namun tingkat konflik lokal terjadi fluktuasi mulai dari 77 insiden

<sup>192</sup> Barron and Samuel Clark, "Decentralizing Inequality? h. 15-16

<sup>193</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> September 2005, h. 1

<sup>194</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-31<sup>th</sup> Oktober 2005, h. 1

<sup>195</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> November 2005, h. 1

<sup>196</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-31<sup>th</sup> Desember 2005, h. 1

<sup>197</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-28<sup>th</sup> Februari 2006, h. 1

pada Februari, 68 pada Maret, 80 terjadi di April, dan 78 di bulan Mei.<sup>198</sup> Selang waktu Juni 2006-Maret 2007 terjadi hanya satu kali insiden GAM-Pemerintah RI yang dilaporkan terjadi pada Juni-Juli 2006.<sup>199</sup> Namun begitu rentang waktu April hingga Juli 2007, dilaporkan terjadi beberapa serangan granat misterius yang ada hubungannya dengan persaingan kekuasaan di antara mantan anggota GAM. Diredang waktu yang sama tingkat konflik lokal meningkat tajam mulai dari 23 insiden pada bulan April, pada Mei menjadi 107, pada bulan Juni dilaporkan 95 dengan 23 diantaranya termasuk insiden berdarah, 94 pada bulan Juli dengan insiden berdarah sebanyak 21 insiden. Kekhawatiran yang lebih besar patut ditujukan kepada korban jiwa terbesar sejak MoU, 12 korban jiwa. Walau tidak dilaporkan adanya insiden GAM-Pemerintah RI pada Juni-Juli, dilain pihak ada indikasi ketegangan dari dua pihak karena keinginan GAM untuk menggunakan Bendera GAM sebagai lambing mereka.<sup>200</sup> Jika kita memperhatikan data di atas, sejak April 2007 konflik politik khususnya yang terjadi diantara sesama GAM cukup mencemaskan. Guna menjaga keamanan di Aceh, penting kiranya Pemerintah Pusat dan Provinsi Aceh duduk bersama untuk mencari kemungkinan bentuk reformasi sektor keamanan, terutama reformasi kepolisian.

*Kelima*, dalam proses pembentukan partai lokal juga terbelahnya generasi GAM muda dengan generasi yang lebih tua semakin meruncing, dan persoalan tersebut akan berlangsung terus sampai dengan pemilu 2009 termasuk dalam parlement. *Keenam*, isu persoalan pelanggaran keadilan dan HAM yang telah dituntut oleh rakyat Aceh sejak sebelu era 1998. militer Indonesia telah berulang kali memperingatkan tidak akan menerima segala bentuk penyidikan pelanggaran HAM dimasa lalu dan menghimbau kepada semua pihak untuk lebih memperhatikan masa depan. Akan tetapi lembaga msasyarakat sipil dan penduduk Aceh selalu menyuarakan tuntutananya bahwa persoalan ini harus ditangani dengan semestinya demi menciptakan perdamaian dan keadilan di Aceh.

Proses perdamaian di Aceh masih akan menempuh jalan panjang. Jika perdamaian di Aceh tetap bertahan, maka pertama kalinya dalam sejarah

<sup>198</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update Maret to Mei 2006, h. 1

<sup>199</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1 Juni-31 Juli 2006 until 1-31 Maret 2007

<sup>200</sup> World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update April to July 2007, h. 1

Indonesia bahwa sebuah gerakan separatis diselesaikan dengan sebuah solusi politik yang komprehensif. Hal itu juga berarti pertama kalinya Pemerintah Indonesia menyetujui untuk menggunakan mediator asing dalam penyelesaian konflik. Pemerintah negara sahabat dan lembaga internasional juga telah banyak memberikan bantuan bagi terciptanya dan menjaga kondisi damai di Aceh. Perdamaian di Aceh dianggap oleh banyak pengamat internasional dan nasional sebagai tidak saja ujian bagi usaha internasional untuk menciptakan perdamaian di sebuah wilayah yang telah diguncang bencana, tetapi juga indikator kinerja Indonesia dalam melakukan transisi menuju demokrasi. Kini semuanya tergantung pada seluruh aktor politik Pemerintah Indonesia, TNI, POLRI, KPA, Pemda Provinsi, dan Kabupaten di Aceh, masyarakat sipil di Aceh dan di Indonesia secara luas untuk mempromosikan perdamaian abadi, keadilan dan demokrasi di Aceh. Transformasi mantan anggota GAM dari kombatan menjadi aktor politik yang berpartisipasi dalam pilkada sesungguhnya merupakan langkah politik pertama untuk mereintegrasikan GAM kedalam sistem politik Indonesia. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mantan gerilyawan yang berganti peran menjadi politisi tersebut menepati janjinya untuk memperlakukan semua pihak secara sejajar dan memberikan keuntungan ekonomi bagi seluruh masyarakat Aceh, bukan hanya anggotanya. Seluruh masyarakat Aceh telah merindukan perdamaian abadi, demokrasi dan tentunya keuntungan ekonomi dan politik setelah lebih dari 32 tahun hidup ditengah konflik.

#### **X. PROSPEK DAN KENDALA TRANSFORMASI KONFLIK ACEH**

Kendati HDC dianggap gagal, lembaga tersebut setidaknya memberikan pengalaman bahwa dialog dan pertemuan untuk membahas konflik yang mengakar di Aceh bukan sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Setidaknya HDC telah mampu membawa kedua belah pihak yang bersengketa untuk mau berdialog dan membangun rasa saling percaya. Poin keberhasilan HDC terletak pada kemampuannya mencairkan kebekuan antara pihak yang bertikai, membatasi dan memperlunak perbedaan pandangan tajam kedua belah pihak sehingga jeda kemanusiaan diperpanjang. Berbagai kegagalan yang mungkin pernah dilakukan HDC merupakan pelajaran berharga yang bisa diantisipasi oleh aktor resolusi konflik berikutnya seperti CMI.

Pengalaman dan sejarah itulah yang kemudian dipelajari secara mendalam oleh CMI ketika memfasilitasi perundingan damai RI-GAM. Seperti halnya HDC, CMI merupakan sebuah NGO internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik yang berlokasi di pusat kota Helsinki, Finlandia yang berdiri pada tahun 2000. Tujuan lembaga ini adalah membantu masyarakat internasional untuk keluar dari krisis internasional mulai dari isu kemanusiaan sampai dengan soal keamanan dan pembangunan. Lahan kerjanya tidak hanya di Eropa, tetapi juga sampai ke Afrika. Keuntungan dari CMI adalah ia memiliki Martti Ahtisaari sebagai Ketua dewan Direktur yang juga mantan Presiden Finlandia. Posisi Ahtisaari ini menjadikan CMI dapat bergerak tidak hanya di jalur *track two* atau *un-official diplomacy* yang lazim digunakan oleh NGO, tetapi juga, dengan pengalaman, pengaruh dan statusnya sebagai mantan presiden, ia mampu menembus dan memasuki *track one* atau *official diplomacy*. Keberhasilannya dalam merangkum dua jalan tersebut membuatnya bisa diterima baik oleh GAM maupun RI sebagai jalan tengah atas kemungkinan sulitnya PBB atau ASEAN untuk masuk ke wilayah konflik di Aceh sehingga netralitasnya dapat terjamin. Dengan pengalaman dan pengaruhnya, ia mampu menekan organisasi antar negara seperti Eropa dan Asean untuk terlibat dalam monitoring perdamaian. Ahtisaari sadar, titik paling sulit dalam persoalan damai konflik internal adalah masalah implementasi.

Implementasi menjadi sulit karena keengganan negara-negara besar untuk terlibat di dalamnya. CMI mulai memprakarsai perundingan damai di Aceh pada Januari 2005. berbagai pertemuan dan dialog informal telah berhasil membahas dan mempertemukan isu yang paling sensitif diantara RI-GAM. GAM bersedia menarik tuntutan merdeka dan menerima self government. Seiring dengan hal tersebut, kondisi di Aceh sendiri tingkat keamanannya mulai membaik dan pemerintah merubah status darurat sipil menjadi tertib sipil. Puncaknya, pada tanggal 15 Agustus 2005, disepakati nota kesepahaman perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki. Ada beberapa kesulitan dan kritikan terhadap MoU Helsinki, mulai dari proses dialog sampai dengan materinya. Dari proses dialog, mereka yang kontra mengkritik kebijakan tersebut mulai dianggap tertutup dan terkesan sangat eksklusif. Materi-materi yang dikandung juga dinilai kebablasan dan

banyak melanggar undang-undang yang berlaku, seperti masalah kewenangan untuk membentuk partai tunggal dan penentuan suku bunga tersendiri yang berbeda dengan bank sentral, serta ketentuan-ketentuan lain yang terkesan terlalu memberi ruang gerak yang terlalu bebas bagi GAM. Kesepakatan itu dianggap telah melampaui undang-undang otonomi khusus bahkan jauh lebih radikal di banding sistem negara federal sekalipun. Beberapa pihak, baik TNI maupun kelompok sipil diparlemen maupun non parlemen banyak yang menolak kesepakatan tersebut karena khawatir Aceh bernasib sama dengan Timor Timur, lepas dari pangkuan NKRI.

Terhadap pihak GAM sendiri ada keraguan apakah benar ia akan mematuhi atau tidak. Mendamaikan para pemimpin kelompok bertikai adalah mudah, yang sulit adalah mendamaikan para pengikutnya. Tidak ada jaminan kesepakatan elit tersebut akan dipatuhi pasukannya di lapangan. Ketika saat para pemimpin politik berjabat tangan menyepakati perjanjian damai, militer masing-masing pihak di tingkat lapangan tetap saling membunuh baik karena alasan ketidaktahuan maupun ketidaksetujuannya. Disamping itu, terdapat keraguan mengenai kepemimpinan Hasan Tiro. Benarkah ia masih mengontrol seluruh pasukan GAM di Aceh mengingat GAM saat ini telah berkembang dan terfragmentasi kedalam berbagai faksi. Hasan Tiro dan para pemimpin GAM lainnya bermukim di Swedia selama hampir dua dekade, sementara para pejuang GAM tinggal di Aceh. Perbedaan ini menjadi pertimbangan mengenai apakah GAM memiliki tingkat koherensi struktur organisasi yang tinggi atau tidak.

Meskipun para pemimpin militer GAM memiliki loyalitas tinggi terhadap para pemimpinnya di Stockhlom, ada keraguan para pemimpin di Swedia mampu mengontrol sayap-sayap militernya di lapangan. Selama terjadi konflik di Aceh, banyak terjadi tindakan kriminal yang mengatasnamakan GAM demi keuntungan pribadi, atau tidak adanya kepastian apakah sebuah eksiden dilakukan oleh GAM, TNI, Polisi, milisi atau kelompok-kelompok lainnya. Selain itu, antara Tiro dan orang-orang GAM di lapangan banyak memiliki perbedaan visi tentang hendak dibawa kemana jika Aceh berhasil merdeka. Tiro menginginkan negara sekuler, sementara sebagian orang di lapangan menginginkan negara Islam.



Terlepas dengan berbagai kelemahan atau kritik, dibanding dengan damai jilid pertama, damai Helsinki ini jauh prospektif. *Pertama*, dari faktor kepemimpinan. Dulu, inisiatif Gusdur untuk melibatkan HDC tidak mendapatkan dukungan penuh dari dalam negeri, terutama pihak militer-TNI yang secara tegas dan terus menerus mengeluarkan statemen menolak strategi penyelesaian Aceh melalui dialog dengan pihak GAM yang dianggap pemberontak. Bagi masyarakat internasional, kesepakatan tersebut dinilai sebuah langkah maju menuju perdamaian Aceh yang diwujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran bantuan dana internasional. Tetapi di dalam negeri, Pemerintah justru menuai kritik karena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengakuan resmi terhadap eksistensi GAM.<sup>201</sup>

Bagi TNI, tidak ada kompromi dengan pemberontak kecuali menyerah serta tunduk di bawah pemerintahan dan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi Gusdur memanfaatkan gejolak politik pemerintahan dalam negeri dimana TNI mendapat banyak tekanan sehingga untuk saat itu TNI lebih banyak bersifat defensive dan menerima keputusan pemerintah sipil. Hubungan antara Gusdur dan TNI dikenal tidak harmonis. Gusdur adalah sosok presiden sipil yang benar-benar menginginkan tentara mutlak patuh pada sipil, sementara kondisi transisi demokrasi di negara ini belum memungkinkan hal itu terjadi. Ketidaksukaan terhadap Gusdur semakin kuat karena campur tangan Gusdur yang terlalu dalam di internal TNI. Yang terpenting, pada saat HDC bertindak, tidak ada kondisi *ripe for resolution* atau *hurting stalemate* di Aceh sebagai langkah awal untuk memudahkan masuknya *entrypoint* negosiasi. Kondisi *hurting stalemate* dapat muncul manakala kelompok-kelompok yang bertikai menemukan jalan buntu dan menghadapi ancaman yang lebih besar di masa yang akan datang.<sup>202</sup>

Situasi tersebut sukar ditemukan dalam perang internal sebab biasanya setiap pihak tidak akan pernah mau bersedia untuk menyelesaikan pertentangan dengan perundingan karena adanya asumsi perang total. Karena itu, kondisi tersebut justru harus diciptakan atau dipaksakan oleh pihak ketiga. Untuk

<sup>201</sup> *Jakarta Post*, 18 Januari 2000

<sup>202</sup> Dean G. Pruitt. "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), h.246

menciptakan pematangan situasi *hurting stalemate*, pihak ketiga harus bekerja keras untuk mengubah persepsi, sikap, *value* dan perilaku kelompok-kelompok yang bertikai.<sup>203</sup> Ini karena pematangan situasi bukan sesuatu hal yang muncul secara otomatis tetapi harus dipercepat oleh pihak ketiga. HDC sebenarnya telah berupaya menciptakan kondisi tersebut tetapi gagal. Kali ini, kondisi *hurting stalemate* “dilahirkan” bukan karena faktor kesengajaan yaitu bencana tsunami. Tusnami, disatu sisi telah mengakibatkan duka Aceh yang semakin dalam. Ratusan ribu orang tewas dalam waktu sekejap. Tetapi di sisi lain, ia melahirkan hikmah.

Kondisi kemanusiaan Aceh sebelum tsunami juga tetap menarik perhatian masyarakat internasional. Di balik banyaknya donasi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, ada syarat perdamaian yang harus diciptakan agar dana tersebut cair. Itulah *entry point* dari pihak pemerintah. Kedua *entry point* itulah yang menjadikan dialog perdamaian dilakukan antara dua pihak yang telah lama saling bermusuhan. Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal status kepemimpinan. Jika dahulu Gusdur yang sipil murni gagal mempengaruhi TNI untuk mendukung damai, maka sekarang, SBY yang berlatar belakang militer mungkin lebih mampu untuk meyakinkan TNI agar mau mendukung kebijakannya. Bagaimanapun juga, TNI memiliki peran besar mengenai damai tidaknya Aceh. Sangat kecil kemungkinan TNI secara kelembagaan akan menentang kebijakan damai SBY karena tindakan tersebut dianggap merusak citra korps dan kohesivitas TNI. Tentu saja, selalu ada kompensasi ekonomi politik bagi siapapun, termasuk TNI, yang dirugikan dengan terciptanya perdamaian ini karena, misalnya, praktek bisnis kotor mereka yang selama ini memberikan keuntungan, menjadi terhenti. Agar implementasi kesepakatan damai Helsinki terlaksana, para praktisi resolusi konflik jangan hanya memfokuskan pada de-escalasi dan negosiasi, tapi juga pada *fairness* dan durabilitas dari kebijakan yang dihasilkannya. Keberhasilan implementasi damai di Aceh sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik.

<sup>203</sup> Fen Osler Hampson. “Third-Party Role in the Termination of Intercommunal Conflict”, *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.26, No.3 (1997), h.743

Agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para *policy makers*, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat harus mendukung, termasuk para pemimpin militer dan elit politik sipil di parlemen. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kemampuan institusi-institusi dalam menjaga kestabilan sistem pasca konflik.<sup>204</sup>

Agar upaya menuju damai lebih efektif, maka para *policy makers*, kaum elit yang mampu mempengaruhi berbagai kebijakan dan masyarakat harus mendukung.<sup>205</sup> Kendati MoU Helsinki ini nanti mengalami nasib yang sama seperti CoHA Swiss, tidak berarti jalan damai penyelesaian konflik di Aceh tertutup. Terlalu cepat untuk memvonis tertutupnya jalan damai bagi penyelesaian konflik yang telah terjadi selama puluhan tahun di Aceh. Selalu ada cara untuk menjembatani perbedaan melalui dialog dan terus belajar dari kesalahan. Ada baiknya jika kita merenungkan ucapan Henry VIII; “Untuk memulai perang, orang tidak perlu nasehat. Tetapi untuk menghentikannya tanpa kehilangan keuntungan dan harga diri, orang perlu belajar”

Beberapa potensi konflik yang bisa muncul; 1) Pembatasan-pembatasan politik kepada GAM dalam aktifitas politiknya dimana pemerintah sering melarang dan membatasi pemakaian simbol-simbol yang diindikasikan sebagai simbol GAM. Padahal pelarangan tersebut tidak tertulis secara jelas dalam aturan-aturan yang berlaku. 2) Ada upaya pemerintah untuk membangun dikotomi antara organisasi milisi (PETA) dan GAM dalam penerimaan jatah bantuan ekonomi dalam program reintegrasi. 3) Dalam praktek politik ditingkat bawah, KPA masih melakukan peran politik intimidasi dan agitasi-agitasi politik bersifat negatif dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan bersuara. 4) Sedikitnya jumlah uang yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap program reintegrasi membuat elemen KPA tidak bisa melakukan distribusi bantuan ekonomi kepada kalangan mereka secara adil dan berkecukupan. Konflik yang mungkin dapat muncul adalah perpecahan dalam tubuh KPA dan mantan kombatan menjadi tidak terorganisir dengan rapi sehingga

---

<sup>204</sup> J. Lewis Rasmussen. “Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors”, dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington, D.C., USIP, 1997, h.42

<sup>205</sup> Ibid., h.43

memberikan peluang terjadinya tindakan kriminal dalam masyarakat. 5) Peminggiran yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok korban konflik adalah sama seperti membakar api dalam sekam. 6) Dikotomi antar milisi dan KPA yang diperankan TNI akan membuat konflik horizontal dapat terjadi. 7) Arogansi perilaku politik dan bisnis yang diperankan GAM akan menuai dan menumpuk ketidak senang masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan Aceh.

Komite Peralihan Aceh (KPA) mengkritik implementasi MoU Helsinki antara GAM dan RI. Kritik disampaikan oleh Juru bicara KPA pusat, Ibrahim Syamsuddin dalam sebuah diskusi bertajuk, konsolidasi sipil untuk perdamaian Aceh yang berkeadilan.

"..beberapa butir dalam nota kesepahaman bersama itu masih belum terealisasi dengan baik. "Beberapa di antaranya telah dijalankan, tapi sebagian belum, butir yang belum terealisasi terkait pembebasan tahanan politik, partai politik lokal, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan pengadilan HAM. Sementara beberapa poin yang telah sukses dilaksanakan adalah Pilkada, pemusnahan senjata GAM, dan penarikan pasukan TNI/Polri nonorganik dari Aceh, terkadang, kita senang menandatangani, tapi sulit mengimplementasikannya, dulu GAM menentang NKRI, namun kini perdamaian telah tercapai dan tidak ada lagi peperangan. Itu semua masa lalu yang suram dan mesti dikubur dalam-dalam..."<sup>206</sup>

Pekerja kemanusiaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga mendesak pemerintah menjamin penyelesaian proses hukum kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan. Mereka khawatir kasus-kasus pelanggaran masa lalu terbengkalai karena tidak memiliki payung hukum yang pasti.

keluarga korban pelanggaran HAM khawatir penuntasan kasus tidak terpenuhi karena berdasarkan UU Pemerintahan Aceh dan UU Pengadilan HAM 26/2000, pengadilan HAM hanya berwenang mengadili pelanggaran yang terjadi setelah tahun 2006 (sesudah UUPA disahkan). Lalu bagaimana dengan korban kasus DOM (Daerah Operasi Militer), Simpang KKA (tragedi penembakan warga di simpangan PT Kertas Kraft Aceh) yang peristiwanya terjadi sebelum tahun 2006? Ini sama saja pemerintah melakukan amputasi terhadap (penyelesaian) pelanggaran HAM di Aceh."<sup>207</sup>

<sup>206</sup> Rakyataceh, KPA Kritik Implementasi MoU Helsinki 06 November 2007

<sup>207</sup> Hendra-kontras dalam Jumpa Pers di Banda Aceh, Tuntaskan Penyelesaian Pelanggaran HAM di Aceh, dikutip dari Vhrmedia.com 08 November 2007

Dalam pertemuan yang dihadiri 41 organisasi kemanusiaan dari 9 kabupaten di Aceh itu juga terungkap soal pentingnya pendampingan dan pemulihan yang memadai bagi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual selama terjadi konflik di wilayah tersebut. Mahyani dari Kabupaten Bener Meriah mengatakan, upaya pemenuhan keadilan dan hukum bagi korban pelecehan seksual dan pemerkosaan di Aceh akan nihil tanpa pendampingan dan pemulihan kondisi psikologis korban.

"Meskipun sudah banyak data dikeluarkan yang menunjukkan tingginya korban perempuan dibanding laki-laki, korban pemerkosaan tidak akan mengungkapkannya. Karena hal itu dianggap aib, kecuali disertai proses pendampingan."<sup>208</sup>

Mereka juga mengkritik rencana Pemprov NAD yang akan membentuk Qanun Pengadilan HAM. Menurut mereka, gagasan itu justru akan mempersulit penegakan HAM di Aceh, karena kekuatan qanun dikhawatirkan tidak dapat menjangkau pelaku pelanggaran HAM di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah lebih cermat dan teliti jika mengeluarkan kebijakan baru. Pemerintah juga didesak mempertimbangkan aspirasi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Selain itu, kasus Batu Lintang Aceh Tengah, juga telah mencoreng proses transformasi konflik dan damai Aceh. Kasus ini sampai memakan korban Jiwa, pembiaran aparat terhadap penyerangan dan pembakaran di Atu Lintang, Aceh Tengah, dikhawatirkan akan memperlebar konflik dan mengancam perdamaian di Aceh Tengah dan di tanah Aceh umumnya. Oleh karena itu, lewat pemantauan aktivis LSM di Aceh, Koordinator Kontras Usman Hamid menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut.

"Itu dilakukan oleh milisi atau preman, kita tak tahu. Begitu pun dengan motifnya, apakah karena penguasaan lahan terminal atau memang ingin mengganggu stabilitas perdamaian. Yang penting harus ada upaya dari Kepolisian, pemerintah Aceh, dan Komnas HAM, agar tabir di balik kejadian itu dapat terbuka dengan jelas, kami berharap polisi bisa bersikap independen dan profesional dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri di Indonesia. konflik yang tak terkelola secara dialog bisa melebar menjadi disintegrasi. Pihak KPA juga pihak yang merasa dirugikan untuk dapat

<sup>208</sup> Rakyat Aceh, Mahyani dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh dalam jumpa Pers di Banda Aceh, 06 November 2007

menahan emosinya demi kepentingan kelanggengan perdamaian di Aceh. Seluruh pihak agar tetap fokus mempertahankan perdamaian di wilayah Aceh di atas kepentingan politik dan ekonomi golongannya."<sup>209</sup>

"Kita minta Pemda NAD dan polisi untuk bertindak tegas guna menyelidiki dengan membuka tabir penyerangan, pembakaran dan pembunuhan tersebut, peristiwa penyerangan, pembunuhan dan pembakaran anggota dan kantor KPA di Atu Lintang, Aceh Tengah merupakan eksekusi dari pembiaran konflik horizontal yang telah berlangsung lama. Hal ini terjadi karena tidak adanya upaya serius untuk mendamaikan kelompok yang bertikai di sana. Ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan perdamaian Aceh pasca perjanjian di Helsinki, dari laporan KontraS Aceh selama ini memang adanya sinyalemen bahwa para pelaku penyerangan dan pembunuhan ini punya kaitan dengan milisi. "Tapi kita tidak ingin menyebutkan bahwa pelaku kejadian ini milisi atau bukan. Kecurigaan-kecurigaan terhadap KPA dan Milisi ini harus didialogkan, Irwandi Yusuf sebagai pemimpin di sana harus menyelesaikan itu, agar kasus kekerasan tidak menyebar ke wilayah lainnya, agar Komnas HAM melakukan investigasi kejadian pada tanggal 29 Februari 2008 itu. Pihak KPA maupun kelompok lainnya harus menahan diri demi kepentingan langgengnya perdamaian di Aceh."<sup>210</sup>

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Asiah Uzia, di Banda Aceh meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia diminta ikut serta menangani kasus tewasnya lima anggota Komite Peralihan Aceh Linge di Kantor KPA Merah Mege, Batu Lintang, Aceh Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam. Bantuan penyelidikan Komnas HAM diharapkan bisa membantu polisi mengungkap kasus yang terjadi Sabtu dini hari lalu itu sejemih mungkin. Selain karena adanya dugaan tindakan penganiayaan di luar batas perikemanusiaan terhadap para anggota KPA yang tewas, juga atas pertimbangan keikutsertaan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) diharapkan bisa meredam terjadinya konflik horizontal di wilayah itu. Konflik horizontal di sana sudah lama berlangsung. Hingga kini, bisa dikatakan, hal itu belum tertanggulangi, memang Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam sudah cukup memberi perhatian terhadap kasus kematian lima anggota KPA. Antara lain, dengan membentuk tim khusus untuk kasus tersebut.

<sup>209</sup>Sinarharapan.co.id, "Polisi Diminta Independen Dalam Kasus Atu Lintang", 05 Maret 2008

<sup>210</sup>Detik.com 03 Mar 2008, Pemda & Polda Nad Harus Tindak Tegas Pembunuh Anggota KPA

Mesti demikian butuh keberanian yang lebih dari polisi untuk menindaklanjuti temuan mereka. Sampai saat ini belum banyak yang terungkap.<sup>211</sup>

Kasus kekerasan sepanjang tahun 2007 sampai awal 2009 semakin panjang, ini adalah catatan panjang kasus kekerasan di Aceh pasca MoU. Kondisi kekerasan yang terus berlanjut di Aceh dikarenakan lemahnya kinerja Kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus yang terjadi sebelumnya. Baik pelaku, pola maupun motif tindakan kekerasan ini. Kepolisian terkesan melakukan pembiaran. Selain itu, dualisme wewenang pengelolaan keamanan di Aceh antara TNI dan Polri juga memberi ruang bagi in-efisiensi penjagaan keamanan di Aceh. Disisi lain pihak TNI terkesan lebih mendominasi ruang-ruang keamanan menjelang Pemilu 2009. Dalam salah satu media lokal di Aceh Danrem 011 Lilawangsa Eko Wiratmoko menyatakan bahwa TNI akan menyebar 5000 pasukan hingga ke desa-desa untuk membantu Polisi dalam mengamankan Pemilu 2009. Perlu dikritisi bahwa mekanisme perbantuan TNI kepada Polri harus melalui keputusan politik pusat karena melibatkan personel angkatan bersenjata (TNI). Jadi harus ada statement politik dari Departemen Pertahanan yang memerintahkan Panglima TNI untuk memberikan bantuan pasukan ke Kepolisian. Dan tentu saja harus melalui surat keputusan Presiden selaku pimpinan tertinggi angkatan bersenjata.

"Terlalu mahal harga yang dipertaruhkan." Itulah kalimat awal Korantempo dalam laporanya "merawat damai di Aceh". Damai, sebuah kata yang ajaib. "Dulu kami sungguh tak kenal kata itu. Kami cuma tahu konflik dan konflik," Cut Nyak Daud, 67 tahun, sesepuh masyarakat Lampuuk, Aceh Besar, Aceh. Kini telah dua tahun lebih usia perjanjian damai Helsinki, yang diteken pada 15 Agustus 2005. Inilah kesepakatan yang mengakhiri konflik berdarah tiga dekade antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kesepakatan yang antara lain dipicu oleh datangnya tsunami, 26 Desember 2004, bencana dahsyat yang menelan 170 ribu korban jiwa di Aceh.

Merawat perdamaian memang bukan perkara mudah. Membangun kepercayaan di antara semua lapisan masyarakat adalah agenda paling utama. Kerikil tajam pun bermunculan. Terjadi ketidakpuasan dan kesenjangan di kalangan para mantan kombatan GAM. Di masa damai, ada kombatan yang

---

<sup>211</sup> Kompas.com, Komnas HAM diminta ikut tangani kasus batu lintang, 5 Maret 2008

merasa terpinggirkan, tidak sedikit pula yang diuntungkan oleh banjir proyek pembangunan pasca-tsunami. Kecemburuan tidak jarang meledak dalam bentuk tindak kekerasan. Tindak kekerasan pun meningkat, seperti dilaporkan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), meningkat. Sepanjang 2007 terjadi 51 kasus tindak kekerasan. Meningkat hampir dua kali lipat dibanding 2006. Peningkatan kekerasan ini karena lemahnya kontrol para pihak dalam menjaga perdamaian. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pemerintah daerah, polisi, tentara, bahkan Komisi Peralihan Aceh (KPA) sebagai transformasi dari GAM. Proses penegakan hukum yang tidak fair dan masih diskriminatif juga masih terjadi.

Tidak kalah serius dengan penegakan hukum adalah membantu pemulihan luka di masa konflik. Inilah tugas Badan Reintegrasi Aceh Damai (BRA), yang dibentuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tidak lama setelah perjanjian Helsinki.

"Bukan tugas mudah, terutama karena proses verifikasi yang sama sekali tidak gampang, lain dengan tsunami yang baru terjadi tiga tahun lalu, konflik sudah puluhan tahun, saksi-saksi sering sulit dicari, problem rumit pun tak jarang muncul, umpamanya, seorang kombatan kita sebut si fulan memiliki empat identitas di empat kampung berbeda sebagai trik melindungi diri di masa konflik. Ternyata, si fulan juga punya istri di setiap kampung, setiap istri mengklaim layak mendapat santunan. Susah, kan?"<sup>212</sup>

Program BRA cukup banyak, antara lain memberi pengobatan kepada mereka yang terluka, memberi beasiswa anak-anak yatim, menyantuni janda, dan membangun rumah yang rusak atau terbakar di masa konflik. Sejauh ini sudah dibangun 6.000 unit, seperlima dari 34 ribu unit harus dibangun BRA. Anggaran yang dipatok Rp 35 juta per unit. Dengan sistem swakelola, pemilik rumah dipercaya membangun rumahnya sendiri dengan pengawasan BRA. Persoalannya, pengawasan BRA tidak cukup memadai. Di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah, misalnya, ada 1.700 unit rumah yang dibangun dengan biaya di bawah patokan BRA. "Cuma Rp 17 juta," kata Rahmad Gade, koordinator masyarakat korban konflik di Bener Meriah. Sisa anggaran, Rp 18 juta per unit, entah masuk ke kantong siapa. Ketimpangan itulah yang membuat 400-an penduduk korban konflik berdemonstrasi ke Banda Aceh. "Kami menuntut hak. Kami tak akan pulang sebelum hak kami dipenuhi," kata Sarijah, 60 tahun.

<sup>212</sup> SerambiIndonesia, Asmawati Hasan dari Badan Pelaksana BRA, 4 Februari 2009



"Ayam, kambing, sudah dijual supaya kami dapat ke Banda Aceh," katanya. Setelah lebih dari dua pekan berdemo, awal bulan ini akhirnya Rahman Gade, Sarijah, dan kawan-kawan kembali ke kampung. "Pak Gubernur menjanjikan penyelesaian segera untuk kami," kata Rahman. Sebuah janji yang, tak pelak lagi, wajib dijaga demi merawat perdamaian. Sepotong janji pulalah yang kini tengah ditunggu BRA. "Pemerintah pusat menjanjikan dana Rp 450 miliar turun awal tahun ini," kata Asmawati. Mudah-mudahan, dia melanjutkan, janji ini segera terwujud. "Masyarakat korban konflik sudah menunggu realisasi program yang kami janjikan."<sup>213</sup>

Dalam hal ini Aceh, harus dilihat kembali impian dan imajinasi sosial yang lenyap atau disenyapkan. Permasalahan terletak pada ketidaksadaran dan bukan hanya pada strategi komunikasi. Penguatan ini tentu saja mempertimbangkan faktor budaya dan sejarah lokal sebagai sumbu nyalanya. Masyarakat yang telah lama tertindas harus dikembalikan harga dirinya dengan membuka eksemplar sejarah dan kebudayaan yang pernah dimilikinya dahulu: bahwa mereka adalah keturunan pejuang yang melawan dengan gigih penjajahan kolonial asing. Mereka harus dikembalikan kesadarannya bahwa yang ditulis Paul van't Veer tentang "penaklukan paling berdarah dan paling lama" itu bukanlah cerita kosong. Sekaligus mereka harus dijauhi dari fiksasi subjektif bahwa menuntut hak bukanlah dosa. Dosa ketika membiarkan kebohongan berubah menjadi kebenaran. Dosa adalah melihat kezaliman berlaku seperti kesalehan, diulang-ulang dan dipuja di atas altar.<sup>214</sup>

Mengharapkan peran negara, yang langsung memiliki wajah demokratis dan etis dalam memperlakukan masyarakat, seperti melukis di atas air. Sampai sekarang di Aceh terbaca bahwa derita yang bertumpuk sekarang bukanlah akibat tsunami dan konflik itu sendiri, tapi setelah itu: proses yang salah dan tidak bermoral dalam menangani bencana dan korbannya. Negara sampai sekarang masih menjadi pemain paling licin agenda liberalisme dan kepentingan global. Salah satu yang memperkuat perannya ke arah itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi regulatornya, termasuk menjalankan peran *surveillance* dengan kekuatan

<sup>213</sup> Laporan Korantempo, tentang "Merawat Damai di Aceh" 12 Januari 2008

<sup>214</sup> Pendapat T. Kemal Fasya, dalam sebuah diskusi di Jakarta 2007

militer dan sipil. Di sini negara mesti memperhatikan diri sebagai bagian organisme yang mungkin berubah dan bukan hanya menjadi agen kepentingan internasional. Seperti yang dikatakan Pierre Bourdieu (dalam Bonnewitz, 1998) bahwa akibat modernisasi negara tak dipungkiri telah menjelma menjadi kelas bahkan budaya dominan. Eksistensinya sebagai budaya dominan telah mengalami proses legitimasi yang panjang. Namun, demi kebaikan dan lahirnya *habitus* demokrasi dari rahimnya, ia harus melupakan kesewenangan-wenangan yang ada pada saat kebudayaan itu dibangun. Legitimasi negara memang mengarahkan pada lahirnya sistem pengetahuan yang permanen dan cenderung stabil mengatur dan mengevaluasi dirinya. Namun dengan sebuah proses untuk membuka diri dan menyediakan partisipasi yang bebas dan menentukan antar seluruh unit sosial dan kekuasaan yang dimilikinya, negara tentu akan tertolong lebih sehat dan tidak mudah sakit. Masyarakat yang hidup dalam wilayahnya menjadi masyarakat yang kreatif dan berani mengemukakan pendapat untuk mengatasi persoalannya secara ilmiah dan "rasional". Harus disadari, makin lama peran negara di era post-modernisme akan makin sulit mendeteksi keinginan, impian, dan hasrat warganya yang makin tak terbatas dan tak terprediksikan. Keran untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan itu adalah jika hadir banyak ruang publik yang mengisi kekosongan dan mengingatkan kealpaan negara akan tindakan-tindakannya.<sup>215</sup>

Perdamaian kali ini menjadi lestari karena perangkat keras perdamaian, yaitu keamanan, mampu digaransi oleh kedua belah pihak. Letusan senjata dan kriminalitas mampu ditekan hingga titik minimal. Tanpa membesar-besarkan beberapa kasus kekerasan, penculikan, perampokan, dan penembakan dari sebaran senjata ilegal yang masih beredar, tingkat kriminalitas nyatanya turun dengan cepat di tengah masyarakat. Faktor keamanan di Aceh pun tumbuh karena intervensi ekonomi. Jika dibaca secara komprehensif, skenario perdamaian di Aceh berkait-kelindan dengan proyek rekonstruksi tsunami dan investasi pembangunan. Beberapa lembaga yang menangani korban konflik dan mantan kombatan, seperti Badan Reintegrasi/Damai Aceh (BRDA) dan Inter Peace Indonesia (IPI) yang dimotori oleh "jaringan Makassar" (JK connection) berlomba memperbesar volume anggaran perdamaian. Faktor terakhir yang memperkuat

---

<sup>215</sup> Ibid

proses perdamaian di Aceh adalah kesadaran komponen konflik melakukan transformasi politik, dari instrumen militerisme dan *clandestine* menuju gerakan politik terbuka-konstitusional. Demokratisasi Aceh tidak hanya terkanalisasi oleh satu kelompok saja (GAM/KPA), tetapi telah menyebar menjadi kekuatan-kekuatan politik baru yang sangat mungkin menolak agenda-agenda krisis dan kerawanan keamanan tumbuh pada masa depan. Mekarnya kekuatan sipil (akademisi, wartawan, dan LSM) dalam mengisi ruang publik dengan rencana-rencana peradaban dan pertumbuhan akan menutup jalan terjal menuju medan pertempuran.<sup>216</sup>

Berkaca pada proses penyelesaian konflik Aceh di Helsinki terlihat proses perdamaian masih menjejak pada keamanan sosial dan struktural, belum menjadi keamanan kultural. Misi penguatan perdamaian di Aceh masih mengarah kepada skenario global, di mana manajemen konflik dilakukan melalui liberalisasi politik dan marketisasi. Proses ini memang ditunjukkan dengan terbentuknya beragam regulasi dan struktur-struktur politik yang mencacah residu konflik dan kekerasan sekaligus masuknya industri investasi. Namun, proses ini belum menjadi keyakinan dan kemampuan bagi seluruh masyarakat. Pilkada dan transformasi politik GAM telah berlangsung, tetapi kesejahteraan dan kenyamanan masih jauh dari pandangan rakyat kecil.

Disisi lain belum redupnya isu pemekaran provinsi Aceh Leuseur Antara (ALA) dari wilayah publik. Peredaan wacana pemekaran akan efektif jika pemerintahan Aceh mampu memberi janji dengan bukti serta membebaskan isolasi masyarakat pedalaman dengan pembangunan dan partisipasi. Selain juga memberi kesempatan kekuasaan dan pendidikan bagi putra-putra terbaik Gayo, Alas, Tamiang, Singkil, Aneuk Jamee, dan Simeulue sebagai suku minoritas di Aceh. Keran keamanan pasti bocor jika setiap individu tidak dipercaya mempertahankan perdamaian. Tanggung jawab perdamaian Aceh tidak hanya di tangan elite, tetapi seluruh aktor yang peduli. Manisnya buah perdamaian bukan hanya bernutrisi bagi masyarakat Aceh, tetapi juga Indonesia.<sup>217</sup> Perdamaian di Aceh tidak boleh dilihat sebagai keniscayaan. Ketegangan sosial dan politik besar

<sup>216</sup> Teuku Kemal Fasya, "Antara Keamanan dan Perdamaian Aceh", dikirim melalui email penulis, Jumat, 29 Agustus 2008.

<sup>217</sup> Ibid

masih terjadi, dan sebagaimana insiden Batu Lintang memperlihatkan, tidak begitu sulit dan susah usaha untuk membuat percikan api menjadi api besar. Namun secara keseluruhan tingkat kekerasan sudah rendah, dan sebagian besar insiden tidak berlangsung secara besar seperti dari konflik sebelumnya antara GAM dan Indonesia. Meskipun demikian, banyak masalah ke depan, terutama jika kepentingan politik di Jakarta melihat keuntungan yang bisa didapat dari campur tangan di Aceh, seperti isu ALA-ABAS. Perilaku yang tidak baik yang masih berlanjut di pihak anggota KPA dapat membuka jalan bagi campur tangan tersebut. Namun, isu reintegrasi yang menyulitkan juga perlu diperhatikan. Selama tingkat pengangguran eks-kombatan masih tinggi, program reintegrasi akan tetap tidak dapat berjalan, dan kekecewaan berkembang atas persepsi jurang pemisah yang kuat antara si kaya dan si miskin, potensi bagi persoalan keamanan masih tetap tinggi.<sup>218</sup>

Menjajakan perdamaian tidaklah mudah. Kehadiran orang ketiga hanya akan bermanfaat jika ada kemauan diri untuk mempromosikan perdamaian sebagai persembahan terakhir di altar kemanusiaan. Bukan hanya pihak yang bertikai, namun seluruh komponen bangsa yang punya kebersihan hati untuk menghentikan pertengkaran dan memberlakukan kebudayaan santun dan beradab. Tantangan ini menjadi berat, karena memang secara tradisi hal ini belum tumbuh dalam spirit berbangsa kita. Namun, bukan tidak mungkin memaksakan sesuatu yang bermanfaat bagi kesembuhan luka dan sejarah. Rekonsiliasi dan transformasi konflik adalah cara terakhir sebelum ide perdamaian permanen dalam tindakan sosial dan dalam pengetahuan negara dan masyarakat. Arti pentingnya rekonsiliasi akan terjawab jika pemerintah mau mengupayakan terbentuknya komisi rekonsiliasi yang mengatur cara menyembuhkan “luka-luka” (*scars*) di diri korban dan menghilangkan ingatan *stereotype* di diri pelaku (negara) terhadap korban. Kita harus menyadari keterbatasan potensi manusiawi korban (*victims*) dan pelaku kejahatan (*perpetrators*), namun hal itu bukan cara untuk menyingkirkan kebenaran yang mengarah perdamaian. Tujuan perdamaian adalah mengingat

---

<sup>218</sup> Sidney Jones, Menjaga perdamaian keamanan di Aceh di akses, <http://www.c-r.org/our-work/accord/aceh/bahasa/security.php>

untuk melupakan (*remember to forget*) kejahatan yang pernah sangat liar menghantam bukan terhadap pihak bertikai, tetapi yang lebih nyata dan luas, di diri rakyat Aceh. Harus dibangun sebuah prasasti dalam ingatan bahwa kekerasan adalah masa lalu yang perlu ditinggalkan (*memory to forgetfulness*). Agresivisme patriotis seperti yang masih terlihat dari demonstrasi di Jakarta yang menolak perdamaian Helsinki harus diganti dengan komitmen untuk setara; hasrat untuk tidak saling mendominasi dan mencurangi. Tanpa persaudaraan, nasionalisme tetap akan pecah, meskipun seluruh GAM telah tertawan dan terlucuti senjatanya.<sup>219</sup>

---

<sup>219</sup> Kesimpulan hasil diskusi dan wawancara informal di Jakarta akhir Juli 2007 dengan Indra J. Piliang dan T. Kemal Fasya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Dari hasil analisa data dan pembahasan dalam Bab. IV, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan antara lain:

1). Bahwa proses transformasi konflik Aceh tidak terlepas dari upaya keharmonisan hidup umat manusia di Indonesia yang multikultur, multietnisitas dan identitas. Dalam Proses transformasi konflik Aceh tersebut, didapati bahwa manusia yang memiliki sifat-sifat individual dan sosial, selalu sangat ditentukan oleh bagaimana setiap individu, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mampu menempatkan kepentingan individualnya secara tepat, seimbang dan tidak berlebihan serta sebanding dengan keharusan mempertimbangkan kepentingan komunitas-komunitas lain. Artinya, ketika seseorang berada di tengah orang-orang lain (ingroup maupun outgroup) dalam upaya transformasi konflik, baik secara sadar maupun tidak sadar, semua ucapan dan tindakannya selalu berlangsung bersama segala simbol dan substansinya, yang secara kolektif mencirikan sifat dan tanda keberadaannya. Dengan demikian, sifat dan ciri yang dimiliki bersama itu berlangsung proses identifikasi diri, bersama interpretasi dan interaksi seseorang sebagai anggota dari suatu komunitas masyarakat, dalam menanggapi dan bertindak, dimana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang secara kolektif menjadi pengikat dan pemersatu. Disisi lain karakter yang merupakan sifat-sifat atau watak-watak yang secara historis dimiliki para individu suatu komunitas baik Aceh maupun non Aceh. Sifat dan watak ini, pada awalnya tidak terbentuk begitu saja, tetapi merupakan hasil yang terbentuk setelah adanya pertimbangan-pertimbangan dan proses-proses rasionalitas. Ini semua lantas membentuk semacam basic personality structure yang terwariskan secara transgenerasional.

Dengan adanya konsep pemahaman sifat dan watak individual dan komunitas ke Acehan seperti itulah, menuntut para pihak untuk berkenan memberikan pertimbangan, pengertian dan penghargannya. Karena ini merupakan hasil konstruksi sosial alamiah, yang boleh jadi juga rasional, adalah salah satu

faktor penting yang perlu dimiliki dan dihayati lebih dulu, ketika suatu konstruksi kehidupan bersama secara berdampingan dari berbagai etnis-bangsa dibangun. Namun, disadari ada berbagai kesulitan yang dimiliki para pihak untuk membayangkannya dan sekaligus bersedia mempertimbangkan. Khususnya ketika para *outsiders* merasa memiliki kekuasaan, dimana ia kemudian berkeinginan membangun hegemoni atas keberadaan komunitas Aceh yang ingin dikuasai.

Karakter yang menjadi identitas budaya etnis/bangsa Aceh mesti ditelusuri implikasinya terhadap penciptaan suasana kehidupan bermasyarakat, tentu akan memperlihatkan suatu hubungan timbal-balik dan kausalitas yang amat dekat dan potensial, baik bagi membangun masyarakat yang damai ataupun sebaliknya yang merusak perdamaian. Sikap keras yang muncul dalam sikap-sikap yang militan dan ekstrim - *ni bak siget, leubeh got roe, ni bak puteh mata leubeh got puteh tuleung, meuyokanapakat lampoh jrat ta peugala, Ureung Aceh menyoka teupeuh bou leubeuh han geupeutaba* dll, yang jika dihubungkan dengan cara-cara menyelesaikan konflik yang sering muncul dalam masyarakat, tentu saja kekerasan kemudian cenderung digunakan dalam upaya menyelesaikan pertikaian. Ini tentu saja besar pengaruhnya bagi rusaknya suasana hidup yang aman dan damai. Demikian pula, karakter budaya yang suka berterus-terang, atau blak-blakan yang terkadang dapat pula membuat situasi menjadi tegang dan bermusuhan. Akan tetapi, dalam budaya Aceh, sebenarnya juga telah ada suatu mekanisme penyelesaian konflik dengan menggunakan kearifan lokal sebagai jalan penyelesaiannya. Dengan metoda ini, kebijakan lokal menggunakan mekanisme pengakuan bersalah dan pembayaran kompensasi sebagai jalan untuk meniadakan permusuhan yang berkelanjutan antara para pihak yang bertikai. Terlihat disini, bahwa di satu pihak terdapat budaya kekerasan dalam masyarakat, namun di pihak lain terdapat kearifan lokal yang coba menengahi pertikaian masyarakat yang secara tradisional telah diterima masyarakat tempo dulu sebagai suatu *dispute settlement*. Pemahaman bahwa Aceh sejak zaman imprealis hingga kini, Aceh telah menjadi laboratorium politik, sosial, budaya dan hukum yang menarik peneliti internasional sudah mulai tumbuh antara para pihak sehingga proses transformasi berjalan walaupun masih banyak mendapat hambatan. Faktor pemahaman pola interaksi, identitas keAcehan sosial budaya, sejarah, politik dan

komunikasi baik secara individu, masyarakat maupun bangsa secara konprehensi menentukan keberhasilan transformasi konflik. Para aktor konflik GAM-RI, pihak ketiga-*Crisis Management Initiative* (ICM) termasuk *peace builders* yang terlibat di Aceh mulai memahami akan pentingnya pemahaman terhadap hal tersebut tersebut.

2). Bahwa dalam persoalan proses transformasi konflik di Aceh dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik terutama bagi Gerakan Aceh Merdeka -GAM Pasca MoU Helsinki yang sudah berlangsung hampir empat tahun, rupanya bukan hanya komunitas mantan kombatan GAM, tapi juga warga Aceh secara keseluruhan mesti dilibatkan secara proaktif. Proses tranformasi konflik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi sumber-sumber konflik sosial, budaya dan politik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif dari peperangan menjadi kekuatan sosial budaya dan politik yang positif. Transformasi konflik di Aceh sebenarnya bukan hal baru yang muncul tiba-tiba. Namun sudah berlangsung sepanjang sejarah Aceh. Sampai kemudian transformasi konflik antara RI-GAM yang ditandai berhentinya perang bersenjata menuju perang politik. Konflik antara RI-GAM yang berlangsung hampir 30 tahun bukan juga hanya ditentukan faktor relasi-komunikasi atau dialog yang dibangun sejak pemerintah Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono-M.Yusuf Kalla. Namun jauh sebelumnya konsepsi transformasi dan relasi-komunikasi konflik secara dialektik sudah tertanam dan terbangun di Aceh sebalum Indonesia ada. Proses transformasi ini disadari atau tidak akan terus berlangsung sepanjang manusia hidup. 3). Proses transformasi konflik Aceh, berjalan setahap demi setahap atau fase demi fase, perundingan demi perundingan yang dilakukan, adalah bagian dari tahapan transformasi ini. Laga senjata berubah menjadi adu argument, hutan belantara, berubah menjadi hamparan meja perundingan. Komunikasi emosional menjadi rasional, lawan menjadi kawan, egois menjadi humanis. Dalam konteks ini, budaya, politik, negosiasi, komunikasi dengan diplomasi secara santun menjadi taruhan yang tidak mungkin dinafikan.

4). Diketahui bahwa komunikasi sebagai instrument interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan



masyarakat. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian proses transformasi damai di Aceh juga sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi para aktor yang terlibat. bahwa suatu masyarakat Aceh adalah upaya pembangunan dunianya. Ia merupakan hasil dari proyek manusia membangun dunianya, suatu *enterprise of world building*. Memberikan pengertian bahwa dunia (lingkungan sosial-kultural, komunikasi, termasuk politik) Aceh merupakan hasil konstruksi pemikiran dan aktivitas masyarakat manusia. Semua realitas konflik dan transformasi konflik dikonstruksi oleh masyarakat manusia secara dialektika. Dalam hal ini komunikasi bisa disebut sebagai proses budaya yang ada dalam masyarakat. Komunikasi sebagai proses budaya tak bisa dipungkiri menjadi obyektivasi antara budaya dengan komunikasi. Proses ini meliputi peran dan pengaruh komunikasi dalam proses budaya Aceh. Komunikasi adalah proses budaya karena di dalamnya ada proses seperti layaknya sebuah proses kebudayaan, punya wujud dan isi serta kompleks keseluruhan. Sesuatu dikatakan komunikasi jika ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kebudayaan juga hanya bisa disebut kebudayaan jika ada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya yang membentuk sebuah sistem. Dalam hubungannya dengan proses sosial di Aceh, komunikasi menjadi sebuah cara dalam melakukan perubahan sosial (*social change*). Komunikasi berperan menjembatani perbedaan dalam masyarakat baik masyarakat Aceh sendiri maupun non Aceh karena mampu merekatkan kembali sistem sosial masyarakat dalam usahanya melakukan perubahan. Namun begitu, komunikasi juga tak akan lepas dari konteks sosialnya. Artinya ia akan diwarnai oleh sikap, perilaku, pola, norma, pranata masyarakatnya. Jadi keduanya saling mempengaruhi dan saling melengkapi, seperti halnya hubungan antara manusia dengan masyarakat. Bahwa memahami kehidupan sosial sebagai proses interaksi. Komunikasi (interaksi) merupakan sarana kita belajar berperilaku. Komunikasi merupakan perekat masyarakat. Masyarakat tidak akan ada tanpa komunikasi. Struktur sosial-struktur sosial diciptakan dan ditopang melalui interaksi. Bahasa yang dipakai dalam komunikasi adalah untuk menciptakan struktur-struktur sosial.

Proses penyelesaian konflik dan transformasi konflik Aceh terutama dalam membangun kepercayaan dengan para aktor konflik, dapat dikatakan, untuk mencapai yang disebut *trust building* merupakan suatu proses yang amat penting sebagai sebuah bagian dari komunikasi sosial, budaya dan politik dengan para pihak. Bahwa melalui komunikasi sosial, politik dan budaya, atau komunikasi personal, dapat dipetakan tuntutan politik para pihak yang terlibat dalam konflik, respon dan pemikirannya terhadap sejumlah langkah yang pernah ditempuh sebelumnya. sikap politiknya, dan harapan-harapannya. Komunikasi yang efektif tersebut yang membuat masing-masing pihak saling memahami pemikiran dan solusi yang sangat berguna untuk adanya kepercayaan.

5). Ketika proses transformasi konflik Aceh ini dikaji dengan pendekatan atau perspektif konstuksionisme, dalam hal ini dapat dikatakan Aceh sebuah identitas yang dikonstruksikan secara sengaja dalam situasi konflik. Konstruksi ini kemudian digunakan sebagai instrumen untuk mengambil keuntungan dalam konflik. Konflik Aceh sebenarnya tidak lebih hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang dikembangkan oleh teori konstruksionis. Konflik sebagai bahasa budaya dan politik, alat untuk mencapai tujuan. Sementara itu realitas identitas komunal dikonstruksikan sedemikian rupa untuk dijadikan faktor konflik. Dalam setiap konflik Aceh selalu ada istilah: provokator, aktor intelektual, atau juga disebut "entrepeneur politik". Antara komunikasi, budaya dan politik memiliki hubungan yang erat dan istimewa karena berada dalam kawasan budaya dan politik dengan menempatkan komunikasi pada posisi yang sangat fundamental. Artinya tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, saling pengertian sehingga tidak ada budaya dan politik.

Proses transformasi ini senantiasa menggunakan sarana komunikasi. Maka perspektif komunikasi apapun dapat digunakan dalam proses transformasi konflik. Namun, komunikasi dalam kontek budaya dan politik menjadi dominan dalam proses transformasi konflik Aceh. 6). Titik penting penyelesaian konflik dan transformasi konflik Aceh adalah ketika pemerintah menandatangani Kesepakatan Damai yang dikenal dengan Memorandum of Understanding Helsinki antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia pada 15 Agustus 2005. Dengan kesepakatan damai ini, secara resmi rakyat Aceh yang bergabung

dalam Gerakan Aceh Merdeka sepakat untuk menyimpan senjata mereka dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam kerangka negara kesatuan Indonesia. Meski kesepakatan damai telah ditandatangani, berbagai bentuk konflik dan tembak menembak antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan TNI masih berlangsung secara sporadis. Aceh belum sepenuhnya menjadi daerah terbuka bagi orang luar, bahkan sampai bencana tsunami kemudian terjadi pada Desember 2005.

7). Proses transformasi konflik Aceh, juga ditandai oleh beberapa hal, antara lain. *Pertama*, mereka telah melakukan proses *decommissioning* sebanyak lebih dari 840 pucuk senjata. *Kedua*, mereka membubarkan sayap militer dan membentuk sebuah organisasi sipil untuk menampung mantan petempur yang diberi nama Komite Peralihan Aceh (KPA). KPA dibentuk untuk menjaga kendali dan sebagai sumber atau data informasi tentang mantan kombatan GAM. Pengurusnya terdiri atas panglima-panglima GAM dari tingkat kecamatan sampai provinsi. Menurut dari beberapa narasumber dari unsur GAM, KPA merupakan wadah bagi mantan kombatan agar mereka tidak merasa seperti anak ayam kehilangan induknya. Melalui wadah ini dimaksudkan agar mantan GAM atau kombatan tetap dalam kendali. Dalam konteks reintegrasi, data yang diberikan KPA sangat membantu dalam menginformasikan orang-orang mantan GAM yang perlu mendapatkan santunan. Dengan melihat posisi KPA dalam struktur organisasi sosial di Aceh, jelas bahwa KPA ini lebih mengutamakan kepentingan para mantan GAM atau kombatan. Demikian juga dalam kaitannya dengan proses reintegrasi, KPA menempatkan diri sebagai informan atau narasumber penting personil mantan GAM atau kombatan yang harus mendapatkan dana dari BRA. *Ketiga*, BRA menjadi wadah reintegrasi mantan kombatan Gam, Tapol/Napol dan korban konflik. *Keempat*, GAM secara terbuka terlibat dan berpartisipasi dalam proses politik (pilkada) di Aceh pada tahun 2006 lalu. *Kelima*, GAM telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi partai politik lokal di Aceh dengan nama Partai Aceh (PA). *Keenam*, GAM secara terbuka terlibat dan berpartisipasi dalam proses Pemilu 2009 di Aceh.

8). Selain itu, beberapa momentum penting sebagai fase atau tahapan baru dalam transformasi konflik Aceh, dapat disimpulkan, antara lain. *Pertama*

pengalaman yang mengakar terhadap Aceh, konflik Aceh dan pengalaman penyelesaian konflik Aceh sepanjang sejarah. *Kedua* adalah gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004. Pasca musibah di luar dugaan tersebut semua orang berharap bahwa ini babak baru membangun Aceh. Setiap orang atau kelompok yang selama ini terlibat dalam konflik dan pengelolaan pembangunan Aceh sadar dan kembali berfikir untuk sepenuhnya mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh. *Ketiga*, ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) Damai di Helsinki tepatnya pada 15 Agustus 2005 antara kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) menjadi tempat menggantungkan masa depan rakyat Aceh. Bahwa setelah perjanjian damai ini tidak ada lagi perang, bumi Serambi Mekkah menjadi aman, rakyat bebas melakukan berbagai aktifitas tanpa ada ancaman dan teror. Nafas persengketaan dan permusuhan yang telah berakar lebih dari 30 tahun di Aceh mulai berhenti. Ia tergantikan dengan angin perubahan yang jauh lebih signifikan dan makin melegakan. Simpul penting transformasi konflik menuju proses damai yang lebih stabil dan berkelanjutan telah dilalui.

*Keempat*, reintegrasi adalah sebuah proses yang kompleks yang meliputi transisi ekonomi, politik, sosial dan psikologi dari kehidupan militer kedalam kehidupan sipil. Kompleksnya cakupan transisi tersebut menyebabkan reintegrasi, berupa proses untuk menjadi sipil sepenuhnya, menjadi proses yang membutuhkan waktu lama. *Reintegrasi ekonomi* adalah proses yang memberikan para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi kemandirian keuangan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup diri mereka dan orang-orang yang menjadi tanggungannya melalui kegiatan produksi atau pekerjaan dengan penghasilan yang memadai. Reintegrasi ekonomi seringkali sulit untuk dicapai di masyarakat yang kondisi ekonominya kurang baik. *Reintegrasi politik* adalah proses yang memberikan jalan bagi para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi untuk memperoleh kesempatan ikut serta dalam kehidupan politik komunitasnya, seperti menjadi anggota atau pengurus organisasi sipil dan sebagainya. *Reintegrasi social* adalah proses yang mendorong para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi dan keluarga mereka menyadari bahwa diri

mereka adalah bagian dan diterima oleh komunitas dimana mereka tinggal dan masyarakat secara lebih luas. Sikap komunitas terhadap mantan kombatan ini biasanya dipengaruhi oleh persepsi terhadap peran historis yang dijalankan oleh mantan kombatan sebelumnya. *Reintegrasi psikologis* adalah proses dimana para kombatan yang telah berhenti atau didemobilisasi melakukan penyesuaian diri dari gaya hidup militer, yang secara umum teratur secara hirarkis mengikuti garis komando dan pengawasan, ke dalam kehidupan yang lebih fleksibel ala warga sipil.<sup>1</sup> Perbedaan antara aspek politik dan aspek sosial-ekonomi diatas tidak sepenuhnya bersifat *exhaustive*, karena jelas bahwa keberhasilan dalam reintegrasi social-ekonomi akan berpengaruh pada proses politik. Demikian pula sebaliknya, karena semua proses pada dasarnya adalah budaya dan politik, dimana tidak ada satupun keputusan menyangkut pendanaan, pengawasan, dan sebagainya dari proses reintegrasi yang terlepas dari konteks dan konsekuensi politik. Perbedaan antara aspek politik dan aspek lain dari reintegrasi semata-mata disebabkan dual hal. Pertama, pembedaan tersebut ditujukan guna memberikan penekanan pada reintegrasi politik sebagai bagian mendasar (*essential part*) dari proses perdamaian yang menyeluruh. Kedua, pembedaan juga dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa reintegrasi social-ekonomi tidak dapat dipahami semata-mata dalam terminologi teknis, melainkan terkait dengan aspek politik.

*Kelima*, cahaya perdamaian itu makin bersinar ketika pilkada yang berlangsung 11 Desember 2006 paling demokratis telah mampu memberi ruang baru bagi sirkulasi kekuasaan di Aceh. Pilkada desember 2006 pun melahirkan pemimpin yang beragam, mulai dari kelompok yang selama ini terbuang dari siklus kekuasaan (*outsider*) hingga masyarakat sipil yang dianggap berprestasi untuk menjaga momentum membangun Aceh. Kemenangan calon independen dalam pilkada lalu menunjukkan besarnya keinginan dari masyarakat sipil Aceh untuk menyongsong perubahan politik pemerintahan dan mengharapkan adanya visi pembangunan yang lebih mengakar pada kepentingan masyarakat luas dan korban dari kebijakan pro-Jakarta di masa lalu. Irwandi Yusuf, di dampingi Muhammad Nazar sebagai wakilnya, terpilih melalui jalur independen, diharapkan benar-benar independen dalam memimpin Aceh. Para pemimpin yang

---

<sup>1</sup> *Ibid.*

terpilih dapat dikatakan sebagai representasi terbaik keinginan rakyat. Proses pemilihan yang nyaman dan belum pernah dialami bumi Iskandar Muda ini bahkan Indonesia sejak pemilu 1955, menggehirkan semua pihak: Jakarta, para stakeholders rehabilitasi dan rekonstruksi, kelompok sipil demokratis, dan akar rumput. Anggapan bahwa Pilkada Aceh 2006 lalu akan 'berdarah-darah', terbantahkan dengan realitas yang menyejukkan. Pilkada 2006 juga dapat diukur dari dua hal. Pertama, kedamaian prosesnya. Kedua, penerimaan atas siapapun yang kalah atau yang menang. Ketika tokoh dari GAM/KPA menang, kunci suksesnya bukanlah terletak pada kemenangan *an sich*, melainkan bagaimana menjalankan pemerintahan. Daya dukung publik akan dengan cepat menurun, apabila pemerintahan yang dijalankan tidak memenuhi harapan publik, terutama dalam kepiawaian sebagai seorang administrator dan birokrat, pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Pilkada 2006 di Aceh dianggap paling demokratis yang berlangsung damai. Proses ini telah menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta politik lokal. Kemenangan rakyat ini dapat dijadikan barometer yang jelas sejauh mana komitmen pemimpin Aceh dalam mengimplementasikan semua program, visi, misi tentang arah kebijakan Aceh yang telah dijanjikan pada saat kampanye guna membangun kerja-kerja positif dalam percepatan pembangunan Aceh pasca Tsunami dan konflik bersenjata. Pilkada ini menjadi tahapan tempat rakyat Aceh menggantungkan harapan dan cita-cita.

Momentum *keenam*, lahirnya partai politik lokal, enam partai lokal yang lolos verifikasi faktual KPU pusat dan Partai Nasional akan bertarung di Aceh. Parlok sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat Aceh diharapkan dapat membawa Aceh ke arah yang lebih baik, mandiri dan modern. Partai Aceh mampu membangun pencitraan diri dalam konteks ke Aceh. Hal tersebut sangat tergantung pada landasan ideologis, strategi-taktik, dan program-program yang diusung. Di samping itu, juga memiliki kemampuan menerjemahkan kondisi objektif keAcehan. Dalam konteks keAcehan dan sistem politik nasional, bagaimana membangun kanal politik secara nasional, karena arah proses perdamaian abadi masih sangat bergantung oleh konstelasi politik di nasional. Partai politik lokal hanya menjangkau saluran aspirasi masyarakat di tingkatan

DPRA dan DPRK. Keberadaan parlok telah mewarnai konstelasi politik Aceh dan bagaimana pemerintahan nasional menghadapi pemerintahan Aceh pasca-pemilu. Nota Kesepahaman (MoU) ataupun UU No. 11/2006 adalah bagian dari kebijakan politik nasional, sekalipun dorongan dan masukan dari unsur-unsur masyarakat Aceh juga tidak bisa diabaikan dan signifikan. Masa depan Aceh akan tercermin dari sukses atau tidaknya serta hasil pemilu legislatif Aceh 2009. Eksistensi parpol lokal di Aceh memang tidak menjadi perdebatan yuridis lagi ketika UU No 11/2006 (UU Pemerintahan Aceh) dan PP No 20/2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh telah mengamanatkannya. Kehadirannya juga merupakan bagian dari *road map to peace process* di Aceh seperti yang tertuang dalam kesepakatan Helsinki, 15 Agustus 2005. Pemilu 2009 merupakan arena pembuktian kekuatan bagi parlok dan alat ukur seberapa kuat parnas masih bisa bertahan untuk merebut kursi-kursi di DPRA dan DPRK-DPRK di Aceh. Dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 pemilu 2009 menjadi lain, kepesertaan kontestan partai politik lokal membawa nuansa baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran parpol lokal menjadi titian penting bagi proses transisi politik Aceh. Beberapa kemajuan dalam tahapan perdamaian dan rekonstruksi memang memberikan nilai yang mampu memperpendek jaring transisi. Namun, tanpa kehadiran perjuangan politik masyarakat melalui parpol tetap terasa hampa. Kehadiran parpol lokal juga cermin bahwa proses berpolitik melalui jalur kepartaian yang terjadi selama ini (melalui parpol nasional) tidak berjalan dengan sehat. Tentu saja konflik militer telah menyebabkan kemampuan melakukan partisipasi politik secara bebas tidak tercapai meskipun secara formal terdapat partai politik, parlemen, dan pemilu. Saat ini terlihat banyak aktivis parpol nasional dan mantan pejabat yang memilih bergabung dan membentuk parpol lokal dibandingkan memperkuat parpol nasional yang telah mapan. Kesempatan yang dapat mengakhiri transisi politik dan menguncinya dalam situasi yang lebih permanen untuk berdemokrasi. Parpol lokal dibingkai bukan oleh kekhasan ideologis yang berbeda dengan parpol nasional, tetapi oleh kompetensi kewilayahan. Parpol lokal hanya memiliki kesempatan untuk melakukan kontestasi politik di Aceh. Meskipun demikian, tentu tidak mungkin mengabaikan moral historis parpol lokal sebagai perpanjangan jiwa kepentingan rakyat Aceh yang lama berada dalam era

ketertindasan. Ada aspek psikologis dan sosiobiologis masyarakat Aceh yang berbeda dengan masyarakat lain, terutama karena Aceh pernah dicap bertahun-tahun sebagai tanah pemberontakan. Berhadapan dengan situasi ini, parpol lokal yang hadir juga harus mampu menjadi representasi organik dari keinginan masyarakat Aceh.

Ada dua tantangan yang dihadapi dalam usaha mereka merubah diri menjadi partai politik. Pertama, menyangkut dengan konsolidasi di tingkat elit komunitas tersebut dalam menghadapi perubahan situasi politik, termasuk menanggalkan ideologi lama dan membangun ideologi baru. Pergesekan dan persaingan intra elit biasanya tidak bisa dihindari karena perbedaan persepsi atau kepentingan. Relasi elit sipil-militer dalam tubuh gerakan itu juga berpotensi menjadi tantangan yang sensitif. Kedua, berkaitan dengan strategi untuk mendapat dukungan dan basis massa. Diketahui bahwa kelompok bersenjata adalah gerilyawan yang mendapat dukungan logistik dari rakyat ketika peperangan berlangsung. Tanpa dukungan rakyat, kelompok tersebut biasanya akan tamat, atau berubah menjadi kelompok kriminal yang melakukan pemerasan. Ketika mereka merubah dirinya menjadi partai politik, kondisinya sangat berbeda. Arena politik berbeda dengan arena tempur bersenjata. Politik memerlukan keahlian untuk bernegosiasi dan keahlian untuk membujuk masyarakat supaya setuju dengan program politik partai.

*Ketujuh,* Keberhasilan Partai lokal yaitu Partai Aceh (PA) bentukan mantan kombatan GAM meraih lebih dari 40% suara pemilih di seluruh Aceh dalam pemilu legeslatif 2009, dapat dikatakan keberhasilannya menguasai parlemen di Aceh juga keberhasilan transformasi politik. Keberhasilan mantan GAM dalam Pilkada 2006 dan Pemilu legeslatif 2009 mencerminkan kuatnya mesin politik yang diperankan oleh mantan GAM. Hal ini juga akan berpengaruh pada penentuan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilpres Juli 2009 terutama bagi rakyat Aceh. Sepertinya kemana arah penentuan pilihan KPA-PA kesitu pula arah pilihan rakyat Aceh dalam Pilpres 2009, ini menjadi momentum *kedelapan* bagi rakyat Aceh dalam menyelesaikan proses transformasi konfliknya.

9). Diketahui juga bahwa masih ada situasi dan kondisi Aceh yang masih rawan terhadap konflik dan dapat mengganggu proses transformasi yang sedang

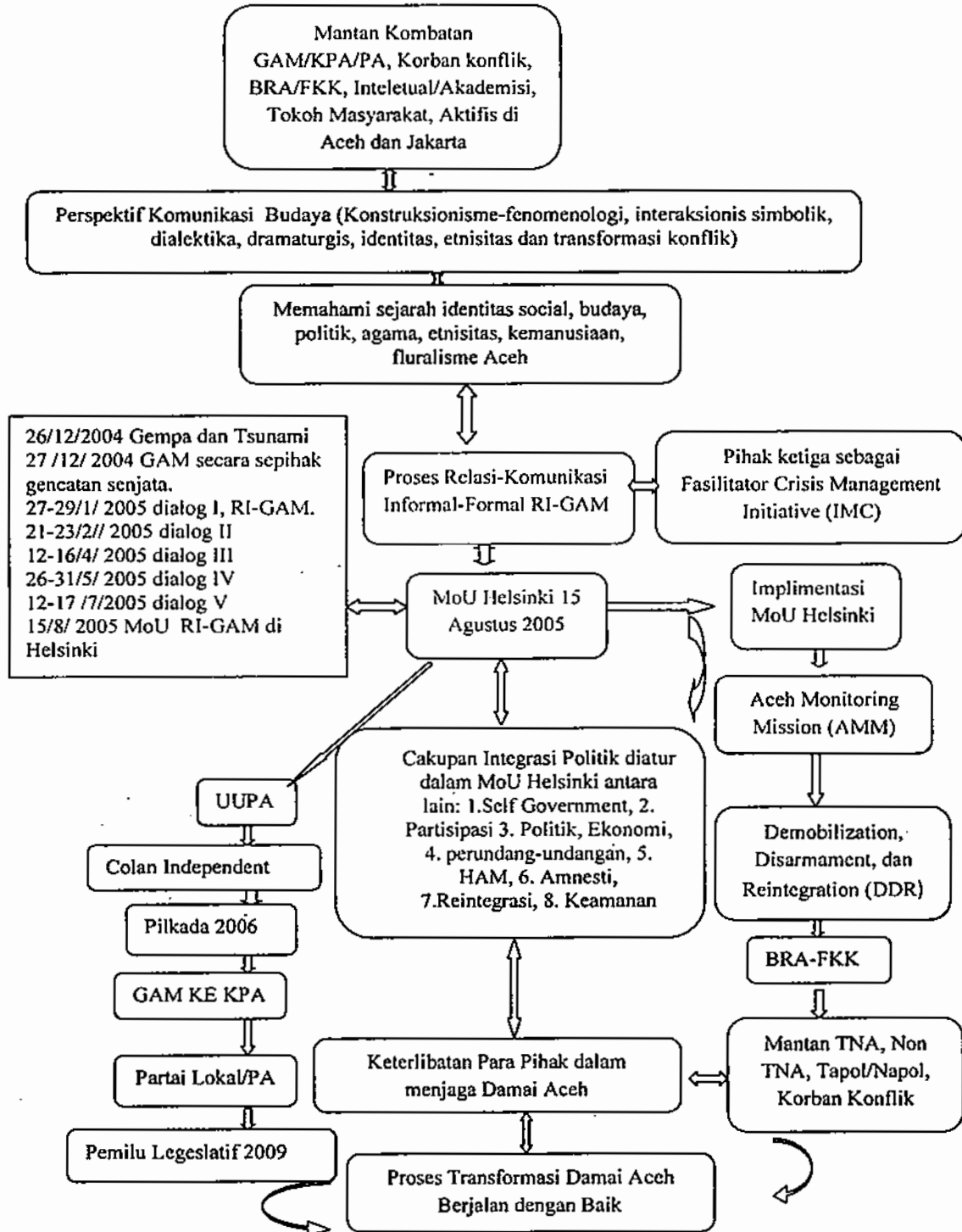


berjalan. Kekisruhan situasi ini bersumber pada empat masalah. *Pertama*, tingkat rasa saling percaya (mutual trust) antara stakeholders perdamaian di Aceh terus melorot, sementara rasa permusuhan (hostilities) dan kecurigaan bergerak naik. *Kedua*, forum komunikasi politik, budaya dan keamanan tampaknya terlalu lemah dan tidak mampu menjadi tempat dialog antara militer dan kelompok mantan GAM, antara elite politik Aceh dan berbagai spektrum elite politik Jakarta, serta antarberbagai komponen masyarakat Aceh sendiri. *Ketiga*, setiap saat kekerasan dapat meledak; terutama saat TNI dan mantan anggota GAM (atau oknum-oknum di dalamnya) tidak tunduk pada supremasi hukum atau terpancing untuk berkonfrontasi. Potensi kekerasan lain bisa muncul dari berbagai kelompok milisi dan faksi-faksi internal GAM yang kecewa terhadap perkembangan organisasi dan perjuangan mereka. *Keempat*, masih ada perbedaan pandangan antara Aceh dan Jakarta (dan antar berbagai elemen kedua pihak) tentang platform penyelesaian komprehensif masalah Aceh. Titik tengkar utama adalah penafsiran "pemerintahan sendiri" (self government) yang telah disepakati dalam MOU Helsinki, tetapi tidak secara memadai diatur dalam UU Pemerintahan Aceh. Kubu mantan GAM berjuang untuk memenangi pemilu (menguasai parlemen lokal) sebagai jalan untuk implementasi pemerintahan sendiri sesuai dengan tafsiran mereka. Sebaliknya, elite Politik Jakarta mencurigai Partai Aceh akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan lewat jalur politik melalui parlemen lokal dengan dalih penentuan nasib sendiri.

10). Perdamaian kali ini menjadi lestari karena perangkat keras perdamaian, yaitu keamanan, mampu digaransi oleh kedua belah pihak. Letusan senjata dan kriminalitas mampu ditekan hingga titik minimal. Tanpa membesarkan beberapa kasus kekerasan, penculikan, perampokan, dan penembakan dari sebaran senjata ilegal yang masih beredar, tingkat kriminalitas nyatanya turun dengan cepat di tengah masyarakat. Faktor keamanan di Aceh pun tumbuh karena intervensi ekonomi. Jika dibaca secara komprehensif, skenario perdamaian di Aceh berkait-kelindan dengan proyek rekonstruksi tsunami dan investasi pembangunan. Beberapa lembaga yang menangani korban konflik dan mantan kombatan, seperti Badan Reintegrasi/Damai Aceh (BRDA) dan Inter Peace Indonesia (IPI) yang dimotori oleh "jaringan Makassar" (JK connection) berlomba

memperbesar volume anggaran perdamaian. Faktor terakhir yang memperkuat proses perdamaian di Aceh adalah kesadaran komponen konflik melakukan transformasi politik, dari instrumen militerisme dan *clandestine* menuju gerakan politik terbuka-konstitusional. Persoalan juga muncul dalam menafsirkan MoU Helsinki antara pihak RI dan GAM. Perdamaian di Aceh tidak boleh dilihat sebagai keniscayaan. Ketegangan sosial dan politik besar masih terjadi, dan sebagaimana insiden Batu Lintang memperlihatkan, tidak begitu sulit dan susah usaha untuk membuat percikan api menjadi api besar. Namun secara keseluruhan tingkat kekerasan sudah rendah, dan sebagian besar insiden tidak berlangsung secara besar seperti dari konflik sebelumnya antara GAM dan Indonesia. Meskipun demikian, banyak masalah ke depan, terutama jika kepentingan politik di Jakarta melihat keuntungan yang bisa didapat dari campur tangan di Aceh, seperti isu ALA-ABAS. Perilaku yang tidak baik yang masih berlanjut di pihak anggota KPA dapat membuka jalan bagi campur tangan tersebut. Namun, isu reintegrasi yang menyulitkan juga perlu diperhatikan. Selama tingkat pengangguran mantan kombatan masih tinggi, proses transformasi akan tetap tidak dapat berjalan dengan baik, dan kekecewaan berkembang atas persepsi jurang pemisah yang kuat antara si kaya dan si miskin, potensi bagi persoalan keamanan masih tetap tinggi.

Gambar 5.1 Kesimpulan konstruksi realitas proses transformasi konflik di Aceh.



## 5.2. REKOMENDASI

1. Komunikasi sebagai instrument interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap-sikap tertentu dalam proses transformasi konflik Aceh, untuk mengetahui keberadaan secara individu dan komunitas dalam menciptakan keseimbangan transformasi konflik Aceh. Pemahaman pola interaksi, identitas, social budaya, politik dan komunikasi baik secara individu, masyarakat Aceh mesti diawali oleh pemahaman sejarahnya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian proses transformasi damai di Aceh sangat ditentukan oleh kemampuan komunikasi para aktor yang terlibat. Artinya dalam proses transformasi konflik Aceh, faktor pemahaman terhadap sejarah identitas dan etnisitas keacehan secara konprehensi menentukan keberhasilannya.
2. Implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara kedua belah pihak yang sebelumnya bertikai yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia (RI) yang menjadi tempat menggantungkan masa depan Aceh, masih menyisakan banyak masalah dilapangan. Untuk itu para pihak sama-sama berperan aktif dalam implementasi MoU Helsinki. Dapat dipastikan proses transformasi konflik Aceh dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik mesti melibatkan semua pihak atau stakeholders seperti pemerintah pusat-daerah, intelektual/akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, media massa, aktifis, LSM/NGO, BRA/FKK, KPA maupun dunia Internasional
3. Badan Reintegrasi Aceh atau BRA lebih memfokuskan diri pada tugas serta peran awalnya, seperti diamanatkan butir 3.2 nota kesepahaman Helsinki tentang tahap reintegrasi. Reintegrasi mantan anggota GAM baik dari aspek politik, ekonomi dan sosial merupakan tugas yang sulit. Meskipun pemerintah mendirikan BRA yang terdiri atas pemerintah, LSM, intelektual, dan mantan GAM, lembaga ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya dana, kewenangan yang terbatas, ketidakjelasan tugas kerja, dan program. Percepatan reintegrasi mantan

GAM, mantan Tapol/Napol sangat tergantung pada penerimaan masyarakat Aceh.

4. KPA yang telah melebur menjadi Partai Lokal yaitu Partai Aceh (PA), melalui wadah ini dimaksudkan agar mantan GAM tetap dalam kendali. Dengan melihat posisi KPA-PA dalam struktur organisasi sosial di Aceh, jelas bahwa KPA-PA ini lebih mengutamakan kepentingan para mantan kombatan GAM. Dalam perkembangannya KPA cenderung memperluas cakupan perannya dengan menggantikan posisi dan peran lembaga-lembaga non-formal seperti ulama, tokoh adat, keuchik, mukim. Kecenderungan memperluas cakupan kerja KPA ini dapat menimbulkan persoalan baru dalam masyarakat Aceh. Karena itu akan melumpuhkan tugas utama para ulama, tokoh adat, keuchik, dan mukim. Oleh karena itu, diperlukan penelitian khusus tentang peran dan fungsi KPA walaupun telah melebur menjadi partai politik lokal, untuk memberikan solusi atas peran KPA-PA yang proporsional dalam konteks reintegrasi.
5. Bagaimana Partai Aceh mengambil semangat perjuangan dari berbagai belahan dunia, ini menjadi program partai dalam menggariskan agenda-agenda pembelaan rakyat. Dengan demikian Partai Aceh akan benar-benar menjadi partai rakyat yang menjunjung tinggi kedaulatan dan kebebasan rakyat. Partai Aceh perlu membuka diri kepada semua elemen untuk menjelaskan visi, misi dan program partai secara terbuka. Sehingga Partai Aceh akan benar-benar menjadi satu partai alternatif bagi perjuangan rakyat Aceh. Yang lebih penting Partai Aceh harus menjadi partai yang siap mempertaruhkan segala sesuatu untuk membebaskan rakyat Aceh dari segala penindasan, kebodohan dan penderitaan. Bukan sebaliknya Partai Aceh hanya perlu kepada rakyat pada saat berlangsungnya pemilihan umum. Setelah wakil partai Aceh mendapat kekuasaan, mereka lupa kepada nasib rakyat yang telah memberi amanah perjuangan. Mereka telah menjadi gila kuasa. Partai Aceh (PA) mesti harus melakukan konsolidasi internal dalam memperkuat kesolidan mereka dalam memperjuangkan hak rakyat serta mengatur agenda-agenda taktis dalam mengimplementasikan

penyempurnaan MoU dan review UUPA PA juga harus melakukan konsolidasi yang intens dengan para Legislator Aceh DPR RI asal Aceh, karena mereka memiliki peran penting untuk memperjuangkan dilevel nasional dengan jumlah kuota 13 orang. Bahwa analisis strategis peluang Capres-cawapres kalangan PA-KPA mutlak diperlukan demi kepentingan masa depan Aceh. Kekuatan PA terbukti kuat di Aceh, jadi jangan salah membawa rakyat Aceh, rakyat mesti cerdas dalam menentukan pilihan.

6. Kurangnya penerimaan GAM oleh militer dan sebaliknya, potensi konflik horizontal antara mantan GAM dan anggota milisi yang didirikan oleh militer. Masih terbukanya kemungkinan milisi menjadi pemicu konflik horizontal dimasa yang akan datang bila mantan GAM yang berusia lebih tua dahulunya merupakan anggota berpendidikan yang terlibat dalam pemerintahan sipil GAM sedangkan kebanyakan anggota yang berusia muda kurang terdidik. Tidak mengherankan laporan Bank Dunia menyebutkan bahwa 75% mantan anggota GAM masih berstatus pengangguran. Disisi lain, implementasi MoU dan reintegrasi GAM tidak menyentuh aspek integrasi sikap dan psikologi secara utuh terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota GAM berpendapat jika proses perdamaian gagal, mereka akan memilih untuk kembali ke hutan lagi. Artinya, kesungguhan dan konsistensi pemerintah daerah, pusat dan stakeholders dalam proses transformasi konflik Aceh sangat dibutuhkan.
7. Pemerintah Aceh yang dipimpin oleh Irwandi Yusuf-M. Nazar, apakah mampu menciptakan perdamaian dan membangun perekonomian Aceh. Irwandi Yusuf terutama, harus mengubah kebiasaan sebelumnya sebagai panglima perang. Dengan kata lain, untuk tidak menggunakan kekuasaannya melalui paksaan kepada elit politik lainnya, khususnya anggota DPRD untuk mencapai tujuan politiknya. Dia harus merubah dirinya dari seorang panglima perang menjadi pejabat negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik di Aceh. Masalah apapun yang timbul antara pemerintah pusat di Jakarta dan aktor politik di Aceh harus diselesaikan melalui transformasi dan resolusi konflik yang

demokratis. Tantangan besar bagi pejabat terpilih yang mantan GAM adalah mengatasi budaya korupsi, patronase dan kelambanan birokrasi. Memang korupsi, kolusi, nepotisme gaya baru telah menjadi praktik umum setelah tiga tahun penandatanganan MoU Helsinki di Aceh. Hal lain yang masih problematis adalah belum redupnya isu pemekaran provinsi Aceh Leuseur Antara (ALA) dari wilayah publik. Meskipun Gubernur Irwandi berhasil membonsai jaringan dan tokoh-tokoh politik yang pro pemekaran, isu ini kembali hangat. Bila tidak dikelola "mainan politik" ini akan berubah menjadi serius. Maka tentu saja peningkatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan pemimpin baru dan aparat pemda Aceh yang efektif merupakan kunci agar keuntungan yang diperoleh dari MoU dapat dikelola dengan konstruktif.

8. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) belum dilakukan sampai saat ini. Dengan dihapusnya UU tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi, institusi KKR di Aceh tidak akan bekerja maksimal untuk mendorong rekonsiliasi, apalagi KKR di Aceh tidak menganut sistem retroaktif. Persoalan pelanggaran keadilan dan HAM yang telah dituntut oleh rakyat Aceh sejak sebelum era 1998. militer Indonesia telah berulang kali memperingatkan tidak akan menerima segala bentuk penyidikan pelanggaran HAM dimasa lalu dan menghimbau kepada semua pihak untuk lebih memperhatikan masa depan. Akan tetapi lembaga msasyarakat sipil dan penduduk Aceh selalu menyuarakan tuntutananya bahwa persoalan ini harus ditangani dengan semestinya demi menciptakan perdamaian dan keadilan di Aceh.
9. Pentingnya pendidikan perdamaian berbasis kebudayaan. Kepada NGO, lembaga/instansi atau individu, baik lokal, nasional maupun internasional, mesti menyadari pentingnya pendidikan perdamaian di level pada semua level terutama level akar rumput. Materi pendidikan perdamaian yang komprehensif bisa merupakan perpaduan dari lima program. *Pertama*, program berbasis keahlian (*skill-based programmes*), yakni program pendidikan yang terkait dengan peningkatan kemampuan berkomunikasi,

hubungan interpersonal dan teknik-teknik resolusi konflik. *Kedua*, program perdamaian, yakni program berbasis keahlian yang lebih spesifik diarahkan untuk mengatasi konflik tertentu. *Ketiga*, pendidikan multikultural dan interkultural, yakni pendidikan yang menekankan pada pemahaman terhadap keberagaman, *mutual understanding* dan kesalingtergantungan (*interdependence*). *Keempat*, pendidikan hak asasi manusia, yakni pendidikan yang menekankan pada konsep kesamaan antar manusia dan keadilan. *Kelima*, *civic education*, *citizenship* dan demokrasi, yakni pendidikan yang menekankan pada hak-hak rakyat untuk berperan dalam bidang politik dan kewajiban menaati hukum. Wilayah pendidikan perdamaian di Aceh harus mencakup keseluruhan provinsi Aceh.

10. Dengan demikian hasil penelitian ini sedikit banyak menjadi solusi untuk mempertahankan, mengabadikan damai, serta proses transformasi konflik dapat berjalan dengan baik di bumi Serambi Mekkah. Selain itu juga untuk rujukan bagi daerah maupun negara lain, dengan menjabarkan beberapa pelajaran yang mungkin relevan bagi penyelesaian konflik serupa di kawasan Samudera Hindia. Selain itu, penelitian ini diakui memiliki kelemahan, hal ini diakibatkan oleh banyaknya masalah dan informasi berkaitan dengan proses transformasi konflik di Aceh sampai dengan saat ini.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku

- Ake, Claude. *A Theory of Political Integration*. Illionis: The Dorsey Press, 1969
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta : Rineka Cipta.
- A.Rani Usman, Sejarah peradabana Aceh (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h.124.
- Alan Scott (ed.), *The Limits of Globalization*, 1997: 120
- Aurbey Fisher "Teori-Teori Komunikasi", 1996 : 241-242
- Aall, Pamela. "Nongovernmental Organizations and Peacemaking" dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996).
- Anderson, Mary B.. "Humanitarian NGOs in Conflict Intervention" dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996).
- Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity*, (Stanford University Press : California), 1991.
- Ahmed Gurnah, Alan Scott (ed.), *The Limits of Globalization*, 1997: 120
- Ahmad Farhan Hamid Jalan Damai Nanggroe Endatu; catatan seorang wakil Rakyat Aceh, *Suara Bebas Jakarta* 2006
- Anthony Reid, Asal Muasal konflik Aceh, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005); lihat juga Anthony Reid, "War, Peace and the Burden of History in Aceh, dalam *Asian Ethnicity*, vol. 5 No. 3, Oktober 2004; lihat juga Anthony Reid, *Verandah of Violence, The Background To the Aceh Problem*, (Singapore University Press, 2006)
- Amin, S.M., *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh*, (Jakarta: Soerongan, 1956).
- Budiarjo, Miriam. (peny.). *Partisipasi dan Partai Politik*.(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 1998)
- Bahar, Safroedin dan AB Tangdililing (penunting). *Integrasi Nasional: Teori, Masalah dan Strategi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.
- Brown, R. & Gaertner, S. (eds.), *Handbook of Social Psychology: Intergroup Processes*, 2003: 321
- Bavelas, Janet Beavin, Nicole Chovil and Jennifer Mullett. *Equivocal Communications* (Newbury Park, CA : Sage, 1990)
- Berger, Peter L, and Thomas Luckman. *The Social Construction of Reality*, (New York : Anchors Book, 1967)

- Bertens. K. & Nugroho. A. A. (1985). *Filsafat Barat Abad XX Jilid II*. Jakarta: Gramedia.
- Crewell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*, California, Sage Publication.
- Bloomfield, David., Nupen, Charles., dan Haris, Peter.. "Proses-proses Negosiasi" dalam Haris, Peter dan Reilly, Ben. (eds.). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator* (Jakarta: International IDEA, 2000).
- Burton, John. *Conflict: Resolution and Provention* (London: MacMillan Press, 1990).
- Crocker, Cherster A.. "The Varieties of Intervention: Conditions for Success" dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996).
- Benedict R'OG Anderson, *Imagined Community*, terj. Omi Intan Naomi, (Insist-Pustaka Pelajar), 2001.
- Bill Ashcroft, et al (ed), *The Post Colonial Studies Reader*, (Rouledge : London-New York), 1995.
- Barron and Sammuell Clark,"Decentralizing Inequality? h. 15-16
- Bernard, H. Russel, *Handbook of Methods in Cultural Anthropology*, (California: Altamira Press, 1998).
- Creswell. J. W. (1994). *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. London. New Delhi: Sage Publication.
- Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)
- Denton, R.E., Woodward, G.C. *Political Communication in America*. (New York : raeger. 1990)
- Carmejoole, P.J., *Atjeh*, Groningen, 1931
- Coakley, John, *The Territorial Management of Ethnic Conflict*, (London: Frank Cass and Co. Ltd., 1993).
- Comaroff, Jean, *Ethnography and the Historical Imagination*, (Oxford, San Fransisco: Westview Press, 1992).
- De Vito, Joseph. A. 1978. *Communicology: An Introduction to the Study of Communication*. New York : Harper Collins Publisher Inc.
- Denzin. N. K. & Lincoln. Y. S. (Editors) (1994). *Handbook of Qualitative Research*. London. New Delhi: Sage.
- Delfgaauw. B. (1987). *Filsafat Abad 20* (Alih Bahasa oleh Soeyono Soemargono). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Dan Nimmo, 1984, *Komunikasi Politik*, Rosdakarya, Bandung
- D. Gahril Adian, *Menyoal Objektivitas Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Traju, 2002)

- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Jakarta: Pestaka Pelajar, 2004, h.374
- Dean G. Pruitt. "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), h.246
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Jakarta: Pestaka Pelajar, 2004, h.374
- Emery, Edwin dkk. 1970. *Introduction to Mass Communications*. New York : Dood, Mead & Company.
- El Ibrahim, M.Nur. *Peranan Tgk. Daud Beureuh dalam Pergelokan Aceh*, Edisi revisi. Jakarta: Media Da'wah, 2001.
- Fisher, B. Aubrey. 1986. *Perspectives on Human Communication (Teori-teori Komunikasi)*, Terjemahan Soejono Trimono, Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Fisher, Simon, *et.al*, *Mengelola Konflik, Ketrampilan dan Strategi untuk Bertindak*, 2001, The British Council, Indonesia, 2001.
- Flick. U. (2002). *An Introduction to Qualitative Research*. London: Sage.
- Frankel. J. R. & Wallen. N. E. *How To Design And Evaluate Research In Education (Second Edition)*. New York: Mc. Graw Hill Inc.
- Fen Osler Hampson. "Third-Party Role in the Termination of Intercommunal Conflict", *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.26, No.3 (1997), hlm.749
- Farid Husain To See The Unseen; kisah dibalik damai Aceh, Health & Hospital Indonesia 2007.
- Flynn, Pierce J., *The Ethnomethodological Movement, Sociosemiotic Interpretations*, (New York: Walter de Gruyter & Co, 1991).
- Forbes, H.D., *Ethnic Conflict: Commerce, Culture, and the Contact Hypothesis*, (New Haven, London: Yale University Press, 1997).
- Fukuyama, Francis, *The End of History and the Last Man*, (New York: the Free Press, 1992).
- Gudykunst, W.B. & Young Yun Kim. *Communication with Strangers: An Approach to Intercultural Communication*. Reading: Addison-Wesley, 1984.
- Geetz, Clifford, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1981.
- Gudykunst, B William dan Young Yun Kim, *Communicating With Strangers, An Approach to Intercultural Communications*, third edition, McGraw-Hill Companies, 1997.
- Gudykunst, William B & Bella Mody, *Hanbook of International and Intercultural Communication*, second edition, California- Sage Publications, Inc., 2002.

- Gudykunst, William B, Stella Ting-Toomey, Elizabeth Chua, *Culture and Interpersonal Communication*, New Delhi-Sage Publications, 1988.
- Garna. Judistira K. 1999. *Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif*. Program Pasca Sarjana Unpad Bandung.
- ....., 2005. *Komunikasi Partisipasi*. Bandung : Humaniora.
- Gellner, Ernest, *Nations and Nationalism*, (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983).
- Guba. E. G. (1990). *The Paradigm Dialog*. London. New Delhi: Sage.
- Greertz. C. (1992). *Tafsir Kebudayaan*. (Alih Bahasa oleh Fransisco Budi Hardiman). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hasan, kamaruddin, 2008. "Pilkada, Partai Lokal dan Masa depan Aceh" dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, Pustaka Pelajar P2P LIPI.
- Horton, Paul. B. Dan Chester L. Hunt. 1984. *Sosiologi*, (Edisi Enam). Alih Bahasa : Aminuddin Ram & Tita Sobari. Jakarta : Erlangga.
- Hart, Roderick and Don M. Burks, "Rhetorical Sensitivity and Social Interaction," *Speech Monographs* 39 (1972)
- Huntington, Samuel P. and Joan M. Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in developing Countries* (Cambridge, Mass.:Harvard University Press,1977)
- Hogg, M.A. & Abram, D.(1988). *Social Identification: A Social Psychology of Intergroup*
- Homi K Bhaba (ed), *Nation and Narration*, (Routledge : London), 1990.
- Homi K. Bhaba, *The Location of Culture*, (Routledge : London-New York), 1994.
- Hugh Miall et.al., *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, terjemahan Tri Budhi Satrio, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 48.
- Ifanta, Dominic, Teresa A. Chandler and Jill E.Rudd, "Test of an Argumentative Skill Deficiency Model of Interpousal Violence," *Communication Monographs* 26 (1989)
- Ikra Nusa Bakhti, dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, P2P-LIPI, Pustaka Pelajar, 2008
- Irwandi Yusuf, dalam pengantar Menguak sejarah di Bawah Karpas, dalam Harry Kawilarang "Aceh dari Sultan Iskandar Muda Ke Helsinki, Banda Aceh 15 Agustus 2007.
- James A. Wiggins, Beverly B. Wiggins, James Vander Zanden, *Social Psychology*, Fifth Edition, 1994, McGraw-Hill, Inc.
- James H. Laue. "The Emergence of Institutionalization of Third Party Roles in Conflict", dalam John Burton and Frank Dukes (eds). *Conflict: Reading in Management and Resolution* , London: MacMillan, 1990, h.267-268
- Jonathan H. Tuner, 1994. *Sociology, Concepts and Uses* , McGraw-Hill Inc

- Jabri, Vivienne. *Discourse on violence: Conflict analysis reconsidered* (Manchester: Manchester University Press, 1996).
- John Hutchinson and Anthony D. Smith (ed), *Nationalism*, (Oxford : Oxford University Press), 1994.
- John Rachman (ed), *The Identity in Question*, (Routledge : London-New York), 1995.
- James H. Laue. "The Emergence of Institutionalization of Third Party Roles in Conflict", dalam John Burton and Frank Dukes (eds). *Conflict: Reading in Management and Resolution*, London: MacMillan, 1990, hlm.267-268
- J. Lewis Rasmussen. "Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington, D.C., USIP, 1997, h.42
- Kincaid, D Lawrence & Schramm, Wilbur, 1987, *Asas-asas Komunikasi Antar Manusia*, Jakarta : LP3ES
- Kuntowijoyo, 1987, *Manusia dan Kebudayaan*, Yogyakarta : Tiara Wacana
- Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta Djambaran, 2007
- Krech, David Richard and Egerton. 2001. *Individual In Society* (Terjemahan). Bandung Forsis Unpad.
- Kartono. K. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Keraf. S. & Mikhael Dua. (2001). *Ilmu Pengetahuan Sebuah Tinjauan Filosofis*. Jakarta: Kanisius.
- Kerlinger. F. N. (1986). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Edisi Ketiga (Alih Bahasa oleh Landung R. Simatupang). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kriesberg, Louis. *Constructive Conflict: Form Escalation to Resolution* (New York: Rowman & Littlefield, Publ., 1998).
- Kawilarang, Harry "Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki", Bandar Publisir Banda Aceh 2008, h. 1-2
- Liliweri, Alo. 1994. *Perspektif Teori Komunikasi Antarpribadi, suatu Pengantar Ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Littlejohn, Stephen W. (1996). *Theories of Human Communication*, 5th Edition. Belmont, Wadsworth Publishing Company
- Lofland, John Dan Lyn H. Lofland. 1984. *Analisis Social Setting : A Guide To Qualitative Observation and Analisis*. Relmont, Cal : Wasworth Publishing Company.

- Landis, Paul H, *Rural Life in Process*, McGraw Hill, New York, 1940.
- Lawrence, E Harrison dan Huntington, Samuel P, *Kebangkitan Peran Budaya Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, LP3ES, 2006.
- Littlejohn, Stephen W, *Theories of Human Communication*, seventh edition, Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2002.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*, (Albuquerque, New Mexico : Wadsworth Publishing Company, 1998)
- Lombard, Denys, *Kerajaan Aceh, Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta-Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.
- Lewis Rasmussen. "Peacemaking in the Twenty-First Century: New Rules, New Roles, New Actors", dalam I. William Zartman and J. Lewis Rasmussen. *Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques*, Washington, D.C., USIP, 1997, h.42
- Miles, M.B dan Huberman, A.M., 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press
- Mulyana, Deddy, 2000, *Komunikasi Antarbudaya, Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-orang yang Berbeda Budaya*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy. Agustus 2004. *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintasbudaya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- ....., 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung Remaja Rosdakarya.
- ....., 2004. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung (Edisi Revisi) Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008
- M.Isa Sulaiman, *Aceh Merdeka: Ideologi, kepemimpinan dan gerakan* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), hlm.26-27
- McClosky, Herbert. *Political Participation*, International Encyclopedia of the Social Sciences, Edisi ke-2 (New York: The McMillan Company and the Free Press, 1972)
- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication*. Third Edition, (London and New York : Routledge. 2004)
- Mosco, Vincent. *The Political Economy of Communication*. ( London, New Delhi: SAGE Publication, 1996)
- Mc. Carthy. T. (2006). *Teori Kritis Jürgen Habermas* (Alih Bahasa oleh Nurhadi).
- Miles. M. B. & Huberman. A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta. UI. Press.

- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cetakan Keempat Belas). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Marvin E. Shaw / Philip R. Costanzo, *Theories of Social Psychology* Second Edition, 1985, McGraw-Hill, Inc.
- Miall, Hugh. (et.al.). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola da Mengubah Konlik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*, terj. Tri Budhi Sastrio (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).
- Nimmo, Dan, *Komunikasi Politik*, Tjun Surjaman (terj.). (Bandung : Rosdakarya, 1993)
- Nurhasim, Moch., Abdul Rachman Patji, Padjri Alihar, dan Lamijo. *Konflik Aceh: Analisis Atas Sebab-sebab konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*. Jakarta: Proyek Pengembangan Riset Unggulan/Kompetitif LIPI, 2003.
- Nakayama, K Thomas dan Judith N Martin, *Intercultural Communications in Contexts*, 2003
- Neuman, W. Lawrence, *Social Research Methods*, fifth edition, USA-Pearson Education. Inc. 2003
- Noer, Deliar .*Pengantar ke Pemikiran Politik*. (Jakarta: Rajawali. 1983)
- Neuman. W. L. (1997). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Third Edition). Boston: USA.
- Noerhadi. T. H. (1998). *Filsafat Ilmu Pengetahuan*. (Diktat Kuliah). Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Nurudin , 2004, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Poloma, Margareth M. 2000. *Sosiologi Kontemporer*, Terjemahan Tim Yasogama, Jakarta :Raja Grafindo Persada
- Peter L. Berger, *Humanisme Sosiologi*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: Inti Sarana Aksara, 1985)
- Patton, Michael Quinn, *Metode Evaluasi Kualitatif* (diterjemahkan oleh Budi Puspo Priyadi), Yogyakarta-Pustaka Pelajar, 2006.
- ....., *Qualitative Research & Evaluation Methods*, (Edisi 3), Sage Publications 2002.
- Powel Jr., Bingham. *Contemporary Democracies, Participan, Stability and Violence*. (New York : Harvard University Press. 1982)
- Pierre van den Berghe *The Ethnic Phenomenon* (1981)
- Qadir. C. A. (1995). *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2004. *Psikologi Komunikasi Bandung* : Remaja Rosda Karya
- Ritzer, geogre. 1992. *Symbolic Intertionism*. Third edition. University Of Maryland. Mc. Graw – Hall Internasional Editions Sosiologi Series.

- Rogers, Everett, 1975, *Network Analysis of The Diffusion of Innovation*, Institute for Communication Research. Stanford University
- Rahardjo, Turnomo, *Menghargai Perbedaan Kultural, Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*, cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992)
- Rothman, J. *From Confrontation to Cooperation: Resolving Ethnic and Regional Conflict* (Newbury Park, CA: Sage, 1992).
- Ronald J. Fisher. "Interactive Conflict Resolution" in I.W. Zartman and J.L. Rasmussen (eds.). *Peace making in international Conflict: Methods and Techniques*, Washington D.C.: USIP, 1997, h.259
- Reily, Ben. "Katup-katup Demokratis bagi Pengelolaan Konflik" dalam Haris, Peter dan Reilly, Ben. (eds.). *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan Negosiator* (Jakarta: International IDEA, 2000)
- Ronald J. Fisher. "Interactive Conflict Resolution" in I.W. Zartman and J.L. Rasmussen (eds.). *Peace making in international Conflict: Methods and Techniques*, Washington D.C.: USIP, 1997, h.259
- Ra'anan, Uri, et.al., (eds.), *State and Nation in Multi-ethnic Societies*, (New York: Manchester University Press, 1991).
- Reid, Anthony J.S., *The Contest of North Sumatra*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press).
- Siller, Barbara Harvey. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- Sulaiman, M.Isa. *Aceh Merdeka: Ideologi, Kepemimpinan dan Gerakan*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000
- Salim, Agus (Peny). 2001. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (Pemikiran Norman K. Denzim dan Guba dan Penerapannya)*. Yogyakarta : Tiara Wacana Jogja.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Susanto, Astrid, S. 1982. *Komunikasi Kontemporer*. Bandung : Bina Cipta
- Soeprapto, H.R. Riyadi. 2002. *Interaksionalisme Simbolik : Perspektif Sosiologi Modern*, Malang : Averroes Press.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali
- Samovar, Larry A dan Richard E. Porter, *Communication Between Cultures*, fourth edition, USA: Belmont, 2001
- Samovar, Larry A, Richard E. Porter, *Interculturalcommunication: A Reader*, fifth edition, USA-Wadsworth, Inc. 1988
- Sunarwinadi, Ilya, *Komunikasi Antarbudaya*, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas Indonesia



- Sutrisno, Mudji & Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta-Kanisius, 2005
- Suprpto Tommy, *Pengantar Teori Komunikasi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Ting-Toomey, Stella, *Communicating Across Cultures*, New York :The Guilford Press. 1999
- Sigmund Neumann "Modern Political Parties" dalam *Comparative Politic: A Reader*, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter (London: The Free Press of Glencoe, 1963)
- Stephen J. Stedman, "Negotiation and Mediation in Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996), h.345
- Stephen P. Littlejohn, *Theories of Human Communication*, Fifth Edition, (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 1996), h. 179-180, dalam Eriyanto, op. cit, h. 40-41.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001)
- Silverman. D. (1997). *Qualitative Research: Theory, Method and Practice*. London: Sage.
- Smith. J. A. (2006). *Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Methods*. London: Sage.
- Spradley. J. P. (1997). *Metode Etnografi* (Alih Bahasa oleh Misbah Zulfa Elizabeth). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Strauss. A. & Corbin. J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. London. New Delhi: Sage.
- Strauss. A. & Corbin. J. (1990). *Qualitative Analysis For Social Scientists*. New York: Cambridge University Press.
- Said, Muhammad, *Centuries Along with the Acehnese History*, (Medan, 1961)
- Siddiqi, Mazheruddin, *The Qur'anic Concept of History*, (Karachi: Central Institute of Islamic Research, 1965).
- Stavenhagen, Rudolfo, *Ethnic Question: Conflict, Development and Human Rights*, (Tokyo: United Nation University Press, 1990).
- Sumaryono. E. (1993). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suparlan. P. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Program S-2 Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia.
- Suparlan. P. (1997). *Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya*. *Majalah Antropologi Indonesia*. No. 53. Vol. 21. Jurusan Antropologi FISIP Universitas Indonesia.
- Sheldon Goldenberg, 1987, *Thinking Sociologically* Wadsworth, Inc.

- Sarwono, S.W.(1999). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.
- Simon Fisher, dkk, Mengelola Konflik :Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak, The British Council Indonesia, 2001.
- Sampson, Cynthia. "Religion and Peacebuilding" dalam Zartman, William I. dan Rasmussen, J.L.. Peacemaking in International Conflict: Methods and Techniques (Washington, D.C.: USIP, 1997).
- Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, England, Dartmouth, 1990, h.53.
- Stephen J. Stedman, "Negotiation and Mediation in Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.).*The International Dimensions of Internal Conflict*, (Cambridge: MIT Press, 1996), h.345
- Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, terj., (Grafiti : Jakarta, 1995)
- Stephen Ryan, *Ethnic Conflict and International Relations*, England, Dartmouth, 1990, h.53.
- Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M.(1994). Theories of Intergroup Relations. London: Praeger.
- Tiskov, Valery A., et.al, (eds.), *Ethnicity and the Power in the Contemporary World*, (Tokyo: United Nation University Press, 1994).
- Tuchman, Gaye. Qualitative Methods in the Study of News, in Jensen, K.B., and Jankowski, N.W. (ed.), A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. (London and New York : Routledge, 1991)
- Thomas G. Weiss. "Nongovernmental Organizations and Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, Cambridge: MIT Press, 1996, h.444
- Thomas G. Weiss. "Nongovernmental Organizations and Internal Conflict", dalam Michael E. Brown (ed.). *The International Dimensions of Internal Conflict*, Cambridge: MIT Press, 1996, h.444
- Usman, A.Rani. *Sejarah Pemberontakan Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Usman, A. Rani, *Sejarah Peradaban Aceh Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan konflik*, Yayasan Obor, 2003
- Veeger, K.J. 1985. *Realitas Sosial : Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu – Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Seri Filsafat Atmajaya. Jakarta : Gramedia
- Viekke, Bernard HM, *Nusantara Sejarah Indonesia*, Jakarta-Kepustakaan Populer, 2008
- Wijaya, A. W. 1993. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta : Bumi Aksara

- ....., 2000. *Ilmu Komunikasi Pengantar Studi*. Jakarta : Rineka Cipta
- Welch Jr., Claude E (ed). *Political Modernization: A Reader in Comparative Political Change*. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1969.
- Wight, Martin. *International Theory: The Three Traditions* (London: Leicester University Press,, 1996).
- Weiner, Eugene, *The Handbook of Interethnic Coexistence*, (New York: Continuum Publishing Company, 1998).
- Wicker, Hans-Rudolf, *Rethinking Nationalism and Ethnicity, the Struggle for Meaning and Order in Europe*, (New York: Berg Publisher, 1997).
- Willet, Cynthia, *Theorizing Multiculturalism: A Guide to the Current Debate*, (Massachusetts: Blackwell Publisher, 1998).
- Will, Kymlicka, *Multicultural Citizenship*, (Oxford: Clarendon Press, 1995).
- Wuthnow, Robert, et.al., (eds.), *Cultural Analysis*, (London: Routledge, 1984).
- Yinger, J. Milton, *Ethnicity: Source of Strength? Source of Conflict?*, (New York: State University of New York Press, 1994).
- Zartman, William I. dan Touval, Saadia. "International Mediation in the Post-Cold War Era" dalam Crocker, Chester A (et.al)(eds.). *Managing Global Chaos: Sources of and Responses to International Conflict* (Washington, D.C.: USIP Press, 1996).
- Zatman, William I.. *Ripe for Resolution: Conflict and Intervention in Africa* (New York: Oxford University Press, 1985).

#### **Koran, Artikel, Jurnal, Situs Internet, dan lain-lain**

- Byrne, Sean, "Transformational Konflik Resolution and the Northern Ireland Conflict", *International Journal on World Peace* (No. XVIII, No. 2, June 2001).
- Hamijoyo, Santoso S. 2006. *Landasan Ilmiah Komunikasi*, dalam *Jurnal Mediator* Volume Nomor I, Bandung : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.
- Hasan, kamaruddin. *Aceh: "Antara Budaya Local vs Budaya Global,"*. Rakyat Aceh, 10 Oktober 2006
- Fasya, Keumal Teuku. "Mencari Model Rekonsiliasi Aceh,". *Kompas* 23 Oktober 2007.
- Gormany, Brian, "Conversion from War to Peace: Reintegration of Ex-Prisoners in Northern Ireland" (Bonn: BICC, 2001)
- Nurhasim, Moch, *Evaluasi Darurat Militer di Aceh 2003-2004*, Jakarta- LIPI, 2006.
- Wendell Oswalt (1986, sebagaimana dikutip Nur Fadhil Lubis, 2006), Van der Kroef (*Kompas*, 15 Maret 2001),

- Amitai Etzioni, "Mediation as A World Role for the United States", *The Washington Quarterly*, Vol.18, No.3, (Summer,1995), hlm.76
- Joseph R. Rudolph, Jr. "Intervention in Communal Conflicts", *Orbis*, Vol.39, No.2, (Spring 1995), hlm.261
- I. William Zartman. "Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), hlm.258-260
- ICG Asia Report, No. 17, 12 Juni 2001, *Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa pada Perdamaian Kekal*, hlm.10
- Fen Osler Hampson. "Third-Party Role in the Termination of Intercommunal Conflict", *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.26, No.3 (1997), hlm.743
- Crisis Group Asia Report No.139, *Aceh: Post Conflict Complications*, Jakarta/Brussels, 4 Oktober 2007, h. 1
- Sidney Jones, "Priorities for a GAM-led Government in Aceh, The Jakarta Post," *Indonesia Outlook 2007: Politics and Social Welfare*", dapat diakses pada [http://www.thejakartapost.com/Outlook/pool\\_109b.asp](http://www.thejakartapost.com/Outlook/pool_109b.asp).
- Edward Aspinal, *Guerillas in Power*, "Inside Indonesia", <http://insideindonesia.org/content/view/616/47>, h. 3.
- Patric Barron dan Sammuell Clark, "Decentralizing Inequality? Center Periphery Relations, Local Governance, and Conflict in Aceh", *Social Development Papers, Conflict Prefention*, Paper No. 39/Desember 2006, h. 16-17.
- Liem Sie Liong "Resounding Vactory for Democracy in Aceh, Tapol, Buletin, Januari 2007, lihat juga Liem Sie Liong, *The Struggle for Peace ang Democracy in Aceh*, "Tapol Buletin, Agustus 2007. gambaran lengkap mengenai Pilkada di Aceh dan independent kandidat yang didukung GAM menang dalam Pilkada, Jakarta/Brussels, 29 November
- Fasya, Tengku Kemal, "Setelah Tiga Tahun Tsunami", [www.kompas.com](http://www.kompas.com)  
Selasa, 08 Januari
- Herman, RN, "Interferensi Budaya Indonesia ke dalam Bahasa Aceh"  
(menjawab Polemik Terima Kasih) terbitan tanggal Rabu, 19  
September 2007, <http://www.acehinstitute.org>
- Suparlan, Parsudi, "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural",  
2002, <http://www.duniaesai.com/antro/antro3.html>
- Tohari, Ahmad, "Aceh, Pahami Budayanya", [http://www.mail- archive.com](http://www.mail-archive.com)
- Yuanda, Teuku Riza, "Penerapan Syariah Islam di Aceh, sebuah Review  
Singkat", 2008, <http://indonesianmuslim.com/>
- Otto Syamsuddin Ishak, *Dilihat dari Dalam, Ditulis dari Luar*, Kompas Senin, 8  
September 2008.

- Loescher, Gil dan Dowty, Alan. "Refugee Flows as Grounds for International Action" *International Security*, Vol.2, No.1 (Summer 1996). Widjajanto, Andi. "Dinamika Keamanan Pasca Orde Baru", *Global: Jurnal Politik Internasional*, Vol.1, No.7, (Februari 2001).
- UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Suwa, edisi ... 2007
- Perang Kolonial Belanda di Aceh lihat buku *The Dutch Colonial War in Aceh*, Banda Aceh; Pusat Dokumentasi dan Publikasi, 1977, h. 251. Buku ini lahir dalam bentuk gagasan yang dicetuskan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, A. Muzakkir Walad.
- Dean G. Pruitt "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis; A Journal of World Affairs*, Vol.44, No.2, Spring 2000, hlm.245
- Farouk Mawlawi, "New Conflicts, New Challenges: The Evolving Role for Non-Governmental Actors", *Journal of International Affairs*, Vol.46, No.2, (Winter 1993), hlm.392
- Dean G. Pruitt "The Tactics of Third-Party Intervention", *Orbis; A Journal of World Affairs*, Vol.44, No.2, Spring 2000, h.245
- Fen Osler Hampson. "Third-Party Role in the Termination of Intercommunal Conflict", *Millenium: Journal of International Studies*, Vol.26, No.3 (1997), h.749
- Amitai Etzioni, "Mediation as A World Role for the United States", *The Washington Quarterly*, Vol.18, No.3, (Summer,1995), h.76
- ICG Asia Report, No. 17, 12 Juni 2001, *Aceh: Kenapa Kekuatan Militer Tidak akan Membawa pada Perdamaian Kekal*, h.10
- I. William Zartman. "Mediating Conflicts of Need, Greed and Creed", *Orbis*, Vol.44, No.2, (Spring 2000), h.258-260
- Joseph R. Rudolph, Jr. "Intervention in Communal Conflicts", *Orbis*, Vol.39, No.2, (Spring 1995), h.261
- Sarah Nuraini Siregar, 2003-2004) "Impikasi Darurat Militer di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya", dalam *Evaluasi Pelaksanaan Darurat Militer di Aceh 2003-2004*.
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update Maret to Mei 2006, h. 1
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1 Juni-31 Juli 2006 until 1-31 Maret 2007
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update April to July 2007, h.
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> September 2005, h. 1
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-31<sup>th</sup> Oktober 2005, h. 1
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-30<sup>th</sup> November 2005, h. 1
- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-31<sup>th</sup> Desember 2005, h. 1

- World Bank/DSF, Aceh Conflict Monitoring Update 1<sup>th</sup>-28<sup>th</sup> Februari 2006, h. 1
- Survei AMM/WB (GAM aktif) dan SUSENAS 2004 (populasi umum)
- The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement.....," hal 3-4
- survey AMM/WB, 2006*
- The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement: How Far have We Came? (Jakarta: The World Bank, Desember 2006), hal 1-5, lihat juga Internasional Crisis Group Asia Briefing No.44, Aceh: So far, So good, Jakarta/Brussels, 13 Desember 2005, tentang peran dan keberhasilan AMM lihat Kirsten E.Schulze, Mission Not So Impossible: The AMM Transition from Conflict to Peace in Aceh, 2005-2006," Working Paper No. 131, S. Rajaratnam School of International Studies, Singapore, 29 Juni 2007. lihat juga pandangan mantan ketua Aceh Monitoring Mission, Piter Feith, The Aceh Peace Process. Nothing Less Than Success," Special Report 184, United Institute of Peace, Maret 2007.
- Farouk Mawlawi, "New Conflicts, New Challenges: The Evolving Role for Non-Governmental Actors", *Journal of International Affairs*, Vol.46, No.2, (Winter 1993), h.392
- The World Bank Support for Post-Tsunami Reconstruction in Aceh and Nias, Indonesia The Aceh Agreement.....," h 3-4 di ambil dari Ikra Nusa Bhakti dalam Beranda Perdamaian Aceh Tiga Tahun Pasca MoU Helsinki, LIPI 2008, h. 23
- World Bank, GAM Reintegration Need Assessment: Enhancing Peace Through Community-Level Programming, (Banda Aceh / Jakarta: World Bank/DSF, 2006).
- Kompas, 4 Desember 2002, h.8
- Kompas, 24 Nopember 2002, h.30
- Kompas, 16 Desember 2002
- Kompas, 10 Desember 2002, h.1
- Kompas, 24 Nopember 2002, h.30
- Rakyataceh, KPA Kritik Implementasi MoU Helsinki 06 November 2007
- Jakarta Post*, 18 Januari 2000
- Kompas, Sabtu, 27 Desember 2008
- Kompas.com, Komnas HAM diminta ikut tangani kasus batu lintang, 5 Maret 2008
- Sinarharapan.co.id, "Polisi Diminta Independen Dalam Kasus Atu Lintang", 05 Maret 2008
- Vhrmedia.com 08 November 2007
- Waspada Online, www.waspada.co.id, 31 Agustus 2005

- Serambi Indonesia, 10 April 2009
- Serambi Indonesia, 11 April 2009
- Serambi Indonesia, 5 Februari 2007,
- Waspada Online, [www.waspada.co.id](http://www.waspada.co.id), 31 Agustus 2005
- Serambi Indonesia, Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh, Kamis 1 Mei 2008
- Harian Waspada Kamis, 29 Desember 2005
- Kompas, 4 Desember 2002, h.8
- Kompas, 24 Nopember 2002, h.30
- Serambi Indonesia, 21 Desember 2005
- Serambi Indonesia, 22 Desember 2005, Dibubarkan GAM ganti nama KPA
- Kompas, 24 Nopember 2002, h.30
- <http://www.indoforum.org/showthread.php?t=62567> , Sabtu, 22 November 2008, Amien Rais: Aceh Berpeluang Tentukan Nasib Sendiri, di akses 27 November 2008
- <http://www.theglobejournal.com/detilopini.php?id=33>, Partai Aceh satu pilihan alternatif, Efendi Hasan. Diakses 12/6/2008
- <http://www.worldwatch.org/390/print>, h. 5.
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/23/06022754/demi.perdamaian.nama.partai.gam.harus.diubah>, Jumat, 23 Mei 2008
- <http://serambinews>, edisi 23/05/2008, diakses 1/6/2008
- <http://serambinews>, edisi 02/05/2008, diakses 1/6/2008
- <http://serambinews>, edisi 24/05/2008. diakses 1/6/2008
- Serambi Indonesia, Partai GAM Bakal Jadi Partai Aceh, Kamis 1 Mei 2008
- <http://www.kompas.com/read/xml/2008/02/27/09453281/gamgerakan.aceh.mandiri.GAM=Gerakan.Aceh.Mandiri.Rabu>, 27 Februari 2008
- <http://www.pantau.or.id>.
- <http://serambinews>, edisi 22/05/2008, diakses 1/6/2008
- <http://Serambinews>, Edisi 22/05/2008. Diakses 1 Juni 2008
- Waspada online : Partai GAM Sesuai MoU, senin 07 Juli 2007
- Detik.com 03 Mar 2008, Pemda & Polda Nad Harus Tindak Tegas Pembunuh Anggota KPA